BAPPEDA PROVINSI BALI

PROFIL DAERAH
PROVINSI BALI
TAHUN 2025







2026

KATA PENGANTAR

"Om Swastyastu"

Dengan menghaturkan angayubagia kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas *Asung Kertha Wara Nugraha*-Nya buku "Profil Daerah Provinsi Bali Tahun 2025" dapat disusun sesuai rencana.

Buku Profil Daerah Provinsi Bali ini menyajikan informasi pembangunan dari berbagai sektor sebagai bahan analisis keberhasilan pembangunan, perkembangan sektor-sektor strategis, serta kebutuhan informasi ke depan. Informasi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan pelaksanaan pembangunan daerah.

Meskipun telah disusun sebaik mungkin, kami menyadari masih adanya kekurangan, sehingga saran dan masukan sangat kami harapkan untuk penyempurnaan selanjutnya.

"Om Shanti, Shanti, Shanti Om"

Bali, 30 Oktober 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN
Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710814 200003 1 010

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**

BAB 1 KONDISI GEOGRAFIS
1.1. Letak Wilayah Administrasi 1
1.2. Kondisi Geografis dan Fisik Wilayah 3
1.3. Kawasan Rawan Bencana 13
1.4. Ancaman Perubahan Iklim 35
1.5. Penggunaan Lahan 37
1.6. Alih Fungsi Lahan 38

BAB 2 KONDISI DEMOGRAFI PENDUDUK
2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk 41
2.2. Kepadatan Penduduk 42
2.3. Sex Ratio Penduduk 43
2.4. Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan 46
2.5 Kelompok Umur 48
2.6. Angka Ketergantungan Penduduk 50
2.7. Usia Harapan Hidup 52

BAB 3 POTENSI SUMBER DAYA
3.1. Potensi Kehutanan 55
3.2. Potensi Pertanian dan Pangan 57
3.2.1. Produksi Padi di Provinsi Bali 57
3.2.2. Produksi Beras di Provinsi Bali 62
3.2.3. Produksi Pertanian Hortikultura 67
3.2.4. Produksi Perkebunan 71
3.3. Potensi Peternakan 75
3.3.1. Ternak Hewan 75
3.3.2. Ternak Unggas 77
3.4. Potensi Sumber Daya Pesisir 80
3.4.1. Potensi Mangrove 80
3.4.2. Ekosistem Terumbu Karang 82
3.5. Kondisi Umum dan Sejarah Singkat 83
3.6. Desa Adat & Banjar Adat 84
3.7. Suku, Bahasa, dan Kesenian 86
3.8. Kawasan Suci dan Tempat Suci 89
3.8.1. Kawasan Suci 89
3.8.2. Kawasan Tempat Suci 91
3.9. Keanekaragaman Hayati 93

BAB 4 EKONOMI & KEUANGAN DAERAH

4.1. Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi 98
4.1.1. Struktur Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2025 98
4.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2025 99
4.2. Perkembangan Inflasi dan Indeks Harga Konsumen (IHK) 102
4.2.1. Perkembangan Indeks Harga Konsumen 102
4.2.2. Perkembangan Inflasi Tahun 2025 103
4.2.3. Perbandingan Inflasi Bali dan Nasional 103
4.2.4. Variasi Inflasi Antarwilayah di Bali 104
4.2.5. Gambaran Umum Kondisi Harga Tahun 2025 104
4.3. Perkembangan Investasi Daerah 105
4.3.1. Perkembangan Investasi Provinsi Bali Tahun 2025 106
4.3.2. Posisi Bali dalam Dinamika Investasi Nasional 107
4.3.3. Arah dan Karakter Pengembangan Investasi 108
4.4. Pendapatan Daerah 109

BAB 5 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

5.1. PDRB & Pengeluaran Per Kapita Penduduk 113
5.1.1. PDRB Per Kapita Provinsi Bali Tahun 2025 113
5.1.2. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan 114
5.1.3. Keterkaitan PDRB Per Kapita dan Pengeluaran Per Kapita 114
5.1.4. Gambaran Kesenjangan Ekonomi Antarwilayah 115
5.1.5. Implikasi terhadap Pembangunan Daerah 115
5.2. Indeks Pembangunan Manusia 116
5.3. Ketimpangan pada Masyarakat 118
5.4. Kondisi Pendidikan Masyarakat 120
5.4.1. Angka Melek Huruf 121
5.4.2. Angka Partisipasi Kasar 122
5.4.3. Angka Pendidikan yang Ditamatkan 124
5.4.4. Angka Partisipasi Murni 127
5.4.5. Angka Putus Sekolah 129
5.4.6. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 130
5.5. Kondisi Kesehatan Masyarakat 132
5.5.1. Angka Kematian Bayi 132
5.5.2. Angka Kematian Ibu 133
5.5.3. Angka Prevalensi Stunting 135
5.5.4. Ketersediaan Tenaga Kesehatan 136
5.5.5. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan 137
5.6. Kemiskinan 139
5.6.1. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin (P0) 139
5.6.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 141
5.6.3. Garis Kemiskinan (Rp) 142
5.7. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender 145

5.7.1. Indeks Pembangunan Gender 145
5.7.2. Indeks Pemberdayaan Gender 146
5.8. Indeks Ketimpangan Gender 147

BAB 6 PELAYANAN UMUM DAERAH
6.1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 149
6.2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 150
6.3. Indeks Reformasi Birokrasi 152
6.4. Indeks Pelayanan Publik 153
6.5. Indeks Inovasi Daerah 154
6.6. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 155
6.7. Pelayanan Transportasi 156
6.7.1. Transportasi Darat 156
6.7.2. Transportasi Udara 161
6.7.3. Transportasi Laut 162
6.8. Pelayanan Telekomunikasi 164
6.9. Pelayanan Air Bersih 168
6.10. Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 169

BAB 7 DAYA SAING DAERAH
7.1. Indeks Daya Saing Daerah 171
7.2. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif 173
7.3. Indeks Ekonomi Hijau 174
7.3.1. Perkembangan Umum 174
7.3.2. Perkembangan Pilar Lingkungan 175
7.3.3. Perkembangan Pilar Ekonomi 176
7.3.4. Perkembangan Pilar Sosial 176
7.3.5. Implikasi Bagi Pembangunan Daerah 177
7.4. Indeks Ketahanan Pangan 177
7.5. Ketahanan dan Konsumsi Energi 180
7.6. Kondisi Kepariwisataan Daerah 183
7.6.1. Kontribusi Sektor Pariwisata pada Ekonomi Makro Bali 183
7.6.2. Jumlah Kunjungan Wisatawan 184
7.6.3. Tingkat Penghunian Kamar 190
7.6.4. Rata-rata Lama Menginap 193
7.7. Kondisi Ketenagakerjaan 197
7.7.1. Tingkat Pengangguran Terbuka 197
7.7.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 199
7.8. Pertumbuhan Sektor Industri 201
7.9. Potensi Koperasi dan UMKM 203
7.9.1. Koperasi 203
7.9.2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 208
7.10. Kegiatan Ekspor Barang 211

BAB 8 PENUTUP

8.1. Ringkasan Kondisi Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025 214
8.2. Kesimpulan dan Arah Penguatan Pembangunan 217

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Letak Geografis Masing-Masing Kabupaten/Kota 2
Tabel 1.2 Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk ke Dalam Daerah Rawan Banjir di Provinsi Bali 14
Tabel 1.3 Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Bali 17
Tabel 1.4 Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk ke Dalam Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi di Provinsi Bali 26
Tabel 1.5 Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Bali..... 29
Tabel 1.6 Perkembangan Perubahan Luas Lahan Baku Sawah/LBS & Pengurangan LBS Provinsi Bali Tahun 2019-2024..... 39
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2025..... 41
Tabel 2.2 Kepadatan Penduduk Provinsi Bali Masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2025..... 43
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Ratio Masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2025..... 44
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2025 45
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Bali Tahun 2025 47
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Provinsi Bali Tahun 2025..... 50
Tabel 2.7 Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Bali Tahun 2025 51
Tabel 2.8 Usia Harapan Hidup Masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2025 54
Tabel 3.1 Perkembangan Luas Kawasan Hutan di Provinsi Bali Menurut Fungsinya Tahun 2023–2025 57
Tabel 3.2 Perkembangan Produksi Padi di Provinsi Bali Tahun 2020–2025 61
Tabel 3.3 Perkembangan Produksi Sayuran dan Buah-buahan Semusim di Provinsi Bali Tahun 2020–2025 (Kuintal)..... 69
Tabel 3.4 Perkembangan Produksi Tanaman Biofarmaka di Provinsi Bali 71
Tabel 3.5 Perkembangan Produksi Perkebunan di Provinsi Bali 74
Tabel 3.6 Produksi Daging Ternak Provinsi Bali Tahun 2025..... 77
Tabel 3.7 Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas di Provinsi Bali Tahun 2025 79
Tabel 3.8 Produksi Telur Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas di Provinsi Bali Tahun 2025 79
Tabel 4.1 Struktur Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2025 Berdasarkan PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 100
Tabel 4.2 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Tahun 2025 Menurut Lapangan Usaha 101

Tabel 4.3 Indeks Harga Konsumen (IHK) Bulanan di Provinsi Bali Tahun 2025 105
Tabel 4.4 Inflasi Bulanan di Provinsi Bali Tahun 2025 105
Tabel 4.5 Perkembangan Realisasi Investasi Provinsi Bali Tahun 2025 (Status Penanaman Modal PMA) 109
Tabel 4.6 Ringkasan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023–2025 (Rupiah) 112
Tabel 5.1 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025 116
Tabel 5.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2025 117
Tabel 5.3 Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2025 120
Tabel 5.4 Angka Melek Huruf Kota/Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2025 122
Tabel 5.5 Persentase Angka Pasrtisipasi Kasar Di Provinsi Bali Tahun 2025 ... 124
Tabel 5.6 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2025 127
Tabel 5.7 Persentase Angka Partisipasi Murni Kota/Kabupaten Di Provinsi Bali Tahun 2025 129
Tabel 5.8 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Partisipasi Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2023 dan 2024 130
Tabel 5.9 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota/Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2025 130
Tabel 5.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Bali, September 2024 – September 2025 141
Tabel 5.11 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Bali, September 2024 – September 2025 142
Tabel 5.12 Perkembangan Garis Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Bali, September 2024–September 2025 143
Tabel 5.13 Daftar Komoditas yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan Beserta Kontribusinya (%) di Provinsi Bali, September 2025 144
Tabel 5.14 Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin di Provinsi Bali, Maret 2025-September 2025 145
Tabel 5.15 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/ Kota Provinsi Bali Tahun 2021-2025 145
Tabel 5.16 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/ Kota Provinsi Bali Tahun 2020-2024 146
Tabel 5.17 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota/ Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2025 148
Tabel 6.1 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Bali Tahun 2025 150
Tabel 6.2 Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Provinsi Bali 155

Tabel 6.3 Panjang Jalan (km) Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Provinsi Bali Keadaan Akhir Tahun 2025 157
Tabel 6.4 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2022–2025 159
Tabel 6.5 Banyaknya Penerbangan dan Penumpang di Provinsi Bali Tahun 2023–2025 162
Tabel 6.6 Banyaknya Penumpang Tiba dan Berangkat Menurut Pelabuhan di Bali Tahun 2023–2025 164
Tabel 6.7 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel untuk Keperluan Komunikasi dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Bali, 2025 167
Tabel 6.8 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Base Transceiver Station (BTS), Sinyal Telepon Seluler, dan Sinyal Internet GSM atau CDMA Tahun 2025 167
Tabel 6.9 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum di Provinsi Bali, Tahun 2025 169
Tabel 6.10 Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 170
Tabel 7.1 Indikator Keuangan Inklusif Provinsi Bali & Nusa Tenggara 2022–2025 174
Tabel 7.2 Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Bali 175
Tabel 7.3 Indeks Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Bali Tahun 2020–2025 179
Tabel 7.4 Jumlah Pelanggan Listrik Berdasarkan Jenis Pelanggan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2025 182
Tabel 7.5 Daya Terpasang, Produksi, dan Listrik Terjual Menurut Jenis Pelanggan dan Area Pelayanan di Provinsi Bali Tahun 2025 182
Tabel 7.6 Jumlah dan Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Domestik ke Provinsi Bali Tahun 2021–2025 185
Tabel 7.7 Banyaknya Wisatawan Domestik yang Datang ke Bali per Bulan, Tahun 2021–2025 186
Tabel 7.8 Jumlah dan Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Bali Tahun 2021–2025 187
Tabel 7.9 Banyaknya Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Provinsi Bali Berdasarkan Bulan Kunjungan Tahun 2021–2025 189
Tabel 7.10 Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang Menurut Bulan dan Kelas Hotel di Bali, 2025 193
Tabel 7.11 Rata-rata Lama Menginap Tamu Domestik pada Hotel Berbintang di Provinsi Bali Tahun 2025 195
Tabel 7.12 Rata-rata Lama Menginap Tamu Mancanegara pada Hotel Berbintang di Provinsi Bali Tahun 2025 197
Tabel 7.13 Karakteristik Pengangguran (%) di Provinsi Bali, Agustus 2024–Agustus 2025 199

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Bali 2
Gambar 1.2 Peta Topografi Provinsi Bali 4
Gambar 1.3 Peta Kelerengan Provinsi Bali 5
Gambar 1.4 Peta Hidrologi Provinsi Bali 8
Gambar 1.5 Peta Bathimetri Provinsi Bali 11
Gambar 1.6 Peta Tipologi Pantai Provinsi Bali 12
Gambar 1.7 Peta Rawan Bencana Banjir 17
Gambar 1.8 Peta Rawan Bencana Longsor 25
Gambar 1.9 Peta Rawan Bencana Gunung Berapi 27
Gambar 1.10 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi 28
Gambar 1.11 Peta Rawan Bencana Tsunami 32
Gambar 1.12 Peta Rawan Bencana Angin Kencang 33
Gambar 1.13 Peta Rawan Bencana Abrasi 34
Gambar 1.14 Peta Rawan Bencana Kekeringan 34
Gambar 2.1 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Pada Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2025 (ribu jiwa) 45
Gambar 2.2 Grafik Penduduk Menurut Usia di Provinsi Bali 2025 49
Gambar 2.3 Grafik Perbandingan Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Bali Tahun 2025 51
Gambar 2.4 Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2025 54
Gambar 3.1 Grafik Perkembangan Produksi Padi dan Produksi Beras Provinsi Bali Tahun 2020–2025 62
Gambar 3.2 Infografis Produksi Padi dan Produksi Beras Provinsi Bali 66
Gambar 5.1 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota/Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2025 118
Gambar 5.2 Grafik Angka Partisipasi Murni Kota/kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2025 128
Gambar 5.3 Grafik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota/ Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2025 132
Gambar 5.4 Angka Kematian Neonatus, Bayi, Dan Balita di Provinsi Bali 133
Gambar 5.5 Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kota/Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2025 134
Gambar 5.6 Persentase Balita Pendek (Stunting) Tahun 2025 136
Gambar 5.7 Rasio Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Provinsi Bali Tahun 2025 137
Gambar 5.8 Rasio Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Provinsi Bali Tahun 2025 138
Gambar 5.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Bali Tahun 2018–2025 140
Gambar 5.10 Grafik IKG Kota/Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2025 148
Gambar 6.1 Jumlah Peserta Aktif Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Provinsi Bali Tahun 2025 151

Gambar 6.2 Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Bali Tahun 2023–2025 153
Gambar 7.1 Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2025 173
Gambar 7.2 Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2020–2025 179
Gambar 7.3 Grafik Perkembangan Kontribusi Sektor Pariwisata Berdasarkan Kontribusi Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB ADHB Provinsi Bali Tahun 2020–2025 184
Gambar 7.4 Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantara yang Mengunjungi Bali Berdasarkan Bulan Kunjungan Tahun 2021–2025 186
Gambar 7.5 Grafik Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Provinsi Bali Tahun 2021–2025 189
Gambar 7.6 Grafik Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang di Provinsi Bali Berdasarkan Bulan Tahun 2025 192
Gambar 7.7 Grafik Rata-rata Lama Menginap Wisatawan Domestik di Hotel Berbintang Tahun 2025 195
Gambar 7.8 Grafik Rata-rata Lama Menginap Wisatawan Mancanegara di Hotel Berbintang Tahun 2025 197
Gambar 7.9 Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Bali Tahun 2021-2025 (%) 198
Gambar 7.10 TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (%), Agustus 2024-Agustus 2025. 199
Gambar 7.11 Grafik Perbandingan TPAK Kota/Kabupaten di Provini Bali Tahun 2025. 201
Gambar 7.12 Grafik Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan Provinsi Bali Tahun 2020–2025 202
Gambar 7.13 Grafik Perkembangan Distribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Provinsi Bali Tahun 2021–202 203
Gambar 7.14 Grafik Jumlah Koperasi di Provinsi Bali Tahun 2025 204
Gambar 7.15 Grafik Jumlah Koperasi di Provinsi Bali Menurut Bidang Usaha Tahun 2025 205
Gambar 7.16 Grafik Jumlah Koperasi di Provinsi Bali Menurut Jenis Komoditas Tahun 2025 207
Gambar 7.17 Grafik Perkembangan Jumlah Koperasi di Provinsi Bali Menurut Jenis Komoditas Tahun 2021–2025 208
Gambar 7.18 Perkembangan UMKM di Provinsi Bali Berdasarkan Tahun 2024–2025 210
Gambar 7.19 Jumlah UMKM di Provinsi Bali Berdasarkan Sektor Tahun 2025 210

BAB 1

PROFIL DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025



BAB 1
KONDISI GEOGRAFIS

1.1. LETAK WILAYAH ADMINISTRASI

Provinsi Bali adalah salah satu dari 38 provinsi di Indonesia yang dikenal luas sebagai Pulau Dewata *(The Island of God*). Provinsi ini berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok, dengan Kota Denpasar sebagai ibu kota yang terletak di bagian selatan Pulau Bali.

Sebagai provinsi kepulauan, Bali memiliki luas wilayah 5.636,66 km². Wilayah administrasinya mencakup Pulau Bali sebagai pulau utama, serta beberapa pulau kecil seperti Nusa Penida, Nusa Ceningan, Nusa Lembongan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan di bagian barat. Secara astronomis, Bali berada pada 08°03'40"-08°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53"-115°42'40" Bujur Timur, yang menjadikannya beriklim tropis seperti wilayah Indonesia lainnya.

Bali terbagi atas delapan kabupaten dan satu kota, yaitu: Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, dan Kota Denpasar. Kabupaten Buleleng memiliki wilayah terluas dengan 1.322,75 km² (24,23% dari total luas Bali), diikuti oleh Kabupaten Tabanan, Jembrana, dan Karangasem. Kabupaten/kota lainnya memiliki luas yang bervariasi, dengan Kota Denpasar menjadi wilayah administratif terkecil seluas 125,71 km².

Secara administratif, Provinsi Bali terdiri dari 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, dan 1.500 desa adat, dengan jumlah kecamatan di setiap kabupaten/kota berkisar antara 4 hingga 10 kecamatan.

Batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Laut Bali
- Sebelah timur : Selat Lombok
- Sebelah selatan : Samudera Hindia
- Sebelah barat : Selat Bali.

Tabel 1. 1
Letak Geografis Masing-Masing Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Km2)	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa Adat
Jembrana	849,13	5	51	64
Tabanan	849,31	10	133	349
Badung	398,75	6	62	124
Gianyar	364,36	7	70	273
Klungkung	313,96	4	59	125
Bangli	526,76	4	72	170
Karangasem	839,32	8	78	190
Buleleng	1.322,68	9	148	170
Denpasar	125,87	4	43	35
BALI	**5.590,15**	**716**	**716**	**1.500**

Sumber: RTRW Provinsi Bali Tahun 2023-2043, BPS Provinsi Bali Tahun 2026, dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

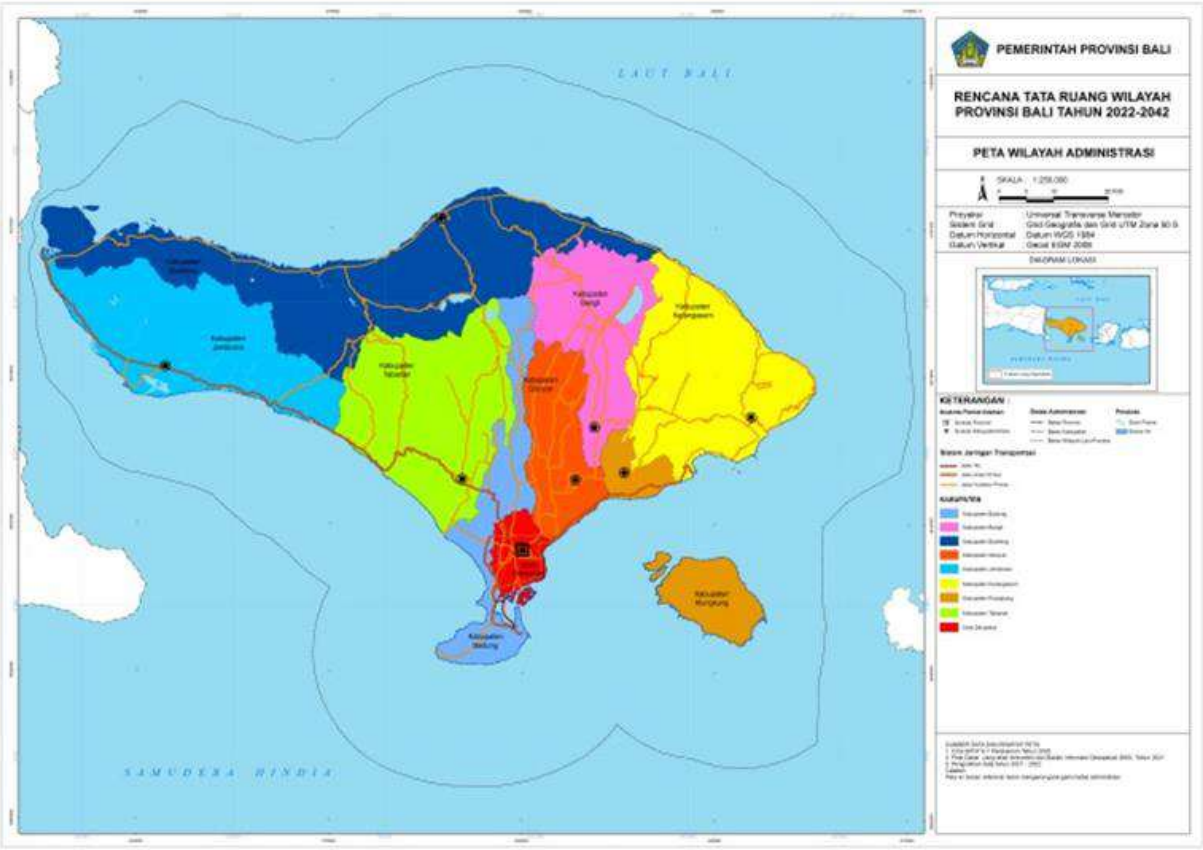

Gambar 1. 1
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Bali
Sumber: RTRW Provinsi Bali Tahun 2023-2043

1.2. KONDISI GEOGRAFIS DAN FISIK WILAYAH

a. Topografi

Kondisi geografis Provinsi Bali merupakan alam yang memiliki daya tarik tersendiri karena keindahannya yang lengkap: berupa laut, sungai, danau, dan gunung. Masyarakat Bali memposisikan gunung di hulu, dan pantai di hilir sehingga terbentuk bentangan alam yang dikenal dalam istilah Bali dengan sebutan *Nyegara-Gunung*.

Wilayah Provinsi Bali, 85% merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Relief Pulau Bali merupakan rantai pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Di antara pegunungan tersebut terdapat gunung berapi aktif yaitu Gunung Batur (1.717 m) dan Gunung Agung (3.140 m).

Ditinjau dari ketinggian lahan, Pulau Bali terdiri dari kelompok lahan sebagai berikut:

1. Lahan dengan ketinggian 0-50 meter di atas permukaan laut mempunyai permukaan yang cukup landai meliputi areal seluas 77.321,38 ha;
2. Lahan dengan ketinggian 50-100 meter di atas permukaan laut mempunyai permukaan berombak sempai bergelombang dengan luas 60.620,34 ha;
3. Lahan dengan ketinggian 100 - 500 meter seluas 211.923,85 ha didominasi oleh keadaan permukaan bergelombang sampai berbukit;
4. Lahan dengan ketinggian 500 - 1.000 meter seluas 145.188,61 ha; dan
5. Lahan dengan ketinggian diatas 1.000 m di atas permukaan laut seluas 68.231,90 ha.

b. Geologi

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bali, Nusa Tenggara (Purwo-Hadiwidjojo dkk, 1998), wilayah permukaan Pulau Bali tersusun atas berbagai batuan produk gunung api. Sementara batuan endapan permukaan hanya terdapat di daerah pesisir. Dengan komposisi litologi/batuan wilayah, sebagai berikut.

1. Aluvium (Qa) berupa kerakal, kerikil, pasir, lanau dan lempung; sebagai endapan sungai, danau dan pantai di leher sepenanjung Prapat Agung, wilayah pesisir dekatpantai di Kabupaten Buleleng (Kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Sawan dan sebagian Buleleng), pesisir dekat pantai Kabupaten Jembrana (Kecamatan Negara, Jembrana dan Mendoyo), Kabupaten Badung (Tanjung Benoa dan leher Kuta), Kota Denpasar (dekat pantai Denpasar Selatan dan Pulau Serangan asli).
2. Formasi Prapat Agung (Tpsp), terdiri dari batugamping ter-kars-kan, batupasir gampingan dan napal, terdapat di sepenanjung Prapat Agung Kabupaten Buleleng.
3. Formasi Palasari (QTsp), terdiri dari konglomerat, batupasir dan batugamping terumbu. Batuan ini terdapat di wilayah dataran rendah Kabupaten Jembrana, menyebar hingga pesisir dekat pantai Kecamatan

Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Labuhan Lalang Kabupaten Buleleng.

4. Formasi Selatan (Tmps), terdiri dari batugamping terumbu, setempat napal; sebagian berlapis, terhablur-ulang dan berfosil. Batuan ini terdapat di daerah Bukit Kabupaten Badung dan Kepulauan Nusa Penida.

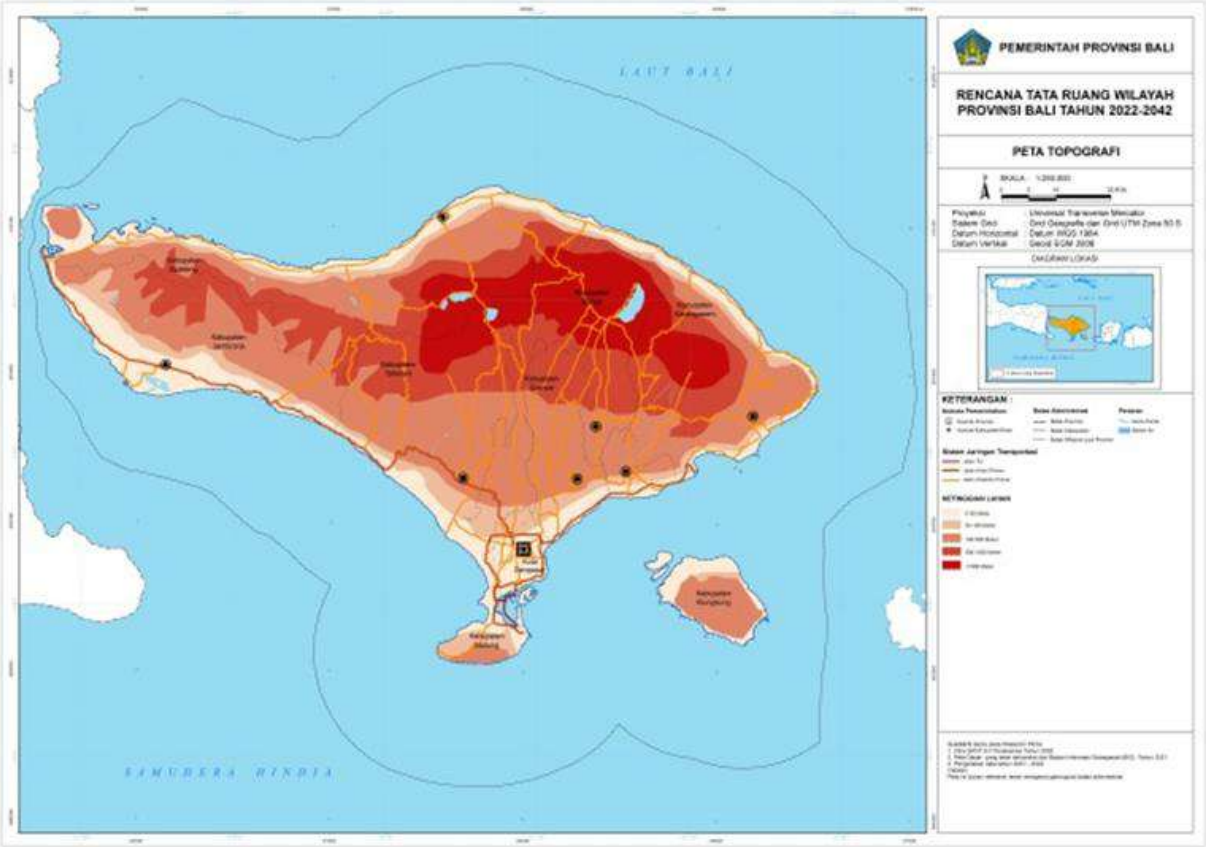

Gambar 1. 2
Peta Topografi Provinsi Bali
Sumber: RTRW Provinsi Bali Tahun 2023-2043

c. Kemiringan Lahan

Kemiringan Pulau Bali didominasi kemiringan >15% sebagai konsekuensi pola rantai pegunungan dan perbukitan. Wilayah pesisir utara kemiringan 0->40%. 0-2% relatif sempit terdapat di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem. Wilayah pesisir selatan Pulau Bali kemiringan 0-40%, kemiringan 0-2% relatif lebar di Kabupaten Jembrana, Tabanan bagian timur, seluruh Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar. Kemiringan 2-15% mendominasi wilayah Kabupaten Tabanan dan Gianyar, kemiringan 15-40% mendominasi Kabupaten Jembrana dan Klungkung, sedangkan wilayah pesisir Kabupaten Karangasem barat (Kecamatan Manggis) kemiringan

>40% dan di Kecamatan Karangasem 0-2% dan 2-15%. Bukit Peninsula dan Prapat Agung umumnya mempunyai kemiringan 15-40% dan di atas 40%

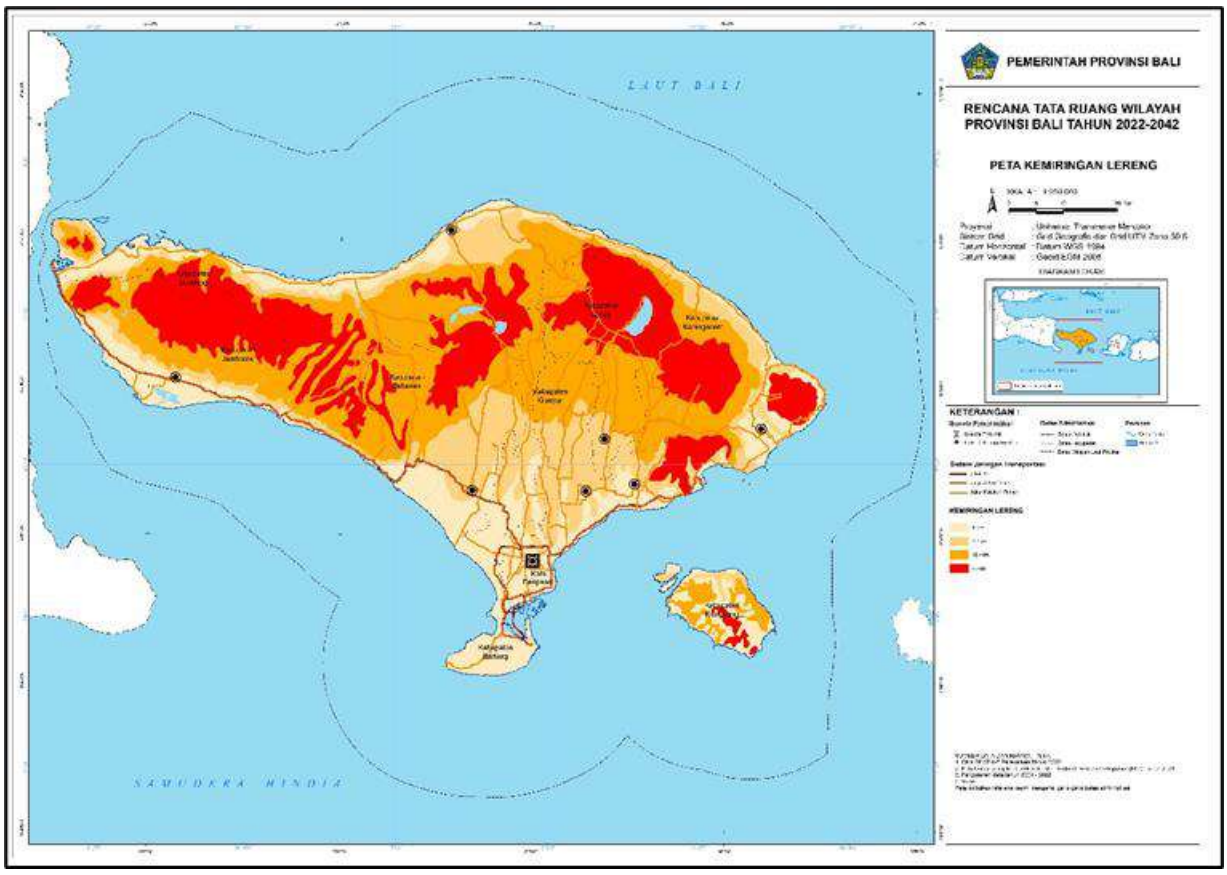

Gambar 1. 3
Peta Kelerengan Provinsi Bali
Sumber: RTRW Provinsi Bali

d. Hidrologi

1. Sungai

Terbaginya fisiografi Pulau Bali oleh pegunungan yang membentang dari barat – timur pulau ini menyebabkan sistem sungai di Pulau Bali mengalir dari utara ke selatan di belahan selatan pulau dan dari selatan ke utara di belahan utara pulau. Sungai-sungai di Povinsi bali dikelompokan dalam Wilayah Sungai Bali Penida, terdii dari 391 Daerah Aliran Sungai (DAS).

DAS di Provinsi dibagi dalam 5 zona meliputi: Zona Utara 138 DAS, Zona Timur 68 DAS, Zona Tengah 70 DAS, Zona Sarbagita 85 DAS da Zona Barat 30 DAS. Dari 391 DAS yang ada 94 DAS diantaranya merupakan DAS Lintas Kabupaten/Kota. Provinsi Berdasarkan wilayah, Kabupaten Buleleng memiliki DAS terbanyak (139 DAS) disusul Kabupaten Karangasem (77 DAS) dan Kabupaten Klungkung (72 DAS).

2. Danau/Waduk/Embung/Embungan

Di Pulau Bali terdapat 4 buah danau yaitu Danau Batur di Kabupaten Bangli, Danau Beratan di Kabupaten Tabanan, Danau Buyan dan Danau Tamblingan di Kabupaten Buleleng, serta Situ Yeh Malet. Potensi air danau di Bali adalah 872,47 juta m3. Danau terbesar di Bali adalah Danau Batur dengan potensi air 773,33 juta m3 atau 88,63% dari total potensi air danau.

Waduk/bendungan/embung di Bali sebanyak 6 buah yaitu Bendungan Palasari dan Bendungan Betel di Kabupaten Jembrana, Waduk Gerokgak di Kabupaten Buleleng, Waduk Telaga Tunjung di Kabupaten Tabanan, Waduk Muara Nusa Dua di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, dan Embung Seraya di Kabupaten Karangasem. Seluruh bendungan/waduk/ embung tersebut terdapat di wilayah pesisir. Potensi air bendungan/ waduk/embung adalah 13,53 juta m3.

3. Mata Air

Berdasarkan data dari Dinas PU Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, potensi mata air di Provinsi Bali adalah 1.023 miliar m3 dengan total debit 32.463,12 Lt/dt. Jumlah Mata Air yang tercatat di Provinsi Bali adalah sebanyak 1.394 titik mata air dimana jumlah paling banyak berada di Kabupaten Bangli yaitu sebanyak 447 titik mata air. Namun untuk debit paling tinggi terdapat di Kabupaten Karangasem dengan potensi air 13.023,48 Lt/dt meskipun jumlah mata air hanya 215 titik.

4. Air Tanah dan Cekungan Air Tanah

Berdasarkan Peta Hidrogeologi Lembar Bali (Sudadi dkk., 1985), kondisi akuifer dan air tanah di wilayah pesisir Provinsi Bali sebagai berikut:

a) *Akuifer* produktivitas tinggi dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah umumnya dekat muka tanah, debit sumur umumnya >10 liter/detik. Terdapat di wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung (Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Utara, dan Kecamatan Mengwi) dan Kabupaten Tabanan (Kecamatan Kediri).
b) *Akuifer* produktif dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau di bawah muka tanah, debit sumur umumnya 5-10 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Badung (Kuta) dan Kota Denpasar (pesisir dekat pantai Denpasar Selatan).
c) *Akuifer* dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, muka air tanah beragam dari di atas atau dekat muka tanah sampai lebih dalam dari 10 meter di bawah muka tanah, debit sumur umumnya <5 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana (dekat

pantai Negara, Jembrana dan Mendoyo), dan Kabupaten Buleleng (pesisir dekat pantai Kec. Gerokgak, Seririt, dan Banjar).

d) Setempat *akuifer* dengan produktivitas sedang, debit sumur umumnya <5 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana, Badung (Jimbaran dan Tanjung Benoa), pesisir utara dekat pantai Nusa Penida, pesisir utara Nusa Lembongan, Kabupaten Buleleng (Labuhan Lalang dan Sumberkima).
e) *Akuifer* dengan produktivitas tinggi dan penyebaran luas, kedalaman muka air tanah beragam, debit sumur umumnya >5 liter/detik. Terdapat di Kabupaten Tabanan (pesisir bagian tengah Kecamatan Kerambitan, Tabanan dan Kediri), Kabupaten Badung (Kecamatan Mengwi bagian atas), Kota Denpasar (Kecamatan Denpasar Timur bagian atas), sebagian besar wilayah pesisir dekat pantai Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung (dekat pantai Banjarangkan dan Klungkung) dan Kabupaten Buleleng (Kota Singaraja).
f) *Akuifer* dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, kedalaman muka air tanah umumnya dalam, debit sumur umumnya <5 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Tabanan (dekat pantai Kecamatan Selemadeg, Selemadeg Timur dan pesisir bagian atas Kecamatan Kerambitan, Tabanan dan Kediri), wilayah pesisir bagian atas Kabupaten Gianyar, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem (Manggis, Karangasem dan pesisir dekat pantai Kecamatan Kubu), dan Kab. Buleleng (Tejakula, Buleleng, dan Seririt).
g) Setempat *akuifer* produktif, air tanah umumnya tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah, setempat mata air dapat diturap. Terdapat di Kabupaten Tabanan (pesisir atas Kecamatan Selemadeg Barat dan Selemadeg), sebagian besar wilayah pesisir Kabupaten Karangasem dan Buleleng.
h) *Akuifer* produktif sedang, aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan, dan saluran pelarutan, debit mata air beragam dengan kisaran sangat besar, lebih dari 500 liter/detik. Terdapat di pesisir dekat pantai Kubutambahan.
i) Setempat, *akuifer* produktif, aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan, dan saluran pelarutan, muka air tanah umumnya dalam. Terdapat di Parapat Agung, Bukit, Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan.
j) *Akuifer* dengan produktivitas rendah, setempat berarti, air tanah dangkal terbatas dapat diperoleh di lembah-lembah atau zona pelapukan. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana dan Buleleng (Sumberklampok, Pejarakan dan Sumberkima).
k) Daerah air tanah langka. Terdapat di wilayah pesisir perbukitan Kabupaten Jembrana, Buleleng, Klungkung, dan Karangasem.

Berdasarkan data Dinas PU Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, jumlah Cekungan Air Tanah (CAT) yang terdata ada di Provinsi Bali adalah sebanyak 8 kawasan CAT. Adapun CAT tersebut adalah sebagai berikut.

a) CAT Denpasar - Tabanan dengan luas 2.080 Km^2 yang meliputi kawasan di dalam 8 kabupaten/kota (Kecuali Kabupaten Jembrana)
b) CAT Singaraja dengan luas 505 Km2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan
c) CAT Amlapura dengan luas 200 Km2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Karangasem.
d) CAT Negara dengan luas 418 Km2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan
e) CAT Gilimanuk dengan luas 131 Km2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.
f) CAT Nusa Penida dengan luas 198 Km2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Klungkung.
g) CAT Nusa Dua dengan luas 99 Km2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Badung.
h) CAT Tejakula dengan luas 750 Km2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Karangasem.

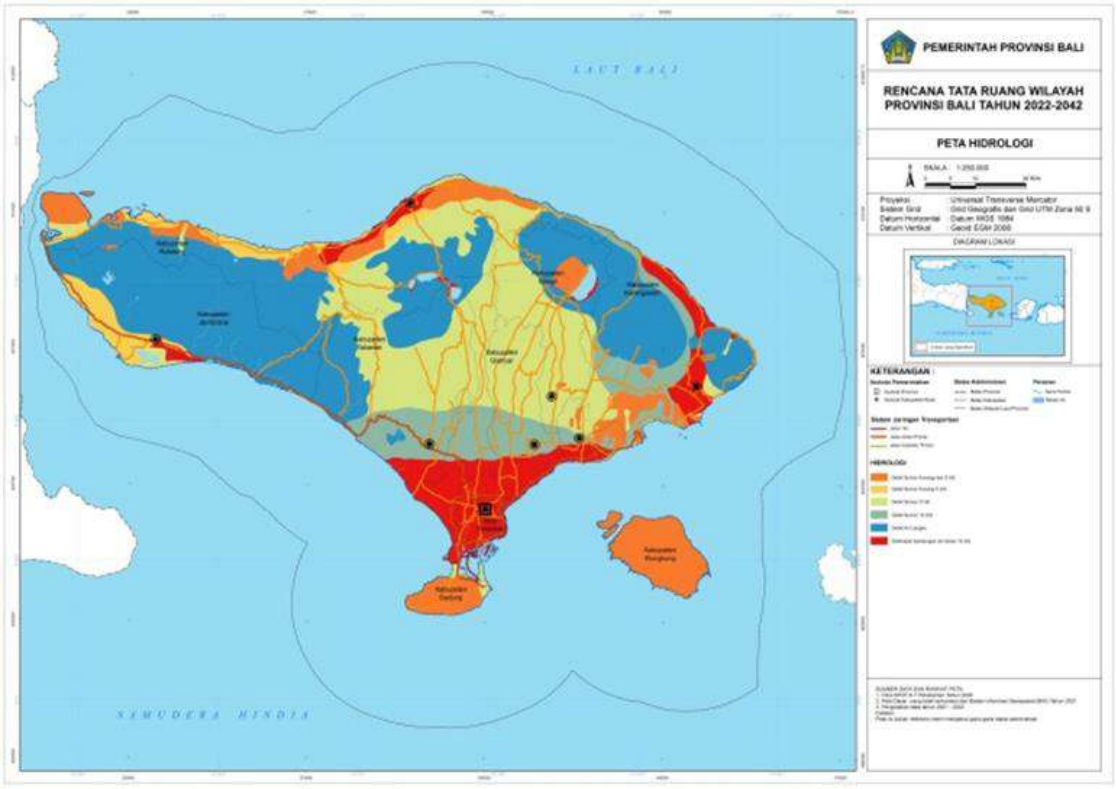

Gambar 1. 4
Peta Hidrologi Provinsi Bali
Sumber: RTRW Provinsi Bali Tahun 2023-2043

e. Klimatologi

1. Tipe Iklim

Wilayah Bali secara umum beriklim laut tropis, yang dipengaruhi oleh angin musiman. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Pada bulan Juni hingga September, arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sedangkan pada bulan Desember hingga Maret, arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik, sehingga terjadi musim penghujan. Corak produksi masyarakat Bali ini sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim (siklus alam dan curah hujan). Karena itu, peralihan musim merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi musim kemarau atau musim hujan secara lebih dini, sehingga perencanaan pertanian terutama periode tanam dan jenis komoditas dapat disusun sesuai kondisi iklim aktual.

2. Suhu dan Curah Hujan

Menurut catatan pengamatan unsur iklim pada 4 Stasiun Klimatologi di Provinsi Bali yaitu: Stasiun Meteorologi I Gusti Ngurah Rai; Stasiun Geofisika Denpasar; Pos Pengamatan Kahang-Kahang Kabupaten Karangasem; dan Stasiun Klimatologi Jembrana sepanjang tahun 2025, suhu/temperatur udara tertinggi di wilayah Bali terjadi di Kota Denpasar, yaitu mencapai 36,2^{o}C dengan rata-rata kelembaban udara 86,2%. Sebaliknya, suhu udara rata-rata terendah terjadi di Kabupaten Karangasem yang mencapai 18°C dengan tingkat kelembaban udara rata-rata yakni sebesar 80%.

Apabila dilihat dari curah hujan di masing-masing stasiun pos pengamatan, tercatat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari 2025 yang mencapai 938,8 mm/bulan dan curah hujan terendah terjadi di pada bulan februari yang hanya 7,7 mm/bulan.

Intensitas curah hujan tertinggi selama tahun 2025 terjadi di bulan Desember seperti yang tercatat di semua stasiun pencatatan di Bali yakni Stasiun Ngurah Rai, Sanglah, Negara, dan Karangasem.

f. Bathimetri

Pulau Bali dan pulau-pulau utama dari rantai kepulauan Lesser Sunda dikenal sebagai pulau-pulau yang memiliki perairan laut yang dalam di sekitar pantainya. Pola batimetri perairan pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali mempunyai karakteristik yang berbeda-beda menurut wilayahnya , sebagai berikut :

- Perairan Selat Bali, cenderung dangkal (<200 m) bagian dari paparan sunda dan merupakan selat yang sempit di bagian utara dan meluas

ke arah selatan.

- Perairan Selat Lombok memiliki batimetri yang dalam (800-1000 m) kecuali di bagian selatan sekitar Pulau Nusa Penida.
- Pola batimetri perairan pesisir Selat Bali di wilayah Kabupaten Jembrana umumnya sejajar garis pantai pada kontur di bawah kedalaman 100 m, sedangkan kontur di atas 100 m lebih berkelok-kelok. Perairan dekat pantai mempunyai pola kontur yang rapat pada kedalaman di bawah 100 m.
- Perairan di Selat Bali yang merupakan garis perbatasan antara Propinsi Bali dengan Jawa Timur mempunyai kedalaman maksimum 300 m yaitu di sebelah selatan Perancak.
- Perairan pesisir di wilayah Kabupaten Tabanan relatif dangkal dimana kedalaman maksimum pada jarak 4 mil laut dari garis pantai berada pada *isodepth* maksimum 80 meter.
- Perairan Bali Selatan sekitar Uluwatu Kabupaten Badung juga cenderung sejajar garis pantai dengan dasar laut yang relatif curam sampai kedalaman 20 meter. Sedangkan kedalaman 20 meter sampai 50 meter, perairan semakin landai.
- Perairan dekat pantai di Labuhan Jimbaran, Kuta dan Seseh termasuk perairan yang sangat landai sampai landai, dengan pola kontur dasar laut sejajar garis pantai pada kedalaman 20 meter ke atas.
- Perairan pesisir di sebelah selatan Pulau Bali yang merupakan Samudera Hindia merupakan perairan yang relatif curam. Kedalaman laut pada batas 4 mil laut di sebelah selatan Kabupaten Badung mencapai 200 meter dan pada batas 12 mil laut kedalamannya mencapai 2000 meter, sedangkan laut pada batas 4 mil di sebelah selatan Nusa Penida mempunyai kedalaman hingga 300 meter dan pada batas 12 mil laut kedalamannya mencapai 1600 meter.
- Perairan Selat Badung merupakan perairan selat yang relatif dalam yaitu mencapai 500 meter. Kontur dasar laut di sekitar Nusa Dua, Sanur dan Gianyar relatif landai sedangkan di selatan Kabupaten Klungkung dan Karangasem serta di sekitar Nusa Penida lebih curam. Pola kontur dasar laut perairan Selat Bali pada sisi Pulau Bali cenderung sejajar garis pantai sedangkan di sekitar Nusa Penida cenderung tegak lurus garis pantai.
- Di wilayah pesisir timur Provinsi Bali yaitu perairan Selat Lombok merupakan perairan yang sangat dalam. Kedalaman dasar laut antara Pulau Bali dan Pulau Lombok lebih dari 1300 meter. Sedangkan kedalaman antara Nusa Penida dan Pulau Lombok lebih kurang 300 meter.
- Perairan pesisir utara Pulau Bali merupakan perairan yang curam dan dalam. Semakin ke arah timur mendekati Selat Lombok, perairan semakin curam dan dalam. Kedalaman dasar laut pada batas 4 mil laut di sebelah utara Kubu, Tejakula, Kubutambahan dan Sawan lebih dari

1000 meter.

- Sedangkan Laut Bali bagian barat relatif lebih landai dan dangkal. Pola kontur dasar laut sampai isodepth di atas 1000 meter cenderung sejajar garis pantai dan isodepth di atasnya cenderung tegak lurus garis pantai.

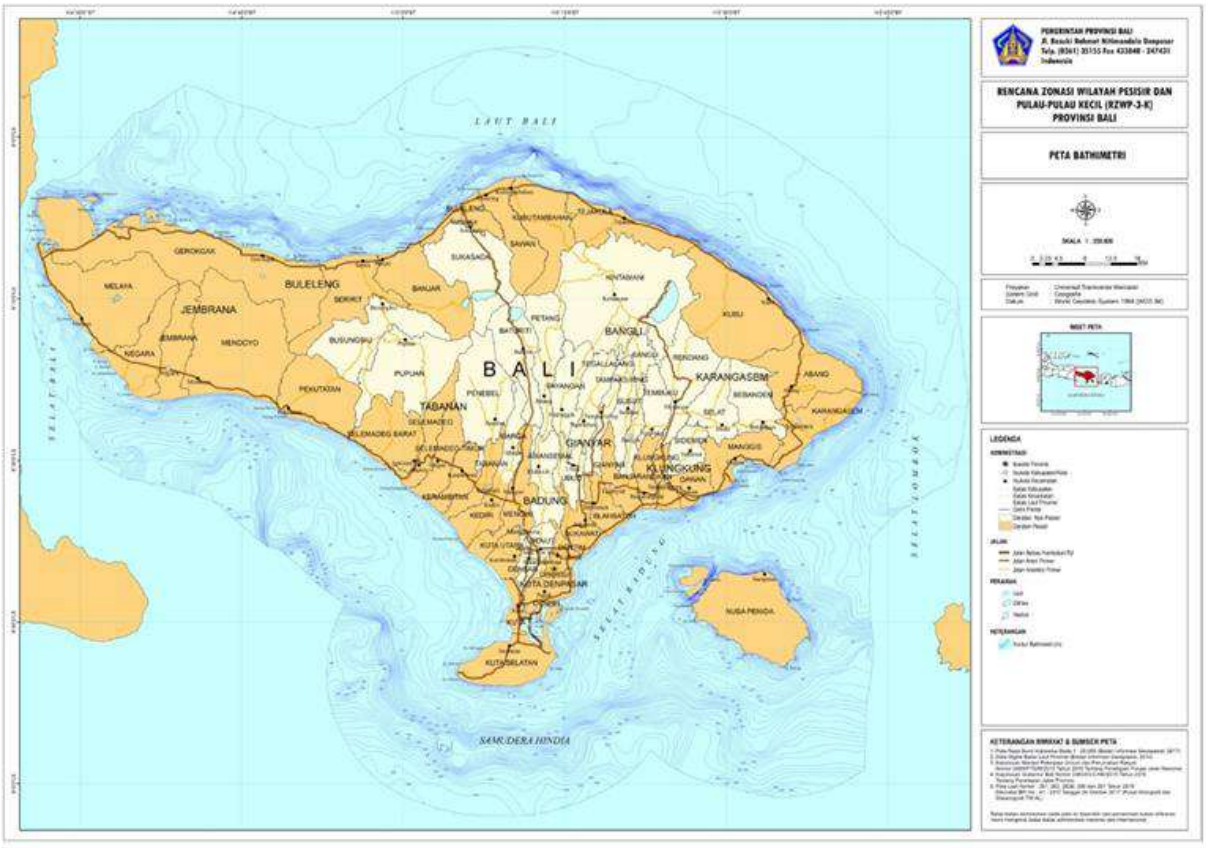

Gambar 1. 5
Peta Bathimetri Provinsi Bali

Sumber: Peta RZWP3K Provinsi Bali

g. Tipologi Pantai

Pantai adalah mintakat atau zona antara tepian perairan laut pada pasang rendah sampai ke batas efektif pengaruh gelombang kearah daratan. Sedangkan garis pantai adalah garis dimana daratan dan air bertemu yang posisinya berubah-ubah sesuai dengan kondisi muka air akibat pasang surut. Panjang total garis pantai (*shoreline*) Provinsi Bali yang meliputi Pulau Bali dan pulau-pulau kecil (Pulau Menjangan, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan dan Pulau Serangan) adalah 610 km, dengan karakter Pantai pasir hitam, tebing, pasir putih, batu dan bermangrove.

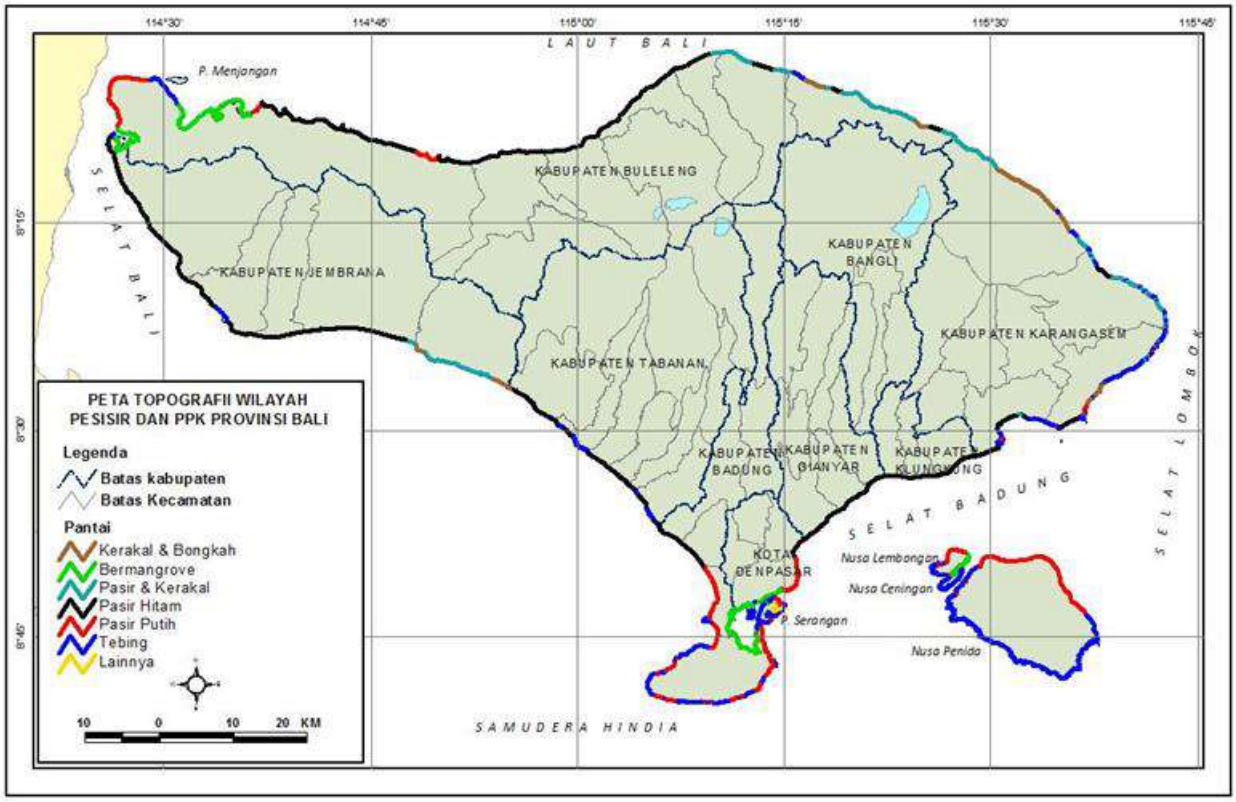

Gambar 1. 6

Peta Tipologi Pantai Provinsi Bali

Sumber: RTRW Provinsi Bali

a. Morfologi Dasar Laut

Berdasarkan standarisasi Topomini Bentukan Dasar Laut Indonesia (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan, 2008), morfologi dasar laut di wilayah perairan pesisir Provinsi Bali terdiri atas:

- Dataran atau paparan benua, yaitu perluasan perimeter pada benua yang terhubung dataran pesisir yang merupakan dasar laut dangkal. Laut sekitar dataran pesisir Pulau Bali dan pulau-pulau kecil di sekitarnya merupakan bagian dari Paparan Sunda.
- Cekungan atau Lubuk Laut (Basin), meliputi Cekungan Laut Bali dan Cekungan Selat Bali. Berdasarkan kemiringan dan bentuk cekungan atau tonjolan, dasar Laut Bali dapat dibedakan atas dua morfologi yaitu paparan benua di bagian barat dimana kemiringan dasar laut semakin melandai ke arah darat dan di bagian timur merupakan lubuk laut yaitu cekungan akibat adanya penurunan dasar laut yang dapat disebabkan oleh lipatan.
- Palung Laut, meliputi perairan Selat Lombok yang merupakan perairan curam dan dalam. Sebagaimana diketahui Selat Lombok terdapat garis khayal sebagai garis biologi dan garis geologi yang dikenal sebagai garis Wallace yang membedakan penyebaran fauna Oriental dan Asiatis.

Secara geografis, garis Wallace terletak memanjang dari Selat Lombok hingga Selat Makassar.

- Lereng Benua (Continental Slope), meliputi perairan selatan Pulau Bali yang menempati regim zona tambahan (contiguous) sebagai sistem Samudera Hindia dimana zona ini dipengaruhi oleh interaksi lempeng-lempeng kerak bumi Eurasia (utara) dan Hindia-Australia (selatan). Lereng benua ini bagian relief dasar laut yang menurun tajam dan curam, kelanjutan dari landas benua, memiliki sudut kemiringan kurang dari 500 menuju ke dalam laut, dan kedalaman antara 200-1.500 m.
- Takat (Gosong), berupa gundukan yang terbentuk dari pasir atau kerikil di dasar perairan. Gugusan takat atau gosong terdapat di perairan pesisir utara Pulau Bali bagian barat. Takat tersebut antara lain Kisik Pegametan, Takat Jaran, Takat Penyu, Takat Kembar, Takat Panjang dan Takat Sendang.

b. Substrat Dasar Laut

Menurut Peta Sedimen Permukaan Dasar Laut Wilayah Laut Indonesia (Pusat Pengembangan Geologi Kelautan, 1991), substrat permukaan dasar laut di perairan pesisir Provinsi Bali terdiri dari:

- Pasir dan lanau (silt), merupakan butiran bergaris-tengah berdiameter 2 mm – 2 μm, terdiri dari pasir, lanau, vulkanik klastika, gelas vulkanik, arenit gamping, bintil mangan dan arenit cangkang. Pasir dan lanau mendominasi dasar laut di WP3K Provinsi Bali.
- Lumpur, berupa endapan perombakan asal darat, umumnya berbutir halus, mengandung sedikitnya 20% partikel yang berukuran pasir, lanau dan lempung. Sebaran sedimen lumpur ini terdapat di perairan Selat Bali, kira-kira 5 mil laut di selatan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana dan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan.
- Batu keras dan kerikil, endapan yang terdiri dari batuan atau partikel bergaris tengah lebih dari 2 mm, antara lain batu keras, kerikil, basal, rijang, kapur, lumpur mengeras, bintil mangan dan cangkang moluska. Substrat ini tersebar di perairan Selat Badung khususnya antara Pulau Serangan dan Nusa Lembongan serta di selatan Nusa Dua.
- Substrat koral, yaitu terumbu dekat pantai. Koral terdapat di perairan pantai Bali Utara bagian barat (Kecamatan Gerokgak sampai Kecamatan Banjar), dan Selat Bali.
- Lempung, yaitu endapan pelagos halus (<4 mikron). Sebaran substrat ini terdapat di Selat Bali, Selat Badung, Selat Lombok dan perairan lepas pantai selatan Pulau Bali.

1.3. KAWASAN RAWAN BENCANA

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana juga meliputi bencana alam dan non alam. Bencana alam dapat diklasifikasikan menjadi bencana akibat fenomena geologi (seperti gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, dan gunung api), bencana akibat faktor biologi (seperti epidemic dan wabah penyakit), bencana akibat kondisi hidrometerologi (seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan). Bencana non alam dapat terjadi akibat ulah manusia, seperti konflik sosial dan kegagalan teknologi.

Ditinjau dari kondisi geografis, geologis dan hidrometeorologis, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali berpotensi mengalami bencana alam dan bencana alam geologi seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, gempa dan tsunami, abrasi pantai, gelombang pasang, dan angin kencang. Selain itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga tidak terlepas dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim global seperti erosi/abrasi pantai dan kenaikan paras muka laut. Oleh karena itu, mitigasi bencana pesisir mutlak mendapatkan perhatian dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

a. Daerah Rawan Banjir

Seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Bali termasuk memilki daerah rawan banjir ditinjau dari aspek curah hujan, kemiringan lereng, kerapatan sungai, jenis tanah dan penggunaan lahan serta ketinggian tempat dari permukaan laut.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, terdapat 81 desa/kelurahan di Provinsi Bali yang termasuk kedalam daerah rawan banjir. Desa/Kelurahan ini tersebar di 5 kabupaten/kota yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana. Kabupaten Buleleng merupakan wilayah terbanyak yang memiliki desa/kelurahan dengan status daerah rawan banjir. Terdapat 40 desa/kelurahan di Kabupaten Buleleng yang rawan banjir.

Untuk lebih jelasnya, daerah rawan banjir di Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 2

Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Banjir di Provinsi Bali

No.	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	Desa Benoa	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
2	Desa Tanjung Benoa	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
3	Desa Kedonganan	Kecamatan Kuta	Badung
4	Desa Tuban	Kecamatan Kuta	Badung
5	Desa Kuta	Kecamatan Kuta	Badung
6	Desa Legian	Kecamatan Kuta	Badung
7	Desa Seminyak	Kecamatan Kuta	Badung
8	Desa Kerobokan Kelod	Kecamatan Kuta Utara	Badung
9	Desa Kerobokan	Kecamatan Kuta Utara	Badung
10	Desa Dalung	Kecamatan Kuta Utara	Badung
11	Desa Kapal	Kecamatan Mengwi	Badung
12	Desa Penarungan	Kecamatan Mengwi	Badung
13	Desa Darmasaba	Kecamatan Abiansemal	Badung
14	Desa Abiansemal	Kecamatan Abiansemal	Badung
15	Desa Carangsari	Kecamatan Petang	Badung
16	Desa Takmung	Kecamatan Banjarangkan	Klungkung
17	Kel Semarapura Kauh	Kecamatan Klungkung	Klungkung
18	Kel Semarapura Tengah	Kecamatan Klungkung	Klungkung
19	Kel Semarapura Kangin	Kecamatan Klungkung	Klungkung
20	Kel Semarapura Klod Kangin	Kecamatan Klungkung	Klungkung
21	Desa Kusamba	Kecamatan Dawan	Klungkung
22	Desa Kampung Kusamba	Kecamatan Dawan	Klungkung
23	Desa Pejarakan	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
24	Desa Celukan Bawang	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
25	Desa Sangalangit	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
26	Desa Musi	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
27	Desa Penyabangan	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
28	Desa Banyupoh	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
29	Desa Pengastulan	Kecamatan Seririt	Buleleng
30	Desa Tangguwisia	Kecamatan Seririt	Buleleng
31	Desa Kalianget	Kecamatan Seririt	Buleleng
32	Desa Sulanyah	Kecamatan Seririt	Buleleng
33	Desa Umaanyar	Kecamatan Seririt	Buleleng
34	Kelurahan Seririt	Kecamatan Seririt	Buleleng
35	Desa Banjarasem	Kecamatan Seririt	Buleleng
36	Desa Kalisade	Kecamatan Seririt	Buleleng
37	Desa Petemon	Kecamatan Seririt	Buleleng
38	Desa Kaliasem	Kecamatan Banjar	Buleleng
39	Desa Temukus	Kecamatan Banjar	Buleleng
40	Desa Dencarik	Kecamatan Banjar	Buleleng
41	Desa Banjar	Kecamatan Banjar	Buleleng
42	Kelurahan Penarukan	Kecamatan Buleleng	Buleleng

No.	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
43	Kelurahan Banyuning	Kecamatan Buleleng	Buleleng
44	Kelurahan Kampung Baru	Kecamatan Buleleng	Buleleng
45	Kelurahan Kampung Kajanan	Kecamatan Buleleng	Buleleng
46	Kelurahan Kampung Anyar	Kecamatan Buleleng	Buleleng
47	Kelurahan Kaliuntu	Kecamatan Buleleng	Buleleng
48	Banjar Bali	Kecamatan Buleleng	Buleleng
49	Kelurahan Kampung Bugis	Kecamatan Buleleng	Buleleng
50	Desa Baktiserage	Kecamatan Buleleng	Buleleng
51	Desa Pemaron	Kecamatan Buleleng	Buleleng
52	Desa Kalibubuk	Kecamatan Buleleng	Buleleng
53	Desa Anturan	Kecamatan Buleleng	Buleleng
54	Desa Bungkulan	Kecamatan Sawan	Buleleng
55	Desa Sangsit	Kecamatan Sawan	Buleleng
56	Desa Kerobokan	Kecamatan Sawan	Buleleng
57	Desa Kubutambahan	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
58	Desa Bukti	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
59	Desa Pacung	Kecamatan Tejakula	Buleleng
60	Desa Bondalem	Kecamatan Tejakula	Buleleng
61	Desa Tejakula	Kecamatan Tejakula	Buleleng
62	Desa Tembok	Kecamatan Tejakula	Buleleng
63	Desa Padasambian Kaje	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
64	Kelurahan Padasambian	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
65	Kelurahan Padasmbian Klod	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
66	Desa Tegal Kertha	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
67	Desa Tegal Harum	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
68	Desa Pemecutan	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
69	Desa Pemecutan Klod	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
70	Desa Dauh Puri	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
71	Desa Dauh Puri Kauh	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
72	Desa Dauh Puri Klod	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
73	Desa Sesetan	Kec Denpasar Selatan	Denpasar
74	Desa Panjer	Kec Denpasar Selatan	Denpasar
75	Desa Pemogan	Kec Denpasar Selatan	Denpasar
76	Desa Pedungan	Kec Denpasar Selatan	Denpasar
77	Desa Sanur	Kec Denpasar Selatan	Denpasar
78	Desa Kesiman Kerthalangu	Kec Denpasar Timur	Denpasar
79	Desa Melaya	Kecamatan Melaya	Jembrana
80	Kelurahan Baler Bale Agung	Kecamatan Negara	Jembrana
81	Desa Batuagung	Kecamatan Jembrana	Jembrana

Sumber: BPBD Provinsi Bali



Gambar 1. 7
Peta Rawan Bencana Banjir
Sumber: RTRW Provinsi Bali Tahun 2023-2043

b. Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor

Pulau Bali dibentuk oleh vulkanik dan mempunyai topografi bergelombang, berbukit dan bergunung, termasuk memiliki kerentanan tinggi terhadap potensi longsor.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, tercatat sebanyak 322 desa di Provinsi Bali yang termasuk ke dalam daerah rawan bencana tanah longsor. Kabupaten Tabanan merupakan kabupaten dengan jumlah desa terbanyak yang masuk ke dalam daerah rawan bencana tanah longsor. Terdapat 122 desa di Kabupaten Tabanan yang rawan longsor. Untuk lebih jelasnya, data mengenai desa/kelurahan yang masuk kedalam klasifikasi Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 3
Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Bali

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
1	Desa Buahan	Kintamani	Bangli
2	Desa Belandingan	Kintamani	Bangli

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
3	Desa Batur Utara	Kintamani	Bangli
4	Desa Batur Tengah	Kintamani	Bangli
5	Desa Batur Selatan	Kintamani	Bangli
6	Desa Kutuh	Kintamani	Bangli
7	Desa Abang Batudinding	Kintamani	Bangli
8	Desa Pengejaran	Kintamani	Bangli
9	Desa Subaya	Kintamani	Bangli
10	Desa Siakin	Kintamani	Bangli
11	Desa Trunyan	Kintamani	Bangli
12	Desa Bunutin	Kintamani	Bangli
13	Desa Binyan	Kintamani	Bangli
14	Desa Dausa	Kintamani	Bangli
15	Desa Kintamani	Kintamani	Bangli
16	Desa Kedisan	Kintamani	Bangli
17	Desa Serai	Kintamani	Bangli
18	Desa Satra	Kintamani	Bangli
19	Desa Songan A	Kintamani	Bangli
20	Desa Songan B	Kintamani	Bangli
21	Desa Pinggan	Kintamani	Bangli
22	Desa Suter	Kintamani	Bangli
23	Desa Tegallalang	Tegallalang	Gianyar
24	Desa Taro	Tegallalang	Gianyar
25	Desa Pupuan	Tegallalang	Gianyar
26	Desa Kedisan	Tegallalang	Gianyar
27	Desa Kenderan	Tegallalang	Gianyar
28	Desa Sebatu	Tegallalang	Gianyar
29	Desa Keliki	Tegallalang	Gianyar
30	Desa Tampaksiring	Tampaksiring	Gianyar
31	Desa Manukaya	Tampaksiring	Gianyar
32	Desa Sanding	Tampaksiring	Gianyar
33	Desa Pejeng	Tampaksiring	Gianyar
34	Desa Pejeng Kaja	Tampaksiring	Gianyar
35	Desa Pejeng Kelod	Tampaksiring	Gianyar
36	Desa Pejeng Kawan	Tampaksiring	Gianyar
37	Desa Puhu	Payangan	Gianyar
38	Desa Bukian	Payangan	Gianyar
39	Desa Bresela	Payangan	Gianyar
40	Desa Kelusa	Payangan	Gianyar
41	Desa Melinggih Kelod	Payangan	Gianyar
42	Desa Melinggih	Payangan	Gianyar
43	Desa Buahan	Payangan	Gianyar
44	Desa Buahan Kaja	Payangan	Gianyar
45	Desa Kerta	Payangan	Gianyar
46	Desa Gobleg	Banjar	Buleleng
47	Desa Pancasari	Banjar	Buleleng
48	Desa Gitgit	Banjar	Buleleng
49	Desa Antap	Selemadeg	Tabanan

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
50	Desa Bajera	Selemadeg	Tabanan
51	Desa Bajera Utara	Selemadeg	Tabanan
52	Desa Berembeng	Selemadeg	Tabanan
53	Desa Serampingan	Selemadeg	Tabanan
54	Desa Selemadeg	Selemadeg	Tabanan
55	Desa Pupuan Sawah	Selemadeg	Tabanan
56	Desa Wanagiri	Selemadeg	Tabanan
57	Desa Wanagiri Kauh	Selemadeg	Tabanan
58	Desa Manikyang	Selemadeg	Tabanan
59	Desa Tegai Mengkeb	Selemadeg Timur	Tabanan
60	Desa Tangguntiti	Selemadeg Timur	Tabanan
61	Desa Mambang	Selemadeg Timur	Tabanan
62	Desa Bantas	Selemadeg Timur	Tabanan
63	Desa Megati	Selemadeg Timur	Tabanan
64	Desa Gadungan	Selemadeg Timur	Tabanan
65	Desa Gunung Salak	Selemadeg Timur	Tabanan
66	Desa Dalang	Selemadeg Timur	Tabanan
67	Desa Gadung sari	Selemadeg Timur	Tabanan
68	Desa Lalanglinggah	Selemadeg Barat	Tabanan
69	Desa Antosari	Selemadeg Barat	Tabanan
70	Desa Tiying Gading	Selemadeg Barat	Tabanan
71	Desa Lumbung	Selemadeg Barat	Tabanan
72	Desa Lumbung Kauh	Selemadeg Barat	Tabanan
73	Desa Mundeh	Selemadeg Barat	Tabanan
74	Desa Mundeh Kangin	Selemadeg Barat	Tabanan
75	Desa Angkah	Selemadeg Barat	Tabanan
76	Desa Mundeh Kauh	Selemadeg Barat	Tabanan
77	Desa Selabih	Selemadeg Barat	Tabanan
78	Desa Bengkel Sari	Selemadeg Barat	Tabanan
79	Desa Tibibiu	Kerambitan	Tabanan
80	Desa Kelanting	Kerambitan	Tabanan
81	Desa Penarukan	Kerambitan	Tabanan
82	Desa Belumbang	Kerambitan	Tabanan
83	Desa Tista	Kerambitan	Tabanan
84	Desa Kerambitan	Kerambitan	Tabanan
85	Desa Pangkung Karung	Kerambitan	Tabanan
86	Desa Kukuh	Kerambitan	Tabanan
87	Desa Baturiti	Kerambitan	Tabanan
88	Desa Meliling	Kerambitan	Tabanan
89	Desa Sembung Gede	Kerambitan	Tabanan
90	Desa Samsam	Kerambitan	Tabanan
91	Desa Batuaji	Kerambitan	Tabanan
92	Desa Kesiut	Kerambitan	Tabanan
93	Desa Timpag	Kerambitan	Tabanan
94	Desa Sudimara	Tabanan	Tabanan
95	Desa Bongan	Tabanan	Tabanan
96	Desa Gubug	Tabanan	Tabanan

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
97	Desa Dauh Peken	Tabanan	Tabanan
98	Desa Delod Peken	Tabanan	Tabanan
99	Desa Dajan Peken	Tabanan	Tabanan
100	Desa Subamia	Tabanan	Tabanan
101	Desa Denbantas	Tabanan	Tabanan
102	Desa Tunjuk	Tabanan	Tabanan
103	Desa Wanasari	Tabanan	Tabanan
104	Desa Beraban	Kediri	Tabanan
105	Desa Buwit	Kediri	Tabanan
106	Desa Kaba-kaba	Kediri	Tabanan
107	Desa Pandak Gede	Kediri	Tabanan
108	Desa Pejaten	Kediri	Tabanan
109	Desa Nyambu	Kediri	Tabanan
110	Desa Kediri	Kediri	Tabanan
111	Desa Abiantuwung	Kediri	Tabanan
112	Desa Banjar Ayar	Kediri	Tabanan
113	Desa Tegal Jadi	Marga	Tabanan
114	Desa Kukuh	Marga	Tabanan
115	Desa Beringkit	Marga	Tabanan
116	Desa Peken Blayu	Marga	Tabanan
117	Desa Batan Nyuh	Marga	Tabanan
118	Desa Kuwum	Marga	Tabanan
119	Desa Caublayu	Marga	Tabanan
120	Desa Selanbawak	Marga	Tabanan
121	Desa Marga	Marga	Tabanan
122	Desa Petiga	Marga	Tabanan
123	Desa Tua	Marga	Tabanan
124	Desa Payangan	Marga	Tabanan
125	Desa Dauh Puri	Marga	Tabanan
126	Desa Dajan Puri	Marga	Tabanan
127	Desa Geluntung	Marga	Tabanan
128	Desa Baru	Marga	Tabanan
129	Desa Perean	Baturiti	Tabanan
130	Desa Perean Tengah	Baturiti	Tabanan
131	Desa Perea Kangin	Baturiti	Tabanan
132	Desa Luwus	Baturiti	Tabanan
133	Desa Apuan	Baturiti	Tabanan
134	Desa Angseri	Baturiti	Tabanan
135	Desa Bangli	Baturiti	Tabanan
136	Desa Baturiti	Baturiti	Tabanan
137	Desa Batunya	Baturiti	Tabanan
138	Desa Antapan	Baturiti	Tabanan
139	Desa Candikuning	Baturiti	Tabanan
140	Desa Rejasa	Penebel	Tabanan
141	Desa Jegu	Penebel	Tabanan
142	Desa Riang Gede	Penebel	Tabanan
143	Desa Buruan	Penebel	Tabanan

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
144	Desa Tajen	Penebel	Tabanan
145	Desa Pitra	Penebel	Tabanan
146	Desa Penatahan	Penebel	Tabanan
147	Desa Tengkudak	Penebel	Tabanan
148	Desa Mengeste	Penebel	Tabanan
149	Desa Penebel	Penebel	Tabanan
150	Desa Biaung	Penebel	Tabanan
151	Desa Bebahan	Penebel	Tabanan
152	Desa Seganan	Penebel	Tabanan
153	Desa Jatiluwih	Penebel	Tabanan
154	Desa Wangaya Gede	Penebel	Tabanan
155	Desa Pesagi	Penebel	Tabanan
156	Desa Tegallinggah	Penebel	Tabanan
157	Desa Sangketan	Penebel	Tabanan
158	Desa Belatungan	Pupuan	Tabanan
159	Desa Kebon Padangan	Pupuan	Tabanan
160	Desa Belimbing	Pupuan	Tabanan
161	Desa Sanda	Pupuan	Tabanan
162	Desa Batungsel	Pupuan	Tabanan
163	Desa Pujungan	Pupuan	Tabanan
164	Desa Pajahan	Pupuan	Tabanan
165	Desa Munduk Temu	Pupuan	Tabanan
166	Desa Bantiran	Pupuan	Tabanan
167	Desa Padangan	Pupuan	Tabanan
168	Desa Jelijih Punggang	Pupuan	Tabanan
169	Desa Karya Sari	Pupuan	Tabanan
170	Desa Sai	Pupuan	Tabanan
171	Desa Bugbug	Karangasem	Karangasem
172	Desa Bukit	Karangasem	Karangasem
173	Desa Pertima	Karangasem	Karangasem
174	Desa Seraya Barat	Karangasem	Karangasem
175	Desa Tegallinggah	Karangasem	Karangasem
176	Desa Tumbu	Karangasem	Karangasem
177	Desa Gegelang	Manggis	Karangasem
178	Desa Nyuh Tebel	Manggis	Karangasem
179	Desa Selumbung	Manggis	Karangasem
180	Desa Tenganan	Manggis	Karangasem
181	Desa Ulakan	Manggis	Karangasem
182	Desa Datah	Abang	Karangasem
183	Desa Pidpid	Abang	Karangasem
184	Desa Purwakerti	Abang	Karangasem
185	Desa Tista	Abang	Karangasem
186	Desa Tiyingtali	Abang	Karangasem
187	Desa Ababi	Abang	Karangasem
188	Desa Bunutan	Abang	Karangasem
189	Desa Bebandem	Bebandem	Karangasem
190	Desa Bhuana Giri	Bebandem	Karangasem

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
191	Desa Budakeling	Bebandem	Karangasem
192	Bungaya Kangin	Bebandem	Karangasem
193	Desa Jungutan	Bebandem	Karangasem
194	Desa Macang	Bebandem	Karangasem
195	Desa Sibetan	Bebandem	Karangasem
196	Desa Besakih	Rendang	Karangasem
197	Desa Menanga	Rendang	Karangasem
198	Desa Nongan	Rendang	Karangasem
199	Desa Pempatan	Rendang	Karangasem
200	Desa Rendang	Rendang	Karangasem
201	Desa Amertha Bhuana	Selat	Karangasem
202	Desa Duda	Selat	Karangasem
203	Desa Duda Timur	Selat	Karangasem
204	Duda Utara	Selat	Karangasem
205	Desa Muncan	Selat	Karangasem
206	Desa Peringsari	Selat	Karangasem
207	Desa Sebudi	Selat	Karangasem
208	Desa Selat	Selat	Karangasem
209	Desa Kertha Bhana	Sidemen	Karangasem
210	Desa Lokasari	Sidemen	Karangasem
211	Desa Sangkangunung	Sidemen	Karangasem
212	Desa Sidemen	Sidemen	Karangasem
213	Desa Sindu Wati	Sidemen	Karangasem
214	Desa Talibeng	Sidemen	Karangasem
215	Desa Tangkup	Sidemen	Karangasem
216	Desa Telaga Tawang	Sidemen	Karangasem
217	Desa Tri Ekabuana	Sidemen	Karangasem
218	Desa Wismakerta	Sidemen	Karangasem
219	Desa Tianyar Barat	Kubu	Karangasem
220	Desa Tianyar Tengah	Kubu	Karangasem
221	Desa Tulamben	Kubu	Karangasem
222	Desa Ban	Kubu	Karangasem
223	Desa Melaya	Melaya	Jembrana
224	Kelurahan Baler Bale Agung	Negara	Jembrana
225	Desa Batu Agung	Jembrana	Jembrana
226	Kelurahan Dauh Waru	Jembrana	Jembrana
227	Desa Penyaringan	Mendoyo	Jembrana
228	Desa Yeh Sumbul	Mendoyo	Jembrana
229	Desa Yehembang	Mendoyo	Jembrana
230	Desa Asah Duren	Pekutatan	Jembrana
231	Desa Manggis Sari	Pekutatan	Jembrana
232	Desa Gumbrih	Pekutatan	Jembrana
233	Desa Selisihan	Klungkung	Klungkung
234	Desa Selat	Klungkung	Klungkung
235	Desa Akah	Klungkung	Klungkung
236	Desa Tangkas	Klungkung	Klungkung

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
237	Kelurahan Semarapura Kangin	Klungkung	Klungkung
238	Kelurahan Semarapura Kelod Kangin	Klungkung	Klungkung
239	Desa Toh Pati	Banjarangkan	Klungkung
240	Desa Bungbungan	Banjarangkan	Klungkung
241	Desa Nyalian	Banjarangkan	Klungkung
242	Desa Tusan	Banjarangkan	Klungkung
243	Desa Getakan	Banjarangkan	Klungkung
244	Desa Aan	Banjarangkan	Klungkung
245	Desa Timuhun	Banjarangkan	Klungkung
246	Desa Nyanglan	Banjarangkan	Klungkung
247	Desa Takmung	Banjarangkan	Klungkung
248	Desa Paksebali	Dawan	Klungkung
249	Desa Gunaksa	Dawan	Klungkung
250	Desa Besan	Dawan	Klungkung
251	Desa Pikat	Dawan	Klungkung
252	Desa Dawan Kelod	Dawan	Klungkung
253	Desa Dawan Kaler	Dawan	Klungkung
254	Desa Kutampi	Nusa Penida	Klungkung
255	Desa Batu Kandik	Nusa Penida	Klungkung
256	Desa Bungamekar	Nusa Penida	Klungkung
257	Desa Suana	Nusa Penida	Klungkung
258	Desa Pejukutan	Nusa Penida	Klungkung
259	Desa Carangsari	Petang	Badung
260	Desa Getasan	Petang	Badung
261	Desa Pangsan	Petang	Badung
262	Desa Petang	Petang	Badung
263	Desa Sulangai	Petang	Badung
264	Desa Pelaga	Petang	Badung
265	Desa Belok	Petang	Badung
266	Desa Ayunan	Abiansemal	Badung
267	Desa Bongkasa	Abiansemal	Badung
268	Desa Sangeh	Abiansemal	Badung
269	Desa Bongkasa Pertiwi	Mengwi	Badung
270	Desa Kuwum	Mengwi	Badung
271	Desa Pecatu	Kuta Selatan	Badung
272	Desa Ungasan	Kuta Selatan	Badung
273	Desa Kutuh	Kuta Selatan	Badung
274	Desa Jimbaran	Kuta Selatan	Badung
275	Desa Sumberkirana	Gerokgak	Buleleng
276	Desa Pemuteran	Gerokgak	Buleleng
277	Desa Musi	Gerokgak	Buleleng
278	Desa Gerokgak	Gerokgak	Buleleng
279	Desa Pengulon	Gerokgak	Buleleng
280	Desa Tinga-tinga	Gerokgak	Buleleng
281	Desa Tukad Sumaga	Gerokgak	Buleleng

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
282	Desa Pangkung Paruk	Seririt	Buleleng
283	Desa Unggahan	Seririt	Buleleng
284	Desa Rangdu	Seririt	Buleleng
285	Desa Gunung Sari	Seririt	Buleleng
286	Desa Titab	Busungbiu	Buleleng
287	Desa Telaga	Busungbiu	Buleleng
288	Desa Subuk	Busungbiu	Buleleng
289	Desa Kedis	Busungbiu	Buleleng
290	Desa Uma Jero	Busungbiu	Buleleng
291	Desa Bengkel	Busungbiu	Buleleng
292	Desa Puncak Sari	Busungbiu	Buleleng
293	Desa Tinggar Sari	Busungbiu	Buleleng
294	Desa Sepang	Busungbiu	Buleleng
295	Desa Sepang Kelod	Busungbiu	Buleleng
296	Desa Tista	Busungbiu	Buleleng
297	Desa Tigawase	Kecamatan Banjar	Buleleng
298	Desa Cempage	Kecamatan Banjar	Buleleng
299	Desa Pedawa	Kecamatan Banjar	Buleleng
300	Desa Sidatape	Kecamatan Banjar	Buleleng
301	Desa Gobleg	Kecamatan Banjar	Buleleng
302	Desa Banyuseri	Kecamatan Banjar	Buleleng
303	Desa Munduk	Kecamatan Banjar	Buleleng
304	Desa Gesing	Kecamatan Banjar	Buleleng
305	Desa Silangjana	Kecamatan Sukasada	Buleleng
306	Desa Pegayaman	Kecamatan Sukasada	Buleleng
307	Desa Ambengan	Kecamatan Sukasada	Buleleng
308	Desa Gitgit	Kecamatan Sukasada	Buleleng
309	Desa Wanagiri	Kecamatan Sukasada	Buleleng
310	Desa Lemukih Desa Galungan	Sawan	Buleleng
311	Desa Sekumpul	Sawan	Buleleng
312	Desa Sudaji	Sawan	Buleleng
313	Desa Sangsit	Sawan	Buleleng
314	Desa Kerobokan	Sawan	Buleleng
315	Desa Depaha	Kubutambahan	Buleleng
316	Desa Tunjung	Kubutambahan	Buleleng
317	Desa Tajun	Kubutambahan	Buleleng
318	Desa Bontiing	Kubutambahan	Buleleng
319	Desa Tamblang	Kubutambahan	Buleleng
320	Desa Sembiran	Tejakula	Buleleng
321	Desa Madenan	Tejakula	Buleleng
322	Desa Julah	Tejakula	Buleleng

Sumber: BPBD Provinsi Bali

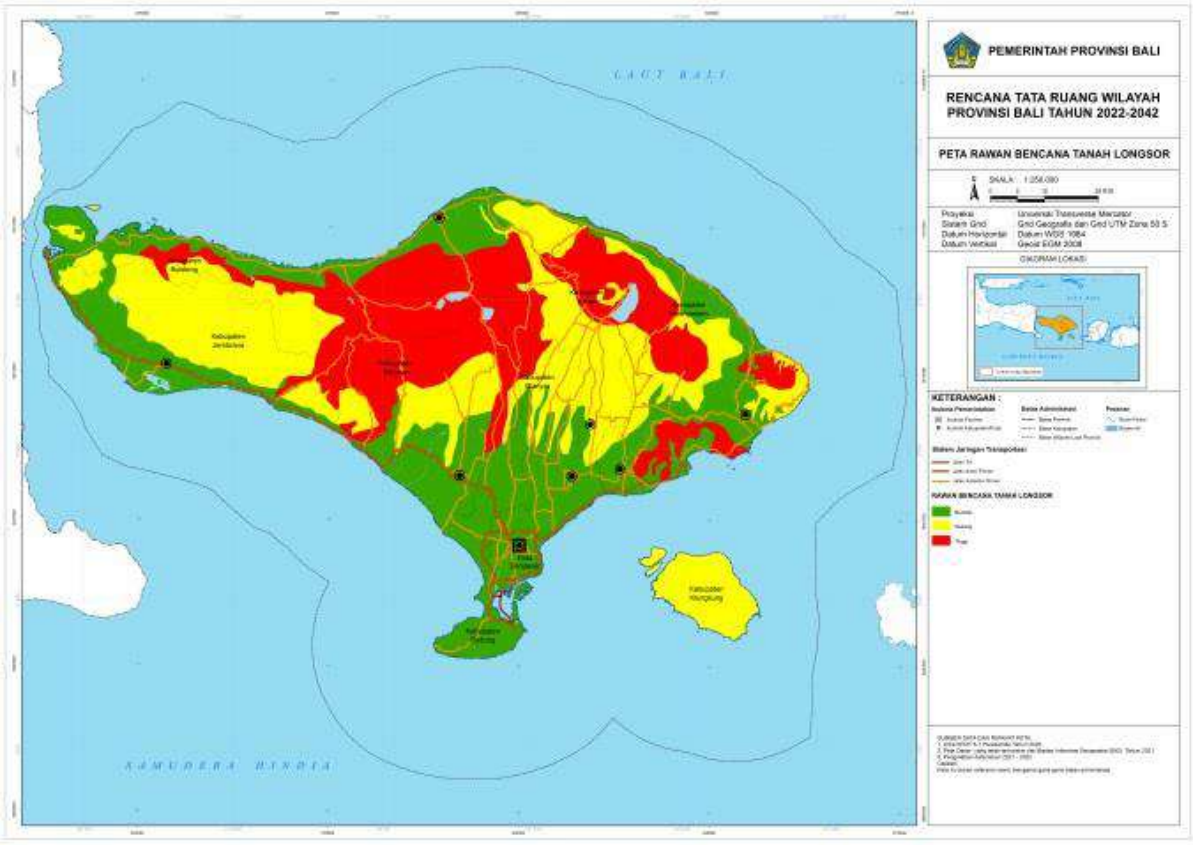

Gambar 1. 8
Peta Rawan Bencana Longsor
Sumber: RTRW Provinsi Bali Tahun 2023-2043

c. Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi

Gunung Agung merupakan gunung tertinggi di Bali (3.142 meter) merupakan gunung berapi yang aktif. Direktorat Jenderal Vulkanologi telah menggolongkan radius bahaya letusan G. Agung kedalam tiga zona bahaya yaitu:

1. Zona Terlarang : area yang paling tinggi tingkat resiko terkena awan panas, aliran lava dan lontaran batu pijar, diharuskan terbebas dari hunian.
2. Zona Bahaya Primer : area yang dapat terkena lontaran batu pijar, hujan abu dan pasir serta aliran lahar.
3. Zona Bahaya Sekunder : area sepanjang lembah sungai yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi lahar serta banjir yang menyertainya

Sedangkan rawan bencana letusan Gunung Berapi Batur berada dalam Kaldera Batur. Berikut adalah data desa di Provinsi Bali yang termasuk ke dalam Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi.

Tabel 1. 4

Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi di Provinsi Bali

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
1	Desa Songan A	Kintamani	Bangli
2	Desa Songan B	Kintamani	Bangli
3	Desa Belandingan	Kintamani	Bangli
4	Desa Sukawana	Kintamani	Bangli
5	Desa Pinggan	Kintamani	Bangli
6	Desa Batur Selatan	Kintamani	Bangli
7	Desa Kedisan	Kintamani	Bangli
8	Desa Buahan	Kintamani	Bangli
9	Desa Abang Batudinding	Kintamani	Bangli
10	Desa Terunyan	Kintamani	Bangli
11	Desa Abang Songan	Kintamani	Bangli
12	Desa Padang Kerta	Karangasem	Karangasem
13	Desa Karangasem	Karangasem	Karangasem
14	Desa Subagan	Karangasem	Karangasem
15	Desa Pidpid	Abang	Karangasem
16	Desa Bebandem	Abang	Karangasem
17	Desa Bhuana Giri	Abang	Karangasem
18	Desa Budakeling	Abang	Karangasem
19	Desa Bungaya Kangin	Abang	Karangasem
20	Desa Jungutan	Abang	Karangasem
21	Desa Macang	Abang	Karangasem
22	Desa Sibetan	Abang	Karangasem
23	Desa Besakih	Rendang	Karangasem
24	Desa Menanga	Rendang	Karangasem
25	Desa Nongan	Rendang	Karangasem
26	Desa Pesaban	Rendang	Karangasem
27	Desa Rendang	Rendang	Karangasem
28	Desa Amertabuana	Selat	Karangasem
29	Desa Duda	Selat	Karangasem
30	Desa Duda Utara	Selat	Karangasem
31	Desa Muncan	Selat	Karangasem
32	Desa Peringsari	Selat	Karangasem
33	Desa Sebudi	Selat	Karangasem
34	Desa Selat	Selat	Karangasem
35	Desa Kerta Bhuana	Sidemen	Karangasem
36	Desa Lokasari	Sidemen	Karangasem
37	Desa Sangkan Gunung	Sidemen	Karangasem
38	Desa Sinduwati	Sidemen	Karangasem

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
39	Desa Talibeg	Sidemen	Karangasem
40	Desa Tangkup	Sidemen	Karangasem
41	Desa Telaga Tawang	Sidemen	Karangasem
42	Desa Wismakerta	Sidemen	Karangasem
43	Desa Baturinggit	Kubu	Karangasem
44	Desa Sukadana	Kubu	Karangasem
45	Desa Tianyar Barat	Kubu	Karangasem
46	Desa Tulamben	Kubu	Karangasem
47	Desa Tianyar	Kubu	Karangasem

Sumber: BPBD Provinsi Bali

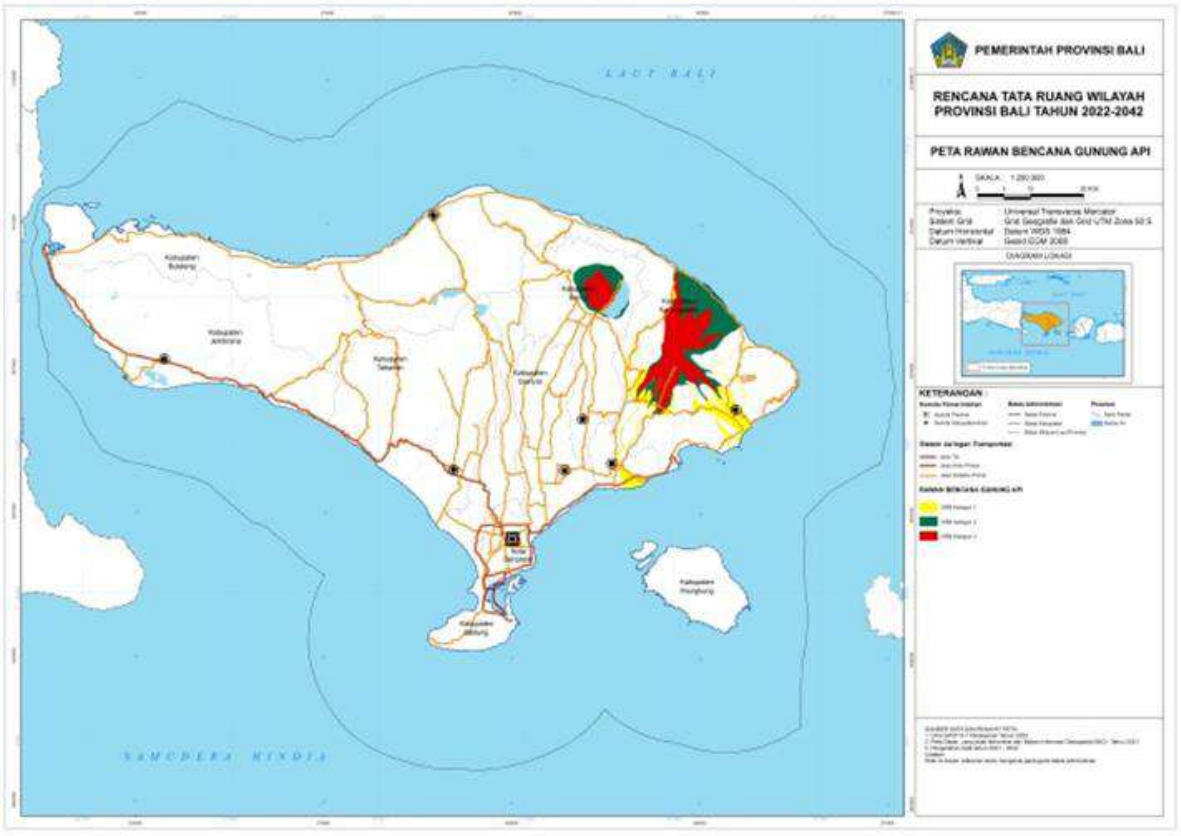

Gambar 1. 9

Peta Rawan Bencana Gunung Berapi

Sumber: RTRW Provinsi Bali Tahun 2023-2043

d. Daerah Rawan Bencana Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran yang terjadi permukaan bumi. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi (lempeng bumi). Berdasarkan hasil kajian BMG Bali (Daryono dkk, 2006 dalam Bappeda Provinsi Bali, 2006) yang mendasarkan pada seismik gempa merusak dan sejarah gempa maka di Bali dibagi menjadi 3 zone daerah rawan gempa. Daerah sangat rawan gempa (zone

1) meliputi wilayah Bali timur (Kabupaten Karangasem dan Klungkung; daerah rawan gempa (zone 2) mencakup seluruh wilayah Bangli, Buleleng, Jembrana dan Tabanan. Sedangkan zone 3 daerah agak rawan gempa meliputi Denpasar, Badung dan Gianyar.

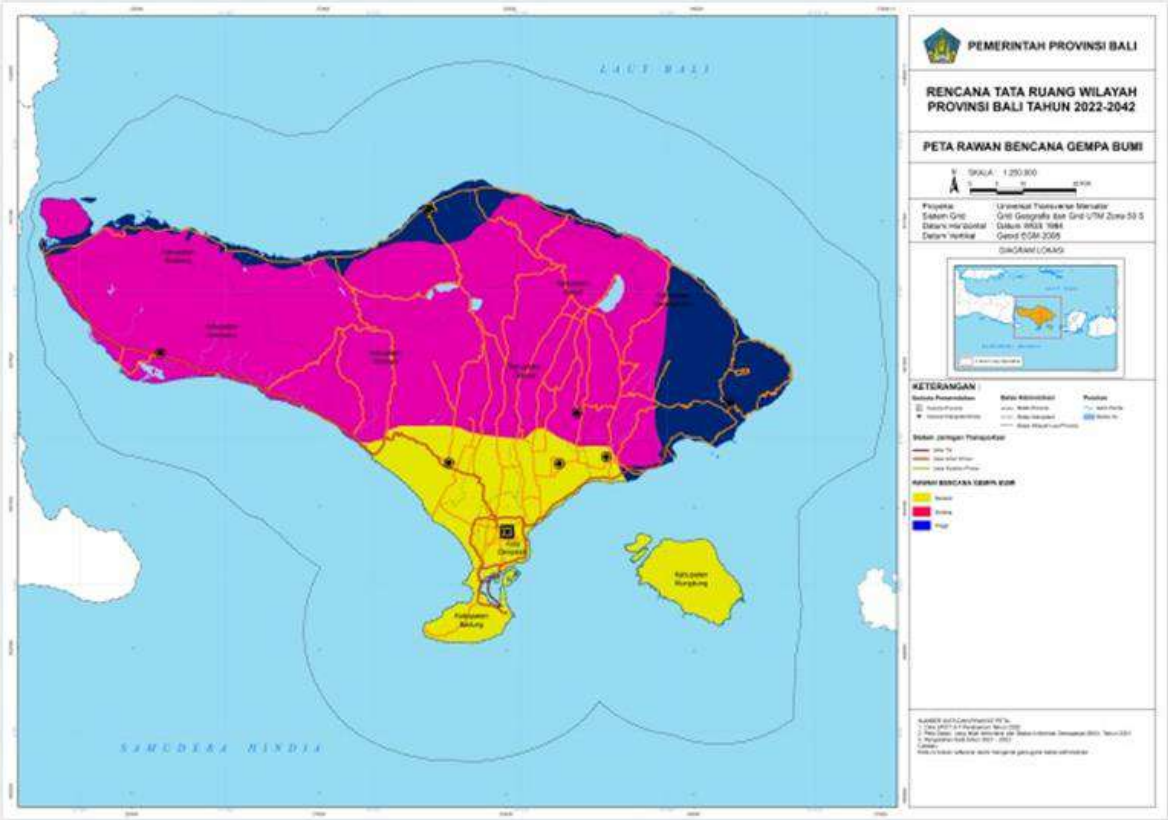

Gambar 1. 10

Peta Rawan Bencana Gempa Bumi

Sumber: RTRW Provinsi Bali Tahun 2023-2043

e. Daerah Rawan Bencana Tsunami

Tsunami berasal dari bahasa Jepang *tsu* artinya pelabuhan dan *nami* berarti gelombang. Tsunami berarti pasang laut besar di pelabuhan. Secara singkat tsunami dapat dideskripsikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh suatu gangguan impulsif yang terjadi pada medium laut, seperti terjadinya gempa bumi, erupsi vulkanik, atau oleh land-slide (longsoran). Gelombang tsunami yang ditimbulkan oleh gaya impulsif ini bersifat transien yaitu gelombangnya bersifat sesar. Luasan rawan tsunami merupakan hasil tumpang susun antara peta permukiman dengan ketinggian tempat.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, terdapat 141 desa di Provinsi Bali yang termasuk ke dalam Daerah Rawan Bencana Tsunami. Adapun daftar desa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 5

Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Bali

No.	Desa	Kecamatan	Kabupaten / Kota
1	Desa Tanjung Benoa	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
2	Desa Jimbaran	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
3	Desa Ungasan	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
4	Desa Kutuh	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
5	Desa Pecatu	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
6	Desa Benoa	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
7	Desa Kerobokan	Kecamatan Kuta Utara	Badung
8	Desa Canggu	Kecamatan Kuta Utara	Badung
9	Desa Tibubeneng	Kecamatan Kuta Utara	Badung
10	Desa Kedonganan	Kecamatan Kuta	Badung
11	Kelurahan Kuta	Kecamatan Kuta	Badung
12	Desa Tuban	Kecamatan Kuta	Badung
13	Desa Seminyak	Kecamatan Kuta	Badung
14	Desa Legian	Kecamatan Kuta	Badung
15	Desa Pererenan	Kecamatan Mengwi	Badung
16	Desa Cemagi	Kecamatan Mengwi	Badung
17	Desa Munggu	Kecamatan Mengwi	Badung
18	Desa Sanur Kauh	Denpasar Selatan	Denpasar
19	Desa Sanur Kaja	Denpasar Selatan	Denpasar
20	Kelurahan Sanur	Denpasar Selatan	Denpasar
21	Kelurahan Pedungan	Denpasar Selatan	Denpasar
22	Desa Sidakrya	Denpasar Selatan	Denpasar
23	Kelurahan Serangan	Denpasar Selatan	Denpasar
24	Kelurahan Sesetan	Denpasar Selatan	Denpasar
25	Desa Pemogan	Denpasar Selatan	Denpasar
26	Desa Kesiman	Denpasar Timur	Denpasar
27	Desa Kertalangu	Denpasar Timur	Denpasar
28	Desa Candi Kusuma	Kecamatan Melaya	Jembrana
29	Desa Melaya	Kecamatan Melaya	Jembrana
30	Desa Cupel	Kecamatan Negara	Jembrana
31	Desa Banyu Biru	Kecamatan Negara	Jembrana
32	Desa Pengambengan	Kecamatan Negara	Jembrana
33	Kelurahan Lelateng	Kecamatan Negara	Jembrana
34	Desa Baluk	Kecamatan Negara	Jembrana
35	Desa Perancak	Kecamatan Jembrana	Jembrana
36	Desa Air Kuning	Kecamatan Jembrana	Jembrana
37	Desa Yeh Kuning	Kecamatan Jembrana	Jembrana
38	Desa Delod Berawah	Kecamatan Mendoyo	Jembrana
39	Desa Medewi	Kecamatan Pekutatan	Jembrana
40	Desa Pulukan	Kecamatan Pekutatan	Jembrana
41	Desa Pengeragoan	Kecamatan Pekutatan	Jembrana
42	Desa Negari	Kecamatan Banjarangkan	Klungkung

No.	Desa	Kecamatan	Kabupaten / Kota
43	Desa Takmung	Kecamatan Banjarangkan	Klungkung
44	Desa Jumpai	Kecamatan Klungkung	Klungkung
45	Desa Gelgel	Kecamatan Klungkung	Klungkung
46	Desa Tojan	Kecamatan Klungkung	Klungkung
47	Desa Tangkas	Kecamatan Klungkung	Klungkung
48	Desa Satra	Kecamatan Klungkung	Klungkung
49	Desa Kusamba	Kecamatan Dawan	Klungkung
50	Desa Pesinggahan	Kecamatan Dawan	Klungkung
51	Desa Lembongan	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
52	Desa Jungutbatu	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
53	Desa Toya Pakeh	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
54	Desa Pedungan	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
55	Desa Kutampi Kaler	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
56	Desa Batununggul	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
57	Desa Suana	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
58	Desa Tulikup	Kecamatan Gianyar	Gianyar
59	Desa Lebih	Kecamatan Gianyar	Gianyar
60	Desa Keramas	Kecamatan Blahbatuh	Gianyar
61	Desa Medahan	Kecamatan Blahbatuh	Gianyar
62	Desa Pering	Kecamatan Blahbatuh	Gianyar
63	Desa Saba	Kecamatan Blahbatuh	Gianyar
64	Desa Sukawati	Kecamatan Sukawati	Gianyar
65	Desa Guwang	Kecamatan Sukawati	Gianyar
66	Desa Ketewel	Kecamatan Sukawati	Gianyar
67	Desa Batubulan	Kecamatan Sukawati	Gianyar
68	Desa Nyuh Tebel	Kecamatan Manggis	Karangasem
69	Desa Sengkidu	Kecamatan Manggis	Karangasem
70	Desa Manggis	Kecamatan Manggis	Karangasem
71	Desa Ulakan	Kecamatan Manggis	Karangasem
72	Desa Padang Bai	Kecamatan Manggis	Karangasem
73	Desa Antiga Kelod	Kecamatan Manggis	Karangasem
74	Desa Antiga	Kecamatan Manggis	Karangasem
75	Desa Bugbug	Kecamatan Karangasem	Karangasem
76	Desa Pertima	Kecamatan Karangasem	Karangasem
77	Kelurahan Subagan	Kecamatan Karangasem	Karangasem
78	Kelurahan Karangasem	Kecamatan Karangasem	Karangasem
79	Desa Tumbu	Kecamatan Karangasem	Karangasem
80	Desa Seraya Barat	Kecamatan Karangasem	Karangasem
81	Desa Seraya	Kecamatan Karangasem	Karangasem
82	Desa Bunutan	Kecamatan Abah	Karangasem
83	Desa Purwakerti	Kecamatan Abah	Karangasem
84	Desa Datah	Kecamatan Abah	Karangasem
85	Desa Labasan	Kecamatan Abah	Karangasem
86	Desa Tulamben	Kecamatan Kubu	Karangasem
87	Desa Kubu	Kecamatan Kubu	Karangasem
88	Desa Baturinggit	Kecamatan Kubu	Karangasem

No.	Desa	Kecamatan	Kabupaten / Kota
89	Desa Sukadana	Kecamatan Kubu	Karangasem
90	Desa Tianyar Tengah	Kecamatan Kubu	Karangasem
91	Desa Tianyar	Kecamatan Kubu	Karangasem
92	Desa Tianyar Barat	Kecamatan Kubu	Karangasem
93	Desa Tembok	Kecamatan Tejakula	Buleleng
94	Desa Les	Kecamatan Tejakula	Buleleng
95	Desa Penuktukan	Kecamatan Tejakula	Buleleng
96	Desa Sambirenteng	Kecamatan Tejakula	Buleleng
97	Desa Tejakula	Kecamatan Tejakula	Buleleng
98	Desa Bondalem	Kecamatan Tejakula	Buleleng
99	Desa Julah	Kecamatan Tejakula	Buleleng
100	Desa Pacung	Kecamatan Tejakula	Buleleng
101	Desa Bukti	Kubutambahan	Buleleng
102	Desa Kubutambahan	Kubutambahan	Buleleng
103	Desa Bungkulan	Kecamatan Sawan	Buleleng
104	Desa Giriemas	Kecamatan Sawan	Buleleng
105	Desa Sangsit	Kecamatan Sawan	Buleleng
106	Desa Kerobokan	Kecamatan Sawan	Buleleng
107	Kelurahan Banyuning	Kecamatan Buleleng	Buleleng
108	Kelurahan Penarukan	Kecamatan Buleleng	Buleleng
109	Kelurahan Kampung Baru	Kecamatan Buleleng	Buleleng
110	Kelurahan KampungKajanan	Kecamatan Buleleng	Buleleng
111	Kelurahan Kampung Anyar	Kecamatan Buleleng	Buleleng
112	Kelurahan Kaliuntu	Kecamatan Buleleng	Buleleng
113	Desa Baktiserage	Kecamatan Buleleng	Buleleng
114	Desa Pemaron	Kecamatan Buleleng	Buleleng
115	Desa Tukad Mungga	Kecamatan Buleleng	Buleleng
116	Desa Anturan	Kecamatan Buleleng	Buleleng
117	Desa Kalibukbuk	Kecamatan Buleleng	Buleleng
118	Desa Temukus	Kecamatan Banjar	Buleleng
119	Desa Banjar	Kecamatan Banjar	Buleleng
120	Desa Kaliasem	Kecamatan Banjar	Buleleng
121	Desa Dencarik	Kecamatan Banjar	Buleleng
122	Desa Pengastulan	Kecamatan Seririt	Buleleng
123	Desa Lokapaksa	Kecamatan Seririt	Buleleng
124	Desa Tangguwisia	Kecamatan Seririt	Buleleng
125	Desa Kalianget	Kecamatan Seririt	Buleleng
126	Desa Sulanyah	Kecamatan Seririt	Buleleng
127	Desa Umaanyar	Kecamatan Seririt	Buleleng
128	Desa Seririt	Kecamatan Seririt	Buleleng
129	Desa Kalisada	Kecamatan Seririt	Buleleng
130	Desa Antap	Kecamatan Selemadeg	Tabanan
131	Desa Berembeng	Kecamatan Selemadeg	Tabanan
132	Desa Tegal Mengkeb	Selemadeg Timur	Tabanan
133	Desa Beraban	Selemadeg Timur	Tabanan
134	Desa Lalanglinggah	Selemadeg Barat	Tabanan

No.	Desa	Kecamatan	Kabupaten / Kota
135	Desa Selabih	Selemadeg Barat	Tabanan
136	Desa Tibibiu	Kecamatan Kerambitan	Tabanan
137	Desa Kelating	Kecamatan Kerambitan	Tabanan
138	Desa Sudimara	Kecamatan Tabanan	Tabanan
139	Desa Pangkung Tibah	Kecamatan Kediri	Tabanan
140	Desa Belalang	Kecamatan Kediri	Tabanan
141	Desa Beraban	Kecamatan Kediri	Tabanan

Sumber: BPBD Provinsi Bali

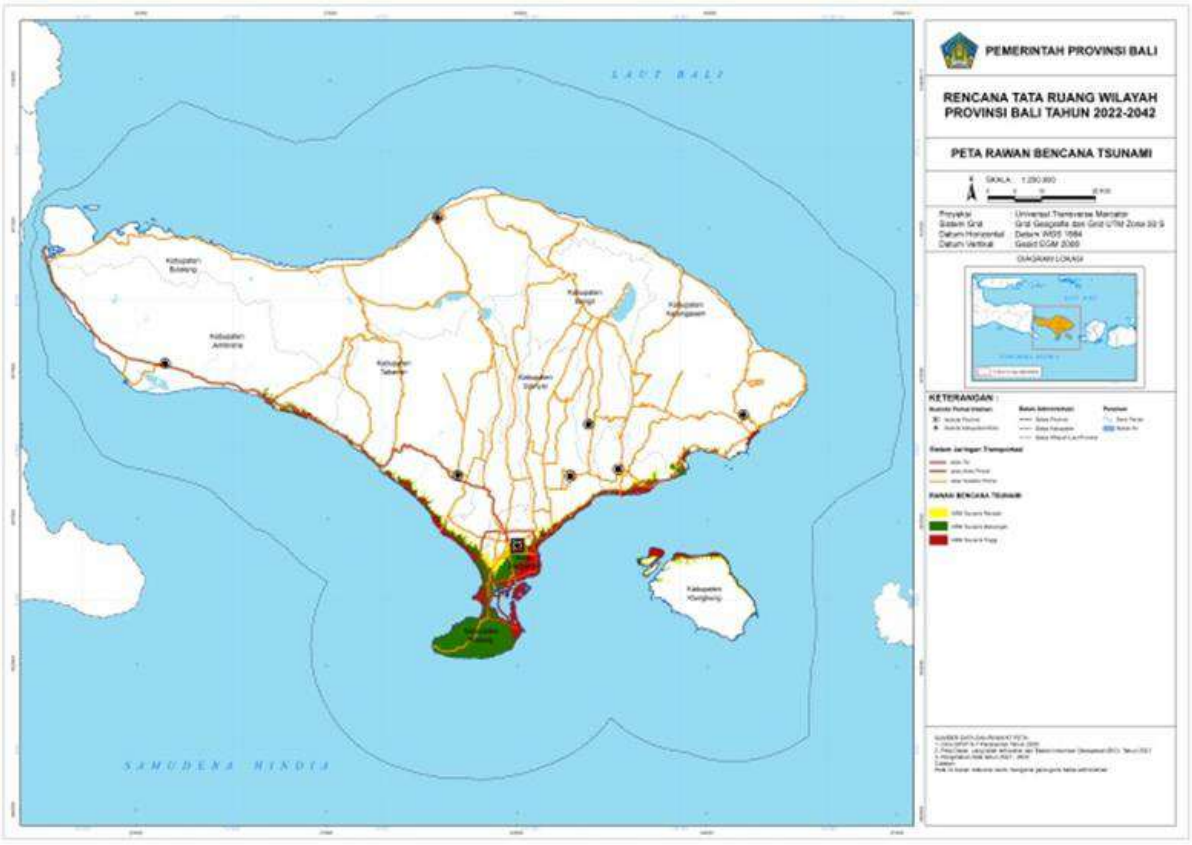

Gambar 1. 11
Peta Rawan Bencana Tsunami
Sumber: RTRW Provinsi Bali

f. Daerah Rawan Bencana Angin Kencang dan Gelombang Badai Pasang

Pada umumnya, terjadinya bencana angin kencang di beberapa tempat di Bali disamping disebabkan faktor dinamika atmosfer lokal juga disebabkan karena pengaruh cuaca ekstrim secara regional. Berdasarkan identifikasi potensi bencana alam di Provinsi Bali, secara geografis kerawanan paling tinggi terhadap ancaman bencana angin kencang adalah seluruh kawasan pesisir di selatan Bali yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, tempat terjadinya badai tropis. Secara spesifik, daerah pesisir yang memiliki tingkat kerawanan tinggi bencana angin kencang adalah Gilimanuk, kawasan pesisir

Kecamatan Negara, Tabanan, Canggu, Kerobokan, Nusa Dua, Denpasar, Gianyar, Klungkung, Nusa Penida dan pesisir selatan Kabupaten Karangasem.

g. Erupsi / Abrasi Pantai

Erosi adalah pengikisan dan pengangkutan material hasil pelapukan batuan oleh aktivitas tenaga angin, air, gelombang laut atau es. Sedangkan abrasi pantai adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak.

Berdasarkan data Balai Wilayah Sungai Bali Penida Tahun 2017, panjang pantai di Bali yang mengalami erosi/abrasi mencapai 111,652 km, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 1987. Hampir seluruh kawasan pantai di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali mengalami erosi/abrasi. Erosi pantai terpanjang terdapat di Kabupaten Buleleng mengingat kabupaten ini juga memiliki pantai terpanjang di Bali. Dari panjang pantai yang tererosi, sampai tahun 2013 telah ditangani dengan berbagai metode sepanjang 77,230 km atau 69,17%.

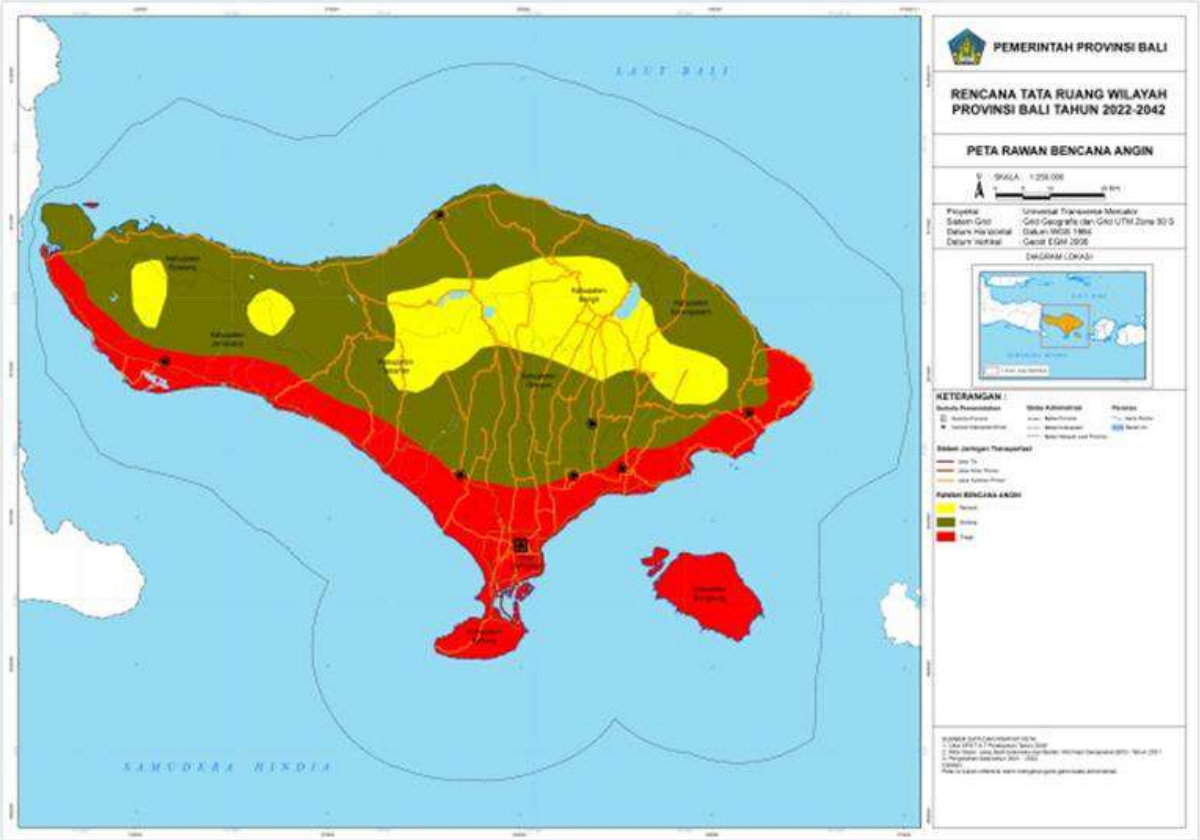

Gambar 1. 12
Peta Rawan Bencana Angin Kencang
Sumber: RTRW Provinsi Bali

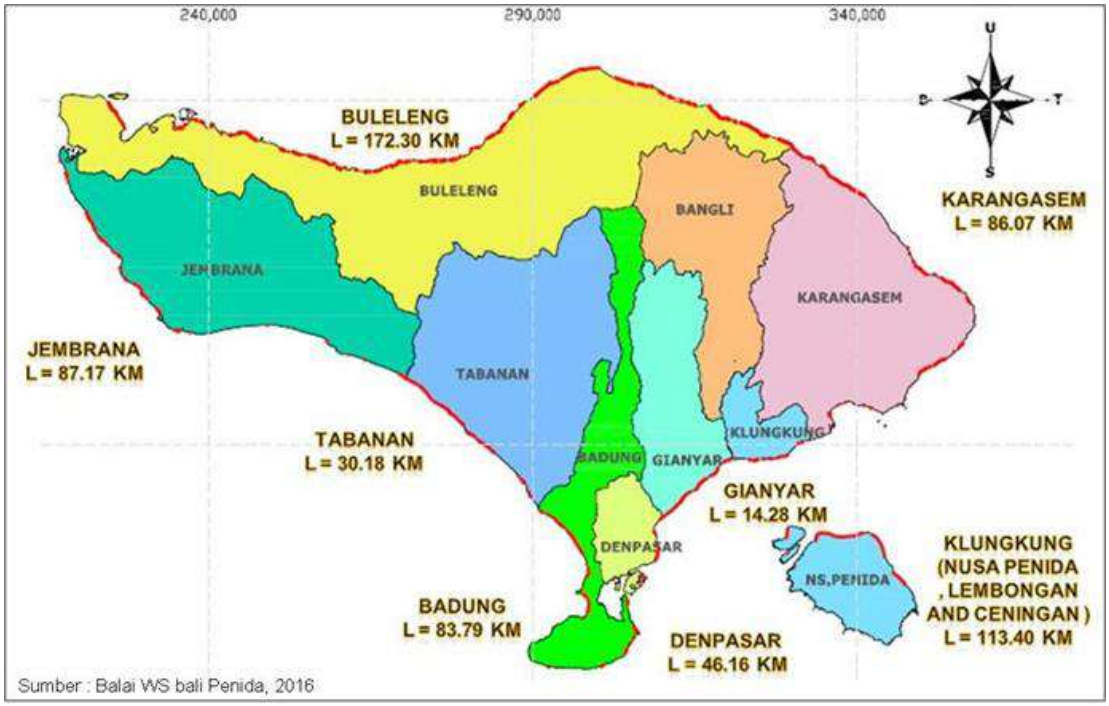

Gambar 1. 13

Peta Rawan Bencana Abrasi

Sumber: RTRW Provinsi Bali

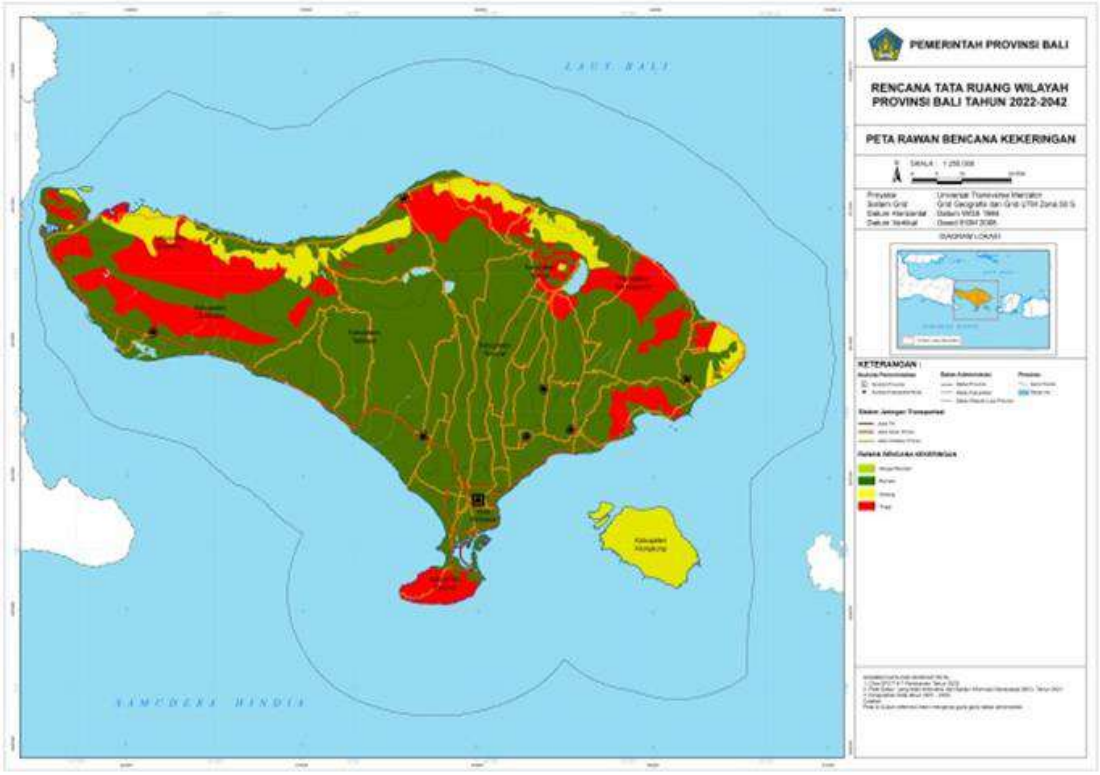

Gambar 1. 14

Peta Rawan Bencana Kekeringan

Sumber: RTRW Provinsi Bali

1.4. ANCAMAN PERUBAHAN IKLIM

Perubahan iklim dipicu oleh pemanasan global, yaitu peningkatan suhu rata-rata atmosfer, daratan, dan laut bumi. Pemanasan global terjadi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) seperti CO_2, CH_4, dan N_2O yang bersumber dari aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil serta perubahan penggunaan lahan seperti deforestasi dan urbanisasi.

Gas-gas tersebut menahan panas matahari di atmosfer, menimbulkan efek rumah kaca, sehingga suhu bumi terus meningkat. Dampaknya meliputi kenaikan suhu global, perubahan pola curah hujan, pencairan es dan gletser, naiknya permukaan air laut, serta meningkatnya suhu dan keasaman laut.

Menurut IPCC (2007), konsentrasi CO_2 meningkat dari 278 ppm (pra-industri) menjadi 379 ppm pada 2005, menyebabkan kenaikan suhu global sekitar 0,74°C. Pemanasan diperkirakan terus berlanjut dan dapat meningkat hingga 1,8-4°C pada tahun 2100, meskipun emisi berhasil dikurangi.

Di provinsi Bali, Perubahan iklim menunjukkan kecenderungan peningkatan risiko pada berbagai aspek lingkungan dan sosial-ekonomi. Intensifikasi kejadian iklim ekstrem telah berkontribusi pada meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi, termasuk banjir, tanah longsor, banjir rob, serta periode kekeringan yang lebih panjang. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat, yang ditunjukkan oleh peningkatan insiden penyakit sensitif-iklim seperti demam berdarah dengue (DBD) dan diare. Di sektor infrastruktur, cuaca ekstrem menyebabkan kerentanan struktural pada bangunan dan fasilitas umum, terutama akibat paparan angin kencang dan variabilitas curah hujan yang ekstrem.

Dampak perubahan iklim juga teridentifikasi pada sektor pertanian dan peternakan, di mana terjadi gagal panen serta penurunan produktivitas pada komoditas tanaman perkebunan, tanaman semusim, dan ternak, yang disebabkan oleh ketidakstabilan pola curah hujan serta peningkatan suhu rata-rata. Variabilitas iklim yang semakin tidak menentu, termasuk pergeseran temporal musim hujan dan kemarau, menimbulkan tantangan terhadap perencanaan kegiatan produksi pertanian dan tata kelola sumber daya air. Selain itu, perubahan iklim memberikan tekanan ekologi yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati, yang tercermin dari terganggunya stabilitas ekosistem darat, perairan tawar, dan laut, serta meningkatnya kerentanan spesies terhadap perubahan kondisi lingkungan. Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan perlunya strategi adaptasi dan mitigasi yang terintegrasi untuk meminimalkan risiko perubahan iklim di Provinsi Bali.

a. Kenaikan suhu daratan dan suhu air laut

Peningkatan suhu global menyebabkan pergeseran musim tanam yang mengganggu produksi pangan dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit tropis seperti malaria dan demam berdarah melalui perubahan distribusi vektor penyakit. Suhu yang lebih tinggi juga meningkatkan risiko kepunahan spesies hingga 30%

jika suhu naik 2°C, terutama pada ekosistem sensitif seperti terumbu karang, hutan boreal, kawasan Mediterania, dan daerah pegunungan.

Selain itu, kenaikan permukaan laut meningkatkan ancaman badai, banjir rob, dan kerusakan garis pantai, terutama pada negara pulau kecil dan wilayah delta rendah. Peristiwa cuaca ekstrem akan semakin sering dan berdampak besar pada kesehatan, lingkungan, dan ekonomi.

Terumbu karang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Peningkatan suhu permukaan laut (SPL) sebesar 1-2°C dalam waktu tertentu dapat menyebabkan pemutihan karang *(coral bleaching)* secara massal, akibat terganggunya hubungan simbiosis antara polip karang dan *alga zooxanthellae*. Jika kondisi stres berlangsung lama, karang mengalami penurunan pertumbuhan, reproduksi, dan bahkan kematian.

Pemutihan diperparah oleh radiasi UV berlebih dan telah terjadi lebih sering sejak 1980-an, terutama selama ENSO 1997/1998 yang menyebabkan kerusakan luas pada lebih dari 50 negara, dengan sekitar 30% karang mati di Samudera Hindia bagian barat. Para ilmuwan memprediksi bahwa pemutihan massal dapat menjadi kejadian tahunan di berbagai wilayah mulai tahun 2020-2040.

b. Kenaikan muka air laut

Kenaikan muka air laut akibat pemanasan global dapat menimbulkan kerusakan besar di wilayah pesisir, terutama daerah dataran rendah dekat pantai. Wilayah tersebut berisiko mengalami banjir, genangan, dan peningkatan erosi pantai akibat perubahan gelombang dan *overtopping*.

Perubahan tinggi muka air laut tidak hanya merusak bentang alam pantai, tetapi juga mengancam aset pariwisata, fasilitas sosial budaya (seperti pura di kawasan pesisir), infrastruktur penting (jalan, jembatan, pelabuhan), permukiman penduduk, serta aset ekonomi lainnya di sekitar pantai.

Selain itu, ekosistem pesisir yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi tinggi seperti terumbu karang dan rumput laut juga berpotensi mengalami kerusakan. Kenaikan muka air laut dapat menyebabkan intrusi air asin, yang mencemari air tanah dan menimbulkan masalah ketersediaan air bersih bagi masyarakat pesisir.

c. Perubahan pola angin

Perubahan pola angin akibat pemanasan global berdampak besar bagi kawasan pesisir dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya intensitas angin kencang serta gelombang badai, yang memicu terjadinya gelombang tinggi dan pasang besar. Walaupun Pulau Bali tidak berada pada jalur badai tropis, efek badai tropis di Samudera Hindia tetap dapat memengaruhi kondisi cuaca di Bali, terutama pada periode Desember–Maret.

Pemanasan global diperkirakan meningkatkan jenis, frekuensi, dan intensitas peristiwa ekstrem seperti siklon tropis, banjir, kekeringan, dan hujan lebat. Perubahan pola angin menyebabkan gelombang besar dan perubahan pasang surut, yang menimbulkan dampak fisik seperti kerusakan sistem pengaman pantai, abrasi pantai, rusaknya pangkalan perahu, dan hancurnya kapal nelayan. Bahkan ekosistem terumbu karang juga dapat mengalami kerusakan akibat hantaman gelombang besar.

Secara nonfisik, kondisi ini berdampak pada perekonomian masyarakat pesisir, karena nelayan tidak dapat melaut saat angin kencang dan gelombang tinggi, sehingga kehilangan pendapatan. Selain itu, perubahan pola angin yang tidak dapat diprediksi meningkatkan risiko kecelakaan laut, bahkan menyebabkan korban hilang.

d. Perubahan presipitasi

Perubahan iklim yang dipicu pemanasan global berdampak besar terhadap presipitasi, termasuk pola curah hujan dan sistem hidrologi. Menurut Rizaldi Boer (2008), wilayah Jawa dan Bali akan mengalami pergeseran musim hujan menjadi lebih lambat, dengan curah hujan yang lebih tinggi pada puncaknya, namun berhentinya musim hujan lebih cepat. Akibatnya, musim hujan menjadi semakin singkat, sedangkan musim kemarau semakin panjang.

Tanah akan menerima air lebih banyak dalam waktu singkat, tetapi cepat mengering karena suhu meningkat, sehingga risiko kekeringan semakin besar. Kondisi ini berdampak pada kerusakan tanaman, kegagalan panen, meningkatnya serangan hama dan penyakit, serta sulitnya petani menentukan waktu tanam karena musim tidak lagi dapat diprediksi.

Masalah lain yang sangat penting adalah kelangkaan air bersih akibat musim kemarau yang lebih panjang. Risiko erosi tanah juga meningkat, terutama di Bali yang memiliki banyak area dengan kemiringan lahan >15%. Erosi membawa lapisan humus subur dan menyebabkan kesuburan tanah menurun.

Erosi yang terbawa ke laut meningkatkan kekeruhan dan sedimentasi, sehingga merusak terumbu karang, padang lamun, dan habitat biota laut lainnya. Kerusakan ekosistem laut ini berdampak pada penurunan stok ikan dan kemerosotan wisata bahari.

1.5. PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan lahan yang berkelanjutan semakin penting di era modern karena meningkatnya kebutuhan lahan akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur. Prinsip ini memastikan bahwa sumber daya lahan yang terbatas digunakan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa merusak kelestarian lingkungan.

Secara umum, penggunaan lahan dibedakan menjadi lahan pertanian dan lahan non-pertanian. Lahan pertanian meliputi sawah dan lahan kering, sedangkan lahan non-pertanian mencakup hutan, badan air, dan permukiman.

Berdasarkan data tutupan lahan di Provinsi Bali, luas lahan pertanian meningkat dari 366.903,84 ha (65,60%) pada tahun 2018 menjadi 389.936,37 ha (69,73%) pada tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama terjadi pada pertanian lahan kering campuran, hutan tanaman, dan perkebunan, sementara sawah, pertanian lahan kering, dan tambak justru mengalami penurunan.

Di masa depan, tantangan utama dalam penggunaan lahan adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan lahan pertanian untuk produksi pangan, lahan permukiman, dan lahan untuk pelestarian keanekaragaman hayati. Pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi membuat kebutuhan lahan untuk permukiman dan bisnis terus meningkat, sehingga lahan pertanian dan habitat alami semakin terdesak.

Dalam kondisi kompetisi penggunaan lahan, lahan pertanian sering dikalahkan oleh pembangunan non-pertanian, terutama permukiman dan kegiatan bisnis. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi lahan sawah, konversi lahan sulit dibendung selama jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Karena itu, diperlukan peningkatan efisiensi lahan pertanian dan penguatan kelembagaan perlindungan lahan untuk menjaga ketahanan pangan.

Efisiensi penggunaan lahan merupakan kunci produktivititas berkelanjutan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta ketersediaan pangan. Efisiensi dapat dilihat dari produktivitas per hektar lahan pertanian.

Di Provinsi Bali, produktivitas padi pada lahan sawah masih rendah, yaitu hanya sekitar 5,85-6,21 ton per hektar dalam periode 2019-2023, meskipun terdapat kecenderungan peningkatan, namun peningkatannya masih terbatas.

1.6. ALIH FUNGSI LAHAN

Alih fungsi lahan memiliki hubungan langsung dengan keberadaan dan keberlanjutan lahan pertanian. Ketika lahan pertanian dikonversi menjadi permukiman, kawasan bisnis, atau infrastruktur, luas lahan yang tersedia untuk produksi pangan berkurang. Hal ini sejalan dengan tantangan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa lahan pertanian semakin terdesak oleh kebutuhan lahan non-pertanian akibat pertumbuhan penduduk dan ekonomi.

Dalam kondisi kompetisi penggunaan lahan, pertanian sering kalah karena nilai ekonomi jangka pendek dari lahan untuk perumahan atau bisnis lebih tinggi. Akibatnya, meskipun ada kebijakan perlindungan lahan, konversi tetap sulit dihentikan.

Meskipun data menunjukkan peningkatan total lahan pertanian di Bali tahun 2019-2024, tetapi sawah mengalami penurunan. Ini berarti sebagian lahan produktif padi

telah dikonversi menjadi perumahan atau kegiatan non-pertanian suatu bukti nyata dampak alih fungsi lahan.

Tabel 1. 6
Perkembangan Perubahan Luas Lahan Baku Sawah/LBS & Pengurangan LBS
Provinsi Bali Tahun 2019-2024

Kabupaten/ Kota	Perkembangan Luas Lahan Baku Sawah/LBS (Ha)						Pengurangan Lahan Baku Sawah (Ha atau %)			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024	Ha per Tahun	% setiap 5 Tahun	% tiap Tahun
Jembrana	7.139,68	7.047,81	6.999,96	6.568,14	6.538,00	6.691,00	448,68	89,74	6,28%	1,26%
Tabanan	19.611,38	19.614,52	19.357,55	17.830,17	17.835,86	18.897,00	714,38	142,88	3,64%	0,73%
Badung	9.072,48	8.770,49	8.597,40	6.799,26	6.741,40	8.301,00	771,48	154,30	8,50%	1,70%
Gianyar	11.780,80	10.677,78	10.514,39	9.232,65	7.067,62	10.035,00	1.745,80	349,16	14,82%	2,96%
Klungkung	3.572,22	3.483,29	3.411,70	3.158,73	3.149,42	3.251,00	321,22	64,24	8,99%	1,80%
Bangli	2.210,45	2.187,39	2.186,50	1.966,01	1.961,56	1.967,00	243,45	48,69	11,01%	2,20%
Karangasem	6.584,14	6.452,39	6.427,66	5.847,90	5.839,56	5.976,00	608,14	121,63	9,24%	1,85%
Buleleng	8.860,66	8.587,25	8.566,79	6.929,46	6.902,83	8.015,00	845,66	169,13	9,54%	1,91%
Denpasar	2.164,00	1.627,82	1.604,67	1.129,26	1.085,16	1.341,00	823,00	164,60	38,03%	7,61%
Provinsi Bali	70.995,81	68.448,74	67.666,62	59.461,58	57.121,45	64.474,00	6.521,81	1.304,36	9,19%	1,84%

Sumber: Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Provinsi Bali, 2025

Selama periode 2019-2024, Bali mengalami penyusutan lahan sawah yang cukup signifikan. Dalam lima tahun tersebut, total lahan baku sawah berkurang lebih dari 6.500 ha atau rata-rata sekitar 1.300 ha hilang setiap tahun. Penurunan ini menunjukkan tekanan yang kuat terhadap ruang pertanian Bali, terutama di wilayah yang berkembang pesat secara ekonomi dan pariwisata.

Jika ditelusuri lebih dalam, beberapa kabupaten/kota mengalami penurunan lahan sawah yang jauh lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Gianyar menjadi wilayah dengan penyusutan paling besar, yaitu hampir 1.800 hektare. Hal ini erat kaitannya dengan pesatnya pertumbuhan *vila, resort*, dan fasilitas wisata di kawasan Ubud dan sekitarnya. Badung dan Denpasar juga mengalami penurunan yang sangat tinggi. Di Denpasar, lahan sawah menyusut hingga 38 persen hanya dalam lima tahun, menunjukkan bahwa sawah di pusat kota semakin terdesak oleh perkembangan permukiman, jalan, kantor, dan aktivitas perkotaan lainnya.

Wilayah seperti Buleleng, Klungkung, Karangasem, dan Bangli juga mengalami penyusutan, meskipun dalam skala yang berbeda. Meski bukan pusat pariwisata utama, lahan sawah di beberapa wilayah tersebut beralih menjadi tegalan, permukiman, atau lahan non-pertanian lainnya akibat perubahan ekonomi masyarakat dan menurunnya jumlah petani aktif. Sementara itu, kabupaten seperti Jembrana menunjukkan penurunan yang relatif lebih kecil dibanding wilayah selatan dan pusat Bali, karena tekanan pembangunan di sana tidak sekuat daerah yang menjadi magnet kegiatan pariwisata.

Penyusutan lahan sawah di Bali secara keseluruhan memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan. Hilangnya sawah tidak hanya mengurangi kemampuan Bali untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, tetapi juga mengancam keberlanjutan sistem subak yang menjadi warisan budaya dunia. Sawah yang menyusut juga berpotensi melemahkan fungsi ekologis penting, seperti penyerapan air, pengendalian banjir, dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Secara umum, gambaran lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa lahan pertanian Bali semakin terdesak oleh pembangunan, terutama pada daerah yang mengalami pertumbuhan pesat di sektor pariwisata dan permukiman. Jika tidak dikendalikan, tren ini dapat berdampak jangka panjang terhadap ketahanan pangan, budaya, dan kualitas lingkungan

BAB 2

PROFIL DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025



BAB 2
KONDISI DEMOGRAFI PENDUDUK

2.1. JUMLAH, DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Provinsi Bali pada tahun 2025 memiliki jumlah penduduk sebanyak 4,46 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,69 persen per tahun. Sebaran penduduk antar kabupaten/kota menunjukkan adanya konsentrasi penduduk pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perkotaan. Kabupaten Buleleng merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu sebanyak 820,5 ribu jiwa atau 18,39 persen dari total penduduk Bali, diikuti oleh Kota Denpasar sebanyak 762,5 ribu jiwa (17,09 persen), Kabupaten Badung sebanyak 573,7 ribu jiwa (12,86 persen), dan Kabupaten Gianyar sebanyak 530,1 ribu jiwa (11,88 persen). Sebaliknya, Kabupaten Klungkung memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 209,9 ribu jiwa atau hanya 4,70 persen dari total penduduk Bali.

Dari sisi dinamika pertumbuhan, Kota Denpasar mencatat laju pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 1,06 persen per tahun, disusul Kabupaten Badung sebesar 0,96 persen dan Kabupaten Buleleng sebesar 0,75 persen. Kondisi ini mencerminkan masih kuatnya daya tarik kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan migrasi maupun lokasi konsentrasi aktivitas penduduk. Di sisi lain, beberapa kabupaten seperti Klungkung (0,30 persen), Tabanan (0,34 persen), dan Bangli (0,36 persen) mengalami pertumbuhan penduduk yang relatif lebih rendah, mengindikasikan pertumbuhan yang lebih stabil serta mobilitas penduduk yang tidak setinggi wilayah perkotaan.

Secara umum, struktur demografi Bali tahun 2025 menunjukkan bahwa persebaran penduduk belum merata, dengan konsentrasi yang cukup besar pada kawasan metropolitan Sarbagita dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam penyediaan infrastruktur, pelayanan dasar, lapangan kerja, perumahan, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru guna mewujudkan persebaran penduduk dan pembangunan yang lebih seimbang antarwilayah.

Tabel 2. 1
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk
1	Jembrana	327,7	0,70	7,35
2	Tabanan	469,1	0,34	10,52
3	Badung	573,7	0,96	12,86
4	Gianyar	530,1	0,60	11,88
5	Klungkung	209,9	0,30	4,70
6	Bangli	263,2	0,36	5,90
7	Karang Asem	504,6	0,52	11,31
8	Buleleng	820,5	0,75	18,39
9	Kota Denpasar	762,5	1,06	17,09
10	Bali	4.461,3	0,69	100

Sumber: BPS Provinsi Tahun 2026

2.2. KEPADATAN PENDUDUK

Pada tahun 2025, kepadatan penduduk Provinsi Bali mencapai 799 jiwa per kilometer persegi, yang menunjukkan tingginya intensitas pemanfaatan ruang sebagai konsekuensi dari luas wilayah Bali yang relatif terbatas dibandingkan jumlah penduduknya. Namun demikian, tingkat kepadatan penduduk antar kabupaten/kota masih menunjukkan disparitas yang cukup besar, mencerminkan perbedaan karakteristik wilayah, tingkat urbanisasi, serta konsentrasi aktivitas ekonomi dan pemerintahan.

Kota Denpasar merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu mencapai 6.066 jiwa per km², jauh melampaui rata-rata Provinsi Bali. Tingginya kepadatan tersebut mencerminkan fungsi Denpasar sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan permukiman. Kepadatan penduduk yang relatif tinggi juga terdapat di Kabupaten Gianyar (1.457 jiwa/km²) dan Kabupaten Badung (1.444 jiwa/km²). Kedua wilayah ini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa, sehingga memiliki daya tarik yang tinggi bagi penduduk maupun kegiatan investasi.

Di sisi lain, Kabupaten Jembrana memiliki kepadatan penduduk terendah, yaitu 387 jiwa per km², diikuti oleh Kabupaten Bangli (500 jiwa/km²) dan Kabupaten Tabanan (553 jiwa/km²). Kepadatan yang lebih rendah pada wilayah tersebut dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang didominasi kawasan pertanian, perkebunan, hutan, maupun kawasan konservasi, serta tingkat urbanisasi yang relatif lebih rendah dibandingkan kawasan perkotaan dan wilayah Bali Selatan.

Secara umum, pola kepadatan penduduk di Bali memperlihatkan adanya konsentrasi penduduk pada wilayah perkotaan dan kawasan strategis ekonomi, khususnya di Bali Selatan, sementara wilayah bagian barat, timur, dan pegunungan memiliki kepadatan yang relatif lebih rendah. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah, terutama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru untuk mengurangi tekanan terhadap kawasan dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi.

Tabel 2. 2
Kepdatan Penduduk Provinsi Bali Masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)
1	Jembrana	387
2	Tabanan	553
3	Badung	1.444
4	Gianyar	1.457
5	Klungkung	672
6	Bangli	500
7	Karang Asem	602
8	Buleleng	621
9	Kota Denpasar	6.066
10	Bali	799

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2026

2.3. *SEX RATIO* PENDUDUK

Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 100,4, yang berarti pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 100 hingga 101 penduduk laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Bali secara umum berada dalam keadaan relatif seimbang, sehingga menjadi modal demografis yang mendukung penyediaan tenaga kerja maupun pembangunan sosial yang inklusif.

Pada tingkat kabupaten/kota, variasi rasio jenis kelamin relatif kecil. Kota Denpasar memiliki rasio jenis kelamin tertinggi, yaitu 102,1, yang mengindikasikan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Kondisi serupa juga terlihat di Kabupaten Bangli (101,1), Kabupaten Klungkung (100,7), Kabupaten Buleleng (100,7), Kabupaten Badung (100,5), dan Kabupaten Jembrana (100,3). Rasio di atas angka 100 pada wilayah-wilayah tersebut dapat dipengaruhi oleh tingginya mobilitas penduduk usia produktif, terutama laki-laki, yang bekerja pada sektor-sektor ekonomi seperti pariwisata, konstruksi, perdagangan, industri, maupun pertanian.

Sebaliknya, beberapa kabupaten memiliki rasio jenis kelamin di bawah 100, yaitu Kabupaten Gianyar (98,7), Kabupaten Tabanan (98,8), dan Kabupaten Karangasem (99,8). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki. Meskipun demikian, selisih tersebut relatif kecil sehingga tidak menunjukkan ketimpangan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin yang signifikan.

Secara keseluruhan, rasio jenis kelamin di seluruh kabupaten/kota Provinsi Bali berada pada kisaran 98,7 hingga 102,1, sehingga mencerminkan distribusi penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang. Kondisi ini memberikan implikasi positif bagi perencanaan

pembangunan, karena kebutuhan pelayanan publik, penyediaan kesempatan kerja, pengembangan sumber daya manusia, serta kebijakan yang responsif gender dapat dirancang dengan mempertimbangkan struktur penduduk yang relatif proporsional di seluruh wilayah Provinsi Bali.

Tabel 2. 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan *Sex Ratio* Masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Jembrana	100,3
2	Tabanan	98,8
3	Badung	100,5
4	Gianyar	98,7
5	Klungkung	100,7
6	Bangli	101,1
7	Karang Asem	99,8
8	Buleleng	100,7
9	Kota Denpasar	102,1
10	Bali	100,4

Sumber: Provinsi Bali Dalam Angka Tahun 2026

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2025, jumlah penduduk Provinsi Bali mencapai 4,46 juta jiwa, yang terdiri atas 2,23 juta penduduk laki-laki dan 2,23 juta penduduk perempuan. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi penduduk menurut jenis kelamin di Provinsi Bali relatif seimbang, dengan jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Keseimbangan struktur penduduk ini menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, penyediaan tenaga kerja, serta perencanaan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan seluruh penduduk.

Dilihat menurut kabupaten/kota, Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan terbesar, masing-masing mencapai 411,58 ribu jiwa dan 408,90 ribu jiwa, sehingga total penduduknya mencapai 820,48 ribu jiwa. Selanjutnya diikuti oleh Kota Denpasar dengan 385,15 ribu penduduk laki-laki dan 377,33 ribu penduduk perempuan, serta Kabupaten Badung yang memiliki 287,60 ribu penduduk laki-laki dan 286,10 ribu penduduk perempuan. Besarnya jumlah penduduk pada wilayah-wilayah tersebut sejalan dengan perannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pemerintahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata di Provinsi Bali.

Sementara itu, Kabupaten Klungkung memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 105,28 ribu laki-laki dan 104,59 ribu perempuan, dengan total 209,87 ribu jiwa. Jumlah penduduk yang relatif lebih rendah juga terdapat di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana, yang dipengaruhi oleh luas wilayah efektif permukiman, karakteristik geografis, serta tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan dan kawasan pariwisata utama.

Apabila ditinjau dari komposisi jenis kelamin, terdapat beberapa kabupaten/kota dengan

jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan, yaitu Jembrana, Badung, Klungkung, Bangli, Buleleng, dan Kota Denpasar. Sebaliknya, Tabanan, Gianyar, dan Karangasem memiliki jumlah penduduk perempuan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Meskipun demikian, perbedaan jumlah tersebut relatif kecil sehingga tidak menunjukkan ketimpangan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin yang berarti.

Secara umum, struktur penduduk menurut jenis kelamin di Provinsi Bali tahun 2025 menunjukkan distribusi yang cukup seimbang di seluruh kabupaten/kota. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa potensi sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tersebar secara relatif merata sehingga menjadi landasan yang baik dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, serta pengarusutamaan gender.



Gambar 2. 1
Grafik Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Pada Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2025 (ribu jiwa)

Sumber: Hasil Olah Data BPS provinsi Bali, 2026

Tabel 2. 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025 (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Jembrana	164,09	163,62	327,71
Tabanan	233,09	236,04	469,13
Badung	287,6	286,1	573,7
Gianyar	263,36	266,75	530,12
Klungkung	105,28	104,59	209,87
Bangli	132,33	130,84	263,17
Karang Asem	252,07	252,53	504,61
Buleleng	411,58	408,9	820,48
Kota Denpasar	385,15	377,33	762,48
Bali	2.234,56	2.226,71	4.461,27

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2026

2.4. JUMLAH PENDUDUK MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN

Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk Provinsi Bali usia 15 tahun ke atas yang bekerja mencapai 2.701.726 orang, terdiri atas 1.459.076 laki-laki (54,01 persen) dan 1.242.650 perempuan (45,99 persen). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi tenaga kerja laki-laki masih lebih besar dibandingkan perempuan, meskipun pada beberapa sektor tertentu perempuan justru mendominasi. Struktur ketenagakerjaan ini mencerminkan karakteristik perekonomian Bali yang didukung oleh sektor perdagangan, pariwisata, industri pengolahan, serta pertanian.

Ditinjau berdasarkan lapangan usaha, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan penyerap tenaga kerja terbesar dengan 561.652 orang atau sekitar 20,8 persen dari total penduduk bekerja. Sektor ini diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menyerap 464.171 orang (17,2 persen), Industri Pengolahan sebanyak 403.820 orang (15,0 persen), serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebanyak 391.990 orang (14,5 persen). Keempat sektor tersebut secara kumulatif menyerap lebih dari dua pertiga tenaga kerja di Bali, sehingga menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Dominasi sektor perdagangan dan akomodasi juga menunjukkan besarnya pengaruh sektor pariwisata terhadap struktur ketenagakerjaan di Provinsi Bali.

Sementara itu, sektor-sektor dengan jumlah tenaga kerja relatif kecil meliputi Pengadaan Listrik dan Gas (3.232 orang), Pertambangan dan Penggalian (4.357 orang), Real Estat (5.877 orang), serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (7.986 orang). Rendahnya penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Bali masih lebih bertumpu pada sektor jasa dan sektor-sektor padat karya dibandingkan sektor utilitas maupun ekstraktif.

Dari perspektif jenis kelamin, terdapat perbedaan pola penyerapan tenaga kerja antar sektor. Laki-laki mendominasi sektor yang membutuhkan aktivitas fisik maupun teknis, seperti Konstruksi (177.152 laki-laki dibandingkan 28.980 perempuan), Transportasi dan

Pergudangan (110.284 berbanding 10.532), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sebaliknya, perempuan lebih banyak bekerja pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran (311.936 perempuan), Industri Pengolahan (252.379 perempuan), Jasa Pendidikan (66.087 perempuan), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (34.697 perempuan), serta Jasa Lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan spesialisasi tenaga kerja berdasarkan karakteristik masing-masing sektor, meskipun partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi formal semakin meningkat.

Secara umum, struktur ketenagakerjaan Provinsi Bali tahun 2025 menggambarkan perekonomian yang didominasi oleh sektor tersier (jasa), khususnya perdagangan, akomodasi, dan berbagai jasa lainnya, dengan dukungan sektor sekunder berupa industri pengolahan serta sektor primer berupa pertanian. Komposisi tersebut mencerminkan karakter Bali sebagai daerah yang bertumpu pada aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif, namun tetap mempertahankan peran strategis sektor pertanian sebagai penyedia lapangan kerja dan penopang ketahanan pangan. Ke depan, pengembangan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta diversifikasi kesempatan kerja menjadi aspek penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2. 5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Bali Tahun 2025

No.	Lapangan Usaha (17 Kategori/Sektor)	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (17 Kategori) dan Jenis Kelamin di Provinsi Bali (Orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	265.266	198.905	464.171
2	Pertambangan dan Penggalian	3.425	932	4.357
3	Industri Pengolahan	151.441	252.379	403.820
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.115	117	3.232
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.332	654	7.986
6	Konstruksi	177.152	28.980	206.132
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	249.716	311.936	561.652
8	Transportasi dan Pergudangan	110.284	10.532	120.816
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	209.665	182.325	391.990
10	Informasi dan Komunikasi	10.175	3.303	134.78

No.	Lapangan Usaha (17 Kategori/Sektor)	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (17 Kategori) dan Jenis Kelamin di Provinsi Bali (Orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	34.952	33.035	67.987
12	Real Estat	2.678	3.199	5.877
13	Jasa Perusahaan	29.886	11.442	41.328
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	74.187	33.846	108.033
15	Jasa Pendidikan	50.615	66.087	116.702
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18.582	34.697	53.279
17	Jasa lainnya	60.605	70.281	130.886
	Jumlah	1.459.076	1.242.650	2.701.726

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2026

2.5. KELOMPOK UMUR

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2025, jumlah penduduk Provinsi Bali mencapai 4,46 juta jiwa, terdiri atas 2,23 juta penduduk laki-laki dan 2,23 juta penduduk perempuan. Struktur penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa Bali masih didominasi oleh penduduk usia produktif, sehingga memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah melalui bonus demografi.

Kelompok umur dengan jumlah penduduk terbesar berada pada rentang 20–24 tahun sebanyak 331,8 ribu jiwa, diikuti kelompok umur 25–29 tahun sebanyak 332,1 ribu jiwa, 30–34 tahun sebanyak 330,1 ribu jiwa, serta 15–19 tahun sebanyak 326,1 ribu jiwa. Besarnya jumlah penduduk pada kelompok usia produktif tersebut menunjukkan bahwa Bali memiliki ketersediaan tenaga kerja yang cukup besar untuk mendukung berbagai sektor ekonomi, khususnya sektor pariwisata, perdagangan, industri pengolahan, jasa, dan ekonomi kreatif yang menjadi penggerak utama perekonomian daerah.

Di sisi lain, jumlah penduduk usia anak (0–14 tahun) mencapai sekitar 919 ribu jiwa atau sekitar 20,6 persen dari total penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan ibu dan anak, gizi, serta perlindungan anak masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan daerah. Investasi pada kelompok usia ini akan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia Bali pada masa mendatang.

Penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) berjumlah sekitar 670 ribu jiwa, atau sekitar 15 persen dari total penduduk. Meningkatnya proporsi penduduk lansia menunjukkan bahwa Bali mulai memasuki proses penuaan penduduk (*population aging*), yang

ditandai dengan semakin besarnya jumlah penduduk pada kelompok usia lanjut. Kondisi ini akan meningkatkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan, jaminan sosial, fasilitas ramah lansia, serta pengembangan sistem perlindungan sosial yang mampu menjamin kualitas hidup penduduk usia lanjut.

Apabila ditinjau berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak pada hampir seluruh kelompok umur muda hingga usia produktif, terutama pada kelompok umur 15–39 tahun. Sebaliknya, mulai kelompok umur 40–44 tahun hingga kelompok usia lanjut, jumlah penduduk perempuan cenderung lebih banyak dibandingkan laki-laki. Perbedaan tersebut semakin terlihat pada kelompok umur 75 tahun ke atas, dimana jumlah perempuan mencapai 78,9 ribu jiwa, sedangkan laki-laki hanya 60,4 ribu jiwa. Pola ini sejalan dengan kecenderungan bahwa perempuan memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Secara keseluruhan, struktur umur penduduk Provinsi Bali tahun 2025 menunjukkan bahwa daerah ini masih berada pada fase yang menguntungkan dalam transisi demografi, yaitu ditandai oleh dominannya penduduk usia produktif. Kondisi tersebut merupakan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, mulai meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia juga menjadi sinyal perlunya perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap proses penuaan penduduk, sehingga kebijakan pembangunan tidak hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja bagi usia produktif, tetapi juga pada penguatan sistem kesehatan, perlindungan sosial, dan pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh kelompok umur.

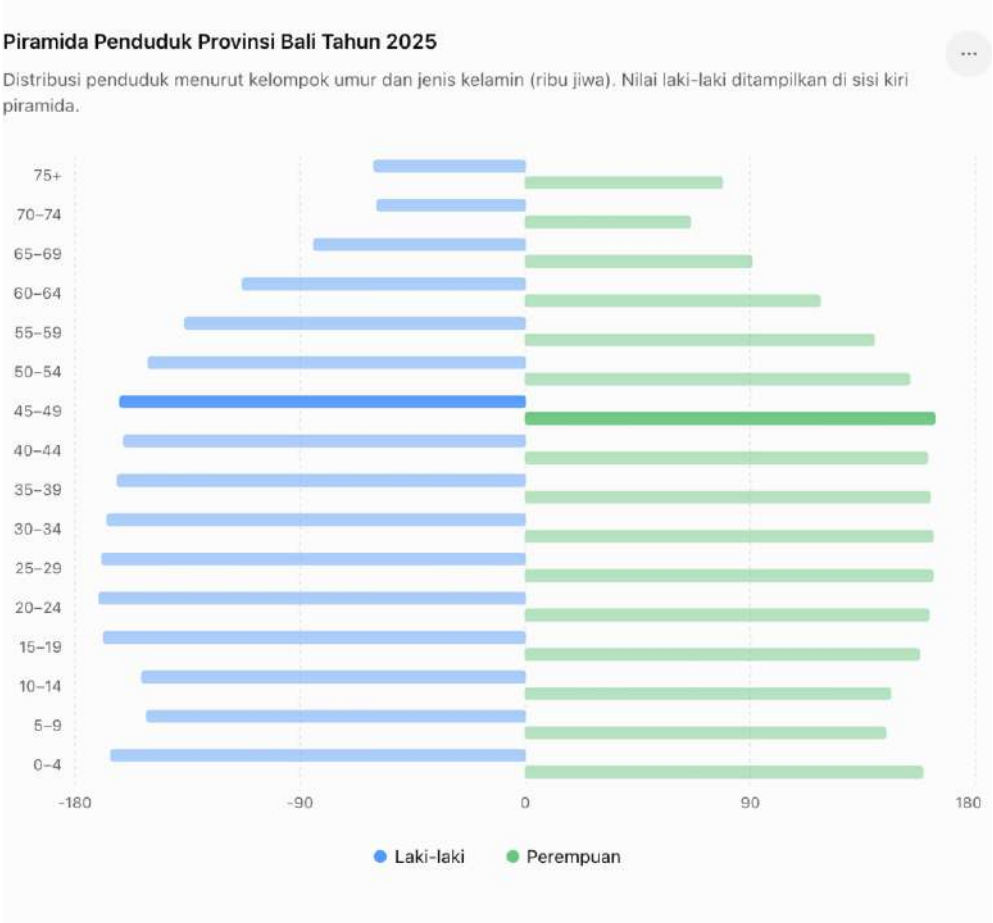

Gambar 2. 2
Grafik Penduduk Menurut Usia di Provinsi Bali 2025

Sumber: Hasil Olah Data BPS Provinsi Bali, 2026

Tabel 2. 6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Provinsi Bali Tahun 2025

Kelompok Umur	Laki-Laki (Ribu Jiwa)	Perempuan (Ribu Jiwa)	Total (Ribu Jiwa)
0-4	165,6	159	324,6
5-9	151,2	144,1	295,3
10-14	153,2	146	299,1
15-19	168,5	157,6	326,1
20-24	170,4	161,4	331,8
25-29	169,2	163	332,1
30-34	167,1	163	330,1
35-39	163,1	161,9	325
40-44	160,4	160,8	321,2
45-49	161,9	163,8	325,8
50-54	150,7	153,6	304,3
55-59	136	139,4	275,4
60-64	113	117,8	230,8

Kelompok Umur	Laki-Laki (Ribu Jiwa)	Perempuan (Ribu Jiwa)	Total (Ribu Jiwa)
65-69	84,6	90,6	175,2
70-74	59,1	66	125,1
75+	60,4	78,9	139,3
Jumlah/Total	2.234,6	2.226,7	4.461,3

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2026

2.6. ANGKA KETERGANTUNGAN PENDUDUK

Berdasarkan struktur umur penduduk tahun 2025, Provinsi Bali memiliki rasio ketergantungan sebesar 43,8. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) menanggung sekitar 44 penduduk usia nonproduktif, yang terdiri atas penduduk usia anak (0–14 tahun) dan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas). Rasio ketergantungan yang masih berada di bawah 50 menunjukkan bahwa beban tanggungan penduduk usia produktif relatif rendah, sehingga Bali masih berada pada kondisi yang mendukung pemanfaatan bonus demografi.

Apabila dirinci menurut kelompok umur, rasio ketergantungan muda mencapai 29,6, sedangkan rasio ketergantungan tua sebesar 14,2. Hal ini menunjukkan bahwa beban ketergantungan masih didominasi oleh penduduk usia anak, meskipun proporsi penduduk lanjut usia mulai mengalami peningkatan. Dengan demikian, selain tetap memperkuat investasi pada pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia usia muda, pemerintah daerah juga perlu mulai mengantisipasi meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, dan fasilitas yang ramah bagi penduduk lanjut usia.

Secara umum, rasio ketergantungan sebesar 43,8 mencerminkan bahwa Provinsi Bali masih berada pada fase yang menguntungkan dalam transisi demografi. Dominasi penduduk usia produktif memberikan peluang untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, investasi, dan pertumbuhan daerah. Namun demikian, peluang bonus demografi tersebut hanya akan memberikan manfaat optimal apabila didukung oleh penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta kebijakan pembangunan yang mampu mempersiapkan Bali menghadapi proses penuaan penduduk (*population ageing*) pada masa mendatang.



Gambar 2. 3
Grafik Perbandingan Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Bali Tahun 2025
Sumber: Hasil Olah Data BPS Provinsi Bali, Tahun 2026

Tabel 2. 7
Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Bali Tahun 2025

Rincian	Persentase Jumlah Penduduk (%)			Rasio Ketergantungan		
	0–14	15–64	65+	Muda	Tua	Total
Laki-laki	21,03	69,82	9,13	30,12	13,08	43,2
Perempuan	20,17	69,26	10,58	29,12	15,27	44,39
Jumlah	20,6	69,54	9,85	29,62	14,17	43,79

Sumber: Olahan Data BPS Provinsi Bali Tahun 2026

Berdasarkan jenis kelamin, struktur umur penduduk Provinsi Bali tahun 2025 menunjukkan bahwa baik penduduk laki-laki maupun perempuan sama-sama didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun). Penduduk laki-laki memiliki proporsi usia produktif sebesar 69,82 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan sebesar 69,26 persen. Sementara itu, proporsi penduduk usia anak (0–14 tahun) pada laki-laki mencapai 21,03 persen, lebih tinggi dibandingkan perempuan yang sebesar 20,17 persen. Sebaliknya, pada kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas), proporsi perempuan mencapai 10,58 persen, lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang sebesar 9,13 persen.

Perbedaan struktur umur tersebut berpengaruh terhadap besarnya rasio ketergantungan menurut jenis kelamin. Penduduk laki-laki memiliki rasio ketergantungan total sebesar 43,20, sedangkan penduduk perempuan sebesar 44,39. Dengan demikian, beban ketergantungan pada kelompok perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Perbedaan tersebut

terutama disebabkan oleh lebih besarnya proporsi penduduk perempuan pada kelompok usia lanjut, yang mencerminkan kecenderungan bahwa perempuan memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Apabila dirinci berdasarkan jenis ketergantungannya, rasio ketergantungan muda pada penduduk laki-laki mencapai 30,12, lebih tinggi dibandingkan perempuan yang sebesar 29,12. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada kelompok laki-laki terdapat proporsi anak-anak yang relatif lebih besar dibandingkan perempuan. Sebaliknya, rasio ketergantungan tua pada penduduk perempuan mencapai 15,27, lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang sebesar 13,08. Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah perempuan lanjut usia relatif lebih besar, sehingga kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, dan fasilitas yang ramah lansia cenderung lebih tinggi pada kelompok perempuan.

Secara keseluruhan, perbedaan rasio ketergantungan antara laki-laki dan perempuan relatif kecil sehingga menunjukkan bahwa struktur penduduk menurut jenis kelamin di Provinsi Bali masih cukup seimbang. Namun demikian, kecenderungan meningkatnya proporsi perempuan pada kelompok usia lanjut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang responsif gender, khususnya dalam pengembangan layanan kesehatan, jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup bagi perempuan lanjut usia. Di sisi lain, tingginya proporsi penduduk usia produktif baik pada laki-laki maupun perempuan merupakan modal penting yang perlu dioptimalkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan kesempatan kerja agar bonus demografi dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi pembangunan Provinsi Bali.

2.7. USIA HARAPAN HIDUP

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator demografis yang digunakan untuk menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa pola mortalitas pada periode tersebut tetap konstan sepanjang hidupnya. Indikator ini mencerminkan tingkat kesehatan masyarakat secara umum, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas pelayanan kesehatan, status gizi, kondisi lingkungan, tingkat pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi penduduk. Semakin tinggi nilai UHH suatu wilayah, semakin baik pula kondisi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pembangunan manusia. Indikator ini menggambarkan rata-rata perkiraan lama hidup yang akan dijalani oleh seseorang sejak lahir apabila pola mortalitas pada tahun berjalan tetap berlaku sepanjang hidupnya. Semakin tinggi nilai UHH, semakin baik kondisi kesehatan masyarakat, akses terhadap pelayanan kesehatan, kualitas lingkungan, status gizi, serta kesejahteraan penduduk secara umum.

Pada tahun 2025, Umur Harapan Hidup Provinsi Bali mencapai 75,46 tahun, yang menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk Bali diperkirakan dapat hidup hingga lebih dari 75 tahun. Capaian ini mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat Bali yang relatif baik serta keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, termasuk peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, dan peningkatan kualitas hidup penduduk.

Dilihat menurut kabupaten/kota, Kabupaten Badung memiliki Umur Harapan Hidup tertinggi, yaitu 76,18 tahun, diikuti oleh Kota Denpasar (76,16 tahun), Kabupaten Gianyar (76,14 tahun), dan Kabupaten Tabanan (76,07 tahun). Seluruh daerah tersebut memiliki nilai UHH di atas rata-rata Provinsi Bali. Tingginya angka harapan hidup di wilayah-wilayah tersebut dapat dikaitkan dengan tingkat pembangunan yang relatif lebih maju, ketersediaan fasilitas kesehatan yang lebih memadai, tingkat pendidikan masyarakat yang lebih tinggi, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih baik dibandingkan daerah lainnya.

Sebaliknya, Kabupaten Karangasem mencatat Umur Harapan Hidup terendah, yaitu 74,52 tahun, disusul oleh Kabupaten Bangli (74,60 tahun) dan Kabupaten Buleleng (74,87 tahun). Meskipun demikian, perbedaan nilai UHH antar kabupaten/kota di Bali relatif kecil, dengan rentang sekitar 1,66 tahun antara daerah tertinggi dan terendah. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pembangunan kesehatan di Provinsi Bali telah berlangsung cukup merata, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di beberapa wilayah.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata provinsi, terdapat lima kabupaten/kota yang memiliki UHH di atas rata-rata Provinsi Bali, yaitu Badung, Denpasar, Gianyar, Tabanan, dan Jembrana, sedangkan Klungkung, Buleleng, Bangli, dan Karangasem masih berada di bawah rata-rata. Kondisi ini menunjukkan adanya variasi capaian pembangunan kesehatan antarwilayah yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya melalui pemerataan akses pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan primer dan rujukan, penguatan program promotif dan preventif, serta peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian Umur Harapan Hidup Provinsi Bali yang mencapai 75,46 tahun mengindikasikan bahwa kualitas kesehatan masyarakat berada pada kondisi yang baik dan menjadi salah satu faktor pendukung tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali. Ke depan, upaya peningkatan UHH tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan, tetapi juga memerlukan sinergi lintas sektor melalui peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan air minum dan sanitasi yang layak, pengendalian penyakit tidak menular, perlindungan sosial, serta penguatan pola hidup sehat sehingga kualitas hidup masyarakat dapat terus meningkat secara berkelanjutan.



Gambar 2. 4

Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2025

Sumber: Hasil Olah Data BPS Provinsi Bali Tahun 2026

Tabel 2. 8

Usia Harapan Hidup Masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2025 (Tahun)
1	Kab. Jembrana	75,42
2	Kab. Tabanan	76,07
3	Kab. Badung	76,18
4	Kab. Gianyar	76,14
5	Kab. Klungkung	75,32
6	Kab. Bangli	74,60
7	Kab. Karangasem	74,52
8	Kab. Buleleng	74,87
9	Kota Denpasar	76,16
	Provinsi Bali	**75,46**

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2026

BAB 3

PROFIL DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025



BAB 3
POTENSI SUMBER DAYA

3.1. POTENSI KEHUTANAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Kawasan hutan dibagi ke dalam hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri atas hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi konversi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui, hutan memiliki kemampuan untuk menyediakan berbagai hasil hutan secara berkelanjutan, baik berupa komoditas kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Selain produk-produk tersebut, hutan juga memberikan jasa lingkungan yang penting, seperti menjaga keseimbangan hidrologis, melindungi tanah dari erosi, serta mempertahankan keanekaragaman hayati.

Provinsi Bali memiliki potensi sumber daya kehutanan yang memiliki peran penting terutama dalam menjaga fungsi ekologis, tata air, keanekaragaman hayati, serta keseimbangan lingkungan wilayah. Berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, pada tahun 2025 luas kawasan hutan dan konservasi perairan di Provinsi Bali tercatat sebesar 132.171,47 Ha. Berdasarkan fungsi kawasan, struktur kawasan hutan Bali didominasi oleh hutan lindung, dengan luas mencapai 96.687,86 Ha atau sekitar 73,15 persen dari keseluruhan kawasan hutan dan konservasi perairan.

Selain hutan lindung, Bali memiliki kawasan konservasi seluas 26.396,32 Ha atau sekitar 19,97 persen dari total kawasan. Kawasan konservasi tersebut terdiri atas cagar alam seluas 1.749,97 Ha, taman nasional seluas 19.026,97 Ha, taman wisata alam seluas 4.461,30 Ha, serta taman hutan raya seluas 1.158,08 Ha. Di antara kawasan konservasi tersebut, taman nasional merupakan kawasan yang paling luas dengan kontribusi sekitar 14,40 persen terhadap keseluruhan kawasan hutan dan konservasi perairan Provinsi Bali.

Sementara itu, kawasan hutan produksi pada tahun 2025 tercatat seluas 9.087,29 Ha atau sekitar 6,88 persen dari total kawasan. Hutan produksi tersebut terdiri atas hutan produksi terbatas seluas 6.904,37 Ha, hutan produksi tetap seluas 2.013,07 Ha, dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 169,85 Ha. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan kawasan hutan di Bali untuk fungsi produksi

memiliki proporsi yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan fungsi perlindungan dan konservasi.

Apabila hutan lindung dan hutan konservasi digabungkan, kedua fungsi tersebut pada tahun 2025 mencapai sekitar 123.084,18 Ha atau 93,12 persen dari keseluruhan kawasan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa potensi kehutanan Provinsi Bali pada dasarnya lebih menonjol pada fungsi ekologis dan konservasi dibandingkan fungsi produksi. Kawasan hutan memiliki posisi strategis dalam perlindungan daerah tangkapan air, pengendalian erosi dan bencana hidrometeorologi, perlindungan habitat dan keanekaragaman hayati, serta dalam menjaga kualitas lingkungan yang menjadi salah satu modal utama pembangunan dan kepariwisataan Bali.

Dalam periode 2023–2025, luas kawasan hutan dan konservasi perairan menunjukkan dinamika. Total kawasan tercatat sebesar 136.827,05 Ha pada tahun 2023, kemudian menjadi 131.425,90 Ha pada tahun 2024, dan meningkat menjadi 132.171,47 Ha pada tahun 2025. Dengan demikian, dibandingkan tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar sekitar 745,57 Ha, meskipun luas tahun 2025 masih lebih rendah sekitar 4.655,58 Ha dibandingkan tahun 2023. Perubahan tersebut terutama terlihat pada kelompok kawasan konservasi, sementara luas hutan lindung dan hutan produksi relatif stabil antara tahun 2024 dan 2025.

Besarnya dominasi fungsi lindung dan konservasi menjadi modal penting bagi pembangunan berkelanjutan Provinsi Bali. Potensi kehutanan tidak hanya dapat dipandang dari nilai ekonomi langsung hasil hutan, tetapi juga dari berbagai jasa lingkungan yang dihasilkan, seperti perlindungan sumber daya air, konservasi tanah, penyimpanan karbon, pelestarian keanekaragaman hayati, pengaturan iklim mikro, serta pemanfaatan kawasan secara terbatas untuk pendidikan, penelitian, wisata alam, dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan potensi kehutanan Bali perlu diarahkan pada upaya menjaga keberlanjutan fungsi ekologis kawasan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya secara lestari untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Tabel 3.1
Perkembangan Luas Kawasan Hutan di Provinsi Bali Menurut Fungsinya Tahun 2023–2025

Fungsi Kawasan Hutan			2023		2024		2025	
			Luas Hutan (ha)	Persentase Terhadap Luas Total (%)	Luas Hutan (ha)	Persentase Terhadap Luas Total (%)	Luas Hutan (ha)	Persentase Terhadap Luas Total (%)
1.	Hutan Lindung (HL)		97 407,95	71,19	96 687,86	73,57	96 687,86	73,15
2.	Hutan Produksi		8 848,47	6,47	9 087,29	6,91	9 087,29	6,88
	a.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	6 805,82	4,97	6 904,37	5,25	6 904,37	5,22
	b.	Hutan Produksi Tetap (HP)	1 872,80	1,37	2 013,07	1,53	2 013,07	1,52
	c.	Hutan Produksi Dapat dikonversi (HPK)	169,85	0,12	169,85	0,12	169,85	0,13
3.	Hutan Konservasi		30 570,53	22,34	25 650,75	19,52	26 396,32	19,97
	a.	Cagar Alam (CA)	1 773,80	1,30	1 004,40	0,76	1 749,97	1,32
	b.	Taman Nasional (TN)	23 143,96	16,91	19 026,97	14,48	19 026,97	14,40
	c.	Taman Wisata Alam (TWA)	4 511,46	3,30	4 461,30	3,39	4 461,30	3,38
	d.	Taman Hutan Raya (Tahura)	1 141,41	0,83	1 158,08	0,88	1 158,08	0,88
Jumlah Luas Hutan dan Perairan			**136 827,05**	**100,00**	**131 425,90**	**100,00**	**132 171,47**	**100,00**

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2026

3.2. POTENSI PERTANIAN DAN PANGAN

3.2.1. Produksi Padi di Provinsi Bali

Sektor pertanian tanaman pangan memiliki posisi penting dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian wilayah Provinsi Bali. Salah satu komoditas utama tanaman pangan adalah padi, yang produksinya tersebar di seluruh kota/kabupaten. Berdasarkan data produksi padi tahun 2020–2025, produksi padi Provinsi Bali menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi, dengan kecenderungan meningkat pada awal periode dan mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir.

Pada tahun 2020, produksi padi Provinsi Bali tercatat sebesar 532.168,45 ton, dengan produksi beras sebesar 298.573,46 ton. Produksi tersebut meningkat cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 618.910,81 ton atau tumbuh sekitar 16,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2022 dengan produksi mencapai 680.601,60 ton, atau meningkat 9,97 persen dibandingkan tahun 2021. Tahun 2022 sekaligus menjadi tingkat produksi tertinggi selama periode 2020–2025.

Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2022, produksi padi Bali mulai menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2023 produksi padi tercatat sebesar 673.580,65 ton, turun sekitar 1,03 persen dibandingkan tahun 2022. Penurunan berlanjut pada tahun 2024 menjadi 635.473,35 ton atau turun 5,66 persen, kemudian kembali turun pada tahun 2025 menjadi 587.866 ton, atau berkurang sekitar 47.607 ton (7,49 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, dibandingkan dengan posisi tertinggi tahun 2022, produksi

padi Bali tahun 2025 telah mengalami penurunan sekitar 92.735,60 ton atau 13,63 persen.

Meskipun terjadi penurunan dalam tiga tahun terakhir, apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2020, produksi padi Bali pada tahun 2025 masih lebih tinggi sekitar 55.697,55 ton atau 10,47 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif enam tahun, kapasitas produksi padi Bali masih berada di atas kondisi awal periode, tetapi dinamika tahun 2023–2025 perlu menjadi perhatian karena menunjukkan terjadinya pelemahan produksi secara berkelanjutan.

Perkembangan produksi beras menunjukkan pola yang sejalan dengan produksi padi. Produksi beras meningkat dari 298.573,46 ton pada tahun 2020 menjadi 349.038,23 ton pada tahun 2021, kemudian mencapai tingkat tertinggi sebesar 383.829,16 ton pada tahun 2022. Selanjutnya, produksi beras menurun menjadi 379.869,53 ton pada tahun 2023, 358.378,78 ton pada tahun 2024, dan 331.531 ton pada tahun 2025. Berdasarkan data tersebut, produksi beras yang dihasilkan setara dengan sekitar 56,40 persen dari produksi padi, dengan proporsi yang relatif konsisten selama periode pengamatan.

a. Distribusi Produksi Padi Menurut Kota/Kabupaten

Secara spasial, produksi padi Provinsi Bali masih terkonsentrasi pada beberapa kabupaten yang memiliki basis pertanian sawah relatif kuat. Pada tahun 2025, Kabupaten Tabanan menjadi produsen padi terbesar dengan produksi mencapai 158.063 ton, atau sekitar 26,89 persen dari total produksi padi Provinsi Bali. Posisi tersebut menunjukkan peranan strategis Kabupaten Tabanan sebagai salah satu sentra utama produksi pangan Bali. Produksi padi Tabanan menghasilkan beras sekitar 89.141 ton pada tahun yang sama.

Produsen padi terbesar kedua adalah Kabupaten Gianyar, dengan produksi sebesar 94.505 ton atau sekitar 16,08 persen dari produksi Bali, diikuti oleh Kabupaten Badung sebesar 87.917 ton (14,96 persen). Selanjutnya, Kabupaten Buleleng menghasilkan 74.153 ton (12,61 persen) dan Kabupaten Jembrana sebesar 73.773 ton (12,55 persen). Dengan demikian, lima kabupaten tersebut secara bersama-sama menyumbang sekitar 83,08 persen dari keseluruhan produksi padi Provinsi Bali pada tahun 2025.

Kabupaten lainnya memberikan kontribusi yang lebih kecil. Kabupaten Karangasem menghasilkan sekitar 47.776 ton atau 8,13 persen, diikuti Kabupaten Klungkung sebesar 24.373 ton (4,15 persen), Kabupaten Bangli sebesar 15.250 ton (2,59 persen), dan Kota Denpasar sebesar 12.057 ton (2,05 persen). Distribusi tersebut menunjukkan adanya perbedaan kapasitas produksi yang cukup besar antardaerah, dengan pusat produksi utama terkonsentrasi di Tabanan, Gianyar, Badung, Buleleng, dan Jembrana.

Empat daerah dengan produksi terbesar, yaitu Tabanan, Gianyar, Badung, dan Buleleng, secara kumulatif menghasilkan sekitar 414.638 ton atau 70,53 persen dari total produksi padi Bali tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya keberlanjutan produksi di wilayah-wilayah sentra tersebut bagi stabilitas produksi pangan Provinsi Bali secara keseluruhan.

b. Dinamika Produksi Kota/Kabupaten

Kabupaten Tabanan secara konsisten menjadi daerah dengan produksi padi terbesar. Produksi meningkat dari 142.846,03 ton pada tahun 2020 menjadi 166.880,26 ton pada 2021 dan mencapai 169.511,90 ton pada 2023. Setelah itu, produksi mengalami penurunan menjadi 163.226,78 ton pada 2024 dan 158.063 ton pada 2025. Meskipun menurun sekitar 3,16 persen pada 2025 dibandingkan 2024, produksinya masih sekitar 10,65 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2020.

Kabupaten Gianyar menunjukkan peningkatan produksi yang kuat sampai tahun 2022. Produksi padi meningkat dari 91.622,56 ton pada 2020 menjadi 117.895,26 ton pada 2021, kemudian mencapai puncak 133.658,86 ton pada 2022. Namun setelah itu terjadi penurunan menjadi 123.419,53 ton pada 2023, 114.966,06 ton pada 2024, dan 94.505 ton pada 2025. Penurunan pada 2025 mencapai sekitar 17,80 persen dibandingkan 2024. Dibandingkan puncaknya pada 2022, produksi Gianyar tahun 2025 telah menurun sekitar 39.153,86 ton.

Kondisi yang relatif serupa terjadi di Kabupaten Badung. Produksi meningkat dari 83.587,23 ton pada tahun 2020 hingga mencapai 104.711,29 ton pada 2023, kemudian menurun menjadi 97.113,36 ton pada 2024 dan 87.917 ton pada 2025. Secara tahunan, produksi Badung tahun 2025 turun sekitar 9,47 persen, tetapi masih sekitar 5,18 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2020.

Kabupaten Buleleng juga berkembang sebagai salah satu sentra produksi penting. Produksi meningkat dari 62.836,23 ton pada 2020 menjadi 82.975,62 ton pada 2021, 90.707,72 ton pada 2022, dan mencapai 91.383,19 ton pada 2023. Pada 2024 produksinya relatif stabil sebesar 89.942,72 ton, sebelum turun cukup tajam menjadi 74.153 ton pada 2025, atau turun sekitar 17,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun demikian, produksi tahun 2025 masih sekitar 18,01 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2020.

Perkembangan yang berbeda terlihat di Kabupaten Jembrana. Produksi padi Jembrana memperlihatkan kecenderungan meningkat dari 47.178,10 ton pada 2020 menjadi 50.258,40 ton pada 2021, 58.158,77 ton pada 2022, dan 63.854 ton pada 2023. Produksi sempat turun menjadi 56.064,88 ton pada 2024, tetapi meningkat sangat kuat pada 2025 menjadi 73.773 ton. Peningkatan tahun 2025 mencapai sekitar 31,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan merupakan peningkatan tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Bali. Dibandingkan tahun 2020, produksi padi Jembrana

meningkat sekitar 56,37 persen. Kondisi ini menjadikan Jembrana semakin penting dalam struktur produksi padi Bali.

Kabupaten Karangasem memperlihatkan produksi yang relatif lebih stabil dalam beberapa tahun terakhir. Produksi sebesar 41.009,95 ton pada 2020 berkembang menjadi 52.090,59 ton pada 2022, kemudian berada pada kisaran 47–48 ribu ton selama 2023–2025. Pada tahun 2025 produksinya tercatat sebesar 47.776 ton, turun tipis sekitar 0,65 persen dari tahun 2024. Dibandingkan tahun 2020, produksi Karangasem masih meningkat sekitar 16,50 persen.

Di Kabupaten Klungkung, produksi padi cenderung berfluktuasi pada kisaran 24–29 ribu ton per tahun. Produksi sebesar 25.764,98 ton pada 2020 turun menjadi 24.805,55 ton pada 2021, meningkat hingga 28.592,07 ton pada 2023, kemudian kembali turun menjadi 24.675,67 ton pada 2024 dan 24.373 ton pada 2025. Secara keseluruhan, produksi tahun 2025 sekitar 5,40 persen lebih rendah dibandingkan kondisi tahun 2020.

Sementara itu, Kabupaten Bangli memiliki skala produksi relatif lebih kecil. Produksi meningkat dari 13.626,32 ton pada 2020 menjadi 21.630,80 ton pada 2022, kemudian mengalami penurunan berturut-turut menjadi 20.576,28 ton pada 2023, 17.809,51 ton pada 2024, dan 15.250 ton pada 2025. Produksi tahun 2025 turun sekitar 14,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi masih sekitar 11,92 persen lebih tinggi daripada tahun 2020.

Dinamika paling menonjol terjadi di Kota Denpasar. Produksi padi Denpasar meningkat dari 23.697,05 ton pada 2020 menjadi 29.948,63 ton pada 2022, tetapi selanjutnya turun menjadi 23.904,26 ton pada 2023, 23.588,01 ton pada 2024, dan hanya 12.057 ton pada 2025. Dengan demikian, produksi padi Denpasar pada 2025 turun sekitar 48,89 persen dibandingkan tahun 2024 dan sekitar 49,12 persen dibandingkan tahun 2020. Penurunan tersebut merupakan yang terbesar secara persentase di antara kabupaten/kota di Bali selama 2024–2025.

c. Perkembangan Produksi Tahun 2024–2025

Penurunan produksi padi Provinsi Bali sebesar 47.607,35 ton pada periode 2024–2025 merupakan hasil dari penurunan produksi di hampir seluruh kota/kabupaten, kecuali Kabupaten Jembrana. Penurunan terbesar secara absolut terjadi di Kabupaten Gianyar sebesar sekitar 20.461 ton, disusul Kabupaten Buleleng sekitar 15.790 ton, Kota Denpasar sekitar 11.531 ton, Kabupaten Badung sekitar 9.196 ton, dan Kabupaten Tabanan sekitar 5.164 ton. Penurunan juga terjadi di Kabupaten Bangli, Karangasem, dan Klungkung dalam besaran yang lebih kecil.

Di sisi lain, Jembrana mengalami peningkatan sekitar 17.708 ton pada periode yang sama. Peningkatan tersebut mampu menahan sebagian

penurunan produksi Provinsi Bali, tetapi belum cukup untuk mengimbangi penurunan yang terjadi di daerah-daerah produsen utama lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan produksi padi Provinsi Bali pada 2025 tidak berlangsung seragam secara spasial.

d. Gambaran Potensi dan Tantangan Produksi Padi

Secara keseluruhan, data tahun 2020–2025 memperlihatkan bahwa Provinsi Bali memiliki basis produksi padi yang cukup kuat dan tersebar pada beberapa sentra utama. Produksi tahun 2025 sebesar 587.866 ton padi yang setara dengan sekitar 331.531 ton beras menunjukkan besarnya potensi sektor tanaman pangan dalam mendukung penyediaan pangan daerah.

Namun demikian, kecenderungan menurunnya produksi selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2023 menjadi hal yang perlu dicermati. Dari perspektif kewilayahan, keberlanjutan produksi Bali sangat dipengaruhi oleh kinerja beberapa kabupaten sentra, khususnya Kabupaten Tabanan, Gianyar, Badung, Buleleng, dan Jembrana. Penurunan produksi pada beberapa sentra utama dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap capaian produksi provinsi.

Dengan mempertimbangkan distribusi dan perkembangannya, potensi produksi padi Bali perlu dijaga melalui keberlanjutan kawasan pertanian produktif, peningkatan produktivitas, dukungan terhadap sistem irigasi dan pengelolaan air, serta penguatan sentra-sentra produksi. Di samping mempertahankan daerah penghasil utama seperti Kabupaten Tabanan, Gianyar, Badung, dan Buleleng, perkembangan positif produksi di Kabupaten Jembrana juga menunjukkan adanya potensi wilayah yang dapat semakin diperkuat dalam mendukung ketahanan pangan Provinsi Bali.

Tabel 3.2
Perkembangan Produksi Padi di Provinsi Bali Tahun 2020–2025

No.	Tahun	Produksi Padi (Ton)	Produksi Beras (Ton)
1	2020	532.168,45	298.573,46
2	2021	618.910,81	349.038,23
3	2022	680.601,60	383.829,16
4	2023	673.580,65	379.869,53
5	2024	635.473,35	358.378,78
6	2025	587.866,00	331.531,00

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2026



Gambar 3.1.
Grafik Perkembangan Produksi Padi dan Produksi Beras Provinsi Bali Tahun 2020–2025
Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2026

3.2.2. Produksi Beras di Provinsi Bali

Produksi beras merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kapasitas penyediaan pangan pokok di Provinsi Bali. Perkembangan produksi beras berkaitan erat dengan produksi padi, mengingat beras merupakan hasil yang diperoleh dari pengolahan padi. Berdasarkan data tahun 2020–2025, produksi beras Provinsi Bali menunjukkan pola perkembangan yang meningkat cukup kuat hingga tahun 2022, kemudian mengalami penurunan secara berturut-turut selama periode 2023–2025.

Pada tahun 2020, produksi beras Provinsi Bali tercatat sebesar 298.573,46 ton. Produksi tersebut meningkat menjadi 349.038,23 ton pada tahun 2021, atau bertambah sekitar 50.464,77 ton (16,90 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2022 dengan produksi mencapai 383.829,16 ton, atau tumbuh sekitar 9,97 persen dibandingkan tahun 2021. Capaian tahun 2022 merupakan tingkat produksi beras tertinggi selama periode 2020–2025.

Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2022, produksi beras Bali mulai mengalami penurunan. Pada tahun 2023, produksi beras turun menjadi 379.869,53 ton, atau berkurang sekitar 3.959,63 ton (1,03 persen). Penurunan menjadi semakin besar pada tahun 2024, ketika produksi beras tercatat sebesar 358.378,78 ton, berkurang 21.490,75 ton (5,66 persen) dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2025, produksi kembali turun menjadi 331.531 ton, atau berkurang sekitar 26.847,78 ton (7,49 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan demikian, selama tiga tahun sejak mencapai puncaknya pada tahun 2022, produksi beras Provinsi Bali mengalami penurunan sekitar 52.298,16 ton

atau 13,63 persen. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2020, produksi beras pada tahun 2025 masih lebih tinggi sekitar 32.957,54 ton atau 11,04 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam perspektif jangka menengah kapasitas produksi beras Bali masih berada di atas posisi tahun 2020, tetapi kecenderungan penurunan selama tiga tahun terakhir perlu mendapat perhatian dalam konteks keberlanjutan penyediaan pangan daerah.

Secara umum, rasio produksi beras terhadap produksi padi pada periode 2021–2025 berada pada kisaran 56,4 persen. Pada tahun 2025, produksi padi sebesar 587.866 ton menghasilkan produksi beras sebesar 331.531 ton. Pola tersebut relatif konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga dinamika produksi beras pada dasarnya mengikuti perubahan produksi padi di masing-masing wilayah.

a. Distribusi Produksi Beras Menurut Kabupaten/Kota

Produksi beras di Provinsi Bali tersebar di seluruh kabupaten/kota, tetapi memiliki tingkat konsentrasi yang cukup tinggi pada beberapa wilayah. Pada tahun 2025, Kabupaten Tabanan merupakan penghasil beras terbesar dengan produksi mencapai 89.141 ton, atau sekitar 26,89 persen dari total produksi beras Provinsi Bali. Besarnya kontribusi tersebut memperlihatkan posisi strategis Tabanan dalam mendukung ketersediaan beras di Bali.

Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Gianyar dengan produksi sebesar 53.296 ton, atau sekitar 16,08 persen dari total Bali. Selanjutnya, Kabupaten Badung menghasilkan 49.581 ton (14,96 persen), diikuti Kabupaten Buleleng sebesar 41.819 ton (12,61 persen) dan Kabupaten Jembrana sebesar 41.605 ton (12,55 persen).

Kelima kabupaten tersebut secara bersama-sama menghasilkan sekitar 275.442 ton beras, atau sekitar 83,08 persen dari keseluruhan produksi beras Provinsi Bali tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi beras Bali masih sangat dipengaruhi oleh perkembangan produksi pada lima daerah sentra tersebut.

Di luar lima daerah utama tersebut, Kabupaten Karangasem menghasilkan 26.944 ton atau sekitar 8,13 persen dari total produksi Bali. Produksi Kabupaten Klungkung mencapai 13.745 ton (4,15 persen), Kabupaten Bangli sebesar 8.600 ton (2,59 persen), sedangkan Kota Denpasar menghasilkan 6.800 ton atau sekitar 2,05 persen. Dengan demikian, terdapat kesenjangan kapasitas produksi yang cukup besar antarkabupaten/kota, yang berkaitan dengan perbedaan basis pertanian sawah dan kapasitas produksi padi masing-masing wilayah.

Apabila hanya memperhitungkan empat daerah dengan produksi terbesar, yaitu Tabanan, Gianyar, Badung, dan Buleleng, total produksinya mencapai 233.837 ton, atau sekitar 70,53 persen dari seluruh produksi beras Bali tahun

2025. Tingginya konsentrasi tersebut menunjukkan pentingnya keberlanjutan produksi pada daerah-daerah sentra karena perubahan produksi di wilayah tersebut dapat memberikan dampak cukup besar terhadap capaian produksi beras tingkat provinsi.

b. Dinamika Produksi Beras Tahun 2024–2025

Periode 2024–2025 memperlihatkan adanya penurunan produksi beras di hampir seluruh kabupaten/kota di Bali. Dari sembilan kabupaten/kota, delapan daerah mengalami penurunan produksi dan hanya Kabupaten Jembrana yang mengalami peningkatan.

Secara absolut, penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Gianyar, yaitu sekitar 11.539,76 ton, diikuti Buleleng sebesar 8.904,69 ton, Kota Denpasar sebesar 6.502,60 ton, Badung sebesar 5.186,63 ton, Tabanan sebesar 2.911,66 ton, serta Bangli sebesar 1.443,78 ton. Penurunan di Karangasem dan Klungkung relatif lebih kecil, masing-masing sekitar 174,56 ton dan 170,99 ton.

Sebaliknya, produksi beras Kabupaten Jembrana meningkat sekitar 9.986,89 ton pada periode yang sama. Peningkatan produksi Jembrana berperan menahan sebagian penurunan produksi dari wilayah lainnya. Namun peningkatan tersebut belum mampu mengompensasi penurunan secara kumulatif pada delapan kabupaten/kota lainnya sehingga produksi beras Bali secara keseluruhan tetap turun sebesar 26.847,78 ton.

Kondisi tersebut juga mengindikasikan adanya perubahan struktur kontribusi antardaerah. Jembrana semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu sentra produksi utama, sedangkan sejumlah wilayah yang sebelumnya memiliki produksi tinggi, terutama Gianyar dan Buleleng, mengalami penurunan cukup besar pada tahun 2025.

c. Potensi dan Keberlanjutan Produksi Beras Bali

Produksi beras sebesar 331,53 ribu ton pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Bali masih memiliki basis produksi pangan yang cukup besar. Keberadaan beberapa sentra utama seperti Tabanan, Gianyar, Badung, Buleleng, dan Jembrana menjadi modal penting bagi keberlanjutan penyediaan pangan daerah. Kabupaten Tabanan memiliki posisi paling dominan, dengan lebih dari seperempat produksi beras Bali berasal dari wilayah tersebut.

Namun demikian, kecenderungan penurunan produksi beras selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2023 menunjukkan perlunya perhatian terhadap keberlanjutan kapasitas produksi. Penurunan tersebut penting dicermati terutama karena sebagian besar produksi Bali terkonsentrasi pada sejumlah wilayah tertentu. Gangguan produksi pada kabupaten sentra dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap produksi beras secara keseluruhan.

Dari data produksi saja belum dapat ditentukan secara langsung faktor yang menyebabkan perubahan produksi tersebut. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai ketahanan produksi beras Bali, data produksi perlu dikaitkan dengan perkembangan luas panen padi, produktivitas lahan, luas baku sawah, luas lahan pertanian pangan berkelanjutan, indeks pertanaman, kondisi jaringan dan ketersediaan air irigasi, kejadian iklim ekstrem, serta perkembangan konversi lahan pertanian.

Selain melihat kapasitas produksi, analisis produksi beras juga perlu dikaitkan dengan kebutuhan konsumsi penduduk. Perbandingan antara produksi beras dengan konsumsi beras penduduk akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai posisi masing-masing kabupaten/kota dan Provinsi Bali secara keseluruhan, apakah berada dalam kondisi surplus atau defisit beras serta seberapa besar ketergantungannya terhadap pasokan dari daerah lain.

Dengan demikian, potensi produksi beras Provinsi Bali tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi yang dihasilkan, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam mempertahankan lahan pertanian produktif, meningkatkan produktivitas, menjaga ketersediaan air dan infrastruktur irigasi, serta mempertahankan regenerasi dan keberlanjutan usaha tani. Penguatan sentra produksi yang sudah berkembang, disertai upaya menjaga wilayah yang mengalami tekanan penurunan produksi, menjadi bagian penting dalam mempertahankan ketahanan pangan Provinsi Bali secara berkelanjutan

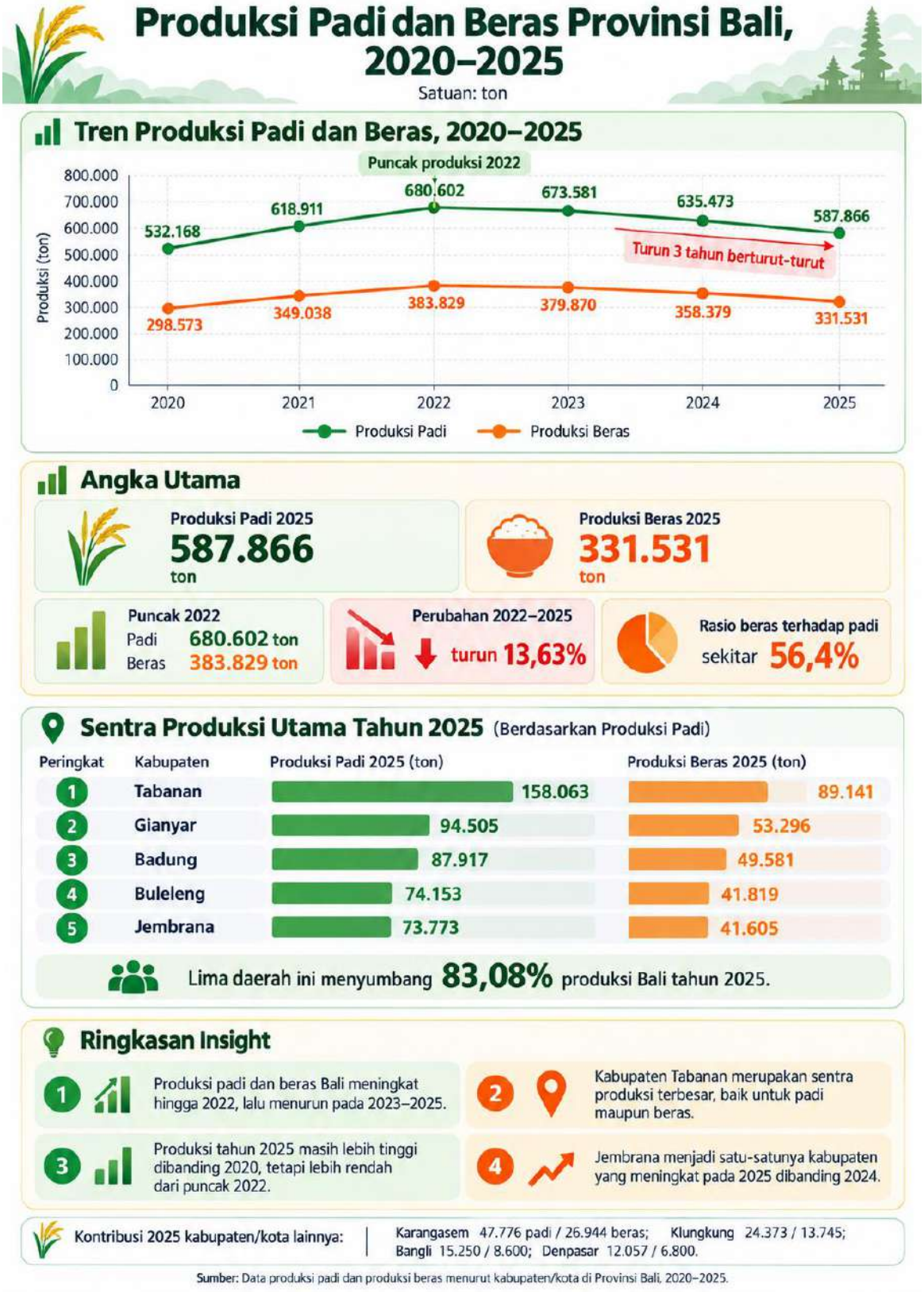

Gambar 3.2.
Infografis Produksi Padi dan Produksi Beras Provinsi Bali
Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2026

3.2.3. Produksi Pertanian Hortikultura

Produksi hortikultura adalah hasil menurut bentuk produk dari setiap tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan tanaman hias yang diambil berdasarkan luas yang dipanen/tanaman yang menghasilkan. Pertanian hortikultura penduduk Provinsi Bali mebudidayakan sayuran maupun buah-buahan secara sinergis.

a. Produksi Sayuran dan Buah-buahan

Produksi sayuran dan buah-buahan semusim di Provinsi Bali pada tahun 2025 menunjukkan kondisi yang cukup beragam antar komoditas. Berdasarkan penjumlahan seluruh komoditas yang tercatat, total produksi pada tahun 2025 mencapai sekitar 1,67 juta kuintal, menurun sekitar 13,35 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai sekitar 1,93 juta kuintal. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya produksi sejumlah komoditas dengan volume relatif besar, seperti labu siam, semangka, petsai/sawi, kubis, dan cabai besar.

Pada tahun 2025, bawang merah menjadi komoditas sayuran dan buah semusim dengan produksi terbesar di Bali, yaitu mencapai 399.069,50 kuintal atau sekitar 23,89 persen dari keseluruhan produksi komoditas yang tercatat. Produksi bawang merah meningkat sebesar 13,70 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 350.993,58 kuintal. Dalam jangka menengah, produksi bawang merah juga menunjukkan perkembangan yang sangat kuat, meningkat dari 142.074,25 kuintal pada tahun 2020 menjadi 399.069,50 kuintal pada tahun 2025, atau tumbuh sekitar 180,89 persen.

Komoditas dengan produksi terbesar berikutnya adalah cabai rawit, dengan produksi sebesar 272.809,77 kuintal pada tahun 2025. Produksi cabai rawit meningkat sekitar 17,64 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 231.907,06 kuintal. Meskipun mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir, produksinya masih lebih rendah dibandingkan kondisi tahun 2020 yang mencapai 353.313,17 kuintal. Dengan demikian, dalam periode 2020–2025 produksi cabai rawit menurun sekitar 22,79 persen.

Komoditas penting lainnya adalah semangka, dengan produksi mencapai 190.795,92 kuintal, disusul labu siam sebesar 170.146,30 kuintal, petsai/sawi sebesar 141.558,38 kuintal, dan kubis sebesar 115.768,50 kuintal. Enam komoditas terbesar tersebut secara bersama-sama menyumbang sekitar 77,24 persen dari total produksi sayuran dan buah-buahan semusim Bali pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa struktur produksi masih terkonsentrasi pada sejumlah komoditas utama.

Meskipun demikian, beberapa komoditas utama tersebut mengalami penurunan produksi cukup besar pada tahun 2025. Produksi labu siam turun dari 404.264,59 kuintal pada tahun 2024 menjadi 170.146,30 kuintal pada tahun 2025 atau turun sekitar 57,91 persen. Dalam jangka panjang, produksi

labu siam bahkan menurun sekitar 79,82 persen dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 843.088,52 kuintal. Penurunan juga terjadi pada semangka sebesar sekitar 22,81 persen, petsai/sawi sekitar 15,76 persen, dan kubis sekitar 6,98 persen dibandingkan tahun 2024.

Beberapa komoditas dengan skala produksi menengah menunjukkan perkembangan positif. Tomat meningkat dari 43.805,28 kuintal pada tahun 2024 menjadi 77.357,78 kuintal pada tahun 2025, atau tumbuh sekitar 76,59 persen. Produksi buncis meningkat sekitar 11,21 persen menjadi 45.294,23 kuintal, sedangkan produksi terung meningkat sekitar 8,25 persen menjadi 19.116,42 kuintal. Produksi bayam juga meningkat sekitar 3,95 persen menjadi 8.699,93 kuintal.

Peningkatan persentase yang cukup besar juga terjadi pada beberapa komoditas dengan volume produksi relatif kecil. Produksi kentang meningkat sekitar 66,10 persen, dari 1.380,50 kuintal pada tahun 2024 menjadi 2.293 kuintal pada tahun 2025. Produksi paprika meningkat sekitar 57,62 persen menjadi 2.271,30 kuintal, sementara produksi stroberi meningkat sekitar 36,40 persen menjadi 4.514,70 kuintal. Produksi jamur tiram juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun secara volume masih relatif kecil.

Di sisi lain, terdapat beberapa komoditas yang mengalami penurunan sangat tajam. Produksi bawang putih turun dari 1.166,74 kuintal pada tahun 2024 menjadi hanya 35,55 kuintal pada tahun 2025, atau turun sekitar 96,95 persen. Dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 13.290,12 kuintal, produksi bawang putih pada tahun 2025 telah berkurang sekitar 99,73 persen. Kondisi serupa terlihat pada kembang kol, yang produksinya turun sekitar 83,47 persen dibandingkan tahun 2024, serta wortel yang menurun sekitar 63,40 persen.

Produksi beberapa komoditas lainnya juga menunjukkan kecenderungan menurun. Produksi kacang panjang turun sekitar 29,65 persen, dari 61.476,47 kuintal pada tahun 2024 menjadi 43.250,92 kuintal pada tahun 2025. Produksi cabai besar turun sekitar 27,18 persen menjadi 55.445,85 kuintal, sedangkan bawang daun turun sekitar 27,88 persen menjadi 3.682,20 kuintal. Produksi melon juga berkurang sekitar 38,35 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Apabila dilihat dalam periode 2020–2025, perkembangan produksi sayuran dan buah-buahan semusim Bali menunjukkan adanya pergeseran struktur produksi antar komoditas. Bawang merah berkembang semakin dominan, sementara sejumlah komoditas yang pada tahun 2020 memiliki produksi relatif besar, seperti labu siam, kubis, petsai/sawi, tomat, bawang putih, dan bawang daun, menunjukkan kecenderungan menurun. Beberapa komoditas seperti ketimun dan semangka masih mampu mempertahankan produksi pada tingkat yang relatif tinggi, meskipun mengalami fluktuasi antartahun.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa potensi hortikultura semusim Provinsi Bali masih cukup besar, tetapi memiliki tingkat fluktuasi produksi yang relatif tinggi. Dinamika produksi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain luas panen, produktivitas, kondisi iklim, ketersediaan air, perubahan pola tanam, harga komoditas, serta keputusan petani dalam memilih jenis tanaman. Oleh karena itu, perkembangan produksi perlu terus dicermati terutama pada komoditas strategis yang mengalami penurunan secara konsisten.

Secara keseluruhan, kondisi tahun 2025 memperlihatkan bahwa produksi hortikultura semusim Bali semakin ditopang oleh beberapa komoditas utama, terutama bawang merah, cabai rawit, semangka, labu siam, petsai/sawi, dan kubis. Peningkatan produksi bawang merah, cabai rawit, dan tomat menjadi perkembangan positif, sementara penurunan tajam pada labu siam, bawang putih, kembang kol, dan wortel perlu menjadi perhatian dalam menjaga keberagaman dan keberlanjutan produksi hortikultura daerah.

Tabel 3.3

Perkembangan Produksi Sayuran dan Buah-buahan Semusim di Provinsi Bali Tahun 2020–2025 (Kuintal)

No.	Komoditas Sayur dan Buah Semusim	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Bawang Daun	11.556,00	10.547,00	7.738,00	8.178,90	5.105,54	3.682,20
2	Bawang Merah	142.074,25	232.151,48	314.923,92	353.739,42	350.993,58	399.069,50
3	Bawang Putih	13.290,12	10.399,20	6.893,00	1.670,70	1.166,74	35,55
4	Bayam	13.648,75	9.428,08	8.078,99	8.196,20	8.369,24	8.699,93
5	Buncis	68.410,00	70.357,20	77.235,00	50.975,16	40.726,80	45.294,23
6	Cabai Rawit	353.313,17	291.749,19	283.181,69	205.230,47	231.907,06	272.809,77
7	Kacang Panjang	46.548,05	59.569,24	47.238,87	46.781,96	61.476,47	43.250,92
8	Kangkung	63.629,82	59.200,65	52.576,87	74.473,64	52.917,36	51.727,44
9	Kembang Kol	22.400,40	18.203,90	16.068,00	14.284,50	11.370,65	1.879,95
10	Kentang	3.762,00	1.142,00	664	2.401,88	1.380,50	2.293,00
11	Ketimun	52.066,00	78.353,86	46.846,00	55.679,06	57.362,56	56.468,74
12	Kubis	265.169,00	389.920,10	337.297,10	247.292,86	124.450,81	115.768,50
13	Labu Siam	843.088,52	701.194,99	673.678,11	534.961,19	404.264,59	170.146,30
14	Melon	3.825,00	2.021,00	2.184,44	1.530,10	3.415,85	2.105,77
15	Paprika	362	853,4	871,4	2.580,50	1.441,00	2.271,30
16	Petsai/Sawi	290.521,22	245.193,10	223.731,24	206.104,48	168.045,23	141.558,38
17	Semangka	160.456,90	128.181,98	245.615,80	193.261,70	247.184,34	190.795,92
18	Stroberi	6.682,00	2.909,00	1.958,00	3.477,00	3.310,00	4.514,70

No.	Komoditas Sayur dan Buah Semusim	2020	2021	2022	2023	2024	2025
19	Terung	29.282,25	15.602,20	11.928,75	16.586,03	17.659,18	19.116,42
20	Tomat	138.107,97	121.718,82	60.042,45	52.181,89	43.805,28	77.357,78
21	Wortel	18.507,00	17.803,00	18.313,40	16.750,00	14.847,50	5.434,00
22	*Cabai Besar*		117.468,03	66.299,06	70.826,38	76.145,64	55.445,85
23	Cabai Keriting		-	-	-	17	1,37
24	Jamur Tiram *Mushroom*		678,62	4.210,61	3.547,94	156,74	506,01
25	Jamur Merang		-	-	-	-	2,15
26	Jamur Lainnya		-	-	-	-	5,25

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2026

b. Produksi Tanaman Biofarmaka

Produksi tanaman biofarmaka di Provinsi Bali selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan penjumlahan komoditas yang tercatat, total produksi tanaman biofarmaka pada tahun 2021 mencapai sekitar 9,04 juta kg, meningkat menjadi 13,01 juta kg pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 11,80 juta kg pada tahun 2023. Penurunan semakin besar pada tahun 2024 dengan produksi sekitar 4,31 juta kg, dan kembali turun menjadi sekitar 3,57 juta kg pada tahun 2025.

Secara tahunan, produksi tercatat meningkat sekitar 43,83 persen pada tahun 2022, kemudian menurun sekitar 9,27 persen pada tahun 2023. Penurunan paling besar terjadi pada tahun 2024, yaitu sekitar 63,50 persen, dan berlanjut pada tahun 2025 dengan penurunan sekitar 17,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, total produksi tanaman biofarmaka yang tercatat pada tahun 2025 telah menurun sekitar 60,49 persen. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan cukup besar dalam struktur dan skala produksi biofarmaka Bali selama lima tahun terakhir.

Pada tahun 2025, produksi tanaman biofarmaka Bali sangat didominasi oleh beberapa komoditas utama. Jahe merupakan komoditas dengan produksi terbesar, yaitu mencapai 1.678.450 kg, atau sekitar 46,96 persen dari total produksi tanaman biofarmaka yang tercatat. Posisi berikutnya ditempati oleh kunyit dengan produksi sebesar 1.115.072 kg atau sekitar 31,20 persen, disusul serai sebesar 405.725 kg atau 11,35 persen, dan kencur sebesar 262.812 kg atau 7,35 persen. Keempat komoditas tersebut secara bersama-

sama menyumbang sekitar 96,87 persen dari keseluruhan produksi tanaman biofarmaka Bali tahun 2025.

Tabel 3.4
Perkembangan Produksi Tanaman Biofarmaka di Provinsi Bali Tahun 2021–2025

Jenis Tanaman	2021	2022	2023	2024	2025
Jahe (kg)	2.903.556	5.757.638	8.340.720	2.126.287	1.678.450
Kapulaga (kg)	-	-	48	42	17
Kencur (kg)	665.072	353.391	499.233	489.609	262.812
Kunyit (kg)	5.228.218	6.466.018	2.221.772	1.491.750	1.115.072
Laos/Lengkuas (kg)	217.370	353.042	671.614	99.115	45.270
Lempuyang (kg)	500	-	-	34	-
Lidah Buaya (kg)	1.663	3.816	2.038	35.207	62.650
Mahkota Dewa (kg)	1.260	-	-	-	-
Mengkudu (kg)	1.160	2.106	1.078	1.761	29
Sambiloto (kg)	14	7	2	-	-
Temuireng (kg)	4	4	-	-	-
Temukunci (kg)	14.739	13.323	4	2	-
Temulawak (kg)	7.098	13.784	6.299	3.728	1.419
Jeruk Nipis (kg)	3.975	7.315	2.658	2.919	2.546
Serai (kg)	63	38.840	57.305	56.990	405.725

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2026

3.2.4. Produksi Perkebunan

Di Provinsi Bali, komoditas perkebunan yang tergolong unggulan meliputi kelapa, kopi, kakao, kacang mete, dan pala. Kelima komoditas tersebut menonjol karena menunjukkan tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya. Keunggulan ini mencerminkan potensi budidaya yang kuat serta peran strategisnya dalam mendukung perekonomian daerah melalui kontribusi terhadap produksi dan nilai tambah sektor perkebunan.

Produksi komoditas perkebunan Provinsi Bali selama periode 2020–2025 menunjukkan perkembangan yang relatif stabil, meskipun terdapat perbedaan kecenderungan antarjenis komoditas. Berdasarkan delapan komoditas perkebunan yang tercatat, total produksi pada tahun 2020 mencapai sekitar 95.106 ton. Produksi kemudian sedikit menurun menjadi 94.563 ton pada tahun 2021, meningkat menjadi 94.823 ton pada tahun 2022, dan turun cukup nyata menjadi 91.103 ton pada tahun 2023. Selanjutnya terjadi pemulihan menjadi 92.524 ton pada tahun 2024 dan 93.672 ton pada tahun 2025.

Dengan demikian, total produksi komoditas perkebunan yang tercatat pada tahun 2025 meningkat sekitar 1,24 persen dibandingkan tahun 2024. Namun apabila dibandingkan dengan tahun 2020, produksinya masih lebih rendah sekitar 1,51 persen. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa secara agregat produksi perkebunan Bali relatif stabil, tetapi belum kembali sepenuhnya pada tingkat produksi awal periode.

Struktur produksi perkebunan Provinsi Bali sangat didominasi oleh kelapa. Pada tahun 2025, produksi kelapa mencapai 69.994 ton, atau sekitar 74,72 persen dari keseluruhan produksi delapan komoditas perkebunan yang tercatat. Produksi kelapa meningkat dari 69.143 ton pada tahun 2024, atau tumbuh sekitar 1,23 persen.

Dalam jangka menengah, produksi kelapa juga menunjukkan kecenderungan relatif stabil dengan sedikit peningkatan. Produksi sebesar 67.202 ton pada tahun 2020 meningkat menjadi 67.369 ton pada 2021 dan 68.733 ton pada 2022. Produksi kemudian turun menjadi 66.343 ton pada 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 69.143 ton pada 2024 dan mencapai 69.994 ton pada 2025. Dibandingkan tahun 2020, produksi kelapa tahun 2025 meningkat sekitar 4,15 persen.

Besarnya kontribusi kelapa menunjukkan bahwa komoditas ini menjadi penopang utama subsektor perkebunan Bali. Selain menghasilkan produk primer, kelapa juga memiliki potensi pengembangan nilai tambah melalui berbagai produk olahan, sehingga keberlanjutan produksi dan produktivitas kelapa menjadi penting dalam pengembangan subsektor perkebunan daerah.

Kopi merupakan komoditas perkebunan penting lainnya di Bali, yang terdiri atas kopi robusta dan kopi arabika. Pada tahun 2025, produksi kopi robusta mencapai 9.766 ton, sedangkan kopi arabika sebesar 4.303 ton. Secara keseluruhan, kedua jenis kopi tersebut menghasilkan sekitar 14.069 ton, sehingga kopi tetap menjadi salah satu kelompok komoditas perkebunan utama setelah kelapa.

Produksi kopi robusta menunjukkan kecenderungan menurun dalam beberapa tahun terakhir. Produksi meningkat dari 11.111 ton pada tahun 2020 menjadi 11.666 ton pada 2021 dan relatif stabil sebesar 11.657 ton pada 2022. Setelah itu produksi menurun menjadi 10.935 ton pada 2023, 9.922 ton pada 2024, dan 9.766 ton pada tahun 2025. Produksi tahun 2025 turun sekitar 1,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan sekitar 12,11 persen dibandingkan tahun 2020.

Berbeda dengan robusta, produksi kopi arabika menunjukkan perkembangan positif pada tahun 2025. Produksi kopi arabika tercatat sebesar 4.189 ton pada tahun 2020, kemudian menurun menjadi 3.983 ton pada 2021, 3.892 ton pada 2022, dan 3.644 ton pada 2023. Setelah itu produksi meningkat menjadi 3.785 ton pada 2024 dan kembali naik cukup kuat menjadi 4.303 ton pada tahun 2025,

atau tumbuh sekitar 13,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi tahun 2025 bahkan sekitar 2,72 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2020.

Perbedaan kecenderungan antara robusta dan arabika menunjukkan adanya dinamika yang berbeda pada pengembangan kedua jenis kopi di Bali. Peningkatan produksi arabika pada tahun 2025 menjadi perkembangan positif, mengingat kopi Bali juga memiliki nilai ekonomi yang tidak hanya ditentukan oleh volume produksi, tetapi juga kualitas, kekhasan wilayah asal, dan potensi pengembangan produk bernilai tambah.

Produksi kakao selama periode 2020–2025 relatif stabil pada kisaran 4,7–5,0 ribu ton per tahun. Pada tahun 2020 produksi kakao mencapai 4.997 ton, kemudian turun menjadi 4.764 ton pada 2021 dan 4.736 ton pada 2022. Produksi meningkat menjadi 4.897 ton pada 2023, sebelum kembali turun tipis menjadi 4.813 ton pada 2024 dan 4.799 ton pada tahun 2025.

Produksi kakao tahun 2025 turun sangat tipis, sekitar 0,29 persen dibandingkan tahun 2024. Sementara itu, dibandingkan tahun 2020, produksinya menurun sekitar 3,96 persen. Relatif stabilnya produksi menunjukkan bahwa kakao masih mempertahankan posisi sebagai salah satu komoditas perkebunan penting, meskipun belum memperlihatkan pertumbuhan produksi yang berarti dalam beberapa tahun terakhir.

Produksi cengkeh menunjukkan kecenderungan menurun dalam jangka menengah. Produksi sebesar 3.573 ton pada tahun 2020 menurun secara bertahap menjadi 3.462 ton pada 2021, 3.190 ton pada 2022, 2.730 ton pada 2023, dan 2.342 ton pada 2024. Pada tahun 2025 terjadi sedikit peningkatan menjadi 2.377 ton, atau naik sekitar 1,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun demikian, produksi tahun 2025 masih sekitar 33,47 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2020.

Kondisi serupa terlihat pada jambu mete. Produksinya menurun dari 3.623 ton pada tahun 2020 menjadi 2.961 ton pada 2021, 2.294 ton pada 2022, dan 2.166 ton pada 2023. Produksi sempat meningkat tipis menjadi 2.202 ton pada 2024, tetapi kembali turun menjadi 2.165 ton pada tahun 2025. Secara keseluruhan, produksi jambu mete tahun 2025 sekitar 40,24 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2020.

Produksi tembakau juga memperlihatkan kecenderungan penurunan yang cukup konsisten. Produksi turun dari 350 ton pada tahun 2020 menjadi 304 ton pada 2021, 273 ton pada 2022, dan 244 ton pada 2023. Produksi sempat meningkat menjadi 259 ton pada 2024, tetapi kembali turun menjadi 208 ton pada tahun 2025. Penurunan tahun 2025 mencapai sekitar 19,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan sekitar 40,57 persen dibandingkan tahun 2020.

Dibandingkan komoditas lainnya, produksi aren memiliki skala relatif kecil. Produksi tercatat sebesar 61 ton pada tahun 2020, kemudian turun menjadi

54 ton pada 2021 dan 48 ton pada 2022. Produksi meningkat cukup besar menjadi 144 ton pada tahun 2023, tetapi kembali turun menjadi 58 ton pada 2024 dan sedikit meningkat menjadi 60 ton pada tahun 2025.

Walaupun kontribusinya terhadap total produksi perkebunan relatif kecil, aren tetap memiliki potensi ekonomi melalui produk turunannya seperti gula aren dan produk olahan lainnya. Dengan demikian, pengembangan komoditas aren dapat lebih diarahkan pada peningkatan nilai tambah dibandingkan semata-mata mengejar peningkatan volume produksi.

Pada tahun 2025, struktur produksi perkebunan Bali menunjukkan tingkat konsentrasi yang cukup tinggi. Kelapa menyumbang sekitar 74,72 persen dari total produksi komoditas yang tercatat. Selanjutnya, kopi robusta memberikan kontribusi sekitar 10,43 persen, kakao 5,12 persen, kopi arabika 4,59 persen, cengkeh 2,54 persen, dan jambu mete sekitar 2,31 persen. Tembakau dan aren masing-masing memberikan kontribusi kurang dari satu persen.

Dominasi kelapa menunjukkan bahwa perkembangan total produksi perkebunan Bali sangat dipengaruhi oleh perubahan produksi komoditas tersebut. Sementara itu, komoditas kopi, kakao, cengkeh, dan jambu mete berperan dalam memperkuat diversifikasi subsektor perkebunan dan memiliki potensi ekonomi yang tidak selalu tercermin hanya dari besarnya volume produksi.

Secara umum, perkembangan tahun 2025 menunjukkan adanya pemulihan terbatas pada produksi perkebunan Bali, dengan total produksi meningkat dibandingkan tahun 2024. Peningkatan terutama didukung oleh bertambahnya produksi kelapa, kopi arabika, cengkeh, dan aren. Sebaliknya, produksi kopi robusta, kakao, tembakau, dan jambu mete masih mengalami penurunan.

Dalam perspektif pembangunan, pengembangan perkebunan Bali perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan volume produksi, tetapi juga pada peningkatan produktivitas, kualitas hasil, peremajaan tanaman, penguatan pascapanen, serta pengembangan produk olahan bernilai tambah. Pendekatan tersebut penting mengingat sejumlah komoditas seperti kopi, kakao, kelapa, cengkeh, dan jambu mete memiliki peluang untuk dikembangkan melalui diferensiasi kualitas, penguatan identitas wilayah, serta keterkaitan dengan industri pengolahan dan pariwisata.

Tabel 3.5

Perkembangan Produksi Perkebunan di Provinsi Bali Tahun 2020–2025

Komoditas Perkebunan	Produksi (Ton)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kelapa	67.202	67.369	68.733	66.343	69.143	69.994
Kopi Robusta	11.111	11.666	11.657	10.935	9.922	9.766

Komoditas Perkebunan	Produksi (Ton)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kopi Arabika	4.189	3.983	3.892	3.644	3.785	4.303
Kakao	4.997	4.764	4.736	4.897	4.813	4.799
Tembakau	350	304	273	244	259	208
Cengkeh	3.573	3.462	3.190	2.730	2.342	2.377
Jambu Mete	3.623	2.961	2.294	2.166	2.202	2.165
Aren	61	54	48	144	58	60

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2026

3.3. POTENSI PETERNAKAN

3.3.1. Ternak Hewan

Sektor peternakan merupakan salah satu potensi sumber daya yang penting dalam mendukung penyediaan pangan hewani, aktivitas ekonomi masyarakat, serta pengembangan usaha berbasis pertanian di Provinsi Bali. Berdasarkan data produksi daging, komoditas peternakan utama yang tercatat meliputi daging babi, daging sapi, dan daging kambing, dengan karakteristik serta konsentrasi produksi yang berbeda-beda antarwilayah.

Produksi daging babi merupakan komoditas yang paling dominan. Secara keseluruhan, jumlah produksi daging babi berdasarkan indikator *meatyield* di Provinsi Bali mencapai sekitar 46,47 juta kg. Produksi terbesar berasal dari Kabupaten Gianyar, yaitu sekitar 14,89 juta kg atau kurang lebih 32,04% dari keseluruhan produksi Bali. Posisi berikutnya ditempati Kota Denpasar dengan sekitar 8,95 juta kg atau 19,25%, kemudian Kabupaten Bangli sekitar 6,43 juta kg atau 13,85%. Kabupaten Tabanan dan Buleleng juga memberikan kontribusi cukup besar, masing-masing sekitar 5,03 juta kg dan 4,97 juta kg.

Besarnya produksi tersebut memperlihatkan bahwa peternakan babi mempunyai posisi penting dalam struktur peternakan Bali. Selain berkaitan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat, peternakan babi juga mempunyai keterkaitan dengan aktivitas sosial, budaya, perdagangan, rumah potong, serta industri pengolahan pangan. Konsentrasi produksi yang relatif tinggi di Gianyar, Denpasar, Bangli, Tabanan, dan Buleleng menunjukkan adanya basis usaha peternakan dan jaringan pemasaran yang cukup berkembang pada wilayah-wilayah tersebut.

Pada komoditas daging sapi, total produksi berdasarkan *meatyield* Bali tercatat sekitar 7,95 juta kg. Produksi sapi menunjukkan konsentrasi yang sangat kuat di Kabupaten Buleleng, dengan produksi sekitar 4,74 juta kg, atau mencapai sekitar 59,62% dari keseluruhan produksi daging sapi Bali. Posisi kedua ditempati Kota Denpasar dengan sekitar 1,59 juta kg atau 20,01%, kemudian Kabupaten Badung sekitar 829,56 ribu kg atau 10,43%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Buleleng menjadi salah satu wilayah strategis dalam penyediaan daging sapi di Bali. Tingginya produksi dapat menjadi dasar bagi pengembangan rantai usaha peternakan sapi, mulai dari kegiatan budidaya dan penggemukan, penyediaan pakan, pelayanan kesehatan hewan, hingga pengolahan dan distribusi hasil peternakan. Sementara itu, tingginya produksi yang tercatat di Denpasar dan Badung juga perlu dilihat dalam konteks keberadaan pusat konsumsi, perdagangan, dan fasilitas pemotongan ternak yang melayani kawasan perkotaan dan pariwisata.

Untuk daging kambing, jumlah produksi berdasarkan *meatyield* di Bali mencapai sekitar 610,16 ribu kg. Produksi terbesar tercatat di Kota Denpasar, yaitu sekitar 165,77 ribu kg atau 27,17%, diikuti Kabupaten Buleleng sebesar 146,49 ribu kg atau 24,01%, dan Kabupaten Tabanan sekitar 107,73 ribu kg atau 17,66%. Kabupaten Jembrana dan Bangli juga mempunyai kontribusi yang cukup berarti, masing-masing sekitar 65,62 ribu kg dan 53,93 ribu kg.

Walaupun volumenya relatif lebih kecil dibandingkan daging babi maupun sapi, peternakan kambing tetap mempunyai potensi ekonomi, khususnya sebagai usaha peternakan rakyat. Karakteristik pemeliharaan yang relatif fleksibel memungkinkan usaha kambing dikembangkan sebagai sumber tambahan pendapatan rumah tangga pertanian serta untuk memenuhi kebutuhan pasar daging tertentu.

Secara agregat, ketiga komoditas tersebut menghasilkan sekitar 55,03 juta kg daging berdasarkan indikator *meatyield*. Dari jumlah tersebut, daging babi memberikan kontribusi terbesar, sehingga dapat dikatakan bahwa struktur produksi daging Bali memiliki kekhasan yang berbeda dibandingkan sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Pada saat yang sama, keberadaan produksi sapi yang sangat terkonsentrasi di Buleleng dan produksi kambing yang tersebar terutama di Denpasar, Buleleng, dan Tabanan menunjukkan adanya spesialisasi wilayah dalam kegiatan peternakan.

Dari perspektif pengembangan wilayah, kondisi tersebut memberikan peluang untuk memperkuat sentra-sentra produksi peternakan melalui peningkatan produktivitas ternak, kualitas bibit dan pakan, pengendalian penyakit hewan, peningkatan fasilitas rumah potong dan rantai dingin, serta penguatan hubungan antara kawasan produksi dengan pusat konsumsi. Pengembangan peternakan juga perlu diarahkan pada aspek keberlanjutan, termasuk pengelolaan limbah peternakan, biosekuriti, keamanan pangan asal hewan, dan efisiensi distribusi.

Dengan demikian, potensi peternakan Bali tidak hanya tercermin dari besarnya produksi, tetapi juga dari keragaman jenis ternak dan terbentuknya pusat-pusat produksi yang berbeda antarwilayah. Gianyar, Bangli, dan beberapa wilayah lainnya memiliki peran penting pada produksi babi; Buleleng sangat menonjol pada produksi sapi; sedangkan Denpasar, Buleleng, dan Tabanan menjadi wilayah utama produksi kambing. Pola tersebut dapat menjadi dasar dalam

penentuan arah pengembangan kawasan peternakan, penguatan rantai pasok pangan hewani, serta perumusan kebijakan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan Provinsi Bali.

Tabel 3.6
Produksi Daging Ternak Provinsi Bali Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Produksi Daging Babi - Jumlah Produksi Daging (Meatyield) (Kg)	Produksi Daging Sapi - Jumlah Produksi Daging (Meatyield) (Kg)	Produksi Daging Kambing - Jumlah Produksi Daging (Meatyield) (Kg)
1	Jembrana	416.265,66	146.109,60	65.617,97
2	Tabanan	5.027.823,98	98.123,21	107.730,81
3	Badung	3.510.933,32	829.557,60	15.910,40
4	Gianyar	14.886.482,52	208.581,30	15.500,21
5	Klungkung	1.112.268,46	155.938,08	33.834,46
6	Bangli	6.433.699,74	4.529,79	53.933,77
7	Karang Asem	1.164.436,86	176.522,13	5.382,19
8	Buleleng	4.968.785,62	4.740.921,00	146.487,55
9	Kota Denpasar	8.947.095,08	1.591.247,40	165.766,48
	Provinsi Bali	46.467.791,24	7.951.530,11	610.163,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2026

3.3.2. Ternak Unggas

Untuk produksi daging unggas, total produksi Bali dari ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik mencapai sekitar 110,12 juta kg. Produksi tersebut sangat didominasi oleh ayam pedaging, yaitu sebesar 98,91 juta kg atau sekitar 89,82% dari total produksi daging unggas Bali. Kondisi ini menunjukkan bahwa ayam pedaging merupakan basis utama penyediaan daging unggas di Provinsi Bali dan memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat maupun kebutuhan sektor perdagangan, jasa boga, dan pariwisata.

Produksi daging dari ayam petelur tercatat sebesar 8,37 juta kg atau sekitar 7,60% dari keseluruhan produksi daging unggas. Berdasarkan rincian kabupaten/kota yang tersedia, produksi terbesar berasal dari Kabupaten Bangli sebesar sekitar 3,34 juta kg, atau hampir 39,92% dari total produksi Bali. Selanjutnya adalah Kabupaten Tabanan sekitar 2,71 juta kg dan Kabupaten Karangasem sekitar 1,13 juta kg. Data tersebut memperlihatkan bahwa Bangli

dan Tabanan memiliki posisi yang cukup menonjol dalam produksi daging yang berasal dari ayam petelur.

Sementara itu, produksi daging ayam buras di Bali mencapai sekitar 2,65 juta kg. Kabupaten Buleleng menjadi penghasil terbesar dengan sekitar 579,96 ribu kg atau sekitar 21,92% dari produksi Bali, disusul Kabupaten Gianyar sebesar 538,72 ribu kg dan Kabupaten Karangasem sebesar 497,24 ribu kg. Ketiga wilayah tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi lebih dari separuh produksi ayam buras Bali. Kondisi ini menunjukkan bahwa peternakan ayam buras masih memiliki basis produksi yang cukup kuat terutama di wilayah Bali bagian utara dan timur.

Produksi daging itik relatif lebih kecil dibandingkan jenis unggas lainnya, yaitu sebesar 188,82 ribu kg atau sekitar 0,17% dari keseluruhan produksi daging unggas. Kabupaten Klungkung menjadi produsen terbesar dengan sekitar 54,17 ribu kg atau sekitar 28,69%, diikuti Gianyar sekitar 43,17 ribu kg dan Badung sekitar 24,97 ribu kg. Meskipun volumenya relatif kecil, komoditas itik tetap mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai produk peternakan yang memiliki segmen pasar tersendiri, terutama untuk kuliner dan usaha pangan lokal.

Pada sisi produksi telur unggas, total produksi Bali mencapai sekitar 245,08 juta kg. Produksi tersebut sangat didominasi oleh telur ayam petelur, dengan produksi sekitar 227,79 juta kg atau sekitar 92,94% dari total produksi telur unggas Bali. Besarnya volume tersebut menegaskan bahwa usaha ayam petelur merupakan salah satu aktivitas peternakan unggas yang sangat penting dalam mendukung penyediaan pangan dan ketahanan pangan daerah.

Produksi telur ayam buras mencapai sekitar 16,15 juta kg atau sekitar 6,59% dari total produksi telur unggas. Produksi terbesar terdapat di Kabupaten Buleleng, yaitu sekitar 3,54 juta kg atau sekitar 21,92%, diikuti Kabupaten Gianyar sebesar 3,29 juta kg serta Kabupaten Karangasem sebesar 3,03 juta kg. Pola ini relatif sejalan dengan produksi daging ayam buras, sehingga menunjukkan bahwa Buleleng, Gianyar, dan Karangasem menjadi kawasan yang cukup potensial untuk pengembangan peternakan ayam buras baik untuk menghasilkan daging maupun telur.

Adapun produksi telur itik tercatat sebesar sekitar 1,15 juta kg atau sekitar 0,47% dari total produksi telur unggas. Kabupaten Klungkung merupakan produsen terbesar dengan sekitar 324,61 ribu kg atau sekitar 28,22%, diikuti Gianyar sekitar 257,25 ribu kg dan Badung sekitar 153,45 ribu kg. Besarnya produksi telur itik di beberapa wilayah tersebut menunjukkan adanya potensi pengembangan usaha peternakan itik yang dapat diintegrasikan dengan pengolahan pangan lokal, termasuk telur asin dan produk olahan lainnya.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa potensi peternakan unggas Bali memiliki struktur produksi yang cukup jelas, yaitu ayam pedaging

sebagai sumber utama daging unggas dan ayam petelur sebagai sumber utama telur. Di sisi lain, ayam buras dan itik tetap mempunyai peran penting karena tersebar pada berbagai kabupaten dan lebih dekat dengan karakter usaha peternakan rakyat. Potensi tersebut dapat diperkuat melalui peningkatan produktivitas dan kualitas bibit, penyediaan pakan yang efisien, pengendalian penyakit unggas, peningkatan biosekuriti, serta pengembangan rantai pasok dan industri pengolahan hasil unggas.

Tabel 3.7
Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas di Provinsi Bali Tahun 2025

No.	Kabupaten/ Kota	Produksi Daging Unggas - Ayam Buras (kg)	Produksi Daging Unggas - Ayam Petelur (kg)	Produksi Daging Unggas - Ayam Pedaging (kg)	Produksi Daging Unggas - Itik (kg)
1	Jembrana	142.179	246.997,18		8.779,67
2	Tabanan	198.168	2.706.157,92		20.386,81
3	Badung	187.349	262.919,45		24.974,09
4	Gianyar	538.722	270.773,32		43.165,40
5	Klungkung	143.629	87.081,89		54.166,58
6	Bangli	330.563	3.342.041,36		16.846,14
7	Karang Asem	497.244	1.130.254,04		9.508,41
8	Buleleng	579.958	320.105,56		9.540,06
9	Kota Denpasar	28.092	4.804,67		1.457,54
	Bali	**2.645.906**	**8.371.135,39**	**98.913.118,79**	**188.824,70**

Sumber: BPS Provinsi Bali tahun 2026

Tabel 3.8
Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas di Provinsi Bali Tahun 2025

No.	Kabupaten/ Kota	Produksi Telur Unggas - Ayam Buras (kg)	Produksi Telur Unggas - Itik (kg)
1	Jembrana	867.759,27	54.403,53
2	Tabanan	1.209.476,44	123.691,45
3	Badung	1.143.444,10	153.453,60
4	Gianyar	3.287.969,83	257.252,34
5	Klungkung	876.604,81	324.611,42
6	Bangli	2.017.519,62	100.349,01

No.	Kabupaten/ Kota	Produksi Telur Unggas - Ayam Buras (kg)	Produksi Telur Unggas - Itik (kg)
7	Karang Asem	3.034.819,24	62.972,77
8	Buleleng	3.539.640,38	63.551,02
9	Kota Denpasar	171.456,16	9.857,32
	Bali	**16.148.689,85**	**1.150.142,46**

Sumber: BPS Provinsi Bali tahun 2026

3.4. POTENSI SUMBER DAYA PESISIR

Di pesisir dan pulau-pulau kecil Bali terdapat tiga Kawasan Konservasi Perairan (KKP) seluas 43.595,59 ha, serta tiga kawasan cadangan seluas 58.132,03 ha. KKP ini berperan penting dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, termasuk pemulihan ekosistem seperti terumbu karang, padang lamun, dan mangrove, sekaligus mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan stok ikan dan biota laut.

Selain menjaga keanekaragaman hayati dan stabilitas habitat, KKP juga menyediakan jasa ekosistem bernilai ekologis, sosial, dan ekonomi. Ekosistem pesisir Bali yang kaya, termasuk mangrove dan terumbu karang, melindungi garis pantai, mendukung pengawetan plasma nutfah, serta mendukung kegiatan ekonomi, sosial budaya, pariwisata, penelitian, dan pendidikan. Interaksi antar-ekosistem ini membentuk sistem ekologis kompleks yang vital bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.

3.4.1. Potensi Mangrove

Wilayah pesisir Provinsi Bali memiliki keanekaragaman ekosistem yang relatif tinggi yang mempunyai peran penting dalam perlindungan sistem penyangga kehidupan di wilayah pesisir dan laut, pengawetan plasma nutfah serta mendukung ekonomi, sosial budaya masyakarat, rekreasi dan pariwisata, dan ilmu pengetahuan. Ekosistem pesisir tersebut meliputi mangrove, terumbu karang dan padang lamun.

Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (2017), luas hutan mangrove di Provinsi Bali mencapai 2.102,8 ha. Sebarannya meliputi 11 kawasan di lima Kabupaten/Kota, yaitu;

1) Teluk Benoa. Mangrove di Teluk Benoa sebagian besar termasuk Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Sebaran mangrove di kawasan ini luasnya 1115,4 ha, meliputi wilayah Kabupaten Badung dengan luas 597,7 ha dan Kota Denpasar dengan luas 517,7 ha. Ekosistem mangrove di kawasan ini tersusun atas 10 jenis mangrove yaitu *Sonneratia alba, Rhizophora apiculata, R. mucronata, R. stylosa, Bruguiera gymnorrhyza, Avicennia marina, dan A. lanata, Xylocarpus granatum* dan *Excoecaria agalocha.*

2) Perancak, Kabupaten Jembrana. Luas mangrove di kawasan ini yaitu 187,4 ha dimana habitat mangrove berada di muara sungai dan pertambakan. Sebagian mangrove yang berada di Desa Budeng dan Loloan Timur ditetapkan sebagai hutan produksi tetap dengan luas 53,72 ha. Mangrove di Perancak tersusun atas 9 jenis, yaitu *Ceriops decandra, C. tagal, Sonneratia alba, Rhizophora apiculata, R. stylosa, R. mucronata, Avicennia marina, Bruguiera gymnorrhyza*, dan *Excoecaria agalocha.*

3) Tuwed, Kabupaten Jembrana. Mangrove di kawasan Tuwed tersebar di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya dan Desa Banyubiru, Kecamatan Negara dengan luas 34,9 ha. Mangrove di kawasan ini terdiri atas 7 jenis, yaitu *Ceriops decandra, Sonneratia alba, Rhizophora apiculata, R. stylosa, R. mucronata, Avicennia alba, A. marina* dan *Bruguiera gymnorrhyza.*

4) Teluk Gilimanuk. Mangrove di kawasan Teluk Gilimanuk termasuk Taman Nasional Bali Barat. Luasnya adalah 305,9 ha, tersebar di Kabupaten Jembrana seluas 147,6 ha dan Buleleng seluas 158,3 ha. Sebaran habitat mangrove di kawasan ini meliputi tepian teluk dan tiga pulau kecil yaitu Pulau Burung, Pulau Kalong dan Pulau Gadung. Mangrove di kawasan ini mempunyai kekayaan jenis mangrove yang tinggi, meliputi 14 jenis, yaitu *Rhizophora apiculata, R. mucronata, R. lamarckii, R. stylosa, Ceriops tagal, Sonneratia alba, Avicennia marina, A. officinalis, A. lanata, Lumnitzera racemosa, Excoecaria agalocha, Bruguiera cylindrica,* dan *B. gymnorrhyza.*

5) Teluk Trima, Kabupaten Buleleng. Hutan mangrove di kawasan ini termasuk Taman Nasional Bali Barat, tersebar di Tanjung Kotal, Teluk Trima, dan Labuhan Lalang dengan luas 114,8 ha. Jumlah jenis vegetasi mangrove di kawasan ini sebanyak 13 jenis, yaitu *Ceriops tagal, C. decandra, Rhizopora apiculata, R. mucronata, R. stylosa, Sonneratia alba, Avicennia marina, Lumnitzera racemosa, Xylocarpus granatum, Xylocarpus mollucensis, Excoecaria agalocha, Pemphis achidula* dan *Bruguiera gymnorrhyza.*

6) Pulau Menjangan. Luas mangrove di Pulau Menjangan termasuk Taman Nasional Bali Barat dengan luas hanya 9,8 ha dimana habitatnya mengisi tepian pantai bagian selatan pulau dan sebagian kecil bagian utara pulau. Jumlah jenis vegetasi mangrove di Pulau Menjangan sebanyak 7 jenis, yaitu *Rhizopora apiculata, R. mucronata, R. stylosa, Sonneratia alba, Avicennia marina, A. alba,* dan *Pemphis achidula*.

7) Teluk Banyuwedang, Kabupaten Buleleng. Mangrove di Teluk Banyuwedang termasuk Taman Nasional Bali Barat, dengan luas 23,6 ha. Habitat mangrove tersebar di sekeliling tepian teluk. Vegetasi mangrove di kawasan ini tersusun atas 7 jenis, yaitu *Ceriops tagal, Rhizopora apiculata, R. mucronata, Sonneratia alba, Avicennia marina, A. officinalis,* dan *Bruguiera gymnorrhyza*.

8) Pejarakan, Kabupaten Buleleng. Mangrove di Pejarakan terletak di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak dengan luas 64,3 ha. Jenis mangrove di Pejarakan sebanyak 7 jenis yaitu *Rhizophora apiculata, R. mucronata, R. stylosa, Avicennia marina, A. alba, Bruguiera gymnorrhyza* dan *Sonneratia alba.*

9) Sumberkima, Kabupaten Buleleng. Mangrove di Sumberkima tersebar di Kawasan Teluk Sumberkima dengan luas 18,4 ha. Mangrove di Sumberkima hanya terdiri atas 5 jenis yaitu *Rhizophora apiculata, R. mucronata, R. stylosa, Avicennia marina* dan *Sonneratia alba.*

10) Nusa Lembongan. Mangrove di Nusa Lembongan termasuk kawasan hutan lindung dengan luas 221,5 ha, terletak di Pulau Nusa Lembongan, meliputi dua desa yaitu Desa Lembongan dan Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Jenis vegetasi mangrove yang ditemukan di Nusa Lembongan sebanyak 10 jenis, yaitu *Ceriops tagal, Sonneratia alba, Bruguiera gymnorrhyza, Rhizophora apiculata, R. stylosa, R. mucronata, Xylocarpus granatum, Lumnitzera racemosa, Avicennia alba,* dan *A. Officinalis.*

11) Nusa Ceningan. Mangrove di Nusa Ceningan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung tersebar secara terbatas di pantai timur laut pulau tersebut dengan luas 6,6 ha. Vegetasi mangrove di Nusa Ceningan sebanyak 8 jenis, yaitu *Ceriops tagal, Rhizophora apiculata, R. mucronata, Avicennia marina, A. alba, Lumnitzera racemosa, Sonneratia alba,* dan *Bruguiera gymnorrhyza.*

3.4.2. Ekosistem Terumbu Karang

Berdasarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (2020), luas total terumbu karang di wilayah pesisir Provinsi Bali mencapai 6.803,7 ha. Ekosistem ini merupakan habitat bagi 406 jenis karang Scleractinia hermatifik yang telah teridentifikasi.

Sebaran geografisnya menunjukkan 367 jenis terdapat di Pulau Bali, 296 jenis terdapat di Nusa Penida.

Selain itu, terdapat 13 jenis karang hasil survei yang masih perlu ditelaah, dan satu jenis Euphyllia sp. merupakan penemuan baru, sedangkan Isopora sp. masih perlu penelitian lebih lanjut. Dengan demikian, total jenis karang Scleractinia hermatifik yang tercatat di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil Bali adalah 420 jenis, yang termasuk dalam 16 famili dan 70 genus.

Ekosistem terumbu karang tersebar di 25 kecamatan di tujuh kabupaten/kota. Sebaran luas terumbu karang menurut kabupaten menunjukkan:

1. Kabupaten Buleleng: 2.199,0 ha (terluas)
2. Kabupaten Klungkung: 1.645,5 ha
3. Kabupaten Badung: 1.181,2 ha

Sebaran terumbu karang di kabupaten/kota lainnya mengikuti data rinci yang tersedia dari survei DKP Bali.

3.5. KONDISI UMUM DAN SEJARAH SINGKAT

Provinsi Bali merupakan salah satu di antara 34 provinsi di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata *(The Island of God).* Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok dengan Kota Denpasar sebagai ibu kota, yang terletak di bagian selatan pulau Bali.

Pengalaman pembangunan masa lalu dapat dijadikan pelajaran yang berharga, karena pembangunan yang terlalu memprioritaskan pada pembangunan bidang ekonomi khususnya fisik dan material dapat memberikan dampak yang kurang menguntungkan. Dampak yang jelas terjadi adalah semakin menipisnya nilai-nilai kemanusiaan (dehumanisasi) dalam proses pembangunan bangsa dan negara.

Bentuk pembangunan seperti ini tidak menguntungkan bagi upaya pembangunan struktur sosial dan budaya bahkan cenderung membuat semakin rapuh dan rentannya fundamen berbagai sistem dan pranata, baik pranata ekonomi, politik, pemerintahan, hukum, sosial dan pertahanan keamanan. Hal ini akan berakibat semakin lambatnya proses pemulihan ekonomi bahkan dapat meluas menjadi krisis moral, sosial dan krisis multidimensi yang berkepanjangan.

Pada bagian lain diperlihatkan, bahwa arus modernisasi dan globalisasi yang begitu deras dapat memperlemah ikatan kebangsaan sehingga diperlukan usaha untuk menata kembali berbagai pranata sosial kemasyarakatan dan kenegaraan. Oleh karena itu, pembenahan struktur dan pranata sosial budaya merupakan keharusan untuk merespon tantangan dimasa depan sekaligus untuk mengejar ketertinggalan. Dengan demikian, diperlukan transformasi sosial dan budaya sehingga mampu merespon berbagai tantangan dengan tetap mengedepankan kepribadian bangsa dan negara.

Provinsi Bali dikenal diseluruh dunia sebagai “The Island of Gods” yang memiliki modal budaya yang kaya sebagai sumber daya pembangunan. Kebudayaan tersebut didasari nilai-nilai keagamaan sehingga mencerminkan kearifan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta keahlian yang bersifat unik.

Budaya Bali yang seperti sekarang merupakan kriya cipta para leluhur yang telah berpandangan jauh ke depan. Unsur keseimbangan yang tidak mengabaikan kekhasan interaksi tentunya harus dipertahankan untuk menjaga keutuhan Bali. Para leluhur suci itu, seperti yang kita kenal salah satunya dengan Mpu Kuturan telah berhasil menata kehidupan masyarakat Bali dalam interaksi antar manusia, antara manusia dengan lingkungan serta sisi spiritualitas manusia itu sendiri.

Pada masa itu hanya sedikit paradigma kebudayaan Bali yang diarahkan pada pembangunan ekonomi. Hal ini karena situasi masyarakat yang relatif masih statis dalam persepsi kemajuan ekonominya. Hanya saja yang patut kita pertahankan dan

banggakan adalah bahwa apa yang telah dibuat para leluhur ini untuk kita telah berhasil menjadikan jati diri dan perilaku hidup orang Bali yang tidak dapat hilang dalam waktu ratusan tahun.

Sementara itu ikatan adat yang ada sekarang di Bali masih dianggap sebagai penghambat dari interaksi sosial masyarakat di luar komunitas adat mereka. Perkembangan ekonomi yang mendorong arus migrasi ke luar wilayah akan menyulitkan masyarakat untuk membagi waktu dalam bekerja maupun berinteraksi dengan komunal mereka. Sehingga tidak jarang masyarakat harus memberikan kompensasi yang tidak sedikit untuk mempertahankan keberadaannya di komunal ini.

Sejarah Bali bermula pada 3000–2500 SM ketika gelombang migrasi dari Asia datang dan menetap, yang dibuktikan dengan temuan peralatan batu di Desa Cekik. Masa prasejarah berakhir ketika ajaran Hindu dan aksara Sanskerta dari India masuk sekitar 100 SM, kemudian pengaruh India semakin kuat setelah abad ke-1 Masehi.

Nama Balidwipa mulai muncul dalam berbagai prasasti, termasuk Prasasti Blanjong (913 M) yang dikeluarkan oleh Sri Kesari Warmadewa. Pada masa ini sistem irigasi subak mulai berkembang, bersamaan dengan pertumbuhan tradisi budaya dan keagamaan di Bali.

Pada tahun 1343 M, Majapahit mendirikan kerajaan bawahan di Bali. Setelah Majapahit runtuh akibat meluasnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, banyak bangsawan, seniman, dan pemuka Hindu dari Jawa bermigrasi ke Bali sehingga memperkuat identitas budaya Bali yang bertahan hingga kini.

Bangsa Eropa pertama yang tiba adalah Cornelis de Houtman pada 1597. Belanda melalui VOC kemudian mencoba menaklukkan Bali, namun menghadapi perlawanan sengit. Pada abad ke-19, Belanda akhirnya mengokohkan kekuasaannya melalui strategi adu domba antar penguasa lokal dan serangkaian serangan besar, termasuk peristiwa Puputan Badung dan Puputan Klungkung, yang menewaskan ribuan rakyat Bali yang memilih bertempur sampai mati daripada menyerah.

Pada masa Perang Dunia II Bali diduduki Jepang. Setelah Jepang menyerah tahun 1945, Belanda mencoba kembali berkuasa namun ditentang pejuang Bali, termasuk I Gusti Ngurah Rai yang memimpin Puputan Margarana (20 November 1945). Seluruh pasukannya gugur dalam pertempuran tersebut, menjadi simbol perjuangan terakhir Bali melawan kolonial Belanda.

Tahun 1946 Belanda memasukkan Bali ke dalam Negara Indonesia Timur. Setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia pada 29 Desember 1949, Bali menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat, dan pada 1950 Bali resmi menjadi provinsi dalam Negara Republik Indonesia.

3.6. DESA ADAT & BANJAR ADAT

Penduduk yang tinggal di wilayah Provinsi Bali yang dikenal dengan istilah *Krama* Bali, memiliki tata kehidupan yang berakar pada kebudayaan Bali yang sangat kental

berupa adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang khas atau unik, indah, menarik, dan suci, serta memiliki spiritualitas yang tinggi. Tata kehidupan *Krama* Bali dengan kebudayaan tinggi tersebut diwadahi dalam Desa Adat. Desa Adat menjadi wadah menyatunya simbol-simbol dan nilai-nilai yang bersumber dari adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya dalam melaksanakan tata kehidupan *Krama* Bali sehari-harinya sehingga terwujud menjadi suatu alam kehidupan, selain khas/unik, indah, dan menarik, juga menjadi alam kehidupan yang memiliki kekuatan tersendiri (*mataksu*).

Tata kehidupan Krama Bali di Desa Adat diatur dengan *Awig-awig* dan *Pararem* yang hanya berlaku di masing-masing Desa Desa Adat atau disebut dengan *Desa Mawacara*. Desa Adat merupakan bentuk Desa yang *genuine* (asli, orisinil, dan asasi) hasil karya para Leluhur Bali.

Tata cara kehidupan *Krama* Bali menyatu dengan alam sehingga perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang sekaligus menjaga kelangsungan kehidupan manusia yang merupakan bagian dari alam itu sendiri. Oleh karena itu, tata kehidupan *Krama* Bali harus sejalan dan seirama dengan alam: "*hidup yang menghidupi, urip yang menguripi'*.

Tata cara kehidupan *Krama* Bali yang menyatu dalam alam, baik secara "*sakala"* maupun *"niskala"* terdapat dalam nilai-nilai *Sad Kerthi,* yaitu *enam sumber kesejahteraan atau kebahagiaan kehidupan* yang terdiri dari: *(1) Atma Kerthi, (2) Danu Kerthi, (3) Wana Kerthi, (4) Segara Kerthi, (5) Jana Kerthi, dan (6) Jagat Kerthi.*

Tata cara *kehidupan* masyarakat Bali yang bersumber dari nilai-nilai tersebut merupakan warisan leluhur untuk memelihara, menjaga, dan melestarikan alam Bali yang khas/unik, indah, dan suci/*metaksu* yang dituangkan menjadi nilai-nilai *Tri Hita Karana*: yaitu cara hidup untuk memelihara/menjaga 3 (tiga) keseimbangan/ keharmonisan manusia, yaitu:

a. Keseimbangan/keharmonisan antara manusia dengan Hyang Maha Pencipta/ Hyang Widhi Wasa yang dinamakan *Parahyangan*;
b. Keseimbangan/ keharmonisan antara manusia dengan sesama manusia yang dinamakan *Pawongan;* dan
c. Keseimbangan/keharmonisan antara manusia dengan alam beserta lingkungan yang dinamakan *Palemahan*.

Tata cara kehidupan untuk memelihara keseimbangan atau keharmonisan kehidupan *Krama* Bali dalam ranah spiritualitas, adat, agama, dan budaya dilaksanakan dengan *Upakara Pakerthi Yadnya* untuk Sad Kerthi, yaitu: *(1) Tumpek Landep, (2) Tumpek Wariga, (3) Tumpek Kuningan, (4) Tumpek Klurut, (5) Tumpek Uye atau Tumpek Kandang, (6) Tumpek Wayang*. Sistem nilai dalam kebudayaan Bali tersebut terbentuk melalui suatu pemahaman tentang *Manumadi,* yaitu sifat keutamaan kelahiran sebagai manusia; pemahaman tentang *Rta,* yaitu hukum alam; dan kewajiban manusia merawat/ memelihara keselarasan/ keharmonisan hubungan-hubungan kosmik, nilai tentang keniscayaan *Dharma* dalam pengembangan

kebudayaan, *lascarya,* yaitu sikap yang ikhlas dalam melaksanakan *swadharma* sebagai kewajiban hidup manusia, dan *Karma Phala,* yaitu kepercayaan kepada kehidupan hukum sebab-akibat.

Secara historis dan sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat (*Krama)* Bali adalah sumber daya manusia yang *unggul,* yaitu *berkualitas* dan *berintegritas* dengan nilai-nilai kebudayaan yang tinggi. Kualitas dan keunggulan *Krama* Bali tersebut tercermin dalam potensi yang luar biasa dengan karakter *jemet*, *seken*, *saja, beneh* dan *luwih,* serta *undagi* (kreatif dan inovatif). Dengan kualitas tersebut *Krama* Bali mampu menghasilkan karya-karya berbasis budaya, seperti tari-tarian, tetabuhan, lukisan, patung, arsitektur, dan kerajinan rakyat yang kreatif dan inovatif yang bernilai tinggi sehingga menarik perhatian masyarakat dunia.

Pada tahun 2026, secara administrasi, Provinsi Bali terbagi menjadi 8 kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, 1.500 Desa Adat. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 789/03-O/HK/2023 tentang Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Menjadi Desa Adat di Bali, Tahun 2023 Provinsi Bali menetapkan tambahan 7 Desa Adat baru yaitu:

1. Desa Adat Bale Agung di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;
2. Desa Adat Karang Dalem Tua di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;
3. Desa Adat Tegal Suci di Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli;
4. Desa Ada Siladan Kaler di Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli;
5. Desa Adat Cemlagi di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
6. Desa Adat Tukad Saang di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung; dan
7. Desa Adat Minggir di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.

Jumlah subak ini terdiri dari 1.596 subak sawah dan 1.130 subak abian. Jumlah terbesar subak sawah terdapat di Kabupaten Gianyar dengan 525 subak, sementara subak abian terbesar terdapat di Bangli dengan 275 subak.

3.7. SUKU, BAHASA, DAN KESENIAN

Beragamnya suku, bahasa dan kesenian tentunya merupakan aset daerah dalam meningkatkan kerukunan dan keragaman kebudayaan. Bertitik tolak dengan hal tersebut, pemerintah diharapkan dapat menjadikan aset daerah tersebut sebagai alat perekat kesatuan dan persatuan bangsa serta menjadi asset dalam peningkatan kepariwisataan.

Sampai dengan tahun 2010 hingga tahun 2020 masih tercatat sebanyak 4 suku/etnis yang tinggal di Provinsi Bali dengan dua bahasa keseharian, yaitu bahasa lokal dan bahasa nasional. Pada tahun yang sama tercatat pula sebanyak 276 situs bersejarah yang masih ada dan terpilihara dengan baik. Disamping itu, jumlah grup kesenian yang ada sebanyak 11.851 grup dengan jumlah gedung kesenian sebanyak 12 gedung kesenian. Sementara itu untuk tahun 2020 di Bali terdapat 33 musem yang digunakan menyimpan berbagai macam jenis koleksi seni maupun purbakala.

Bahasa Bali dan bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling luas pemakaiannya di Bali dan sebagaimana penduduk Indonesia lainnya, sebagian besar masyarakat Bali adalah bilingual atau bahkan trilingual. Meskipun terdapat beberapa dialek dalam bahasa Bali, umumnya masyarakat Bali menggunakan sebentuk bahasa Bali pergaulan sebagai pilihan dalam berkomunikasi. Secara tradisi, penggunaan berbagai dialek bahasa Bali ditentukan berdasarkan sistem catur warna dalam agama Hindu Dharma dan keanggotan klan (istilah Bali: *soroh, gotra*); meskipun pelaksanaan tradisi tersebut cenderung berkurang. Di beberapa tempat di Bali ditemukan sejumlah pemakai bahasa Jawa.

Bahasa Inggris adalah bahasa ketiga (dan bahasa asing utama) bagi banyak masyarakat Bali yang dipengaruhi oleh kebutuhan yang besar dari industri pariwisata. Para karyawan yang bekerja pada pusat-pusat informasi wisatawan di Bali, sering kali juga memahami beberapa bahasa asing dengan kompetensi yang cukup memadai. Bahasa Jepang juga menjadi prioritas pendidikan di Bali.

Masyarakat Bali menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa komunikasi antar sesama orang Bali selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Bahasa Bali merupakan subkelompok dari rumpun bahasa Austronesia Barat, dipergunakan oleh sekitar tiga juta penutur. Bahasa Bali memiliki fungsi dan kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat Bali terutama pada topik-topik pembicaraan yang bersifat tradisional seperti pembicaraan masalah adat (dalam rapat atau pertemuan yang disebut sangkep) kebudayaan dan agama (Hindu).

Bahasa Bali terdiri atas dua dialek:

a. Dialek Bali Aga atau Bali Mula yang dituturkan oleh penduduk Bali di daerah dataran tinggi di Bali
b. Dialek Bali Dataran yang dituturkan oleh penduduk yang pada umumnya berdiam di daerah dataran rendah di Bali.

Masyarakat yang menggunakan dialek Bali Aga disebut masyarakat Bali Aga dan bermukim di wilayah pegunungan. Daerah pengguna dialek Bali Aga meliputi Kabupaten Karangasem, yaitu di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis dan Desa Seraya, Kecamatan Karangasem; Kabupaten Bangli, yaitu di Desa Terunyan dan Kecamatan Kintamani; Kabupaten Klungkung, yaitu di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida; Kabupaten Badung bagian utara, yaitu di Kecamatan Ketihingan dan Petang; Kabupaten Tabanan, yaitu di Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel; Kabupaten Buleleng, yaitu di Desa Sepang, Kecamatan Busung Biu; Kabupaten Jembrana, yaitu di Desa Nusasari, Kecamatan Melaya. Selain itu, bahasa Bali juga dituturkan di berbagai daerah lainnya di Indonesia, yakni di Nusa Tenggara Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Kapuas.

Dialek Bali Dataran digunakan oleh masyarakat Bali yang bertempat tinggal di daerah pesisir atau dataran rendah di Bali, baik di bagian utara Bali maupun bagian selatan Bali. Dialek Bali Dataran menyebar hampir di seluruh wilayah di Bali. Adapun wilayah

yang menggunakan dialek bali dataran seperti Kabupaten Klungkung dari wilayah utara di kecamatan Banjarangkan yaitu Desa Bumbungan; Kabupaten Jembrana, yaitu desa Pengragoan, kecamatan Pekutatan; Kabupaten Tabanan, yaitu di desa Bantas, kecamatan Selemadeg Timur dan desa Luwus, kecamatan Baturiti; Kabupaten Badung, yaitu di desa Baha, kecamatan Mengwi dan Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan; Kota Denpasar yaitu di Kampung Kepoan, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan; Kabupaten Gianyar, yaitu di Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang dan Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh; Kabupaten Klungkung, yaitu di Kampung Toyapakeh, Kecamatan Nusa Penida dan Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung; Kabupaten Karangasem, yaitu di Desa Bebandem dan Kampung Kecicang Muslim, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebanden serta Desa Tianyar, Kecamatan Kubu; Kabupaten Bangli, yaitu di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku; Kabupaten Buleleng, yaitu di Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar, dan Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak.

Bahasa Bali mengenal sistem sor singgih atau tingkatan-tingkatan berbahasa terutama bahasa Bali Dataran karena mendapatkan pengaruh dari Jawa. Tingkatan-tingkatan berbahasa tersebut masih dipertahankan hingga kini oleh masyarakata Bali terutama dalam ranah-ranah tradisional. Sistem Pelapisan sosial masyarakat Bali yang dikenal dengan catur warna sangat besar pengaruhnya terhadap penggunaan Bahasa Bali. Masing-masing kelas sosial dalam masyarakat Bali akan menggunakan bahasa Bali sesuai dengan siapa yang diajak bicara. Seorang Sudra akan berbicara dengan bahasa Bali halus kepada seseorang dari kasta Brahmana.

Bahasa Bali terus mengalami perkembangan terutama bahasa Bali dataran yang disebut sebagai Bahasa Bali standar. Berdasarkan hasil keputusan Pesamuhan Agung Bahasa Bali yang diadakan tahun 1974 bahasa Bali standar atau baku digunakan oleh masyarakat Bali dalam sekolah-sekolah, pertemuan-pertemuan, surat menyurat, kesusastraan, media massa elektronik dan cetak, adat dan budaya. Bahasa Bali baku ini mengacu pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat tutur bahasa Bali yang berdomisili di Klungkung dan kota Singaraja, hal ini disebabkan karena kedua wilayah ini cukup lama menjadi pusat kekuasaan politik, ekonomi dan kebudayaan Bali. Selain itu, bahasa Bali di kedua daerah tersebut memiliki ciri yang sama baik secara fonologis maupun sintaksis.

Terdapat perbedaan yang cukup kentara dari bahasa Bali yang dituturkan di luar Bali dengan yang dituturkan di daerah Bali dan dari dialek Bali Aga dengan dialek Bali Dataran. Berdasarkan perhitungan dialektometri, persentase perbedaan yang terukur antara dialek Bali Aga dengan dialek Bali Dataran adalah sebesar 60%. Jika ditinjau lebih luas lagi terhadap daerah luar Bali, isolek Bali yang berada di pulau Bali memiliki perbedaan sebesar 71,75% dengan bahasa Bali di Nusa Tenggara Barat; sebesar 69,5% jika dibandingkan dengan bahasa Bali di Jawa Timur; sebesar 77,5% jika dibandingkan dengan bahasa Bali di Lampung; dan sebesar 76,75% jika dibandingkan dengan bahasa Bali di Sulawesi Tenggara.

3.8. KAWASAN SUCI DAN TEMPAT SUCI

3.8.1. Kawasan Suci

Menurut Bhisama PHDIP 1994, Agama Hindu dalam kitab sucinya Weda-Weda, telah menguraikan tentang apa yang disebut dengan tempat-tempat Suci dan Kawasan Suci, Gunung, Danau, Campuhan (pertemuan dua sungai), Pantai Laut dan sebagainya diyakini memiliki nilai-nilai kesucian. Oleh karena itu Pura dan tempat-tempat suci umumnya didirikan di tempat tersebut, karena di tempat itu orang-orang suci dan umat Hindu mendapatkan pikiran-pikiran suci (wahyu).

Tempat-tempat suci tersebut telah menjadi pusat-pusat bersejarah yang melahirkan karya-karya besar dan abadi lewat tangan Orang-Orang Suci dan para Pujangga untuk kedamaian dan kesejahteraan umat manusia, Maka didirikanlah Pura-Pura Sad Kahyangan, Dang Kahyangan, Kahyangan Tiga dan lain-lain.

Selanjutnya pengertian dan jumlah Kawasan Suci berkembang, dan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

Kawasan Suci adalah suatu wilayah yang melengkapi bangunan suci maupun wilayah pendukung kegiatan pada bangunan suci tersebut yang telah mendapatkan upacara “bhumi Sudha” yaitu upacara untuk menarik kekuatan Ida Sanghyang Widhi dan menghilangkan segala kekotoran secara spiritual terhadap wilayah/kawasan suci tersebut, seperti ; danau, hutan, laba pura, mata air suci (beji), sungai, jurang, ngarai atau campuhan (pertemuan sungai), pantai, setra dan perempatan agung. Sedangkan ukuran dari suatu kesucian adalah sangat relative dan sulit ditentukan, tetapi untuk adanya suatu kebersamaan sikap, prilaku dalam menghayati sesuatu perlu adanya keyakinan terhadap apa yang dipercaya di dalam pelaksanaan agama Hindu. Suci adalah suatu keadaan yang diyakini dan dipercaya oleh umat Hindu baik terhadap tempat, wilayah, benda, ruang, waktu yang memberikan rasa aman, tentram, rasa tenang, rasa hening dan telah mendapat upacara secara agama Hindu sehingga tercapainya keseimbangan, keselarasan dan ketentraman hidup. Hal ini sesuai dengan jiwa yang termuat dalam Bhisama PHDIP 1994.

Penerapan Kawasan Suci agar penerapan program pembangunan yang seimbang perlu adanya penyempurnaan terhadap ***Tri Hita Karana***, yaitu menjaga kelestarian dan kesucian ***Sad Kertih*** serta menjaga wilayah Bhisama, yaitu

a. ***Atma Kerthi*** , kesejahteraan jiwa atau rohani, yang dilakukan dengan berbagai program di setiap *desa pakraman* atau berbagai *pasraman*, *paguyuban* di bidang kerohanian dan upaya melindungi, memelihara, dan memungsikan berbagai kawasan suci

b. ***Wana Kerthi,*** yaitu kesejahteraan tumbuh-tumbuhan dan segala isinya yang diwujudkan dalam bentuk hutan. Secara niskala dahulu setiap hutan dibangun Pura Alas Angker, untuk menjaga hutan secara niskala dan secara

sekala harus dibentengi dengan aturan perlindungan kawasan hutan. Dari hutan vibrasi kesucian menyebar sesuai dengan lontar Wana Kerthi yang menyebutkan "*Anganyut aken letuhing bhuwana*" yang artinya menghilangkan niat dan tindakan yang merusak alam, dibuatlah oleh leluhur dalam bentuk hari raya tumpek bubuh atau wariga untuk memuja Hyang Tumuwuh "dewa tumbuh-tumbuhan", dengan memuja kita kuat jiwa untuk selalu ingat menjaga serta melestarikan alam untuk kesejahteraan manusia.

c. ***Danu Kerthi*** yaitu suatu upaya menjaga kelestarian dan kesucian sumber-sumber air tawar, yang diwujudkan dengan Danu. Dalam *Menawa Dharma Sastra* IV.52, sangat dilarang berludah, kencing, membuang kotoran apa lagi membuang sampah dan racun di kawasan Danu. Barang siapa yang melakukan itu akan kekurangan kesejahteraan/ makna hidupnya. Saat ini kelestarian fungsi danau telah menurun seingga perlu adanya program pembangunan untuk mengembalikan fungsinya.

d. ***Segara Kerthi*** yaitu upaya untuk menjaga kelestarian samudra sebagai sumber alam tempat leburnya semua kekeruhan. Samudra memiliki fungsi yang sangat kompleks dalam kehidupan umat manusia. Di segara-lah diadakan berbagai macam upacara penyucian dan peleburan seperti nangluk merana, melasti dan menghanyut abu jenazah dan lainnya. Semua upacara itu bermakna untuk menjaga kelestarian dan kesuburan segara. Dari segara, semuanya bermula dan berakhir. Tepi segara hendaknya tetap dijaga hutan bakaunya, tidak dikotori dengan pembuangan sampah, tetap dijaga kesucian dan keserasiannya sebagai tempat pengheningan dan peleburan bagi masyarakat.

e. ***Jagat Kerthi*** yaitu upaya untuk melestarikan keharmonisan sosial yang dinamis.Wujud dari ini adalah desa pakraman. Dalam sistem desa ini dibangun suatu keharmonisan antara hubungan manusia dan *Ida Hyang Widhi* dengan sradha dan bhakti, hubungan antara manusia dan sesama berdasarkan saling pengabdian "*paras-paros sarpanaya salumlum sebayantaka*", hubungan antara manusia dan lingkungannya berdasarkan kasih sayang. Hubungan ini merupakan hubungan timbal balik yang disebut *Cakra Yadnya*. Dalam *Bhagawadgitha* disebutkan hubungan tersebut akan menimbulkan suasana sosial yang menjamin setiap orang dapat menjalankan swadharma-nya masing-masing.

f. ***Jana Kerthi*** yaitu membangun kualitas manusia secara individu maupun kelompok sehingga menjadi manusia "*pawongan*" Bali yang sejahtera, dengan memberikan kecerdasan spiritual berkelanjutan untuk menjaga keajegan pembangunan Bali.

Penerapan kawasan suci diatas ke dalam fungsi ruang, perlu adanya kebijakan untuk memposisikan fungsinye tersebut didalam hirarki zonasi fungsi ruang. Dengan demikian diperlukan adanya kebijakan dalam pengembangan Kawasan Lindung berupa perlindungan terhadap kawasan kawasan yang memiliki

potensi alam yang khas, nilai historis dan budaya, serta kawasan yang diyakini memiliki nilai kesucian untuk mendukung tatanan kebudayaan Bali sebagai jatidiri wilayah. Untuk mengedepankan jatidiri dan kearifan lokal Bali yang berbeda dengan Provinsi lainnya di Indonesia, maka perlu dikembangkan komponen kawasan lindung tersendiri yaitu Kawasan Perlindungan tentang Kesucian.

Pada kenyataannya fungsi ruang kawasan suci diatas akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kawasan-kawasan lindung yang rujukan atau nomenklatur nya telah ditetapkan oleh Undang-Undang Penataan Ruang yang telah dirinci dalam RTRWN.

Karena kawasan suci akan overlap dengan beberapa komponen kawasan lindung seperti : Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Resapan Air, Kawasan Sempadan Danau, Kawasan Sempadan Pantai, Kawasan sempadan Sungai, maka beberapa pengelolaan terkait perlindungan tersebut di atas dapat disetarakan. Namun fungsi perlindungan kesucian tetap menjadi ketentuan yang harus ditambahkan dalam zonasinya. Permasalahanya adalah sulitnya menentukan batas fisik dari Kawasan-kawasan suci tersebut.

Kawasan Suci yang tercantum dalam Revisi RTRW Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

1. Kawasan Suci Pura Erjeruk
2. Kawasan Suci Pura Goa Laah dan Pura Silayukti
3. Kawasan Suci Pura Masceti, Pura Kentel Gumi, Pura Watu Klotok
4. Kawasan Suci Pura Pekendungan dan Pura Tanah Lot
5. Kawasan Suci Pura Petitenget
6. Kawasan Suci Pura Rambut Siwi
7. Kawasan Suci Pura Sakenan
8. Kawasan Suci Pura Srijong

3.8.2. Kawasan Tempat Suci

Beradasarkan Bhisama PHDI-1994, Tempat suci/bangunan suci yang ada di Bali sering disebut Pura atau Kahyangan yang berwujud bangunan yang disakralkan sebagai tempat memuja *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Tempat suci adalah suatu tempat yang berwujud tempat suci/bangunan suci atau Pura atau *Kahyangan* yang berwujud bangunan yang disakralkan sebagai tempat memuja *Ida Sang Hyang Widhi wasa*. Tempat suci terdiri dari *Kahyangan Tiga*, *Dhang Kahyangan*, *Kahyangan jagat*, *Sad Kahyangan* dan sebagainya.

Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia mengenai Kesucian Pura No. 11/Kep/I/PHDI/1994 tertanggal 25 Januari 1994, menyatakan bahwa tempat-tempat suci tersebut memiliki radius kesucian yang disebut daerah ***Kekeran*****,** dengan ukuran ***Apeneleng, Apenimpug*****,** dan ***Apenyengker***. Rinciannya adalah :

1. Untuk Pura *Sad Kahyangan* dipakai ukuran ***Apeneleng Agung*** (minimal 5 km dari Pura)
2. Untuk Pura *Dang Kahyangan* dipakai ukuran ***Apeneleng Alit*** (minimal 2 km dari Pura)
3. Untuk Pura *Kahyangan Tiga* dan lain-lain dipakai ukuran ***Apenimpug*** atau ***Apenyengker*** (tanpa menyebut jarak minimal dari Pura)

Selanjutnya *Bhisama* Kesucian Pura juga mengatur zonasi pemanfaatan ruang di sekitar pura yang berbunyi sebagai berikut:

- Berkenaan dengan terjadinya perkembangan pembangunan yang sangat pesat, maka pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di daerah radius kesucian pura (daerah *Kekeran*) hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan Hindu, misalnya didirikan *Darmasala, Pasraman* dan lain-lain, bagi kemudahan umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan (misalnya *Tirtayatra, Dharmawacana, Dharmagitha, Dharmasadana* dan lain-lain).

Pengertian terkait *Bhisama* Kesucian Pura adalah :

- Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci;

Maka terkait dengan pengertian tersebut, maka Bhisama Kesucian Pura dapat diartikan sebagai sebuah janji suci umat Hindu kepada Bali, bahwa dalam radius kesucian pura yang telah ditetapkan telah diatur penggunaannya sesuai arahan zonasi diatas. Arahan zonasi diatas bila diterjemahkan dalam fungsi ruang mempunyai pengertian bahwa dalam radius kesucian pura hanya diperbolehkan untuk pembangunan fasilitas keagamaan, dan ruang terbuka yang dapat berupa ruang terbuka hijau maupun budidaya pertanian.

Kawasan Tempat Suci di provinsi Bali yang masuk di dalam RTRW provinsi Bali adalah sebagai berikut.

1. Kawasan Tempat Suci Pura Batukaru di Kabupaten Tabanan;
2. Kawasan Tempat Suci Pura Luhur Uluwatu di Kabupaten Badung;
3. Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Mangu di Kabupaten Badung;
4. Kawasan Tempat Suci Pura Pusering Jagat di Kabupaten Gianyar;
5. Kawasan Tempat Suci Pura Kentel Gumi di Kabupaten Klungkung;
6. Kawasan Tempat Suci Pura Goa Lawah di Kabupaten Klungkung;
7. Kawasan Tempat Suci Pura Batur di Kabupaten Bangli;
8. Kawasan Tempat Suci Pura Agung Besakih di Kabupaten Karangasem;
9. Kawasan Tempat Suci Pura Andakasa di Kabupaten Karangasem; dan

3.9. KEANEKARAGAMAN HAYATI

Keanekaragaman hayati merupakan ukuran variasi kehidupan di alam, mencakup keragaman tumbuhan, hewan, mikroorganisme, gen yang dikandungnya, serta ekosistem tempat mereka berinteraksi. Keanekaragaman hayati yang ada saat ini merupakan hasil evolusi selama miliaran tahun melalui proses alami dan turut dipengaruhi aktivitas manusia. Dalam jaring kehidupan, manusia menjadi bagian tak terpisahkan sekaligus sangat bergantung pada keberlangsungan keanekaragaman tersebut.

Keanekaragaman hayati juga mencakup keragaman genetik, yaitu variasi gen dalam populasi maupun antarspesies. Variasi genetik inilah yang menentukan ciri khas setiap individu, seperti perbedaan varietas tanaman atau jenis ikan. Karena perannya yang vital dalam menjaga keseimbangan, produktivitas, dan ketahanan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati menjadi isu pembangunan penting. Penurunan keanekaragaman hayati melemahkan fungsi ekosistem dan menurunkan kemampuan alam menyediakan lingkungan hidup yang sehat bagi manusia.

Di Provinsi Bali, ketahanan keanekaragaman hayati diwujudkan melalui berbagai upaya pelindungan dan pelestarian. Bali telah menetapkan kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi sebagai penyangga keseimbangan ekologis. Hutan lindung seluas 97.407,95 ha (71,19% dari total kawasan hutan) tersebar pada 18 kawasan, terutama di wilayah pegunungan yang berfungsi penting melindungi daerah hilir. Kawasan hutan konservasi seluas 30.570,53 ha (22,34%) mencakup Taman Nasional, empat Taman Wisata Alam, dan satu Taman Hutan Raya; termasuk perairan seluas 4.116,89 ha yang berada di dalam Taman Nasional Bali Barat.

Untuk ekosistem laut, Bali juga menetapkan tiga kawasan konservasi perairan (KKP) dengan luas 43.595,59 ha, serta mencadangkan tiga kawasan tambahan seluas 58.132,03 ha. KKP berfungsi penting dalam memulihkan ekosistem pesisir dan laut, menjaga keberlanjutan sumber pangan, dan melindungi berbagai jasa ekosistem. Dua pilar utama KKP adalah pengelolaan berbasis ekosistem dan penyediaan no-take areas (NTA) atau zona larang ambil, yang dibebaskan dari aktivitas penangkapan untuk memastikan pemulihan alami dan perlindungan jangka panjang.

Potensi Keanekaragaman Hayati Kawasan Hutan di Provinsi Bali dapat dijabarkans ebagai berikut.

a. Kawasan Hutan Batukau

   Kawasan Hutan Batukau merupakan hutan hujan tropis dataran tinggi yang memiliki curah hujan tinggi, kelembapan sepanjang tahun, serta keanekaragaman flora yang melimpah. Letaknya di zona pegunungan menjadikan kawasan ini sangat strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga tata air *(hidro-orologis)* bagi wilayah-wilayah di Bali bagian selatan. Tingginya keragaman tumbuhan dan satwa menjadikan Batukau sebagai area dengan nilai konservasi penting dan prioritas di Provinsi Bali.

Inventarisasi menunjukkan terdapat 45 jenis flora di kawasan ini. Beberapa jenis yang tergolong langka antara lain cemara pandak *(Podocarpus imbricatus),* kepelan *(Manglietia glauca),* dan cemara geseng *(Casuarina junghuniana).* Adapun flora yang paling dominan meliputi bunut *(Ficus indica),* segang *(Polyosma integrifolia),* seming *(Pometia spp.),* balantih *(Homalanthus giganteus),* dan keduduk *(Astronia spectabilis).*

Untuk fauna, Hutan Batukau menjadi habitat bagi beberapa spesies yang jarang dijumpai di kawasan lain, seperti kijang *(Muntiacus muntjak),* babi hutan *(Sus vittatus),* kucing hutan *(Felis bengalensis),* trenggiling *(Manis javanica),* landak *(Hystrix brachyura),* dan bajing tanah (Lariscus insignis). Sementara itu, fauna yang lebih umum dan sering ditemui meliputi ayam hutan *(Gallus sp.)* dan berbagai jenis burung.

b. Kawasan Hutan Bali Barat

Kawasan hutan Bali Barat termasuk ekosistem hutan gugur kering, yaitu hutan dengan ketinggian di bawah 1200 m dengan curah hujan kurang dari 1500 mm, mengalami kekeringan lebih dari 6 bulan, hampir semua pohon pada daerah ini berganti daun. Khusus di Pulau Menjangan dan Parapat Agung terdapat ekosistem hutan savana dimana di ekosistem savanna ini terdapat jenis vegetasi terpenting yaitu *Acasia leucophloca, Azadirachta indica, Borassus flabellifer, Corypha utan, Eucalyptus alba*. Sementara itu, di kawasan Teluk Gilimanuk, Teluk Trima dan Teluk Banyuwedang terdapat ekosistem hutan *mangrove.*

Jenis-jenis flora yang mendominasi kawasan ini antara lain duren-duren *(Algaia argentea),* kesambi (Schiechera oleosa), bayur *(Spermum diversifolium),* cendana *(Santalum album),* sawo kecik *(Manilkara kauki),* lontar (Borassus flabellifer), dan vegetasi pantai seperti tancang *(Bruguiera rymnorrhita),* api-api *(Avicennia marina)* dan lain-lain. Sementara itu, flora yang tergolong langka yang terdapat di TNBB adalah sebagai berikut (TNBB, 2011):

- Bayur (*Spermum diversifolium*), dijumpai pada ketinggian 500 m dpl di Kelatakan, Teluk Trima, Belimbingsari dan Ambyarsari.
- Buni *(Antidesma bunius),* terdapat pada ketinggian 0-100 m dpl di Kelatakan, Sepenanjung Prapat Agung, Pulau Menjangan, Cekik dan Ambyarsari.
- Bungur *(Lager stroemia speciosa),* terdapat pada ketinggian 300 m dpl di Kelatakan, Sepenanjung Prapat Agung, Teluk Trima dan Ambyarsari.
- Burahol *(Stelechocarpus burahol),* dijumpai di lokasi Kelatakan.
- Cendana *(Santalum album),* sebagian besar merupakan hutan tanaman dan sebagian kecil hidup secara liar di alam. Penyebarannya di TNBB terdapat di Sumberejo, Sumber Klampok (hutan tanaman) dan tumbuh liar di Sepenanjung Prapat Agung.
- Kemiri *(Aleulitas moluccana),* dijumpai pada ketinggian 50 m dpl di Sumber Klampok, Kelatakan dan Ambyarsari.

- Kepuh *(Sterculia foetida)*, dijumpai pada ketinggian 100 m dpl merata di seluruh kawasan, meskipun dalam jumlah sedikit antara lain di Sepenanjung Prapat Agung, Cekik, Kelatakan dan Goris.
- Kesambi *(Schleichera oleosa),* dijumpai di seluruh kawasan.
- Keruing Bunga *(Dipterocarpus hasselti),* dijumpai pada ketinggian 500 m dpl.
- Mundu *(Garcinea dulcis),* dijumpai pada ketinggian 400 m dpl di Microwave, Tukad Trenggulun dan Tukad Bajra.
- Pulai *(Alstonia scholaris),* dijumpai pada ketinggian 50 m dpl di Sumberejo, Kelatakan, Penginuman dan Teluk Trima.
- Sawo kecik *(Manilkara kauki),* tumbuh di atas ketinggian 330 m dpl merupakan flora khas yang tumbuh secara alami dan membentuk tegakan murni yang terdapat di wilayah Sepenanjung Prapat Agung.
- Sonokeling *(Dallbergia latifolia),* terdapat di Sepenanjung Prapat Agung, Cekik dan Pulau Menjangan.
- Trengguli *(Cassia fistula),* dijumpai pada ketinggian di bawah 400 m dpl, tersebar di Prapat Agung, Cekik, Kelatakan, Labuhan Lalang dan Goris

Keanekaragaman jenis satwa/fauna khas dan endemik di kawasan hutan Bali Barat yaitu burung jalak bali *(Leucopsar rothschildi).* Selain itu, di kawasan ini juga terdapat banteng *(Bos javanicus)*, kijang *(Muntiacus muncak)*, Rusa *(Cervus timorensis),* bangau *(Egretta sp.),* raja udang *(Halcyon chloris),* koak malam *(Nycticorax nycticorax)*, pecuk ular *(Anghinga melanodaster)* dan lain sebagainya. Jenis-jenis mamalia langka yang terdapat di kawasan hutan Bali Barat antara lain Trenggiling *(Manis javanicus),* Jelarang *(Ratufa bicolor),* Landak *(Hystrix branchyura)*, Kucing hutan *(Felis bengalensis),* Luwak (*Felis marmorata)*, Rusa *(Cervus timorrensis),* Kijang (Muntiacus muntjak), Banteng *(Bos javanicus)* dan Kancil *(Tragulus javanicus)*. Jenis-jenis burung langka antara lain Gangsa Batu *(Sula leucogaster),* Kuntul karang *(Egreta sacra),* Ibis Putih *(Theskonis melanochepalus),* Elang tikus *(Elanus caeruleus),* Elang hitam *(Spizaetus cirrbatus),* Elang Belalang *(Nicrohierax fringillarius),* Gagajahan Besar *(Numenius arquata),* Gagajahan Kecil *(Numenius minutus),* Camar Karudi Putih *(Ancus minutus),* Raja Udang Biru Kecil *(Alcedo caerulescens),* Raja Udang Merah *(Ceyx erithacus),* Raja Udang Kalung Putih *(Halcyon chloris)*, Raja Udang *(Halcyon sancta),* Burung Paok Ekor Biru *(Pitta guajana),* Burung Kipas *(Rhipidura javanica),* Jalak Bali Putih *(Leucopsar rothschildi),* Jalak Putih *(Sturnus melanopterus)*, Bluwok *(Mycteria cinarea),* Pecuk Ular *(Anhinga melanogaster),* Bangau Tongtong *(Leptoptilos javanicus),* Elang Laut Perut Putih *(Haliaetus leocogaster),* Dara Laut Jambul Besar *(Sterna bergii),* Elang Ular *(Spilornis cheela*), Burung Madu Kuning *(Nectarinia jugularis),* Wili-wili *(Esacus magnirostris)* dan Dara Laut *(Sterna dougallii)* (TNBB, 2011).

c. Kawasan Hutan Penelokan-Kintamani

Kawasan hutan Penelokan Kintamani tergolong hutan hujan dataran tinggi, dengan kondisi saat ini sebagian besar merupakan hutan sekunder. Secara

umum, ekosistem kawasan ini didominasi oleh hutan tanaman hasil reboisasi, sehingga banyak jenis flora yang tumbuh merupakan tanaman yang sengaja ditanam kembali. Jenis dominan antara lain: puspa *(Schima noronhae)*, ampupu *(Eucalyptus europhylla),* tusam *(Pinus merkusii),* dan mahoni *(Swietenia macrophylla).*

Selain itu, kawasan ini juga memiliki berbagai jenis tanaman lain seperti:

- Cemara gunung *(Casuarinas montana)*
- Sonokeling *(Dalbergia latifolia)*
- Kerinyuh *(Euphatorium sp.)*
- Harendong (*Melastoma sp.)*
- Tembelekan *(Lantana camara)*
- Albizia (*Paraserienthis falcataria)*
- Belantih *(Homalanthus sp.)*
- Seming *(Pometia spp.)*
- Pakis lemputu *(Cyathea contaminans)*
- Pakis kinca *(Nephrolepis hirsutula)*
- Anggrek hutan *(Phaius thankervillea)*
- Cyprus *(Cupressus curpressa)*
- Kepelan *(Magnolia sp.)*

Keanekaragaman fauna di kawasan ini masih cukup tinggi. Jenis-jenis satwa yang dapat dijumpai antara lain:

- Mamalia: ayam hutan *(Gallus sp.),* landak *(Hystrix brachyura)*, trenggiling *(Manis javanica),* kera abu-abu *(Macaca fascicularis),* musang *(Paradoxurus hermaphroditus),* tupai *(Sciurus nonatus),* kalong *(Pteropus vampyrus)*.
- Burung: perkutut *(Geopelia striata),* kepodang *(Oriolus chinensis),* prenjak *(Prinia familiaris),* tungkling *(Pycnonotus ariceps),* rase *(Vireocula javanicus),* dan berbagai jenis burung lainnya.

Kawasan ini merupakan habitat penting bagi flora dan fauna khas pegunungan Bali, sekaligus berperan dalam pelestarian keanekaragaman hayati di wilayah Kintamani (BKSDA Bali, 2011).

d. Kawasan Hutan Sangeh

Tipe ekosistem kawasan hutan Sangeh termasuk tipe hutan dataran rendah, yang didominasi oleh jenis pohon Pala *(Dipterocarpus trinervis)* alam, suatu tipe ekosistem hutan Diterocarpus trinervis alam yang menempati luasan yang cukup besar, yang masih tersisa di Bali. Ekosistem ini menjadi sangat penting dari aspek ilmu pengetahuan, karena pada saat ini hutan alam jenis *Dipterocarpus* hanya dijumpai di Sumatera dan Kalimantan Pohon pala *(Dypterocarpus haseltii)* digolongkan sebagai flora langka di Bali. Namnun demikian, terdapat beberapa jenis flora lainnya. Sedangkan keanekaragaman

jenis satwa yang banyak terdapat kawasan hutan ini yaitu kera abu-abu *(Macaca fascicularis).*

e. Kawasan Hutan Lainnya

Di kawasan hutan lainnya yang merupakan hutan lindung umumnya tidak memiliki keanekaragaman hayati flora dan fauna yang tergolong langka. Beberapa kawasan hutan didominasi oleh lahan kritis dengan keanekaragaman jenis flora yang sangat rendah, seperti kawasan hutan Bukit Pawon yang merupakan bukit tandus, dan di kawasan hutan Bunutan, Bukit Gumang, Kondangdia, Suana dan Sakti hanya didominasi oleh semak belukar dan rumput lahan kering. Sedangkan keanekaragaman jenis flora di beberapa kawasan hutan sebagai berikut:

1) Kawasan hutan Puncak Landep: gintungan *(Bischofia javanica),* pradah, dau, juwet *(Crypteronia arborea),* lateng *(Laportea spp),* kayu batu *(Eugenia jamboloides),* teep, dan yeh-yeh *(Savravia nudifora).*
2) Kawasan hutan Gunung Mungsu: yeh-yeh *(Savravia nudifora),* ades, lateng *(Laportea spp)*, kresek, dapdap *(Erythrina variegate),* dan bunut *(Ficus indica*).
3) Kawasan hutan Gunung Silangjana: Ae, kayu adis *(Lindera polyantha),* teep, belantih *(Homalanthus giganteus),* dan lateng *(Laportea spp).*
4) Kawasan hutan Munduk Pengajaran: Kayu batu, belantih *(Homalanthus giganteus),* sompangan, gintungan (*Bischofia javanica),* pradah, juwet *(Crypteronia arborea),* lengkaik, dan purna jiwa.
5) Kawasan hutan Gunung Abang-Agung: Pinus *(Pinus merkusii), ampupu (Eucalyptus europhylla),* belalu, dapdap *(Erythrina variegate)*, seming *(Pometia spp),* cemara *(Casuarinas montana*), dan bengkel.
6) Kawasan hutan Gunung Seraya: kayu jeleme, gintungan *(Bischofia javanica*), butuh semal, buni *(Antindesma bunius*), udu, intaran gunung *(Azadichrata sp.),* dan kaliasem.
7) Kawasan hutan Yeh Ayah: gempinis (*Melia exelsa)*, teep, kemiri *(Aleurites moluccana),* belalu, book, sompang, dan kepundung.
8) Kawasan hutan Yeh Leh-Yeh Lebah: kutat, dapdap *(Erythrina variegate),* bayur (*Spermum diversifolium),* tangi, duren-duren *(Algaia argentea),* kemiri *(Aleurites moluccana),* dan balang.

BAB 4

PROFIL DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025



BAB 4
EKONOMI & KEUANGAN DAERAH

4.1. STRUKTUR DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

4.1.1. Struktur Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2025

Struktur ekonomi Bali tahun 2025 didominasi oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai PDRB ADHB sebesar Rp72,20 triliun atau sekitar 22,27% terhadap total PDRB Bali. Besarnya kontribusi sektor ini memperlihatkan bahwa aktivitas pariwisata masih menjadi penggerak utama perekonomian Bali, terutama melalui kegiatan hotel, restoran, jasa makanan dan minuman, serta berbagai aktivitas pendukung pariwisata lainnya.

Kontributor terbesar kedua adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dengan nilai PDRB sebesar Rp42,53 triliun atau sekitar 13,12%. Posisi sektor ini menunjukkan bahwa di tengah kuatnya dominasi sektor jasa dan pariwisata, sektor pertanian tetap memegang peranan strategis dalam struktur ekonomi Bali, khususnya sebagai sumber penghidupan masyarakat perdesaan, penyedia bahan pangan, serta penopang berbagai aktivitas ekonomi lokal.

Selanjutnya, sektor Transportasi dan Pergudangan memberikan kontribusi sekitar Rp33,06 triliun atau 10,20% terhadap PDRB. Besarnya peranan sektor ini berkaitan erat dengan tingginya mobilitas orang dan barang, termasuk aktivitas penerbangan, transportasi darat, angkutan laut, serta distribusi barang yang mendukung kegiatan pariwisata dan perdagangan.

Sektor Konstruksi menempati posisi berikutnya dengan nilai sekitar Rp29,25 triliun atau 9,02%, disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp28,45 triliun atau sekitar 8,78%. Kedua sektor tersebut menunjukkan kuatnya aktivitas investasi fisik, pembangunan infrastruktur, properti, serta aktivitas konsumsi dan perdagangan di Bali.

Sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi sekitar 6,23%, sementara sektor Informasi dan Komunikasi memberikan kontribusi sekitar 5,22%. Adapun sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib berkontribusi sekitar 5,14%, Jasa Keuangan dan Asuransi sekitar 4,97%, dan Jasa Pendidikan sekitar 4,78%.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi Bali tahun 2025 masih sangat berorientasi pada sektor jasa, terutama yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pariwisata. Namun, keberadaan sektor pertanian yang masih menjadi kontributor terbesar kedua menunjukkan bahwa struktur ekonomi Bali tidak sepenuhnya bergantung pada jasa dan pariwisata. Hal ini sekaligus menjadi modal penting dalam upaya diversifikasi ekonomi serta penguatan ketahanan ekonomi daerah.

4.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2025

Perekonomian Provinsi Bali pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Bali tetap berada pada jalur ekspansi, dengan kecenderungan pertumbuhan yang relatif menguat sepanjang tahun.

Secara triwulanan berdasarkan perbandingan tahun ke tahun (year on year), pertumbuhan ekonomi Bali tercatat sebesar 5,59% pada Triwulan I, meningkat menjadi 5,77% pada Triwulan II, kemudian 5,81% pada Triwulan III, dan mencapai 5,82% pada Triwulan IV. Pola tersebut menunjukkan adanya penguatan aktivitas ekonomi secara bertahap sepanjang tahun 2025.

Pertumbuhan tertinggi secara tahunan terjadi pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,99%, disusul oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,25%. Tingginya pertumbuhan akomodasi dan makan minum memperlihatkan bahwa pemulihan dan penguatan aktivitas pariwisata masih menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Bali.

Sektor Jasa Perusahaan juga tumbuh cukup tinggi sebesar 7,84%, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,65%, Jasa Pendidikan sebesar 6,55%, Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,46%, Jasa Lainnya sebesar 6,38%, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,21%.

Pertumbuhan yang cukup tinggi pada sektor transportasi, perdagangan, akomodasi dan makan minum menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antaraktivitas ekonomi yang mendukung pariwisata. Peningkatan kunjungan, mobilitas masyarakat, konsumsi, serta aktivitas perjalanan memberikan efek pengganda terhadap berbagai sektor jasa dan perdagangan.

Di sisi lain, beberapa sektor tumbuh relatif lebih lambat. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 1,70%, Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,71%, serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,98%. Meskipun pertumbuhannya relatif rendah, sektor pertanian tetap memiliki peranan struktural yang besar karena kontribusinya mencapai lebih dari 13% terhadap PDRB Bali.

Sektor Industri Pengolahan tumbuh sebesar 3,94%, sedangkan Konstruksi tumbuh sebesar 4,06%, Informasi dan Komunikasi sebesar 4,65%, serta

Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,88%. Pertumbuhan sektor-sektor tersebut menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang cukup beragam, tidak hanya pada sektor pariwisata tetapi juga pada sektor produksi, infrastruktur, dan pelayanan dasar.

Secara keseluruhan, kondisi perekonomian Bali tahun 2025 mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat dengan struktur yang masih bertumpu pada sektor pariwisata dan jasa, khususnya akomodasi dan makan minum, transportasi, perdagangan, serta konstruksi. Sementara itu, sektor pertanian tetap menjadi fondasi ekonomi yang penting, terutama dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi perkotaan, pariwisata, dan ekonomi perdesaan.

Tabel 4.1
Struktur Ekonomi Provinsi Bali tahun 2025 Berdasarkan PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

No.	Lapangan Usaha (17 Kategori/Sektor)	PDRB Triwulanan Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
		2025				
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.276,54	10.528,24	10.647,49	11.076,51	42.528,78
2	Pertambangan dan Penggalian	633,32	660,80	679,95	678,18	2.652,26
3	Industri Pengolahan	4.699,50	4.984,34	5.116,98	5.384,22	20.185,05
4	Pengadaan Listrik dan Gas	191,43	181,97	184,47	202,66	760,53
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	118,91	119,55	121,06	123,85	483,37
6	Konstruksi	6.842,24	7.262,31	7.385,60	7.763,25	29.253,40
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.534,26	7.045,66	7.188,37	7.682,56	28.450,85
8	Transportasi dan Pergudangan	7.662,92	8.288,11	8.618,71	8.485,91	33.055,66
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15.973,99	18.489,16	18.941,55	18.795,10	72.199,80
10	Informasi dan Komunikasi	4.061,19	4.164,43	4.296,95	4.385,46	16.908,04
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.087,62	4.019,77	3.937,15	4.060,42	16.104,96
12	Real Estat	2.808,46	3.063,45	3.074,58	3.166,02	12.112,52
13	Jasa Perusahaan	862,99	961,59	996,44	998,53	3.819,55
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.007,43	4.236,78	3.812,93	4.609,04	16.666,18
15	Jasa Pendidikan	3.599,96	3.938,23	3.857,36	4.113,54	15.509,08
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.818,98	1.955,06	1.890,79	2.018,12	7.682,95

No.	Lapangan Usaha (17 Kategori/Sektor)	PDRB Triwulanan Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
		2025				
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
17	Jasa lainnya	1.314,26	1.472,00	1.484,62	1.505,11	5.775,99
	Jumlah	**75.493,98**	**81.371,45**	**82.235,02**	**85.048,48**	**324.148,94**

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2026

Tabel 4.2
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Berdasarkan Pertumbuhan PDRB Triwulanan
Tahun 2025

No.	Lapangan Usaha (17 Kategori/Sektor)	Pertumbuhan PDRB Triwulanan Provinsi Bali (c to c) Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
		2025				
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,17	2,34	2,22	1,7	1,7
2	Pertambangan dan Penggalian	0,81	1,04	0,72	0,71	0,71
3	Industri Pengolahan	-0,06	1,62	2,67	3,94	3,94
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,59	5,28	5,23	4,88	4,88
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,83	3,82	3,05	2,51	2,51
6	Konstruksi	3,09	4,7	4,5	4,06	4,06
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,38	6,93	6,9	6,65	6,65
8	Transportasi dan Pergudangan	6,78	7,05	6,78	6,46	6,46
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,21	10,62	10,73	10,25	10,25
10	Informasi dan Komunikasi	2,67	3,45	4,19	4,65	4,65
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,65	3,43	0,5	1,98	1,98
12	Real Estat	1,98	3,16	2,97	2,67	2,67
13	Jasa Perusahaan	5,94	6,95	7,92	7,84	7,84
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	20,26	11,11	10,55	10,99	10,99

No.	Lapangan Usaha (17 Kategori/Sektor)	Pertumbuhan PDRB Triwulanan Provinsi Bali (c to c) Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
		2025				
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
15	Jasa Pendidikan	5,63	4,49	6,08	6,55	6,55
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,71	4,66	5,42	6,21	6,21
17	Jasa lainnya	5,2	6,28	6,84	6,38	6,38
	Jumlah	5,59	5,77	5,81	5,82	5,82

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2026

4.2. PERKEMBANGAN INFLASI DAN INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK)

Pada tahun 2025, tingkat harga konsumen di Provinsi Bali menunjukkan kecenderungan meningkat dengan IHK mencapai 111,01 pada Desember 2025. Inflasi tahunan Bali tercatat sebesar 2,91%, relatif terkendali dan hampir sama dengan inflasi nasional sebesar 2,92%. Meskipun demikian, perkembangan inflasi selama tahun 2025 cukup berfluktuasi, dengan titik terendah 1,21% pada Februari dan tertinggi 3,16% pada Juli. Secara spasial, Kota Denpasar mencatat inflasi akhir tahun tertinggi sebesar 3,45%, sedangkan Kabupaten Badung terendah sebesar 2,37%, menunjukkan adanya variasi tekanan harga antarwilayah di Provinsi Bali.

4.2.1. Perkembangan Indeks Harga Konsumen

Pergerakan IHK Provinsi Bali selama tahun 2025 secara umum menunjukkan tren meningkat. Pada Januari 2025, IHK Bali berada pada level 107,85, kemudian menurun menjadi 107,23 pada Februari. Setelah itu, IHK meningkat menjadi 108,96 pada Maret dan 109,75 pada April. Pada Mei terjadi koreksi menjadi 109,23, kemudian kembali meningkat menjadi 109,71 pada Juni dan 110,06 pada Juli.

Pada Agustus dan September, IHK sedikit menurun masing-masing menjadi 109,63 dan 109,62, sebelum kembali meningkat pada tiga bulan terakhir tahun 2025. IHK Bali tercatat sebesar 109,80 pada Oktober, 110,24 pada November, dan mencapai 111,01 pada Desember. Dengan demikian, posisi IHK pada akhir tahun berada sekitar 3,16 poin lebih tinggi dibandingkan Januari 2025, yang mencerminkan adanya peningkatan tingkat harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat sepanjang tahun.

Dibandingkan dengan nasional, IHK Bali pada Desember 2025 sebesar 111,01 berada di atas IHK nasional yang mencapai 109,92. Namun, perbandingan tingkat IHK antarwilayah perlu dilakukan secara hati-hati. IHK terutama digunakan untuk melihat perubahan harga dari waktu ke waktu pada wilayah yang sama, sehingga nilai indeks yang lebih tinggi tidak secara

langsung berarti bahwa biaya hidup Bali secara absolut lebih tinggi daripada daerah lainnya.

Pada tingkat wilayah penghitungan inflasi di Bali, perkembangan IHK juga menunjukkan variasi. Pada Desember 2025, Kabupaten Tabanan mencatat IHK sebesar 113,17, diikuti Kota Denpasar sebesar 111,89, Singaraja sebesar 110,40, dan Kabupaten Badung sebesar 108,53. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perubahan tingkat harga konsumen tidak berlangsung secara seragam di seluruh wilayah Bali.

4.2.2. Perkembangan Inflasi Tahun 2025

Inflasi tahunan Provinsi Bali selama tahun 2025 memperlihatkan pola yang cukup berfluktuasi. Pada Januari, inflasi Bali tercatat sebesar 2,41%, kemudian turun cukup tajam menjadi 1,21% pada Februari. Inflasi kembali meningkat menjadi 1,89% pada Maret dan 2,30% pada April, sebelum sedikit melambat menjadi 1,92% pada Mei.

Memasuki pertengahan tahun, tekanan harga meningkat cukup kuat. Inflasi naik menjadi 2,94% pada Juni dan mencapai 3,16% pada Juli, yang merupakan tingkat inflasi tahunan tertinggi selama tahun 2025. Setelah mencapai puncaknya pada Juli, inflasi mulai mereda menjadi 2,65% pada Agustus, kemudian 2,51% pada September. Pada Oktober inflasi sedikit meningkat menjadi 2,61%, turun kembali menjadi 2,51% pada November, dan kemudian meningkat menjadi 2,91% pada Desember 2025.

Dengan demikian, rentang inflasi Bali selama tahun 2025 berada antara 1,21% hingga 3,16%. Titik terendah terjadi pada Februari, sedangkan tekanan inflasi tertinggi terjadi pada Juli. Pola tersebut menunjukkan adanya peningkatan tekanan harga terutama menjelang dan selama pertengahan tahun, kemudian relatif terkendali pada semester II meskipun kembali menguat pada akhir tahun.

4.2.3. Perbandingan Inflasi Bali dan Nasional

Jika dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi Bali pada sebagian besar periode awal hingga pertengahan tahun 2025 berada pada tingkat yang lebih tinggi. Pada Januari, misalnya, inflasi Bali mencapai 2,41%, sedangkan nasional hanya 0,76%. Perbedaan semakin terlihat pada Februari ketika Bali masih mengalami inflasi 1,21%, sedangkan secara nasional tercatat deflasi tahunan sebesar 0,09%.

Pada Maret hingga Agustus, inflasi Bali juga tetap lebih tinggi daripada nasional. Pada Juli, inflasi Bali sebesar 3,16% dibandingkan nasional sebesar 2,37%. Namun, sejak September kondisi mulai berubah. Inflasi Bali sebesar 2,51% sudah lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 2,65%. Pola tersebut berlanjut pada Oktober dan November.

Pada akhir tahun, tingkat inflasi keduanya hampir sama, yaitu 2,91% di Bali dan 2,92% secara nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tekanan harga di Bali relatif lebih tinggi pada awal dan pertengahan tahun, menjelang akhir 2025 laju kenaikan harga di Bali semakin konvergen dengan perkembangan harga secara nasional.

4.2.4. Variasi Inflasi Antarwilayah di Bali

Inflasi pada wilayah penghitungan IHK di Bali menunjukkan karakteristik yang berbeda. Pada akhir tahun 2025, Kota Denpasar mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,45%, diikuti Kabupaten Tabanan sebesar 2,70%, Singaraja sebesar 2,51%, dan Kabupaten Badung sebesar 2,37%.

Kota Denpasar memiliki tekanan inflasi yang relatif lebih tinggi hampir sepanjang tahun. Inflasi Denpasar meningkat dari 2,49% pada Januari menjadi 3,51% pada Juli, yang merupakan puncak inflasinya selama 2025. Setelah itu inflasi tetap berada di atas 3% hingga Desember dan berakhir pada 3,45%. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa dinamika harga di pusat kegiatan ekonomi dan konsumsi terbesar Bali relatif lebih kuat dibandingkan beberapa wilayah lainnya.

Kabupaten Tabanan juga mengalami fluktuasi cukup besar. Inflasi sebesar 3,00% pada Januari turun menjadi 1,23% pada Februari, tetapi kemudian meningkat hingga mencapai 3,60% pada Juli, yang merupakan inflasi bulanan tahunan tertinggi di antara wilayah penghitungan IHK Bali selama tahun tersebut. Setelah itu tekanan inflasi mereda dan mencapai 2,70% pada Desember.

Sementara itu, Singaraja mencatat inflasi sebesar 1,61% pada Januari, sempat turun hingga 0,27% pada Februari, kemudian meningkat menjadi 3,10% pada Juli sebelum berakhir pada 2,51% pada Desember. Kabupaten Badung menunjukkan tekanan inflasi yang relatif paling rendah pada akhir tahun. Inflasi Badung turun dari 2,47% pada Januari menjadi hanya 0,92% pada Mei, kemudian meningkat secara bertahap dan mencapai 2,37% pada Desember.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan harga konsumen di Bali memiliki dimensi spasial yang cukup kuat. Karakteristik konsumsi masyarakat, struktur perdagangan dan distribusi barang, aktivitas pariwisata, serta kondisi pasokan pada masing-masing wilayah dapat menyebabkan respons harga yang berbeda antarwilayah.

4.2.5. Gambaran Umum Kondisi Harga Tahun 2025

Secara keseluruhan, perkembangan IHK dan inflasi menunjukkan bahwa stabilitas harga di Provinsi Bali selama tahun 2025 relatif tetap terjaga, meskipun terdapat peningkatan tekanan inflasi pada pertengahan dan akhir tahun. Inflasi tahunan sebesar 2,91% pada Desember 2025 menunjukkan

kenaikan harga yang relatif moderat dan hampir sama dengan kondisi nasional.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, tekanan harga di Bali pada paruh pertama tahun relatif lebih tinggi dibandingkan nasional. Kedua, terdapat disparitas inflasi antarwilayah, dengan Denpasar mencatat inflasi akhir tahun paling tinggi sementara Badung paling rendah. Ketiga, kenaikan IHK dari 107,85 pada Januari menjadi 111,01 pada Desember menunjukkan bahwa secara umum tingkat harga barang dan jasa konsumen tetap mengalami peningkatan sepanjang tahun.

Dalam konteks pembangunan daerah, perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan distribusi komoditas strategis, khususnya bahan pangan, meningkatkan efisiensi rantai distribusi antarkabupaten/kota, serta memperkuat pengendalian inflasi pada periode-periode dengan tekanan permintaan tinggi. Hal ini menjadi semakin penting bagi Bali mengingat struktur ekonominya sangat dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata, mobilitas penduduk, dan dinamika konsumsi masyarakat.

Tabel 4.3
Indeks Harga Konsumen (IHK) Bulanan di Provinsi Bali Tahun 2025

Kota Inflasi (2022=100)	Indeks Harga Konsumen (IHK) Bulanan Provinsi Bali												
	2025												
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Tahunan
Kabupaten Tabanan	110,72	109,56	111,22	112,43	111,51	111,83	112,17	111,40	110,90	111,28	112,03	113,17	-
Kabupaten Badung	106,52	105,57	107,10	107,63	106,61	107,18	107,34	106,85	106,32	106,65	107,33	108,53	-
Singaraja	107,13	106,26	108,08	108,94	108,64	109,04	109,50	108,89	108,82	109,13	109,64	110,40	-
Kota Denpasar	107,87	107,73	109,55	110,31	110,13	110,66	111,07	110,86	111,32	111,30	111,47	111,89	-
Provinsi Bali	107,85	107,23	108,96	109,75	109,23	109,71	110,06	109,63	109,62	109,80	110,24	111,01	-
Nasional	105,99	105,48	107,22	108,47	108,07	108,27	108,60	108,51	108,74	109,04	109,22	109,92	-

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2026

Tabel 4.4
Inflasi Bulanan di Provinsi Bali Tahun 2025

Kota Inflasi (2022=100)	Inflasi Tahunan (year on year) Provinsi Bali (Persen)												
	2025												
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Tahunan
Kabupaten Tabanan	3,00	1,23	1,84	2,52	1,97	3,38	3,60	2,61	1,88	2,26	2,17	2,70	2,70
Kabupaten Badung	2,47	0,98	1,32	1,80	0,92	2,11	2,29	1,91	1,32	1,65	1,61	2,37	2,37
Singaraja	1,61	0,27	1,09	1,82	1,88	2,79	3,10	2,71	2,39	2,47	2,12	2,51	2,51
Kota Denpasar	2,49	1,70	2,53	2,69	2,48	3,30	3,51	3,05	3,42	3,29	3,26	3,45	3,45
Provinsi Bali	2,41	1,21	1,89	2,30	1,92	2,94	3,16	2,65	2,51	2,61	2,51	2,91	2,91
Nasional	0,76	- 0,09	1,03	1,95	1,60	1,87	2,37	2,31	2,65	2,86	2,72	2,92	2,92

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2026

4.3. PERKEMBANGAN INVESTASI DAERAH

Investasi adalah faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi untuk mengukur kemajuan suatu daerah. Ketika jumlah investasi meningkat, maka aktivitas

produksi juga akan meningkat. Dengan bertambahnya produksi barang dan jasa, maka pendapatan juga akan meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi juga menciptakan lapangan kerja baru, yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Investasi di sektor publik dan swasta berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 38 provinsi di Indonesia, termasuk didalamnya adalah provinsi Bali.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Bali memerlukan investasi yang tidak hanya bersumber dari pemerintah, tetapi juga dari sektor swasta. Dengan karakteristik daerah yang berlandaskan nilai Tri Hita Karana harmoni antara manusia dan alam, manusia dan pencipta, serta antar sesama pengembangan investasi di Bali diarahkan pada investasi hijau yang mendukung keseimbangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

4.3.1. Perkembangan Investasi Provinsi Bali Tahun 2025

Perkembangan investasi di Provinsi Bali selama tahun 2025 menunjukkan aktivitas penanaman modal yang cukup kuat, baik yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, pada Triwulan I 2025 realisasi investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali mencapai Rp12,26 triliun dengan sebanyak 31.371 proyek. Capaian tersebut menempatkan Bali pada peringkat ke-14 secara nasional berdasarkan nilai realisasi investasi.

Komposisi investasi pada Triwulan I menunjukkan bahwa investasi Bali relatif kuat ditopang oleh modal asing. Realisasi PMA mencapai US$481,43 juta dengan 24.626 proyek. Dengan menggunakan kurs APBN sebesar Rp16.000 per US$ sebagaimana digunakan dalam publikasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi, nilai tersebut ekuivalen dengan sekitar Rp7,70 triliun. Sementara itu, PMDN tercatat sebesar Rp4,55 triliun dengan 6.745 proyek. Dengan demikian, secara indikatif sekitar 62,8% realisasi investasi Bali pada Triwulan I berasal dari PMA, sedangkan sekitar 37,2% berasal dari PMDN. Bali bahkan berada pada peringkat ke-9 nasional untuk realisasi PMA pada periode tersebut, sementara untuk PMDN berada pada peringkat ke-13.

Besarnya peranan PMA tersebut menunjukkan tingginya daya tarik Bali bagi investor internasional. Karakteristik ekonomi Bali yang berbasis pariwisata, jasa, akomodasi, perdagangan, properti, dan berbagai kegiatan penunjang pariwisata memberikan ruang bagi investasi asing untuk tetap berkembang. Namun, kuatnya PMA juga menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara investasi yang masuk dengan arah pembangunan daerah, termasuk kualitas investasi, daya dukung lingkungan, penciptaan lapangan kerja, penggunaan produk lokal, serta keterkaitan investasi dengan pelaku usaha dan masyarakat setempat.

Memasuki Januari-September 2025, realisasi investasi Bali meningkat menjadi sekitar Rp32,4 triliun dengan sebanyak 49.991 proyek. Secara nasional, Bali berada pada peringkat ke-15 berdasarkan total realisasi PMA dan PMDN. Dibandingkan capaian Triwulan I sebesar Rp12,26 triliun, posisi kumulatif hingga September menunjukkan tambahan investasi sekitar Rp20,14 triliun, sehingga nilai realisasi selama sembilan bulan pertama telah mencapai sekitar 2,6 kali capaian Triwulan I.

Dari sisi sumber investasi, hingga September 2025 PMA di Bali mencapai US$1,17 miliar, dengan 33.516 proyek dan menempatkan Bali pada peringkat ke-11 secara nasional untuk investasi asing. Dengan menggunakan kurs Rp16.000 per US$, nilai tersebut setara dengan sekitar Rp18,74 triliun. Sementara itu, PMDN Bali mencapai sekitar Rp13,7 triliun dengan 16.475 proyek dan berada pada peringkat ke-14 nasional.

Berdasarkan komposisi tersebut, PMA menyumbang sekitar 57,8% terhadap total investasi Bali hingga September 2025, sedangkan PMDN menyumbang sekitar 42,2%. Walaupun PMA masih lebih dominan, proporsi PMDN meningkat dibandingkan kondisi Triwulan I. Perkembangan ini dapat dipandang positif karena menunjukkan bahwa ekspansi investasi di Bali tidak hanya bergantung pada modal asing, tetapi juga semakin ditopang oleh investasi domestik. Penguatan PMDN penting untuk memperluas basis investasi daerah dan meningkatkan keterkaitan kegiatan investasi dengan pelaku usaha nasional dan lokal.

Jumlah proyek investasi juga menunjukkan aktivitas yang cukup intensif. Dari 31.371 proyek pada Triwulan I, jumlah proyek kumulatif meningkat menjadi 49.991 proyek sampai dengan September 2025. Besarnya jumlah proyek dibandingkan dengan nilai investasi mengindikasikan karakter investasi Bali yang relatif berbeda dengan daerah-daerah berbasis industri berat, pertambangan, atau hilirisasi mineral. Investasi Bali cenderung tersebar pada lebih banyak proyek dengan ukuran investasi yang relatif beragam, sejalan dengan karakter ekonomi daerah yang banyak ditopang oleh kegiatan jasa, perdagangan, akomodasi, properti, dan usaha penunjang pariwisata.

4.3.2. Posisi Bali dalam Dinamika Investasi Nasional

Perkembangan investasi Bali berlangsung di tengah kinerja investasi nasional yang juga meningkat selama tahun 2025. Pada Triwulan I, realisasi investasi nasional mencapai Rp465,2 triliun, meningkat 15,9% secara tahunan, dengan PMA sebesar Rp230,4 triliun dan PMDN Rp234,8 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 24,4% target investasi nasional tahun 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun.

Hingga Januari–September 2025, realisasi investasi nasional meningkat menjadi Rp1.434,3 triliun atau sekitar 75,3% dari target tahunan, dengan pertumbuhan sebesar 13,7% dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya. PMDN memberikan kontribusi sebesar 55,1% atau Rp789,7 triliun, sedangkan PMA mencapai 44,9% atau Rp644,6 triliun.

Pada akhir 2025, investasi nasional mencapai Rp1.931,2 triliun, tumbuh 12,7% secara tahunan dan telah mencapai 101,3% dari target Rp1.905,6 triliun. Struktur investasi nasional pada akhir tahun semakin didominasi oleh PMDN sebesar Rp1.030,3 triliun atau 53,4%, sementara PMA sebesar Rp900,9 triliun atau 46,6%. Investasi di luar Jawa juga sedikit lebih besar, yaitu 51,3% atau Rp991,2 triliun, dibandingkan investasi di Jawa sebesar 48,7% atau Rp940,0 triliun.

Kondisi tersebut memberikan konteks bahwa Bali berkembang di tengah kompetisi investasi antardaerah yang semakin kuat. Provinsi-provinsi dengan basis industri pengolahan, pertambangan, hilirisasi, dan infrastruktur berskala besar menghasilkan nilai investasi yang jauh lebih besar. Lima daerah dengan realisasi investasi terbesar secara nasional sepanjang 2025 adalah Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan Sulawesi Tengah, dengan nilai investasi masing-masing Rp296,8 triliun, Rp270,9 triliun, Rp145,1 triliun, Rp130,2 triliun, dan Rp127,2 triliun.

Struktur tersebut sekaligus menjelaskan bahwa posisi investasi Bali sebaiknya tidak semata-mata dinilai berdasarkan besaran nominal dibandingkan daerah industri. Karakteristik perekonomian Bali lebih bertumpu pada sektor tersier dan aktivitas berbasis jasa sehingga strategi investasi daerah perlu lebih menekankan pada kualitas, keberlanjutan, produktivitas, dan nilai tambah investasi, bukan hanya mengejar besarnya nilai modal yang masuk.

4.3.3. Arah dan Karakter Pengembangan Investasi

Secara nasional, investasi sepanjang 2025 terkonsentrasi pada industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp262,0 triliun, transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar Rp211,0 triliun, pertambangan Rp199,6 triliun, jasa lainnya Rp170,5 triliun, serta perumahan, kawasan industri dan perkantoran Rp140,4 triliun. Kondisi ini memperlihatkan kuatnya orientasi investasi nasional pada industrialisasi dan hilirisasi.

Sementara itu, karakter ekonomi Bali memberi ruang bagi arah investasi yang berbeda, terutama pada kegiatan yang mampu memperkuat transformasi ekonomi daerah. Investasi dapat diarahkan pada pariwisata berkualitas, industri kreatif, pertanian bernilai tambah, industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, energi bersih, pengelolaan lingkungan, ekonomi digital, serta infrastruktur pendukung pelayanan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, investasi baru tidak hanya menambah kapasitas akomodasi atau kegiatan komersial, tetapi juga memperluas basis ekonomi Bali.

Aspek keberlanjutan menjadi semakin penting mengingat tingginya tekanan pembangunan terhadap ruang dan lingkungan Bali. Investasi perlu diarahkan agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, tata ruang, ketersediaan air, pengelolaan sampah dan limbah, sistem transportasi, serta pelestarian kawasan pertanian dan budaya. Pendekatan tersebut diperlukan agar pertumbuhan investasi memberikan manfaat ekonomi tanpa menambah beban lingkungan dan infrastruktur secara tidak terkendali.

Dari sisi dampak ekonomi, meningkatnya PMDN juga membuka peluang lebih besar untuk memperkuat hubungan investasi dengan UMKM, industri lokal, tenaga kerja lokal, serta rantai pasok daerah. Oleh karena itu, kebijakan investasi tidak cukup hanya berorientasi pada kemudahan masuknya modal, tetapi juga perlu mendorong kemitraan antara investor dengan pelaku ekonomi lokal, peningkatan penggunaan produk lokal, transfer pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kualitas tenaga kerja.

Secara umum, perkembangan investasi Provinsi Bali pada tahun 2025 menunjukkan tren yang positif dan ekspansif. Realisasi investasi meningkat dari Rp12,26 triliun pada Triwulan I menjadi Rp32,4 triliun secara kumulatif hingga September 2025. Bali menempati peringkat ke-14 nasional pada Triwulan I dan peringkat ke-15 pada Januari–September. Investasi masih didominasi PMA, tetapi peranan PMDN menunjukkan penguatan, dengan komposisi sampai September sekitar 57,8% PMA dan 42,2% PMDN.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Bali tetap menjadi salah satu tujuan investasi yang menarik, terutama didukung daya tarik ekonomi jasa dan pariwisata. Ke depan, tantangan pembangunan investasi Bali bukan hanya meningkatkan nilai realisasi investasi, tetapi mengarahkan investasi menuju kegiatan yang lebih produktif, berkualitas, berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, serta mendorong diversifikasi struktur ekonomi Bali.

Tabel 4.5
Perkembangan Realisasi Investasi Provinsi Bali Tahun 2025 (Status Penanaman Modal PMA)

Periode	PMA	PMDN	Total Realisasi Investasi	Jumlah Proyek	Peringkat Nasional PMA+ PMDN
Triwulan I / Januari–Maret	US$481,43 juta (**Rp7,70 triliun**)	**Rp4,55 triliun**	**Rp12,26 triliun**	**31.371 proyek**	**14**
Januari–September	US$1,17 miliar (**Rp18,74 triliun**)	**Rp13,70 triliun**	**Rp32,40 triliun**	**49.991 proyek**	**15**

Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

4.4. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah penerimaan resmi pemerintah daerah yang diperoleh dari berbagai sumber sesuai ketentuan perundang-undangan. Menurut PP No. 12 Tahun 2019, pendapatan daerah terdiri atas tiga sumber utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan ini dihitung secara rasional sebagai target yang dapat dicapai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Bali pada tahun 2025 mencapai Rp7,05 triliun, tepatnya sebesar Rp7.048.315.869.271,64. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan daerah tahun 2024 yang mencapai Rp7,79 triliun, sehingga secara tahunan mengalami penurunan sekitar 9,54%. Struktur pendapatan daerah tahun 2025 masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), diikuti pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp4,63 triliun atau sekitar 65,66% dari total pendapatan daerah. Dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp5,50 triliun, PAD mengalami penurunan sekitar 15,89%. Meskipun demikian, kontribusi PAD yang mencapai hampir dua pertiga dari total pendapatan menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Bali masih relatif kuat dan bertumpu terutama pada sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri.

Penurunan PAD terutama dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan pajak daerah. Pada tahun 2025, pajak daerah terealisasi sebesar Rp2,87 triliun, turun cukup signifikan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp4,49 triliun atau mengalami penurunan sekitar 36,24%. Meskipun mengalami penurunan, pajak daerah tetap menjadi komponen terbesar PAD dan menyumbang sekitar 40,66% terhadap total pendapatan daerah Provinsi Bali tahun 2025.

Sebaliknya, retribusi daerah menunjukkan peningkatan yang sangat besar. Realisasi retribusi daerah meningkat dari sekitar Rp255,67 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp909,60 miliar pada tahun 2025, atau meningkat sekitar 255,77%. Dengan capaian tersebut, retribusi daerah memberikan kontribusi sekitar 12,91% terhadap total pendapatan daerah. Peningkatan ini menjadikan retribusi sebagai salah satu komponen yang berperan penting dalam menahan penurunan PAD akibat berkurangnya penerimaan pajak daerah.

Komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga menunjukkan perkembangan positif. Realisasinya meningkat dari sekitar Rp197,37 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp253,60 miliar pada tahun 2025, atau tumbuh sekitar 28,49%. Komponen tersebut memberikan kontribusi sekitar 3,60% terhadap total pendapatan daerah. Sementara itu, lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp599,05 miliar, meningkat sekitar 8,03% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp554,52 miliar. Kontribusinya terhadap total pendapatan daerah mencapai sekitar 8,50%.

Di luar PAD, pendapatan transfer pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp2,41 triliun, atau menyumbang sekitar 34,25% terhadap total pendapatan daerah. Nilai ini meningkat sekitar 5,73% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2,28 triliun. Peningkatan pendapatan transfer membantu menjaga kapasitas pendapatan daerah di tengah menurunnya PAD, terutama pada komponen pajak daerah.

Sebagian besar pendapatan transfer berasal dari transfer pemerintah pusat, yang pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2,38 triliun. Komponen ini meningkat sekitar 4,20% dibandingkan tahun sebelumnya. Transfer pemerintah pusat tersebut antara lain terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp251,08 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,40 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp711,77 miliar.

Dari ketiga komponen transfer tersebut, DAU menjadi sumber terbesar dengan kontribusi sekitar 19,91% terhadap total pendapatan daerah, diikuti DAK sekitar 10,10%, dan DBH sekitar 3,56%. Dibandingkan tahun 2024, DBH meningkat cukup tinggi sekitar 31,80%, sedangkan DAU meningkat sekitar 2,62% dan DAK sekitar 1,39%. Perkembangan ini menunjukkan adanya peningkatan dukungan transfer dari pemerintah pusat, meskipun pertumbuhannya relatif lebih moderat dibandingkan perubahan pada beberapa komponen PAD.

Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan kontribusi relatif kecil terhadap keseluruhan pendapatan daerah. Pada tahun 2025, komponen tersebut terealisasi sebesar Rp6,09 miliar, seluruhnya berupa pendapatan hibah. Nilainya meningkat sekitar 5,89% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp5,75 miliar, tetapi kontribusinya terhadap total pendapatan daerah hanya sekitar 0,09%.

Secara keseluruhan, struktur pendapatan daerah Provinsi Bali tahun 2025 memperlihatkan bahwa PAD masih menjadi sumber utama pembiayaan daerah, dengan kontribusi lebih dari 65% terhadap keseluruhan pendapatan. Kondisi ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang relatif baik. Namun demikian, penurunan PAD sebesar 15,89%, terutama akibat penurunan pajak daerah, menyebabkan total pendapatan daerah turun sekitar 9,54% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, peningkatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain-lain PAD yang sah, serta pendapatan transfer memberikan kompensasi terhadap penurunan tersebut.

Perkembangan tahun 2025 juga memperlihatkan adanya pergeseran komposisi sumber pendapatan daerah. Jika pada tahun 2024 penerimaan pajak daerah sangat dominan dalam struktur PAD, pada tahun 2025 peranan relatif retribusi daerah dan pendapatan transfer menjadi lebih besar. Kondisi ini menunjukkan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan agar kapasitas fiskal daerah tidak terlalu bergantung pada satu jenis penerimaan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, dokumen RKPD menekankan bahwa peningkatan pendapatan perlu ditempuh melalui optimalisasi PAD dengan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi, penyempurnaan regulasi, pemanfaatan teknologi

informasi dalam pelayanan pendapatan, perluasan akses pelayanan Samsat, penguatan koordinasi antarinstansi, serta optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah. Selain itu, peningkatan pendapatan transfer diupayakan melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota serta optimalisasi sumber-sumber dana transfer dan bagi hasil.

Tabel 4.6
Ringkasan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023–2025 (Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023	REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024	REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**4.627.741.217.667,29**	**5.502.519.452.422,07**	**4.628.083.379.382,63**
1.1	Pajak Daerah	4.052.904.860.269,00	4.494.962.429.486,00	2.865.836.401.524,00
1.2	Retribusi Daerah	15.312.465.038,00	255.671.923.031,94	909.595.917.119,52
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	158.120.019.322,32	197.369.947.623,03	253.603.839.116,43
1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	401.403.873.037,97	554.515.152.281,10	599.047.221.622,68
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.141.120.289.130,00**	**2.283.379.254.237,00**	**2.414.142.690.695,00**
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.141.120.289.130,00	2.283.379.254.237,00	2.379.317.000.326,00
	- Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Non Pajak	156.236.087.531,00	190.506.685.110,00	251.084.753.500,00
	- Dana Alokasi Umum (DAU)	1.244.560.318.195,00	1.367.677.271.075,00	1.403.485.166.622,00
	- Dana Alokasi Khusus (DAK)	672.430.907.404,00	702.037.944.052,00	711.768.494.204,00
	- Dana Insentif Daerah (DID)	67.892.976.000,00	23.157.354.000,00	
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.199.977.500,00**	**5.750.844.000,00**	**6.089.799.194,01**
3.1	Hibah	5.199.977.500,00	5.750.844.000,00	6.089.799.194,01
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	**6.774.061.484.297,29**	**7.791.649.550.659,07**	**7.048.315.869.271,64**

Sumber: Bapenda dan BPKAD Provinsi Bali Tahun 2026

BAB 5

PROFIL DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025



BAB 5
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

5.1. PDRB & PENGELUARAN PERKAPITA PENDUDUK

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga *Non-Profit* yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehinga klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

5.1.1. PDRB Per Kapita Provinsi Bali Tahun 2025

Pada tahun 2025, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Provinsi Bali mencapai Rp72,66 juta per penduduk per tahun. Nilai ini mencerminkan rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan di Bali untuk setiap penduduk selama satu tahun.

Di tingkat kabupaten/kota, terdapat variasi yang cukup besar. Kabupaten Badung mencatat PDRB per kapita tertinggi, yaitu sekitar Rp142,34 juta, atau hampir dua kali lipat rata-rata Provinsi Bali. Posisi berikutnya ditempati Kota Denpasar dengan PDRB per kapita sebesar Rp93,25 juta. Tingginya PDRB per kapita di kedua wilayah tersebut sejalan dengan kuatnya aktivitas ekonomi berbasis pariwisata, perdagangan, akomodasi, jasa, dan kegiatan ekonomi perkotaan.

Kabupaten Gianyar mencatat PDRB per kapita sebesar Rp68,13 juta, disusul Tabanan Rp63,91 juta, Klungkung Rp57,20 juta, Jembrana Rp55,65 juta, dan Buleleng Rp54,99 juta. Sementara itu, PDRB per kapita relatif lebih rendah terdapat di Karangasem sebesar Rp43,21 juta dan Bangli sebesar Rp34,79 juta.

Dengan demikian, hanya Badung dan Denpasar yang memiliki PDRB per kapita di atas rata-rata Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas penciptaan nilai tambah ekonomi masih relatif terkonsentrasi pada wilayah-wilayah utama pariwisata dan perkotaan.

Kesenjangan antarwilayah juga terlihat cukup lebar. PDRB per kapita Badung sebagai yang tertinggi sekitar 4,1 kali PDRB per kapita Bangli sebagai yang terendah. Kondisi tersebut menggambarkan adanya disparitas kapasitas

ekonomi antarwilayah di Bali, yang antara lain berkaitan dengan perbedaan struktur ekonomi, konsentrasi kegiatan usaha, investasi, pariwisata, dan akses terhadap pusat-pusat pertumbuhan.

5.1.2. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Dari sisi kesejahteraan penduduk, rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan Provinsi Bali tahun 2025 tercatat sebesar Rp15,383 juta per orang per tahun. Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat yang telah disesuaikan dan merupakan salah satu dimensi dalam pengukuran tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran per kapita tertinggi terdapat di Kota Denpasar, yaitu sebesar Rp21,185 juta per orang per tahun, diikuti Kabupaten Badung sebesar Rp19,004 juta. Selanjutnya, Gianyar mencapai Rp16,244 juta, Tabanan Rp15,752 juta, dan Buleleng Rp14,827 juta.

Sementara itu, tingkat pengeluaran per kapita yang relatif lebih rendah terdapat di Jembrana sebesar Rp13,113 juta, Klungkung Rp13,023 juta, Bangli Rp12,447 juta, serta Karangasem Rp11,676 juta. Karangasem menjadi wilayah dengan pengeluaran per kapita terendah pada tahun 2025.

Dibandingkan rata-rata provinsi, Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan berada di atas nilai Bali, sementara lima kabupaten lainnya masih berada di bawah rata-rata. Denpasar memiliki pengeluaran per kapita sekitar 37,7% lebih tinggi dibandingkan rata-rata Bali, sedangkan Karangasem sekitar 24,1% lebih rendah dari rata-rata provinsi.

Walaupun terdapat kesenjangan, variasi pengeluaran per kapita antarwilayah relatif lebih sempit dibandingkan PDRB per kapita. Pengeluaran per kapita tertinggi di Denpasar sekitar 1,81 kali pengeluaran per kapita terendah di Karangasem. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas penciptaan nilai tambah ekonomi antarwilayah lebih besar dibandingkan disparitas kemampuan konsumsi atau daya beli penduduk.

5.1.3. Keterkaitan PDRB Per Kapita dan Pengeluaran Per Kapita

Secara umum terdapat kecenderungan bahwa wilayah dengan PDRB per kapita tinggi juga memiliki pengeluaran per kapita yang tinggi. Badung dan Denpasar merupakan contoh paling jelas. Kedua wilayah tersebut memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi sekaligus daya beli masyarakat yang relatif besar.

Namun demikian, PDRB per kapita tidak dapat disamakan dengan pendapatan masyarakat per kapita. PDRB per kapita merupakan pembagian total nilai tambah ekonomi suatu wilayah dengan jumlah penduduknya, sehingga tidak menggambarkan secara langsung berapa besar pendapatan yang benar-benar diterima setiap penduduk. Sebagian nilai tambah dapat berasal dari perusahaan, investasi, tenaga kerja lintas wilayah, maupun aktivitas ekonomi yang keuntungannya tidak seluruhnya dinikmati oleh penduduk setempat.

Hal ini terlihat cukup jelas di Badung. PDRB per kapitanya sekitar Rp142,34 juta, jauh lebih tinggi dibandingkan pengeluaran per kapitanya sebesar Rp19,00 juta. Besarnya selisih tersebut mencerminkan tingginya intensitas aktivitas ekonomi wilayah, terutama sektor pariwisata dan jasa, tetapi tidak berarti seluruh nilai tambah tersebut menjadi pendapatan atau konsumsi penduduk Badung.

Sebaliknya, di Bangli PDRB per kapita relatif rendah, yakni sekitar Rp34,79 juta, tetapi pengeluaran per kapitanya mencapai Rp12,45 juta. Rasio antara pengeluaran per kapita dan PDRB per kapita di Bangli relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Kondisi ini tidak serta-merta menunjukkan efisiensi atau kesejahteraan yang lebih tinggi, melainkan mencerminkan perbedaan struktur ekonomi dan pola distribusi pendapatan antarwilayah.

5.1.4. Gambaran Kesenjangan Ekonomi Antarwilayah

Jika kedua indikator dilihat secara bersama-sama, pola wilayah Bali tahun 2025 dapat digambarkan dalam beberapa kelompok. Badung dan Denpasar merupakan wilayah dengan tingkat aktivitas ekonomi dan daya beli paling tinggi. Gianyar dan Tabanan berada pada kelompok menengah-atas, karena tingkat pengeluaran per kapitanya sudah melampaui rata-rata Bali meskipun PDRB per kapitanya masih di bawah rata-rata provinsi.

Sementara itu, Jembrana, Klungkung, dan Buleleng berada pada kelompok menengah dengan PDRB per kapita maupun pengeluaran per kapita yang masih di bawah rata-rata Bali. Bangli dan Karangasem menjadi wilayah dengan indikator relatif paling rendah, terutama dari sisi PDRB per kapita.

Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan spasial pembangunan ekonomi di Provinsi Bali, terutama antara kawasan pusat pariwisata dan perkotaan dengan wilayah yang basis ekonominya lebih banyak bertumpu pada pertanian dan aktivitas ekonomi lokal.

5.1.5. Implikasi terhadap Pembangunan Daerah

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali tidak cukup hanya melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi secara agregat, tetapi juga membutuhkan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan dan kesempatan ekonomi. Penguatan sektor unggulan di luar kawasan Bali Selatan, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan ekonomi kreatif, hilirisasi produk lokal, peningkatan investasi produktif, dan peningkatan akses terhadap pekerjaan berpenghasilan lebih tinggi menjadi penting untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah.

Dalam konteks Profil Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa Bali memiliki PDRB per kapita sebesar Rp72,66 juta dan pengeluaran per kapita disesuaikan sebesar Rp15,38 juta pada tahun 2025. Namun, capaian tersebut belum terdistribusi secara merata antarwilayah. Badung dan Denpasar menunjukkan kapasitas ekonomi dan daya beli yang jauh lebih tinggi, sementara Bangli dan Karangasem masih berada pada

kelompok terendah. Kondisi ini menegaskan pentingnya pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru dan penguatan potensi ekonomi lokal di seluruh kabupaten/kota Provinsi Bali.

Tabel 5.1
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan di Provinsi Bali Menurut Kota/Kabupaten Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah)	PDRB Perkapita Atas Dasar harga Berlaku Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Ribu Rupiah)
		2025	2025
1	Kab. Jembrana	13.113	55.648,05
2	Kab. Tabanan	15.752	63.913,72
3	Kab. Badung	19.004	142.343,74
4	Kab. Gianyar	16.244	68.130,26
5	Kab. Klungkung	13.023	57.195,75
6	Kab. Bangli	12.447	34.787,41
7	Kab. Karangasem	11.676	43.210,58
8	Kab. Buleleng	14.827	54.993,03
9	Kota Denpasar	21.185	93.246,71
	Provinsi Bali	**15.383**	**72.658,49**

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2026

5.2. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas untuk menilai tingkat kemajuan kualitas hidup masyarakat. IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi utama:

1. Kesehatan, diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH).
2. Pendidikan, diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).
3. Standar hidup layak, dilihat dari Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan (PPP).

Untuk memahami kemajuan pembangunan manusia, perlu melihat tingkat capaian setiap dimensi dan kecepatan peningkatannya dari waktu ke waktu.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali tercatat sebesar 79,37. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Bali secara umum sudah berada pada tingkat yang relatif tinggi, meskipun masih terdapat perbedaan capaian yang cukup nyata antar kabupaten/kota.

Pada tingkat kabupaten/kota, Kota Denpasar mencatat IPM tertinggi sebesar 85,63, diikuti oleh Kabupaten Badung sebesar 84,27 dan Kabupaten Gianyar sebesar 80,96.

Ketiga wilayah tersebut memiliki capaian IPM di atas 80. Selanjutnya, Kabupaten Tabanan mencatat IPM sebesar 79,70, sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Bali sebesar 79,37.

Sementara itu, lima kabupaten lainnya memiliki capaian IPM di bawah angka provinsi. Kabupaten Buleleng mencatat IPM sebesar 76,06, disusul Kabupaten Jembrana sebesar 75,94 dan Kabupaten Klungkung sebesar 75,89. Kabupaten Bangli memiliki IPM sebesar 73,22, sedangkan capaian terendah terdapat di Kabupaten Karangasem sebesar 71,89.

Secara keseluruhan, terdapat empat kabupaten/kota yang memiliki IPM di atas capaian Provinsi Bali, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan. Sementara itu, Kabupaten Jembrana, Klungkung, Bangli, Karangasem, dan Buleleng masih berada di bawah rata-rata provinsi.

Perbedaan antara wilayah dengan IPM tertinggi dan terendah mencapai sekitar 13,74 poin, yaitu antara Kota Denpasar sebesar 85,63 dan Kabupaten Karangasem sebesar 71,89. Selisih yang cukup besar tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan pembangunan manusia antarwilayah di Provinsi Bali. Dengan demikian, peningkatan capaian IPM ke depan tidak hanya perlu diarahkan pada peningkatan nilai IPM provinsi secara agregat, tetapi juga pada pengurangan kesenjangan antar kabupaten/kota.

Dari sisi pola capaian, wilayah dengan IPM tinggi cenderung memiliki akses yang lebih kuat terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, serta kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja. Sebaliknya, wilayah dengan nilai IPM yang relatif lebih rendah perlu memperoleh perhatian lebih besar melalui peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kesempatan ekonomi masyarakat.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali sebesar 79,37 menunjukkan kualitas pembangunan manusia yang relatif baik. Namun demikian, capaian IPM antar kabupaten/kota masih menunjukkan disparitas yang cukup nyata. Kota Denpasar mencatat IPM tertinggi sebesar 85,63, sedangkan Kabupaten Karangasem memiliki IPM terendah sebesar 71,89, dengan selisih mencapai 13,74 poin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia di Bali perlu dibarengi dengan upaya pemerataan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, serta peningkatan taraf hidup dan kesempatan ekonomi masyarakat, terutama pada wilayah yang capaian IPM-nya masih berada di bawah rata-rata provinsi.

Tabel 5.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia
1	Jembrana	75,94
2	Tabanan	79,70
3	Badung	84,27

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia
4	Gianyar	80,96
5	Klungkung	75,89
6	Bangli	73,22
7	Karang Asem	71,89
8	Buleleng	76,06
9	Kota Denpasar	85,63
	Bali	**79,37**

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025



Gambar 5.1.
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota/Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2025

5.3. KETIMPANGAN PADA MASYARAKAT

Ketimpangan pendapatan adalah kondisi ketika pendapatan dalam suatu masyarakat tidak tersebar secara merata antar penduduk atau antar kelompok. Indeks Gini merupakan salah satu ukuran yang paling umum digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah.

Ukuran ini memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1, yang masing-masing merepresentasikan kondisi distribusi pendapatan yang berbeda. Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar tingkat ketidakmerataan pendapatan yang terjadi. Nilai 0 menggambarkan distribusi pendapatan yang sepenuhnya merata di antara seluruh penduduk, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sangat ekstrem, di mana pendapatan terkonsentrasi pada sekelompok kecil masyarakat.

Dengan demikian, Indeks Gini menjadi alat penting dalam analisis ekonomi dan sosial karena membantu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pemerataan pendapatan serta mendorong perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Berdasarkan data tahun 2025, Gini Rasio Provinsi Bali tercatat sebesar 0,353. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat di Bali berada pada kategori relatif rendah hingga sedang, namun masih memperlihatkan adanya kesenjangan distribusi kesejahteraan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah.

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, Kota Denpasar memiliki Gini Rasio tertinggi sebesar 0,323, disusul Kabupaten Badung sebesar 0,313 dan Kabupaten Jembrana sebesar 0,297. Tingginya Gini Rasio pada Denpasar dan Badung dapat mencerminkan struktur ekonomi yang lebih kompleks, dengan variasi pendapatan dan pengeluaran masyarakat yang lebih lebar seiring kuatnya aktivitas perdagangan, jasa, pariwisata, dan sektor perkotaan.

Kabupaten Buleleng mencatat Gini Rasio sebesar 0,289, kemudian Kabupaten Klungkung sebesar 0,285, Kabupaten Karangasem sebesar 0,276, dan Kabupaten Gianyar sebesar 0,275. Sementara itu, Kabupaten Bangli mencatat Gini Rasio sebesar 0,263, sedangkan Kabupaten Tabanan menjadi wilayah dengan Gini Rasio terendah, yaitu 0,247.

Secara spasial, data tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antarpenduduk cenderung lebih tinggi pada wilayah perkotaan dan kawasan dengan aktivitas ekonomi yang lebih dinamis, seperti Denpasar dan Badung. Sebaliknya, wilayah seperti Tabanan dan Bangli menunjukkan distribusi pengeluaran yang relatif lebih merata. Namun demikian, Gini Rasio yang rendah tidak selalu berarti tingkat kesejahteraan lebih tinggi, karena indikator ini hanya menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi, bukan besarnya pendapatan atau pengeluaran masyarakat secara absolut.

Hal yang menarik dari data ini adalah Gini Rasio Provinsi Bali sebesar 0,353 lebih tinggi dibandingkan seluruh nilai kabupaten/kota yang tercantum. Nilai tertinggi kabupaten/kota hanya 0,323 di Kota Denpasar. Secara statistik hal seperti ini dapat terjadi karena penghitungan Gini Rasio provinsi menggunakan distribusi seluruh rumah tangga atau penduduk Bali secara langsung, bukan merupakan rata-rata sederhana dari Gini Rasio kabupaten/kota. Dengan demikian, ketimpangan pada tingkat provinsi juga menangkap perbedaan tingkat pengeluaran antarwilayah, selain ketimpangan di dalam masing-masing kabupaten/kota.

Selisih antara Gini Rasio tertinggi dan terendah antar kabupaten/kota mencapai 0,076 poin, yaitu antara Kota Denpasar sebesar 0,323 dan Kabupaten Tabanan sebesar 0,247. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan tidak seragam di seluruh wilayah Bali dan memerlukan pendekatan kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik sosial ekonomi masing-masing daerah.

Dalam konteks pembangunan, capaian Gini Rasio tersebut menunjukkan pentingnya menjaga agar pertumbuhan ekonomi Bali tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah dan kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat,

penguatan UMKM dan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

Gini Rasio Provinsi Bali tahun 2025 tercatat sebesar 0,353, yang menunjukkan masih adanya ketimpangan distribusi pengeluaran masyarakat meskipun secara umum berada pada tingkat yang relatif terkendali. Pada tingkat kabupaten/kota, Kota Denpasar mencatat Gini Rasio tertinggi sebesar 0,323, sedangkan Kabupaten Tabanan terendah sebesar 0,247. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi tingkat ketimpangan antarwilayah. Oleh karena itu, upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali perlu terus diimbangi dengan penguatan pemerataan pembangunan, perluasan kesempatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Tabel 5.3
Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota
Kab. Jembrana	0,297
Kab. Tabanan	0,247
Kab. Badung	0,313
Kab. Gianyar	0,275
Kab. Klungkung	0,285
Kab. Bangli	0,263
Kab. Karangasem	0,276
Kab. Buleleng	0,289
Kota Denpasar	0,323
Provinsi Bali	0,353

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2026

5.4. KONDISI PENDIDIKAN MASYARAKAT

Kondisi pendidikan masyarakat adalah gambaran umum mengenai tingkat pengetahuan, kemampuan membaca dan menulis, akses terhadap pendidikan formal maupun nonformal, serta kualitas layanan pendidikan yang diterima oleh suatu kelompok penduduk. Kondisi ini biasanya diukur melalui indikator seperti angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, serta kualitas dan pemerataan fasilitas pendidikan. Semakin baik kondisi pendidikan, semakin tinggi pula kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Kondisi pendidikan masyarakat Bali secara umum menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini tercermin dari indikator melek huruf, Indikator seperti rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan, menandakan bahwa

masyarakat Bali semakin banyak mengakses pendidikan formal dan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

5.4.1. Angka Melek Huruf

Tingkat kemampuan baca-tulis penduduk Bali tetap berada pada level sangat tinggi di sebagian besar kelompok umur. Pada kelompok usia produktif (15-49 tahun), persentase melek huruf stabil di atas 99% pada tahun 2023 maupun 2024, dengan beberapa kelompok mengalami sedikit peningkatan, seperti usia 20-24 tahun yang mencapai 100 persen pada 2024. Kondisi ini mencerminkan kualitas pendidikan dasar yang relatif baik.

Berdasarkan data tahun 2025, Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Bali tercatat sebesar 96,42% untuk penduduk laki-laki dan perempuan secara keseluruhan. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Bali telah memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis, sehingga secara umum tingkat literasi dasar di Provinsi Bali sudah tergolong tinggi.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, terdapat perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan. AMH laki-laki di Provinsi Bali mencapai 98,25%, sedangkan AMH perempuan sebesar 94,58%. Dengan demikian, terdapat kesenjangan sekitar 3,67 poin persentase antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat literasi dasar secara umum sudah tinggi, masih terdapat disparitas gender yang perlu menjadi perhatian, terutama pada wilayah-wilayah yang capaian AMH perempuannya relatif rendah.

Pada tingkat kabupaten/kota, Kota Denpasar memiliki AMH tertinggi sebesar 99,64%, dengan AMH laki-laki sebesar 99,55% dan perempuan sebesar 99,73%. Menariknya, di Denpasar capaian AMH perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Badung dengan AMH gabungan sebesar 98,69%, kemudian Kabupaten Tabanan sebesar 97,57%. Ketiga wilayah tersebut memiliki capaian di atas rata-rata Provinsi Bali.

Kabupaten Gianyar mencatat AMH sebesar 95,90%, disusul Kabupaten Jembrana sebesar 95,80%, Kabupaten Buleleng sebesar 94,94%, Kabupaten Bangli sebesar 94,36%, dan Kabupaten Klungkung sebesar 92,54%. Sementara itu, Kabupaten Karangasem memiliki AMH terendah sebesar 89,11%, dengan AMH laki-laki sebesar 94,04% dan perempuan hanya 84,25%.

Perbedaan antarwilayah juga cukup nyata. Selisih antara wilayah dengan AMH tertinggi dan terendah mencapai sekitar 10,53 poin persentase, yaitu antara Kota Denpasar sebesar 99,64% dan Kabupaten Karangasem sebesar 89,11%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan capaian literasi dasar di Bali masih perlu terus diperkuat, khususnya pada kabupaten dengan tingkat melek huruf yang relatif lebih rendah.

Dari sisi gender, kesenjangan terbesar terdapat di Kabupaten Karangasem, dengan selisih AMH laki-laki dan perempuan sekitar 9,79 poin persentase. Selanjutnya terdapat di Klungkung sekitar 6,83 poin, Jembrana sekitar 5,77 poin, dan Buleleng sekitar 5,47 poin. Sebaliknya, kesenjangan paling kecil

terdapat di Kota Denpasar, bahkan capaian perempuan sedikit lebih tinggi daripada laki-laki.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama literasi dasar di Bali bukan lagi semata-mata meningkatkan angka melek huruf provinsi secara agregat, tetapi lebih pada mengurangi kesenjangan antarwilayah dan kesenjangan gender. Upaya peningkatan literasi perlu lebih diarahkan pada wilayah dengan capaian rendah dan kelompok perempuan, terutama di Karangasem, Klungkung, Buleleng, Jembrana, dan Bangli.

Angka Melek Huruf Provinsi Bali tahun 2025 mencapai 96,42%, yang menunjukkan bahwa tingkat literasi dasar masyarakat Bali secara umum sudah tinggi. Namun demikian, masih terdapat disparitas antarwilayah dan antara laki-laki dan perempuan. Kota Denpasar mencatat capaian tertinggi sebesar 99,64%, sedangkan Kabupaten Karangasem terendah sebesar 89,11%. Selain itu, AMH laki-laki sebesar 98,25% masih lebih tinggi dibandingkan perempuan sebesar 94,58%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan literasi ke depan perlu diarahkan pada pemerataan akses dan kualitas pendidikan, terutama bagi perempuan dan masyarakat di wilayah dengan capaian melek huruf yang masih relatif rendah.

Tabel 5.4
Angka Melek Huruf Kota/Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Persen)		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
	2025	2025	2025
Kab. Jembrana	98,72	92,95	95,8
Kab. Tabanan	99,31	95,88	97,57
Kab. Badung	99,56	97,78	98,69
Kab. Gianyar	98,15	93,63	95,9
Kab. Klungkung	96,03	89,2	92,54
Kab. Bangli	95,99	92,71	94,36
Kab. Karangasem	94,04	84,25	89,11
Kab. Buleleng	97,71	92,24	94,94
Kota Denpasar	99,55	99,73	99,64
Provinsi Bali	98,25	94,58	96,42

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2026

5.4.2. Angka Pertisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak siswa yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat usia mereka, dibandingkan dengan jumlah penduduk yang seharusnya berada pada jenjang tersebut.

Berdasarkan data tahun 2025, Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Bali menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan yang relatif tinggi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, namun menurun cukup tajam pada jenjang perguruan tinggi. Secara provinsi, APK tercatat sebesar 104,07% untuk SD/sederajat, 95,94% untuk SMP/sederajat, 92,58% untuk SMA/sederajat, dan 40,69% untuk perguruan tinggi.

Pada jenjang SD/sederajat, seluruh kabupaten/kota memiliki APK di atas 100%. APK tertinggi terdapat di Kabupaten Klungkung sebesar 108,01%, disusul Kabupaten Bangli sebesar 107,16% dan Kabupaten Buleleng sebesar 106,15%. Sementara itu, nilai terendah terdapat di Kabupaten Badung sebesar 101,49%. Nilai APK yang melebihi 100% dimungkinkan karena indikator ini membandingkan seluruh peserta didik pada suatu jenjang pendidikan, tanpa membatasi usia, dengan jumlah penduduk pada kelompok usia resmi jenjang tersebut. Karena itu, keberadaan peserta didik yang lebih muda atau lebih tua dari usia sekolah standar dapat menyebabkan APK melampaui 100%.

Pada jenjang SMP/sederajat, APK Provinsi Bali mencapai 95,94%. Capaian tertinggi terdapat di Kota Denpasar sebesar 100,31%, diikuti Kabupaten Badung sebesar 99,63% dan Kabupaten Gianyar sebesar 96,78%. Sementara itu, capaian terendah terdapat di Kabupaten Klungkung sebesar 86,01%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan pada jenjang SMP relatif tinggi, tetapi belum merata sepenuhnya antarwilayah.

Untuk jenjang SMA/sederajat, APK Provinsi Bali sebesar 92,58%. Kabupaten Klungkung mencatat APK tertinggi sebesar 114,82%, diikuti Kabupaten Jembrana sebesar 102,97% dan Kabupaten Gianyar sebesar 101,27%. Sebaliknya, nilai terendah terdapat di Kota Denpasar sebesar 80,26%, disusul Kabupaten Bangli sebesar 87,60% dan Kabupaten Badung sebesar 89,36%. Tingginya APK di beberapa wilayah hingga melampaui 100% juga dapat dipengaruhi oleh adanya siswa dari kelompok usia di luar usia resmi jenjang SMA atau mobilitas pelajar antardaerah.

Perbedaan yang paling mencolok terlihat pada jenjang perguruan tinggi. APK Provinsi Bali hanya sebesar 40,69%, jauh lebih rendah dibandingkan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kabupaten Badung memiliki APK perguruan tinggi tertinggi sebesar 55,30%, disusul Kota Denpasar sebesar 49,93%, Kabupaten Tabanan sebesar 35,66%, dan Kabupaten Gianyar sebesar 35,46%. Sementara itu, capaian terendah terdapat di Kabupaten Bangli sebesar 15,70% dan Kabupaten Klungkung sebesar 16,91%.

Perbedaan antara capaian tertinggi dan terendah pada jenjang perguruan tinggi mencapai 39,60 poin persentase, yaitu antara Kabupaten Badung dan Kabupaten Bangli. Selisih ini jauh lebih besar dibandingkan variasi pada jenjang SD dan SMP, sehingga menunjukkan bahwa tantangan pemerataan partisipasi pendidikan di Bali semakin besar pada jenjang pendidikan tinggi.

Secara umum, pola APK tahun 2025 menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan di Bali masih sangat kuat pada jenjang pendidikan dasar, cukup tinggi pada pendidikan menengah, tetapi menurun secara signifikan pada pendidikan tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tantangan pembangunan pendidikan di Bali bukan hanya mempertahankan tingginya partisipasi pada pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga memperluas akses dan keberlanjutan pendidikan setelah jenjang SMA.

Angka Partisipasi Kasar Provinsi Bali tahun 2025 menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan yang tinggi pada jenjang SD/sederajat sebesar 104,07%, kemudian menurun pada jenjang SMP/sederajat sebesar 95,94% dan SMA/sederajat sebesar 92,58%. Penurunan paling nyata terjadi pada jenjang perguruan tinggi dengan APK sebesar 40,69%. Variasi antarwilayah juga semakin besar pada jenjang pendidikan tinggi, dengan capaian tertinggi di Kabupaten Badung sebesar 55,30% dan terendah di Kabupaten Bangli sebesar 15,70%. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pemerataan akses pendidikan, terutama pada jenjang menengah atas dan perguruan tinggi, agar keberlanjutan pendidikan masyarakat Bali dapat meningkat secara lebih merata.

Tabel 5.5
Persentase Angka Pasrtisipasi Kasar Di Provinsi Bali
Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan dan Kabupaten/Kota (Persen)			
	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Perguruan Tinggi
	2025	2025	2025	2025
Kab. Jembrana	104,15	93,04	102,97	27,24
Kab. Tabanan	103,1	94,87	97,12	35,66
Kab. Badung	101,49	99,63	89,36	55,3
Kab. Gianyar	103,68	96,78	101,27	35,46
Kab. Klungkung	108,01	86,01	114,82	16,91
Kab. Bangli	107,16	93,11	87,6	15,7
Kab. Karangasem	103,61	92,18	94,87	26,11
Kab. Buleleng	106,15	93,6	97,88	29,62
Kota Denpasar	103,79	100,31	80,26	49,93
Provinsi Bali	104,07	95,94	92,58	40,69

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2026

5.4.3. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Berdasarkan data tahun 2025, tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Bali menunjukkan bahwa kelompok terbesar adalah penduduk

yang menamatkan SLTA/sederajat, yaitu sebesar 34,92%. Selanjutnya, penduduk yang menamatkan SLTP/sederajat mencapai 20,40%, SD/sederajat sebesar 18,88%, dan penduduk dengan pendidikan DIV/S1/S2/S3 sebesar 11,51%. Sementara itu, lulusan DI/DII/DIII sebesar 4,68%, sedangkan penduduk yang masuk kategori tidak punya pendidikan yang ditamatkan masih sebesar 9,61%.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa struktur pendidikan penduduk Bali secara umum telah bergeser ke jenjang pendidikan menengah, terutama SLTA/sederajat. Jika digabungkan, penduduk yang telah menamatkan pendidikan SLTA/sederajat hingga pendidikan tinggi mencapai sekitar 51,11%. Artinya, lebih dari separuh penduduk usia 15 tahun ke atas di Bali telah menyelesaikan pendidikan sekurang-kurangnya jenjang menengah atas. Namun demikian, masih terdapat sekitar 28,49% penduduk yang hanya menamatkan SD/sederajat atau tidak memiliki pendidikan yang ditamatkan, sehingga peningkatan kualitas pendidikan penduduk masih menjadi agenda penting.

Pada tingkat kabupaten/kota, terdapat perbedaan yang cukup nyata. Kota Denpasar menunjukkan struktur pendidikan penduduk yang paling tinggi. Sebanyak 41,43% penduduk usia 15 tahun ke atas menamatkan SLTA/sederajat dan 17,87% telah menamatkan pendidikan DIV/S1/S2/S3. Jika ditambah lulusan DI/DII/DIII sebesar 6,77%, maka sekitar 66,07% penduduk usia 15 tahun ke atas di Denpasar memiliki pendidikan minimal SLTA/sederajat. Selain itu, proporsi penduduk yang tidak memiliki pendidikan yang ditamatkan hanya sebesar 2,20%, terendah di antara seluruh kabupaten/kota.

Kabupaten Badung juga menunjukkan tingkat pendidikan penduduk yang relatif tinggi. Proporsi lulusan SLTA/sederajat mencapai 44,21%, tertinggi di Bali, sedangkan lulusan DIV/S1/S2/S3 mencapai 14,88% dan DI/DII/DIII sebesar 7,28%. Dengan demikian, sekitar 66,37% penduduk usia 15 tahun ke atas di Badung telah menamatkan pendidikan minimal SLTA/sederajat. Proporsi penduduk yang tidak memiliki pendidikan yang ditamatkan juga relatif rendah, yaitu hanya 3,52%.

Kabupaten Tabanan dan Gianyar memiliki struktur pendidikan yang juga relatif baik. Di Tabanan, penduduk lulusan SLTA/sederajat mencapai 35,69%, sedangkan pendidikan tinggi DIV/S1/S2/S3 sebesar 11,53%. Di Gianyar, lulusan SLTA/sederajat sebesar 36,80% dan DIV/S1/S2/S3 sebesar 12,02%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada beberapa wilayah dengan aktivitas ekonomi yang lebih berkembang, proporsi penduduk berpendidikan menengah atas dan tinggi cenderung lebih besar.

Sebaliknya, Kabupaten Karangasem memiliki proporsi penduduk tanpa pendidikan yang ditamatkan paling tinggi, yaitu sebesar 24,66%. Penduduk yang hanya menamatkan SD/sederajat juga cukup besar, yaitu 26,04%. Dengan demikian, sekitar separuh penduduk usia 15 tahun ke atas di Karangasem berada pada kelompok tidak memiliki pendidikan yang ditamatkan atau hanya

tamat SD. Sementara itu, lulusan DIV/S1/S2/S3 hanya sebesar 4,99%, terendah di Provinsi Bali.

Pola serupa, meskipun tidak setinggi Karangasem, juga terlihat di Kabupaten Bangli dan Buleleng. Di Bangli, kelompok terbesar adalah lulusan SD/sederajat sebesar 30,38%, sementara penduduk yang tidak memiliki pendidikan yang ditamatkan sebesar 15,42%. Lulusan DIV/S1/S2/S3 hanya sebesar 6,53%. Di Buleleng, lulusan SD/sederajat sebesar 27,20%, penduduk yang tidak memiliki pendidikan yang ditamatkan sebesar 15,12%, dan lulusan DIV/S1/S2/S3 sebesar 6,31%.

Kabupaten Klungkung juga masih memiliki proporsi penduduk tanpa pendidikan yang ditamatkan cukup tinggi, yaitu 16,94%, dengan lulusan SD/sederajat sebesar 22,67%. Di sisi lain, lulusan SLTA/sederajat sebesar 28,87% dan pendidikan DIV/S1/S2/S3 sebesar 6,23%. Sementara itu, Kabupaten Jembrana menunjukkan struktur yang lebih seimbang, dengan lulusan SLTA/sederajat sebesar 28,95%, SLTP/sederajat 25,03%, SD/sederajat 23,72%, dan pendidikan DIV/S1/S2/S3 sebesar 6,90%.

Secara keseluruhan, data tersebut memperlihatkan adanya disparitas tingkat pendidikan antarwilayah di Provinsi Bali. Denpasar dan Badung memiliki proporsi penduduk berpendidikan menengah atas dan tinggi yang paling besar, sedangkan Karangasem, Bangli, Buleleng, dan Klungkung masih memiliki proporsi penduduk berpendidikan rendah yang relatif besar. Perbedaan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bali perlu diikuti dengan upaya pemerataan akses, keberlanjutan pendidikan, serta peningkatan kesempatan melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah atas dan perguruan tinggi.

Struktur pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Bali tahun 2025 didominasi oleh lulusan SLTA/sederajat sebesar 34,92%. Sekitar 51,11% penduduk telah menamatkan pendidikan minimal SLTA/sederajat, termasuk 16,19% yang telah menamatkan pendidikan diploma dan perguruan tinggi. Namun demikian, masih terdapat 28,49% penduduk yang tidak memiliki pendidikan yang ditamatkan atau hanya menamatkan SD/sederajat. Disparitas antarwilayah masih terlihat cukup kuat, dengan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung memiliki struktur pendidikan penduduk yang relatif lebih tinggi, sementara Kabupaten Karangasem, Bangli, Buleleng, dan Klungkung masih memiliki proporsi penduduk berpendidikan rendah yang relatif besar. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pemerataan akses dan keberlanjutan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Bali secara lebih merata.

Tabel 5.6
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kabupaten/Kota di Bali (Persen)					
	Tidak Punya	SD Sederajat	SLTP Sederajat	SLTA Sederajat	DI / DII / DIII	DIV / S1 / S2 / S3
	2025	2025	2025	2025	2025	2025
Kab. Jembrana	12,57	23,72	25,03	28,95	2,82	6,90
Kab. Tabanan	7,44	21,06	19,22	35,69	5,07	11,53
Kab. Badung	3,52	12,30	17,82	44,21	7,28	14,88
Kab. Gianyar	9,77	17,18	19,23	36,80	5	12,02
Kab. Klungkung	16,94	22,67	22,16	28,87	3,13	6,23
Kab. Bangli	15,42	30,38	21,06	24,42	2,18	6,53
Kab. Karangasem	24,66	26,04	19,25	23,60	1,46	4,99
Kab. Buleleng	15,12	27,20	22,66	26,78	1,93	6,31
Kota Denpasar	2,20	11,02	20,71	41,43	6,77	17,87
Provinsi Bali	9,61	18,88	20,40	34,92	4,68	11,51

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2026

5.4.4. Angka Partisipasi Murni

Berdasarkan data tahun 2025, Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Bali menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya masih sangat tinggi pada jenjang pendidikan dasar, tetapi semakin menurun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Secara provinsi, APM tercatat sebesar 97,05% untuk SD/sederajat, 84,81% untuk SMP/sederajat, 76,06% untuk SMA/sederajat, dan 30,55% untuk perguruan tinggi.

Pada jenjang SD/sederajat, capaian APM Provinsi Bali sebesar 97,05% menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah mengikuti pendidikan pada jenjang yang sesuai. APM tertinggi terdapat di Kabupaten Bangli sebesar 98,82%, diikuti Kabupaten Klungkung sebesar 98,43% dan Kabupaten Jembrana sebesar 98,40%. Sementara itu, capaian terendah terdapat di Kabupaten Badung sebesar 94,84%. Secara umum, variasi antarwilayah pada jenjang SD relatif kecil, yang menunjukkan tingkat pemerataan partisipasi pendidikan dasar yang cukup baik.

Pada jenjang SMP/sederajat, APM Provinsi Bali menurun menjadi 84,81%. Capaian tertinggi terdapat di Kabupaten Bangli sebesar 87,28%, diikuti Kabupaten Badung sebesar 87,13%, Kabupaten Gianyar sebesar 86,83%, dan Kabupaten Jembrana sebesar 86,69%. Sebaliknya, capaian terendah terdapat di Kabupaten Klungkung sebesar 78,18%. Penurunan dari jenjang SD ke SMP menunjukkan bahwa sebagian penduduk usia SMP belum seluruhnya mengikuti pendidikan pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya.

Pada jenjang SMA/sederajat, APM Provinsi Bali kembali menurun menjadi 76,06%. Capaian tertinggi terdapat di Kabupaten Klungkung sebesar 88,29%, kemudian Kabupaten Jembrana sebesar 87,50% dan Kabupaten Gianyar sebesar 85,78%. Sementara itu, capaian terendah terdapat di Kota Denpasar sebesar 66,15%, disusul Kabupaten Bangli sebesar 70,80% dan Kabupaten Badung sebesar 72,05%. Variasi yang cukup lebar pada jenjang ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah atas belum merata antarwilayah.

Penurunan yang paling tajam terjadi pada jenjang perguruan tinggi, dengan APM Provinsi Bali hanya sebesar 30,55%. Capaian tertinggi terdapat di Kabupaten Badung sebesar 38,68%, diikuti Kota Denpasar sebesar 37,72%, Kabupaten Tabanan sebesar 30,50%, dan Kabupaten Gianyar sebesar 28,54%. Sementara itu, capaian terendah terdapat di Kabupaten Bangli sebesar 14,19% dan Kabupaten Klungkung sebesar 14,79%. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa akses dan keberlanjutan pendidikan tinggi masih menjadi tantangan utama pembangunan pendidikan di Bali.

Secara keseluruhan, pola APM tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan partisipasi murni seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Selisih antara APM SD/sederajat dan perguruan tinggi mencapai 66,50 poin persentase. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan pendidikan Bali bukan lagi hanya pada akses pendidikan dasar, tetapi terutama pada mempertahankan keberlanjutan pendidikan hingga SMA dan perguruan tinggi.

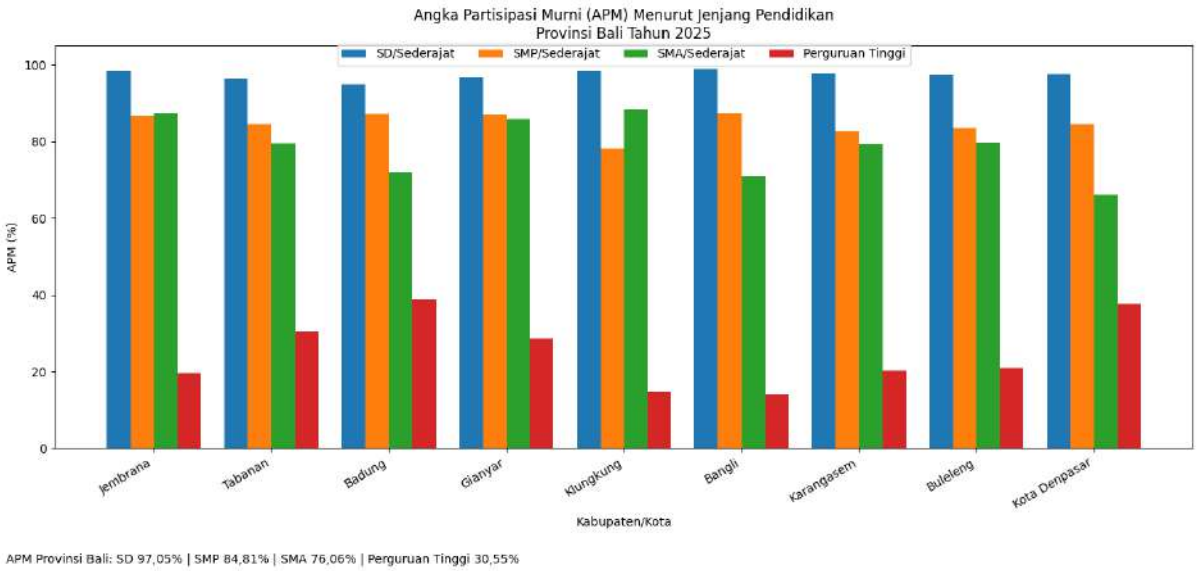

Gambar 5.2.
Grafik Angka Partisipasi Murni Kota/kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2025
Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2026

Tabel 5.7
Persentase Angka Partisipasi Murni Kota/Kabupaten Di Provinsi Bali Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Bali Menurut Jenjang			
	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	Perguruan Tinggi
	2025	2025	2025	2025
Kab. Jembrana	98,40	86,69	87,50	19,46
Kab. Tabanan	96,47	84,50	79,46	30,50
Kab. Badung	94,84	87,13	72,05	38,68
Kab. Gianyar	96,73	86,83	85,78	28,54
Kab. Klungkung	98,43	78,18	88,29	14,79
Kab. Bangli	98,82	87,28	70,80	14,19
Kab. Karangasem	97,70	82,56	79,21	20,19
Kab. Buleleng	97,25	83,45	79,60	20,89
Kota Denpasar	97,55	84,36	66,15	37,72
Provinsi Bali	97,05	84,81	76,06	30,55

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2026

5.4.5. Angka Putus Sekolah

Persentase penduduk yang tidak lagi bersekolah masih ditemukan pada kelompok umur 13-24 tahun. Kelompok usia 13-18 tahun mencerminkan potensi putus sekolah pada jenjang SMP hingga SMA. Meskipun proporsinya relatif kecil (1,2-15%), kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian remaja tetap membutuhkan dukungan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkelanjutan.

Persentase tidak bersekolah lagi mencapai nilai tertinggi pada kelompok umur 19-24 tahun, yaitu sebesar 68,18% pada tahun 2024. Fenomena ini menggambarkan transisi alami dari dunia pendidikan menuju dunia kerja atau aktivitas lain setelah menyelesaikan pendidikan formal.

Tabel 5.8
Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Partisipasi Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2023 dan 2024

Kelompok Umur Sekolah (Tahun)	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah lagi	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah lagi
	2023			2024		
7–12	0,39	99,61	–	0,35	99,65	-
13–15	0,11	97,97	1,94	0,02	98,78	1,20
16–18	0,11	84,73	15,16	0,10	85,17	14,73
19–24	0,20	30,92	68,98	0,34	31,49	68,18
7–24	**0,23**	**74,71**	**25,06**	**0,25**	**73,96**	**25,80**

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2026

5.4.6. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Berdasarkan data tahun 2025, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Provinsi Bali menunjukkan variasi yang cukup lebar antar kabupaten/kota yang dapat diukur. Sesuai ketentuan yang Anda sampaikan, pengukuran IPLM hanya dilakukan pada provinsi/kabupaten/kota yang urusan perpustakaannya ditangani oleh kelembagaan setingkat dinas. Karena itu, tidak seluruh wilayah memiliki nilai IPLM.

Tabel 5.9
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota/Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2025

Kabupaten/Kota	IPLM	Dimensi Kepatuhan	Dimensi Kinerja
Jembrana	–	–	–
Tabanan	0,8	0,316	0,326
Badung	19,43	0,177	0,202
Gianyar	6,04	0,121	0,149
Klungkung	16,69	0,111	0,19
Bangli	–	–	–
Karangasem	5,72	0,086	0,11
Buleleng	2,53	0,187	0,266
Kota Denpasar	18,69	0,143	0,277
Provinsi Bali	–	–	–

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2026

Kabupaten/kota yang memiliki nilai IPLM tahun 2025 adalah Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Karangasem, Buleleng, dan Kota Denpasar. Sementara Jembrana, Bangli, dan Provinsi Bali tidak memiliki nilai pada tabel sumber, sehingga tidak tepat diperlakukan sebagai nilai nol.

Berdasarkan nilai IPLM yang tersedia, Kabupaten Badung mencatat nilai tertinggi sebesar 19,43, disusul Kota Denpasar sebesar 18,69 dan Kabupaten Klungkung sebesar 16,69. Ketiga wilayah tersebut berada jauh di atas wilayah lainnya yang memiliki nilai pengukuran.

Kelompok berikutnya adalah Kabupaten Gianyar sebesar 6,04 dan Kabupaten Karangasem sebesar 5,72. Sementara itu, nilai yang relatif lebih rendah terdapat di Kabupaten Buleleng sebesar 2,53 dan Kabupaten Tabanan sebesar 0,80.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa capaian pembangunan literasi masyarakat antarwilayah masih belum merata. Namun demikian, interpretasi terhadap nilai IPLM perlu dilakukan secara hati-hati karena indikator ini tidak semata-mata menggambarkan minat baca masyarakat, tetapi berkaitan dengan pembangunan dan penyelenggaraan ekosistem literasi yang menjadi ruang lingkup pengukuran IPLM.

Jika ditinjau dari Dimensi Kepatuhan, nilai tertinggi terdapat di Kabupaten Tabanan sebesar 0,3160, kemudian Buleleng sebesar 0,1870, Badung sebesar 0,1770, dan Kota Denpasar sebesar 0,1430. Sementara nilai terendah terdapat di Kabupaten Karangasem sebesar 0,0860.

Untuk Dimensi Kinerja, Tabanan juga mencatat nilai tertinggi sebesar 0,3260, kemudian Kota Denpasar sebesar 0,2770, Buleleng sebesar 0,2660, Badung sebesar 0,2020, dan Klungkung sebesar 0,1900. Karangasem mencatat nilai terendah sebesar 0,1100.

Menariknya, nilai dimensi kepatuhan dan kinerja tidak selalu bergerak sejalan dengan nilai IPLM total. Tabanan, misalnya, memiliki nilai IPLM paling rendah di antara wilayah yang diukur, tetapi mencatat nilai tertinggi untuk dimensi kepatuhan dan kinerja. Karena itu, ketiga indikator tersebut sebaiknya dibaca sebagai komponen yang saling melengkapi dan tidak ditafsirkan sebagai satu ukuran tunggal tanpa melihat metodologi penghitungan indikatornya.

Secara umum, kondisi IPLM tahun 2025 menunjukkan bahwa Badung, Denpasar, dan Klungkung menjadi wilayah dengan capaian IPLM tertinggi, sedangkan Tabanan dan Buleleng masih menunjukkan nilai yang relatif rendah. Di sisi lain, belum tersedianya nilai untuk Jembrana, Bangli, dan Provinsi Bali bukan menunjukkan ketiadaan pembangunan literasi, tetapi berkaitan dengan cakupan kelembagaan yang memenuhi kriteria pengukuran IPLM.

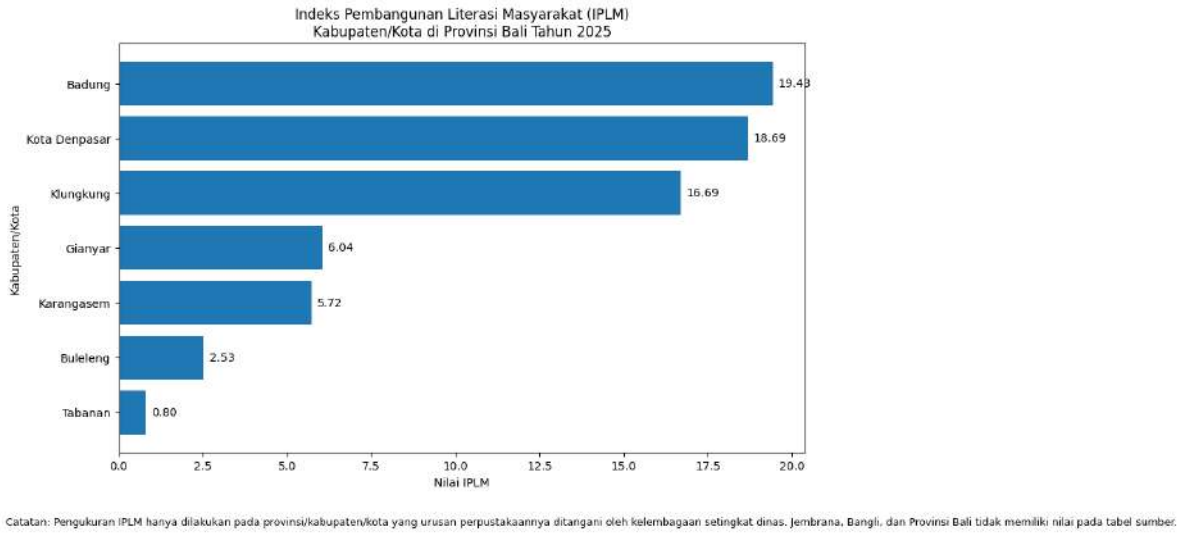

Gambar 5.3.
Grafik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota/Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2025

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2026

5.5. KONDISI KESEHATAN MASYARAKAT

5.5.1. Angka Kematian Bayi

Menurunkan angka kematian bayi baru lahir, bayi, dan balita merupakan tujuan penting dalam pelayanan kesehatan anak. Upaya ini dilakukan melalui pencegahan, deteksi dini, serta penanganan cepat berbagai masalah kesehatan pada masa awal kehidupan, agar anak memiliki fondasi kesehatan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang.

Sesuai Permenkes RI No. 25 Tahun 2014, setiap anak berhak untuk hidup dan berkembang secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan anak harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 18 tahun.

Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Bali tahun 2025 tercatat sebesar 10,88 per 1.000 kelahiran hidup. Artinya, secara statistik terdapat sekitar 11 kematian bayi sebelum mencapai usia satu tahun untuk setiap 1.000 kelahiran hidup.

AKB merupakan salah satu indikator penting yang menggambarkan derajat kesehatan masyarakat karena sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan ibu selama kehamilan, kualitas pelayanan persalinan, kesehatan neonatal, kecukupan gizi, imunisasi, serta akses terhadap pelayanan kesehatan anak. Dengan demikian, nilai AKB tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak masih perlu menjadi bagian penting dalam pembangunan kesehatan Bali.

Persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif mencapai sekitar 90,34%, cakupan imunisasi dasar lengkap sebesar 86,74%, dan cakupan bayi mendapatkan vitamin A sebesar 94,84%. Selain itu, kunjungan neonatal lengkap tercatat sekitar 99,16%. Capaian tersebut menunjukkan tingginya jangkauan pelayanan kesehatan dasar bagi bayi, meskipun tetap diperlukan peningkatan kualitas pelayanan untuk menekan kematian bayi.

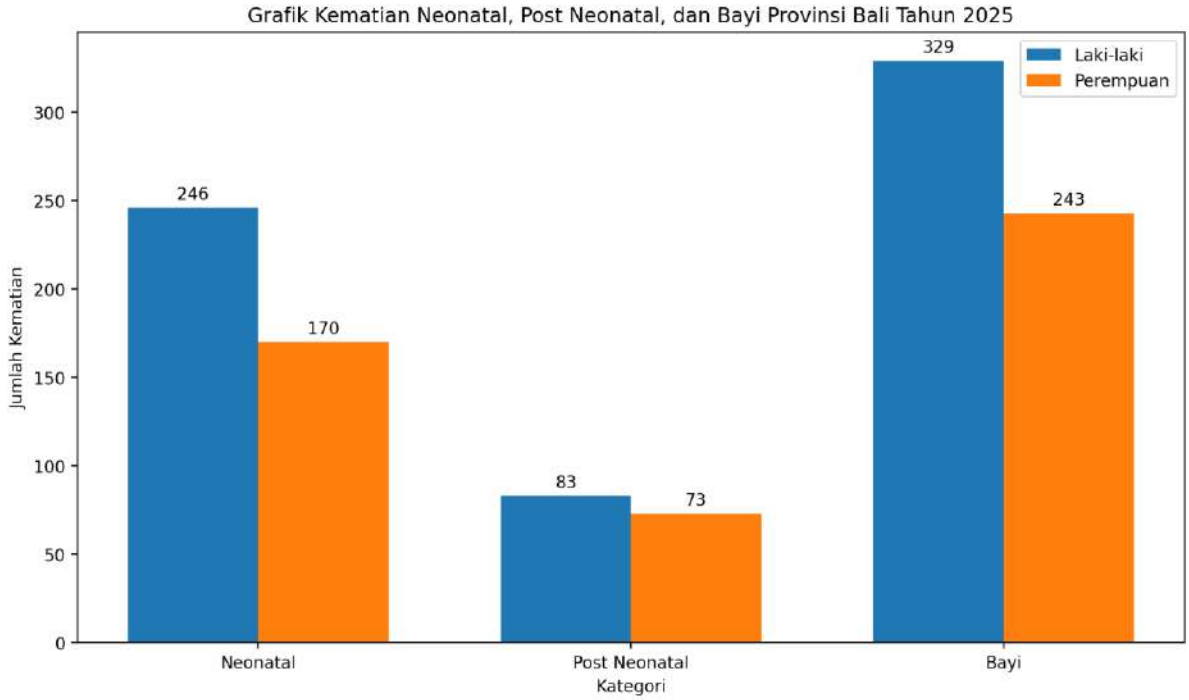

Gambar 5.4.
Angka Kematian Neonatus, Bayi, Dan Balita di Provinsi Bali

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2026

5.5.2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah indikator untuk menilai keberhasilan pelayanan kesehatan ibu. AKI dihitung dengan membandingkan jumlah kematian ibu dengan jumlah kelahiran hidup, lalu dikalikan 100.000. Kematian ibu yang dihitung adalah kematian selama kehamilan hingga 42 hari setelah melahirkan, yang disebabkan oleh masalah terkait kehamilan atau penanganannya, bukan akibat kecelakaan. AKI mencerminkan tingkat kesehatan ibu, kualitas layanan kesehatan selama kehamilan, persalinan, dan nifas, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kondisi kesehatan maternal tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat 47 kematian ibu dari total 52.572 kelahiran hidup, sehingga Angka Kematian Ibu (AKI) yang dilaporkan mencapai 89,40 per 100.000 kelahiran hidup.

Dari 47 kematian ibu tersebut, sebanyak 9 kasus terjadi pada masa kehamilan, 1 kasus pada saat persalinan, dan 37 kasus pada masa nifas. Dengan demikian,

sekitar 78,7% kematian ibu terjadi pada masa nifas. Kondisi ini menunjukkan bahwa masa setelah persalinan merupakan periode yang sangat penting dalam upaya penurunan kematian ibu dan membutuhkan penguatan pemantauan serta pelayanan nifas, deteksi dini komplikasi, sistem rujukan, dan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.

Secara wilayah, jumlah kematian ibu paling banyak tercatat di Kota Denpasar sebanyak 13 kasus, kemudian Badung dan Gianyar masing-masing 6 kasus, Bangli dan Buleleng masing-masing 5 kasus, Jembrana dan Karangasem masing-masing 4 kasus, Tabanan 3 kasus, serta Klungkung 1 kasus. Namun, jumlah absolut kematian perlu dibaca bersama jumlah kelahiran hidup masing-masing wilayah karena besarnya populasi dan jumlah persalinan berbeda.

Dari sisi pelayanan maternal, file menunjukkan bahwa persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan telah mencapai sekitar 96,89%, sedangkan cakupan pelayanan ibu nifas lengkap sekitar 96,71%. Cakupan tersebut sudah relatif tinggi, sehingga tantangan berikutnya tidak hanya berkaitan dengan akses, tetapi juga dengan mutu pelayanan, kecepatan deteksi komplikasi, efektivitas rujukan, dan penanganan kegawatdaruratan maternal, khususnya selama periode nifas.

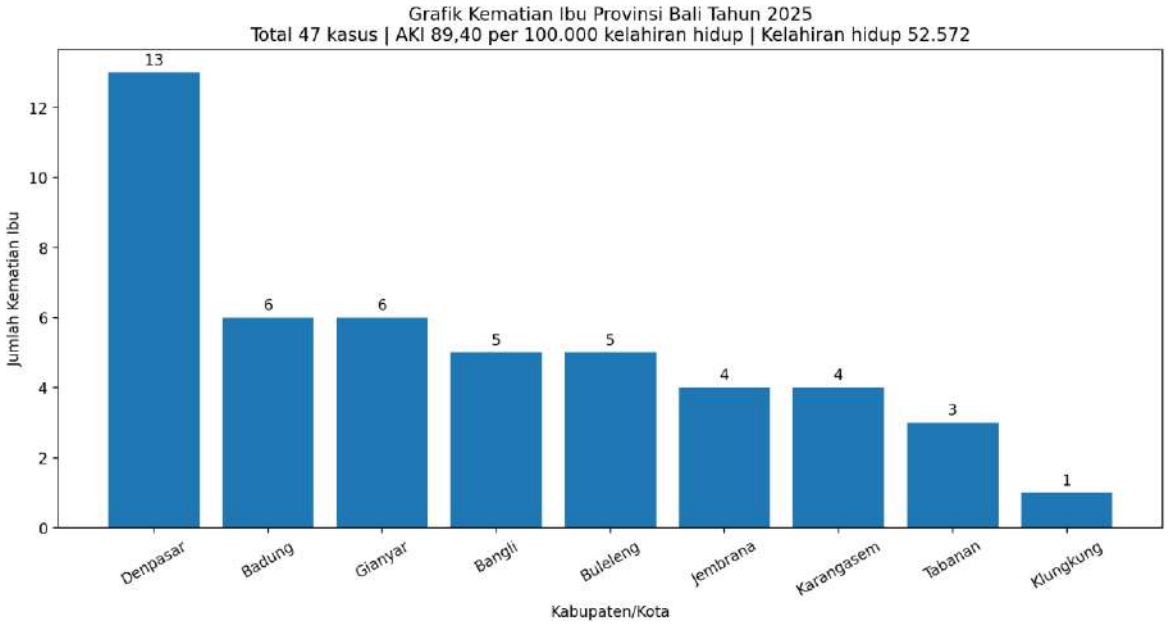

Gambar 5.5.
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kota/Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2025

Sumber: Profil KesehatanProvinsi Bali Tahun 2025

Kematian ibu merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, baik klinis, sistem pelayanan kesehatan, maupun kondisi non-kesehatan yang memengaruhi optimalnya pelayanan. Karena itu, diperlukan pemahaman bersama dari seluruh pemangku kepentingan mengenai peran tiap aspek dalam penurunan

kematian ibu. Upaya penanggulangan masalah ini harus dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan seluruh sektor terkait.

5.5.3. Angka Prevalensi Stunting

Stunting mencerminkan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan pola pengasuhan yang kurang optimal, terutama pada periode awal kehidupan. Oleh karena itu, keberadaannya tidak hanya menjadi indikator status gizi individu, tetapi juga menunjukkan kondisi kesehatan, sosial, dan lingkungan di tingkat populasi. Dengan demikian, indikator balita pendek/stunting berperan strategis dalam menilai kualitas tumbuh kembang anak sekaligus mengidentifikasi tingkat urgensi intervensi gizi di suatu wilayah.

Berdasarkan indikator balita pendek menurut indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) pada tabel status gizi balita, prevalensi stunting yang tercatat di Provinsi Bali tahun 2025 adalah sekitar 3,61%. Dari 171.378 balita yang diukur tinggi badannya, sebanyak 6.183 balita tercatat sebagai balita pendek.

Capaian tersebut menunjukkan adanya variasi cukup nyata antarwilayah. Kabupaten Bangli mencatat prevalensi balita pendek tertinggi sebesar 6,49%, diikuti Jembrana sebesar 5,86%. Selanjutnya Karangasem sebesar 3,86%, Gianyar 3,79%, Buleleng 3,35%, Klungkung 3,25%, Tabanan 2,65%, Badung 2,53%, dan Kota Denpasar menjadi yang terendah sebesar 2,26%.

Distribusi tersebut menunjukkan bahwa persoalan stunting tidak terjadi secara merata di seluruh Bali. Bangli dan Jembrana memerlukan perhatian relatif lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Penanganan stunting tetap perlu dilakukan melalui pendekatan lintas sektor, antara lain peningkatan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi sejak masa kehamilan, pemberian ASI dan makanan pendamping yang tepat, sanitasi dan air minum layak, serta pemantauan pertumbuhan balita.

Perlu diperhatikan bahwa angka 3,61% dalam file merupakan hasil pencatatan balita pendek (TB/U) pada balita yang diukur dalam sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, angka tersebut sebaiknya disebut sesuai terminologi sumber sebagai persentase balita pendek (TB/U)/stunting berdasarkan data pelayanan tahun 2025, terutama apabila nantinya dibandingkan dengan prevalensi stunting hasil survei yang menggunakan metodologi sampling berbeda.

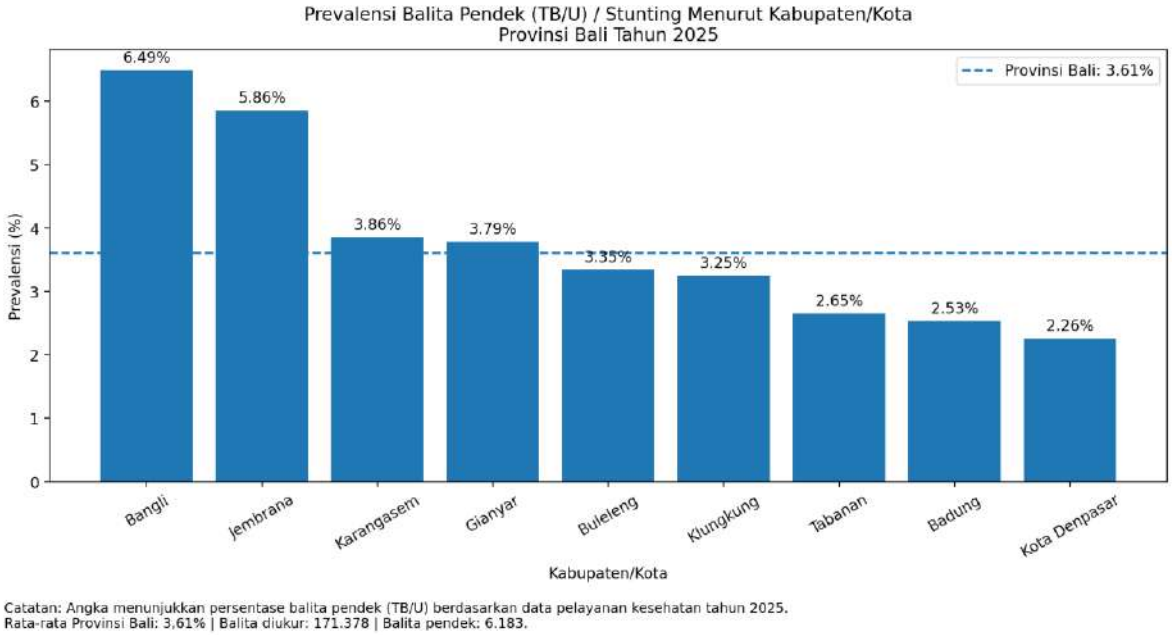

Gambar 5.6.
Persentase Balita Pendek (Stunting) Tahun 2025
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2025

5.5.4. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Dengan jumlah penduduk Bali tahun 2025 sebesar sekitar 4,40 juta jiwa, ketersediaan sumber daya manusia kesehatan menunjukkan variasi antarjenis tenaga. Rasio dokter umum tercatat sebesar 1,14 per 1.000 penduduk, dokter spesialis 0,86 per 1.000 penduduk, dan dokter subspesialis sekitar 0,06 per 1.000 penduduk. Untuk pelayanan kesehatan gigi, rasio dokter gigi mencapai 0,37 per 1.000 penduduk, sementara dokter gigi spesialis sekitar 0,04 per 1.000 penduduk.

Kelompok tenaga kesehatan dengan rasio terbesar adalah tenaga keperawatan, yaitu sekitar 3,17 per 1.000 penduduk, dengan jumlah tenaga keperawatan mencapai 13.971 orang. Tenaga kebidanan berjumlah 5.759 orang atau sekitar 1,31 per 1.000 penduduk.

Sementara itu, rasio tenaga kesehatan masyarakat mencapai sekitar 0,22 per 1.000 penduduk, kesehatan lingkungan 0,12 per 1.000 penduduk, tenaga gizi 0,16 per 1.000 penduduk, dan tenaga kefarmasian sekitar 0,91 per 1.000 penduduk. Untuk tenaga kesehatan yang lebih spesifik, rasio psikolog klinis sekitar 0,02 per 1.000 penduduk, tenaga teknik biomedika 0,47, keterapian fisik 0,10, dan keteknisian medis sekitar 0,27 per 1.000 penduduk.

Apabila berbagai kategori tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut dijumlahkan secara indikatif, ketersediaannya berada pada kisaran 9,23 tenaga kesehatan per 1.000 penduduk. Angka agregat ini perlu digunakan secara hati-hati karena kebutuhan pelayanan tidak hanya ditentukan oleh jumlah keseluruhan tenaga, tetapi juga oleh komposisi profesi, kompetensi, lokasi penempatan, serta distribusinya antarwilayah dan fasilitas kesehatan.

Data tersebut menunjukkan bahwa secara kuantitatif Bali memiliki basis SDM kesehatan yang cukup besar. Tantangan utamanya adalah memastikan distribusi tenaga kesehatan yang merata, khususnya tenaga spesialis dan profesi tertentu, agar akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas tidak terlalu terkonsentrasi pada kawasan perkotaan atau wilayah dengan fasilitas kesehatan besar.

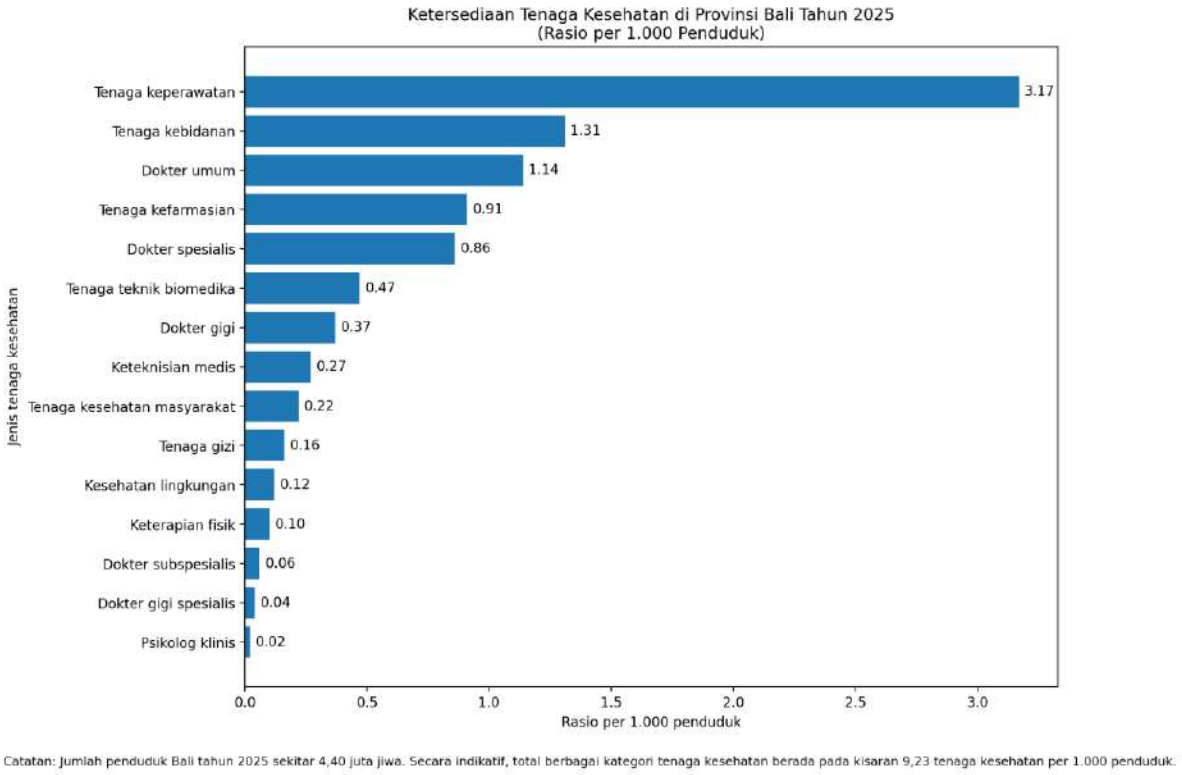

Gambar 5.7.
Rasio Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Provinsi Bali Tahun 2025
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2025

5.5.5. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Sistem pelayanan kesehatan Bali tahun 2025 ditunjang oleh beragam fasilitas kesehatan. Terdapat 66 rumah sakit umum dan 16 rumah sakit khusus, sehingga secara keseluruhan terdapat 82 rumah sakit. Dengan jumlah penduduk sekitar 4,40 juta jiwa, rasio ketersediaannya secara indikatif adalah sekitar 1,86 rumah sakit per 100.000 penduduk, atau rata-rata sekitar 1 rumah sakit untuk 53,7 ribu penduduk.

Pada pelayanan kesehatan tingkat pertama terdapat 120 puskesmas, terdiri atas 30 puskesmas rawat inap dan 90 puskesmas nonrawat inap. Rasio tersebut setara dengan sekitar 2,72 puskesmas per 100.000 penduduk, atau sekitar 1 puskesmas untuk setiap 36,7 ribu penduduk. Jaringan pelayanan

diperkuat oleh 168 puskesmas keliling dan 507 puskesmas pembantu, yang memperluas jangkauan pelayanan hingga tingkat lokal.

Fasilitas pelayanan swasta dan pelayanan lain juga cukup berkembang. Bali memiliki 290 klinik pratama dan 143 klinik utama, atau secara keseluruhan 433 klinik. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 9,83 klinik per 100.000 penduduk, atau rata-rata 1 klinik untuk sekitar 10,2 ribu penduduk.

Selain itu terdapat 1.433 apotek, atau sekitar 32,54 apotek per 100.000 penduduk, serta 4.801 Posyandu Siklus Hidup. Rasio Posyandu mencapai sekitar 109 Posyandu per 100.000 penduduk, atau kurang lebih 1 Posyandu untuk 917 penduduk. Sebanyak sekitar 87,46% Posyandu Siklus Hidup tercatat aktif, menunjukkan besarnya peran pelayanan kesehatan berbasis masyarakat dalam sistem kesehatan Bali.

Secara keseluruhan, jumlah dan keragaman fasilitas kesehatan menunjukkan bahwa Bali telah memiliki jaringan pelayanan kesehatan yang relatif luas, mulai dari pelayanan berbasis masyarakat hingga rumah sakit dan pelayanan spesialistik. Meski demikian, rasio pada tingkat provinsi belum secara otomatis menunjukkan pemerataan akses karena persebaran fasilitas antar kabupaten/kota, jarak pelayanan, kapasitas fasilitas, dan ketersediaan tenaga kesehatan dapat berbeda.

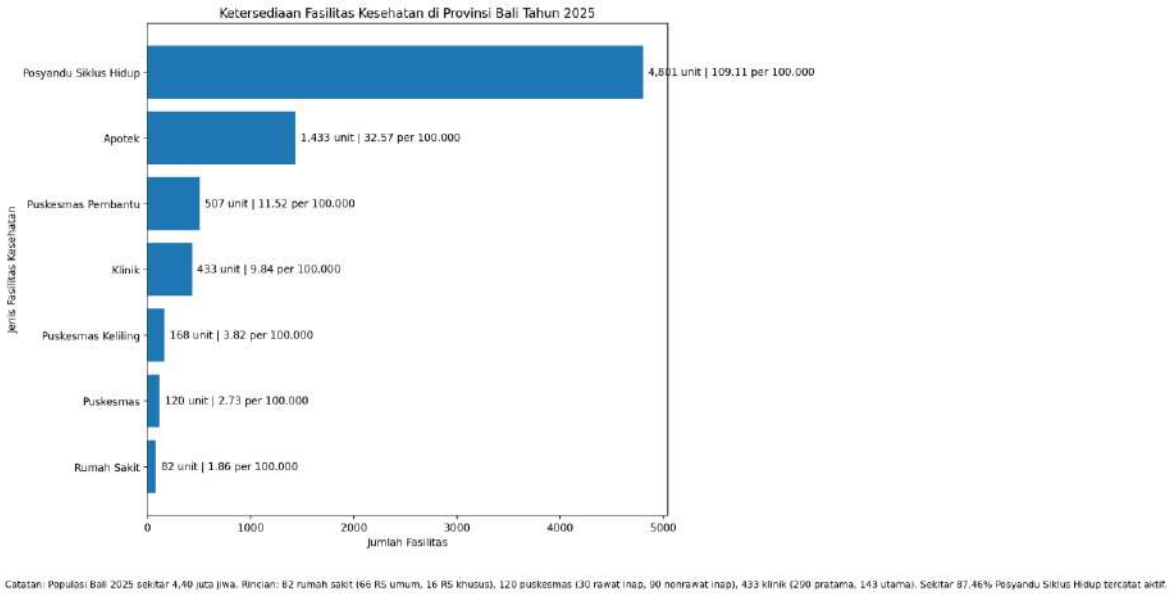

Gambar 5.8.
Rasio Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Provinsi Bali Tahun 2025
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2025

Secara umum, kondisi kesehatan masyarakat Bali tahun 2025 memperlihatkan beberapa capaian positif, terutama pada tingginya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, tersedianya jaringan fasilitas pelayanan kesehatan yang luas, dan jumlah

tenaga kesehatan yang cukup besar. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian, terutama Angka Kematian Ibu sebesar 89,40 per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi yang tercatat sebesar 10,88 per 1.000 kelahiran hidup, serta disparitas stunting dan sumber daya kesehatan antarwilayah.

Kondisi kesehatan masyarakat Provinsi Bali tahun 2025 secara umum didukung oleh cakupan pelayanan dan ketersediaan sumber daya kesehatan yang relatif baik. Angka Kematian Ibu tercatat sebesar 89,40 per 100.000 kelahiran hidup, sementara Angka Kematian Bayi dalam data resume tercatat sebesar 10,88 per 1.000 kelahiran hidup. Persentase balita pendek berdasarkan indeks TB/U tercatat sekitar 3,61%, dengan variasi antarwilayah dan capaian tertinggi di Kabupaten Bangli sebesar 6,49%. Dari sisi pelayanan, Bali didukung oleh 82 rumah sakit, 120 puskesmas, 433 klinik, 1.433 apotek, dan 4.801 Posyandu Siklus Hidup. Ketersediaan tenaga kesehatan juga relatif beragam, dengan rasio tenaga keperawatan sekitar 3,17 per 1.000 penduduk, kebidanan 1,31 per 1.000 penduduk, dan dokter umum 1,14 per 1.000 penduduk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa arah pembangunan kesehatan Bali ke depan perlu semakin menekankan pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, serta pemerataan tenaga dan fasilitas kesehatan agar kualitas pelayanan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Bali.

5.6. KEMISKINAN

5.6.1. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin (P0)

Data Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali diambil dari data yang dirilis oleh BPS Provinsi Bali melalui Berita Resmi Statistik (BRS). Data Persentase Penduduk Miskin dirilis 2 kali dalam setahun. Capaian Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali untuk periode September 2025 diambil pada BRS yang dirilis pada tanggal 5 Februari Tahun 2026.

Pada periode September 2018–September 2025, tingkat kemiskinan di Provinsi Bali mengalami 3 (tiga) fase perubahan. Pada September 2018 - September 2019 tingkat kemiskinan cenderung turun, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kemudian pada periode Maret 2020–September 2021 tingkat kemiskinan mengalami peningkatan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Selanjutnya pada periode Maret 2022–September 2025 sudah terlihat perbaikan kondisi kesejahteraan penduduk yang dicerminkan oleh penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali.

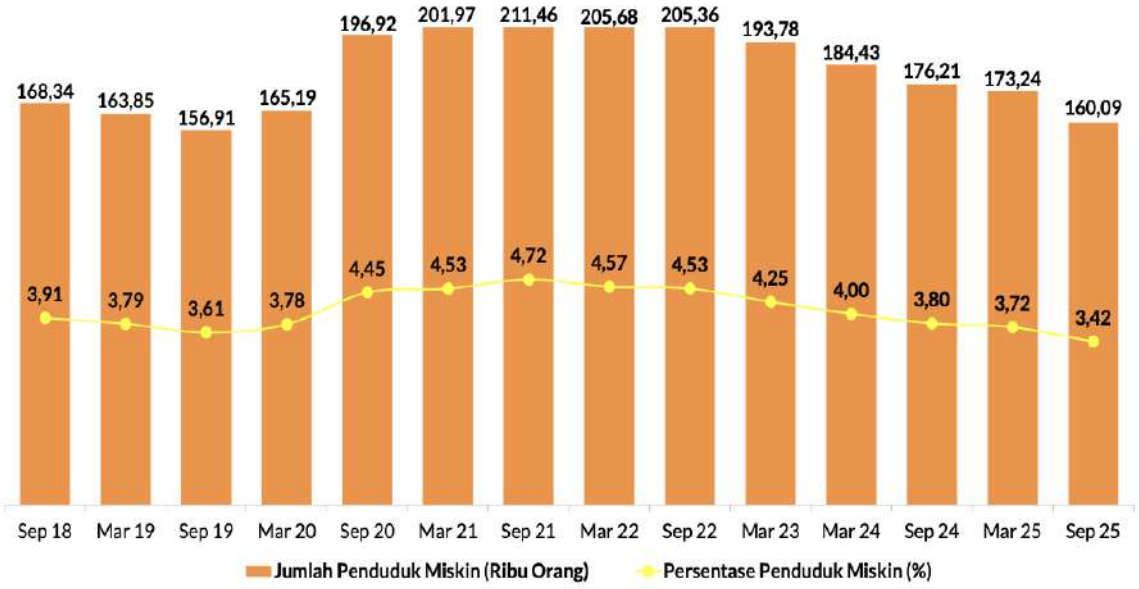

Gambar 5.9.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Bali Tahun 2018–2025
Sumber : BRS Provinsi Bali No. 13/02/51/Th. XX, 5 Februari 2026, Profil Kemiskinan Provinsi Bali September 2025

Pada periode September 2024–September 2025, tingkat kemiskinan di Provinsi Bali menunjukkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada September 2025 tercatat sebanyak 160,09 ribu orang (3,42 persen). Jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2025, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 13,15 ribu orang (0,30 persen poin). Sementara itu, jika dibandingkan dengan kondisi September 2024 jumlah penduduk miskin turun sebanyak 16,12 ribu orang (0,38 persen poin).

Berdasarkan daerahnya, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2025 tercatat sebanyak 106,07 ribu orang (3,06 persen), turun sebanyak 6,10 ribu orang (0,21 persen poin) dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat sebanyak 112,17 ribu orang (3,27 persen). Sementara itu, penduduk miskin di perdesaan pada September 2025 tercatat sebanyak 54,02 ribu orang (4,44 persen), turun sebanyak 7,05 ribu orang (0,53 persen poin).

Tabel 5.10
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Bali, September 2024 – September 2025

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
September 2024	112,93	3,32
Maret 2025	112,17	3,27
September 2025	106,07	3,06
Perdesaan		
September 2024	63,29	5,11
Maret 2025	61,07	4,97
September 2025	54,02	4,44
Perkotaan+Perdesaan		
September 2024	176,21	3,80
Maret 2025	173,24	3,72
September 2025	160,09	3,42

Sumber : BRS Provinsi Bali No. 13/02/51/Th. XX, 5 Februari 2026, Profil Kemiskinan Provinsi Bali September 2025

5.6.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam melihat indikator kemiskinan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan itu sendiri. Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode September 2024–September 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2025 tercatat sebesar 0,579, naik 0,019 poin jika dibandingkan dengan Maret 2025 yang tercatat sebesar 0,560, dan naik 0,140 poin jika dibandingkan dengan September 2024 yang tercatat sebesar 0,439. Di sisi lain, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), pada September 2025 tercatat sebesar 0,134, naik 0,017 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2025 yang tercatat sebesar 0,117 dan naik 0,069 poin jika dibandingkan dengan September 2024 yang tercatat sebesar 0,065.

Jika dilihat menurut daerah, pada September 2025 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Pada September 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan tercatat sebesar 0,473, sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 0,881. Demikian pula untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan tercatat sebesar 0,105 sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 0,218.

Tabel 5.11
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Bali, September 2024 – September 2025

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
September 2024	0,399	0,547	0,439
Maret 2025	0,564	0,551	0,560
September 2025	0,473	0,881	0,579
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
September 2024	0,057	0,085	0,065
Maret 2025	0,128	0,086	0,117
September 2025	0,105	0,218	0,134

Sumber : BRS Provinsi Bali No. 13/02/51/Th. XX, 5 Februari 2026, Profil Kemiskinan Provinsi Bali September 2025

5.6.3. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhannya. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Pada periode September 2024–September 2025, Garis Kemiskinan Provinsi Bali, baik perkotaan dan perdesaan cenderung meningkat, begitu juga halnya dengan Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan. Garis Kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar Rp642.986,- per kapita per bulan. Dibandingkan kondisi Maret 2025, nilai tersebut naik sebesar 5,78 persen, sementara jika dibandingkan September 2024 terjadi kenaikan sebesar 10,80 persen.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel 2.3 bahwa peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Adapun besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2025 sebesar 69,24 persen, sementara besaran sumbangan GKBM terhadap GK sebesar 30,76 persen.

Tabel 5.12
Perkembangan Garis Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Bali, September 2024–September 2025

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
September 2024	412.279	187.981	600.260
Maret 2025	434.774	196.406	631.180
September 2025	459.898	205.898	665.796
Perubahan Sep'24–Sep'25 (%)	11,55	9,53	10,92
Perubahan Mar'25–Sep'25 (%)	5,78	4,83	5,48
Perdesaan			
September 2024	364.979	161.854	526.833
Maret 2025	376.542	166.316	542.858
September 2025	400.884	174.384	575.268
Perubahan Sep'24–Sep'25 (%)	9,84	7,74	9,19
Perubahan Mar'25–Sep'25 (%)	6,46	4,85	5,97
Perkotaan+Perdesaan			
September 2024	399.291	181.015	580.306
Maret 2025	419.319	188.528	607.847
September 2025	445.225	197.761	642.986
Perubahan Sep'24–Sep'25 (%)	11,50	9,25	10,80
Perubahan Mar'25–Sep'25 (%)	6,18	4,90	5,78

Sumber : BRS Provinsi Bali No. 13/02/51/Th. XX, 5 Februari 2026, Profil Kemiskinan Provinsi Bali September 2025

Beberapa komoditas kembali menjadi komoditas yang memberikan sumbangan besar pada Garis Kemiskinan September 2025, seperti beras, rokok kretek filter, dan daging ayam ras, dan lain-lain. Pada September 2025, beras memberikan sumbangan sebesar 23,97 persen di perkotaan dan 27,86 persen di perdesaan. Selain beras, terdapat komoditas rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, kue basah, bawang merah, kopi bubuk dan kopi instan (sachet), roti, tongkol/tuna/cakalang, dan cabe rawit yang paling

memengaruhi Garis Kemiskinan di perkotaan. Sedangkan di perdesaan, Garis Kemiskinan dipengaruhi oleh komoditas beras, daging ayam ras, rokok kretek filter, telur ayam ras, mujair, kue basah, bawang merah, kopi bubuk dan kopi instan (sachet), mie instan, dan gula pasir.

Pada komoditas bukan makanan, komoditas yang berpengaruh pada pembentukan Garis Kemiskinan di perkotaan pada September 2025 adalah perumahan, bensin, upacara agama atau adat lainnya, listrik, dan pendidikan. Sedangkan di perdesaan, komoditas bukan makanan yang berpengaruh pada pembentukan Garis Kemiskinan adalah perumahan, bensin, upacara agama atau adat lainnya, listrik, dan kesehatan.

Tabel 5.13
Daftar Komoditas yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan Beserta Kontribusinya (%) di Provinsi Bali, September 2025

Jenis Komoditas	Perkotaan	Jenis Komoditas	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan:		**Makanan:**	
Beras	23,97	Beras	27,86
Rokok kretek filter	7,47	Daging ayam ras	5,46
Daging ayam ras	5,18	Rokok kretek filter	4,32
Telur ayam ras	3,27	Telur ayam ras	3,31
Kue basah	2,56	Mujair	2,30
Bawang merah	2,20	Kue basah	2,25
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,15	Bawang merah	2,00
Roti	2,10	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,97
Tongkol/tuna/cakalang	1,92	Mie instan	1,81
Cabe rawit	1,70	Gula pasir	1,66
Bukan Makanan:		**Bukan Makanan:**	
Perumahan	10,03	Perumahan	12,33
Bensin	3,86	Bensin	4,44
Upacara agama atau adat lainnnya	3,70	Upacara agama atau adat lainnnya	3,67
Listrik	2,75	Listrik	1,04
Pendidikan	1,68	Kesehatan	0,94

Sumber : BRS Provinsi Bali No. 13/02/51/Th. XX, 5 Februari 2026, Profil Kemiskinan Provinsi Bali September 2025

Disamping GK perkapita, BPS Provinsi Bali turut merilis GK per rumah tangga. Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya. Secara rata-rata, Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin di Provinsi Bali pada September 2025 adalah sebesar

Rp2.655.532,- per bulan, turun 10,66 persen dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat sebesar Rp2.972.372,- per bulan.

Tabel 5.14
Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin di Provinsi Bali, Maret 2025-September 2025

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Rata-rata Anggota Rumah Tangga Miskin	Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin (Rp/rumah tangga/bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
Maret 2025	607.847	4,89	2.972.372
September 2025	642.986	4,13	2.655.532
Perubahan Mar'25–Sep'25 (%)	**5,78**	**-15,54**	**-10,66**

Sumber : BRS Provinsi Bali No. 13/02/51/Th. XX, 5 Februari 2026, Profil Kemiskinan Provinsi Bali September 2025

5.7. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER

5.7.1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia berbasis gender, melalui komponen kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Data IPG Provinsi Bali menunjukkan perkembangan positif selama periode 2021–2025, meningkat dari 94,78 pada 2021 menjadi 95,82 pada 2025.

Peningkatan ini mencerminkan menurunnya kesenjangan gender dalam pembangunan di Bali, menandakan kemajuan dalam upaya pemerataan akses dan kesempatan bagi perempuan maupun laki-laki di berbagai bidang pembangunan.

Tabel 5.15
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Jembrana	94,57	95,19	95,21	95,50	95,54
Kab. Tabanan	95,96	95,92	95,85	96,16	96,41
Kab. Badung	95,71	95,69	95,70	96,13	96,22
Kab. Gianyar	95,24	95,14	95,15	95,31	95,21
Kab. Klungkung	91,83	92,11	92,51	92,98	93,06
Kab. Bangli	91,86	92,20	92,72	93,17	93,49
Kab. Karangasem	89,27	90,29	90,64	91,22	91,27
Kab. Buleleng	92,34	92,62	92,70	92,98	93,25

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Denpasar	97,49	97,57	97,39	97,39	97,84
Provinsi Bali	**94,78**	**95,19**	**95,37**	**95,80**	**95,82**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2026

Kota Denpasar konsisten menempati posisi teratas dengan IPG tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Bali, meskipun mengalami fluktuasi. Kabupaten Badung dan Tabanan juga menunjukkan pencapaian baik dengan IPG di atas Provinsi Bali, mencerminkan keberhasilan daerah perkotaan dan kabupaten maju dalam menyediakan akses setara bagi laki-laki dan perempuan pada layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi.

Namun, disparitas antarwilayah masih menjadi tantangan:

- Kabupaten Karangasem memiliki IPG terendah meskipun meningkat dari 89,27 (2021) menjadi 91,27 (2025).
- Kabupaten Jembrana, Gianyar, Bangli, Buleleng, dan Klungkung juga masih berada di bawah rata-rata provinsi.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan disparitas gender belum merata, sehingga intervensi kebijakan afirmatif yang lebih intensif dibutuhkan di daerah tertinggal untuk memastikan kesetaraan akses dan kesempatan bagi seluruh masyarakat tanpa memandang gender.

5.7.2. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang mengukur peran aktif perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Data Provinsi Bali menunjukkan tren positif selama periode 2020-2024, dengan IDG meningkat secara konsisten dari 72,16 pada 2020 menjadi 74,38 pada 2024.

Peningkatan ini mencerminkan perluasan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, menunjukkan kemajuan dalam pemberdayaan gender di Provinsi Bali.

Tabel 5.16
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	74,39	74,55	72,40	72,44	72,94
Tabanan	77,95	78,27	78,51	78,07	75,48
Badung	75,49	76,99	76,33	76,08	64,20
Gianyar	66,14	65,64	68,58	68,82	73,38
Klungkung	78,36	75,50	75,75	76,07	69,98
Bangli	65,16	65,36	65,69	65,57	69,06
Karangasem	63,61	65,09	64,59	65,79	72,31
Buleleng	72,89	72,91	73,73	72,57	66,71

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Denpasar	67,26	67,02	67,21	69,22	67,40
Provinsi Bali	**72,16**	**72,17**	**72,29**	**73,77**	**74,38**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2026

Berdasarkan tabel diatas, Kabupaten Tabanan secara konsisten mencatat Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi di Provinsi Bali, meskipun mengalami sedikit penurunan, dari 77,95 pada 2020 menjadi 75,48 pada 2024. Sebaliknya, Kabupaten Badung mengalami penurunan signifikan, dari 75,49 pada 2020 menjadi 64,20 pada 2024, yang menjadi perhatian khusus. Kabupaten Gianyar menunjukkan peningkatan cukup baik, dari 66,14 (2020) menjadi 73,38 (2024).

Disparitas antarwilayah masih terlihat jelas, dengan rentang nilai IDG yang cukup lebar. Kabupaten Karangasem tercatat memiliki IDG terendah, meskipun meningkat dari 63,61 (2020) menjadi 72,31 (2024). Perbedaan ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan gender belum merata di seluruh Bali, sehingga intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran diperlukan, khususnya di daerah dengan IDG rendah seperti Karangasem, Bangli, dan Denpasar, untuk mendorong kesetaraan gender dan partisipasi perempuan secara lebih merata.

5.8. INDEKS KETIMPANGAN GENDER

Berdasarkan data tahun 2025, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Bali tercatat sebesar 0,178. Nilai IKG digunakan untuk menggambarkan ketimpangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki; secara umum, semakin rendah nilai IKG, semakin kecil ketimpangan gender.

Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Gianyar mencatat IKG terendah sebesar 0,156, yang menunjukkan tingkat ketimpangan gender relatif paling kecil dibandingkan wilayah lainnya. Posisi berikutnya adalah Kabupaten Tabanan sebesar 0,175, yang juga berada sedikit di bawah nilai Provinsi Bali.

Sementara itu, wilayah dengan IKG tertinggi adalah Kabupaten Buleleng sebesar 0,254. Setelah itu terdapat Kabupaten Jembrana sebesar 0,234, Kabupaten Klungkung dan Karangasem masing-masing 0,232, Kabupaten Bangli sebesar 0,216, Kabupaten Badung sebesar 0,213, serta Kota Denpasar sebesar 0,203.

Jika dibandingkan dengan nilai Provinsi Bali sebesar 0,178, hanya Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan yang memiliki nilai IKG lebih rendah daripada provinsi. Sementara tujuh kabupaten/kota lainnya memiliki nilai lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ketimpangan gender Bali secara agregat relatif rendah, masih terdapat variasi yang cukup nyata antarwilayah.

Selisih antara IKG tertinggi dan terendah mencapai 0,098 poin, yaitu antara Kabupaten Buleleng sebesar 0,254 dan Kabupaten Gianyar sebesar 0,156. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tantangan kesetaraan gender tidak seragam

di seluruh wilayah Bali dan memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota.

Dalam konteks pembangunan daerah, nilai IKG tersebut menunjukkan pentingnya terus memperkuat upaya pengurangan kesenjangan gender, terutama dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, kesempatan kerja, pendapatan, serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Wilayah dengan IKG relatif tinggi perlu mendapat perhatian lebih agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih setara oleh perempuan dan laki-laki.

Tabel 5.17
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota/Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
	2025
Kab. Jembrana	0,234
Kab. Tabanan	0,175
Kab. Badung	0,213
Kab. Gianyar	0,156
Kab. Klungkung	0,232
Kab. Bangli	0,216
Kab. Karangasem	0,232
Kab. Buleleng	0,254
Kota Denpasar	0,203
Provinsi Bali	0,178

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2026

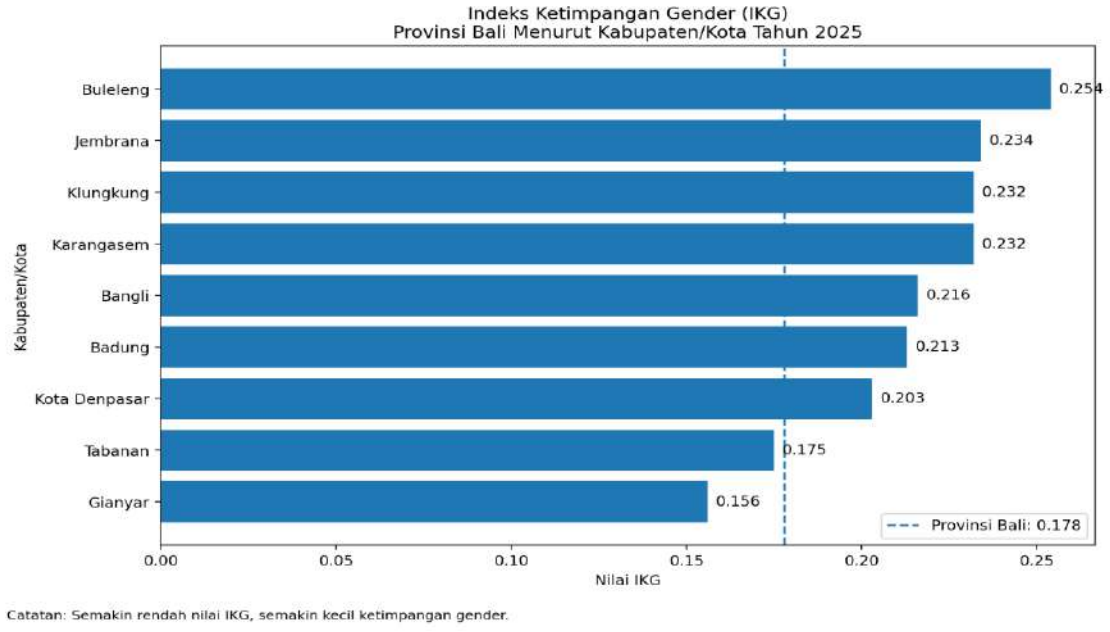

Gambar 5.10.
Grafik IKG Kota/Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2025

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2026

BAB 6

PROFIL DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025



BAB 6
PELAYANAN UMUM DAERAH

6.1. CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Berdasarkan data tahun 2025, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Bali mencapai 4.383.444 peserta aktif atau sekitar 99,5%. Capaian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk Bali telah tercakup dalam sistem jaminan kesehatan nasional, sehingga secara umum tingkat perlindungan kesehatan masyarakat melalui kepesertaan JKN sudah sangat tinggi.

Struktur kepesertaan menunjukkan bahwa kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) masih sedikit lebih besar dibandingkan kelompok non-PBI. Jumlah peserta PBI mencapai 2.263.202 orang atau 51,4%, sedangkan peserta non-PBI sebanyak 2.120.242 orang atau 48,1%. Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa lebih dari separuh peserta aktif JKN di Bali masih memperoleh dukungan pembayaran iuran dari pemerintah.

Pada kelompok PBI, peserta terbesar berasal dari PBI APBD, yaitu sebanyak 1.389.701 orang atau 31,6% dari seluruh peserta aktif JKN. Sementara itu, PBI APBN mencapai 873.501 orang atau 19,8%. Besarnya proporsi PBI APBD menunjukkan peran yang cukup kuat dari pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Pada kelompok non-PBI, jumlah terbesar berasal dari Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 1.353.267 peserta atau 30,7%. Selanjutnya, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/peserta mandiri mencapai 665.550 orang atau 15,1%, sedangkan kategori Bukan Pekerja (BP) sebanyak 101.425 peserta atau 2,3%. Struktur tersebut menunjukkan bahwa pekerja formal menjadi kelompok terbesar dalam kepesertaan non-PBI, sementara partisipasi pekerja mandiri juga cukup signifikan.

Secara keseluruhan, tingginya cakupan JKN di Bali menunjukkan bahwa aspek akses terhadap perlindungan pembiayaan kesehatan telah mencapai tingkat yang sangat luas. Namun demikian, cakupan kepesertaan yang tinggi tetap perlu diikuti dengan peningkatan keaktifan peserta, kemudahan akses pelayanan, pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan, mutu layanan, serta keberlanjutan pembiayaan agar manfaat kepesertaan benar-benar dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Tabel 6.1
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Bali Tahun 2025

NO	JENIS KEPESERTAAN	PESERTA AKTIF JAMINAN KESEHATAN	
		JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*
PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)			
1	PBI APBN	873.501	19,8
2	PBI APBD	1.389.701	31,6
SUB JUMLAH PBI		2.263.202	51,4
NON PBI			
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	1.353.267	30,7
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	665.550	15,1
3	Bukan Pekerja (BP)	101.425	2,3
SUB JUMLAH NON PBI		2.120.242	48,1
CAKUPAN JKN		4.383.444	99,5

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2026

6.2. CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2014, jaminan sosial tenaga kerja merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja yang diberikan dalam bentuk santunan uang sebagai pengganti sebagian pendapatan yang hilang atau berkurang serta layanan terkait kondisi yang dialami pekerja, seperti kecelakaan kerja, sakit, kehamilan, persalinan, hari tua, hingga kematian. Penyelenggaraan jaminan ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2025, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Bali mencapai 1.527.596 orang. Jumlah tersebut terdiri atas peserta Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), serta pekerja pada Jasa Konstruksi. Struktur kepesertaan ini menunjukkan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Bali telah menjangkau pekerja formal, pekerja mandiri, maupun pekerja proyek konstruksi.

Kelompok peserta terbesar berasal dari Penerima Upah (PU) sebanyak 921.888 orang atau sekitar 60,35% dari total peserta BPJS Ketenagakerjaan di Bali. Kelompok ini mencakup pekerja yang bekerja pada pemberi kerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dominannya peserta PU menunjukkan bahwa pekerja pada sektor formal menjadi basis utama kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali.

Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) tercatat sebanyak 506.709 orang atau sekitar 33,17% dari total kepesertaan. Kelompok ini terdiri atas pekerja yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan. Besarnya jumlah peserta BPU menunjukkan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Bali juga telah menjangkau sebagian pekerja sektor informal dan pekerja mandiri, yang memiliki peranan penting dalam struktur ketenagakerjaan daerah.

Sementara itu, peserta dari kelompok Jasa Konstruksi berjumlah 98.999 orang atau sekitar 6,48% dari total peserta. Kelompok ini merupakan pekerja yang bekerja pada

proyek jasa konstruksi dan menerima gaji atau upah. Meskipun proporsinya paling kecil dibandingkan PU dan BPU, keberadaan kelompok ini tetap penting karena pekerja konstruksi memiliki karakter pekerjaan dengan risiko kecelakaan kerja yang relatif tinggi, sehingga perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan menjadi sangat penting.

Jika dilihat secara nasional, total peserta BPJS Ketenagakerjaan tahun 2025 mencapai 69,31 juta orang, yang terdiri atas sekitar 46,68 juta peserta PU, 15,59 juta peserta BPU, dan 7,05 juta peserta jasa konstruksi. Dengan jumlah 1,53 juta peserta, Bali memberikan kontribusi sekitar 2,20% terhadap total kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nasional.

Secara umum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Bali tahun 2025 telah memiliki basis kepesertaan yang cukup besar. Namun demikian, komposisi peserta yang masih didominasi pekerja penerima upah menunjukkan bahwa perluasan perlindungan terhadap pekerja sektor informal dan pekerja mandiri masih menjadi ruang penguatan ke depan. Hal ini penting mengingat struktur perekonomian Bali banyak ditopang oleh usaha mikro, usaha mandiri, pekerja pariwisata, perdagangan, jasa, pertanian, serta berbagai bentuk pekerjaan nonformal.

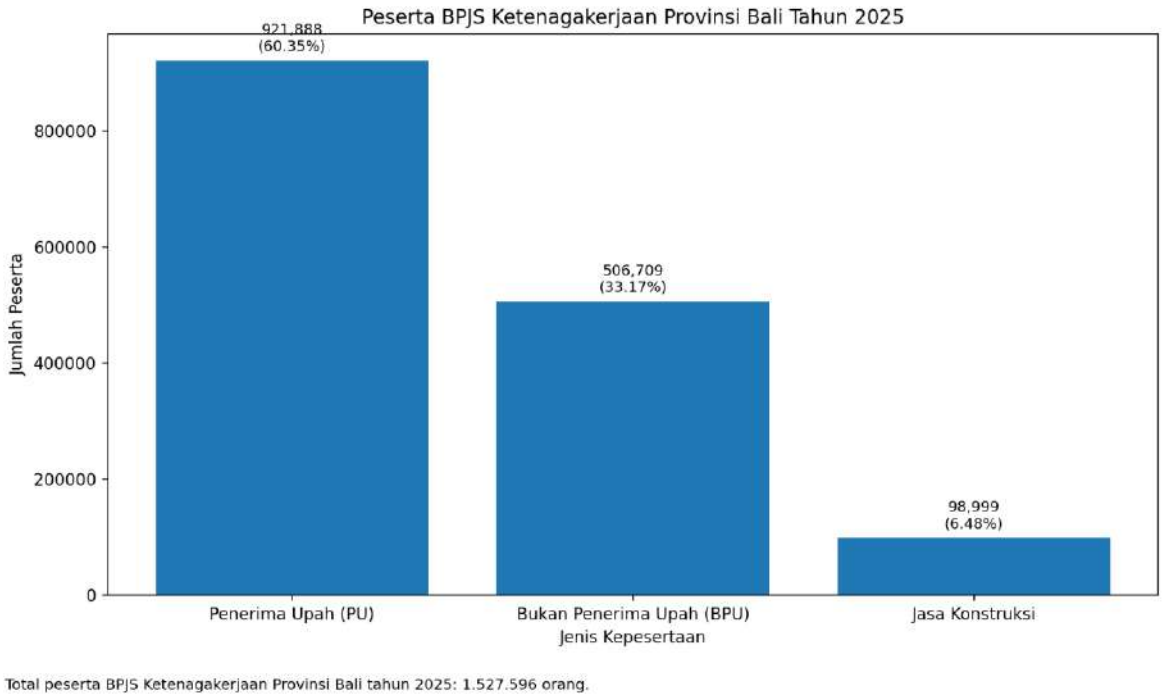

Gambar 6.1.
Jumlah Peserta Aktif Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Provinsi Bali Tahun 2025

Sumber: Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan

6.3. INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi adalah upaya atau proses perubahan secara menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan agar birokrasi menjadi lebih efektif, efisien, bersih, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Bertujuan untuk memperbaiki cara kerja pemerintah, memperkuat integritas aparatur negara, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Berdasarkan data Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Bali tahun 2023–2025, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten. Nilai indeks meningkat dari 91,41 pada tahun 2023 menjadi 92,05 pada tahun 2024, dan kembali naik menjadi 95,05 pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, selama periode 2023–2025 terjadi peningkatan sebesar 3,64 poin. Kenaikan dari tahun 2023 ke 2024 relatif moderat, yaitu 0,64 poin, sedangkan peningkatan yang lebih kuat terjadi pada periode 2024–2025 sebesar 3,00 poin. Perkembangan ini menunjukkan adanya perbaikan yang semakin nyata dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi mencerminkan semakin baiknya upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta mendorong akuntabilitas dan profesionalisme aparatur. Kenaikan indeks secara berkelanjutan juga menunjukkan bahwa agenda reformasi birokrasi tidak hanya dipertahankan, tetapi semakin diperkuat dari tahun ke tahun.

Capaian tahun 2025 sebesar 95,05 menjadi nilai tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ini dapat dipandang sebagai indikator positif bahwa berbagai kebijakan pembenahan kelembagaan, penyederhanaan proses bisnis, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, penguatan sistem akuntabilitas, serta digitalisasi pelayanan mulai memberikan hasil yang lebih optimal.

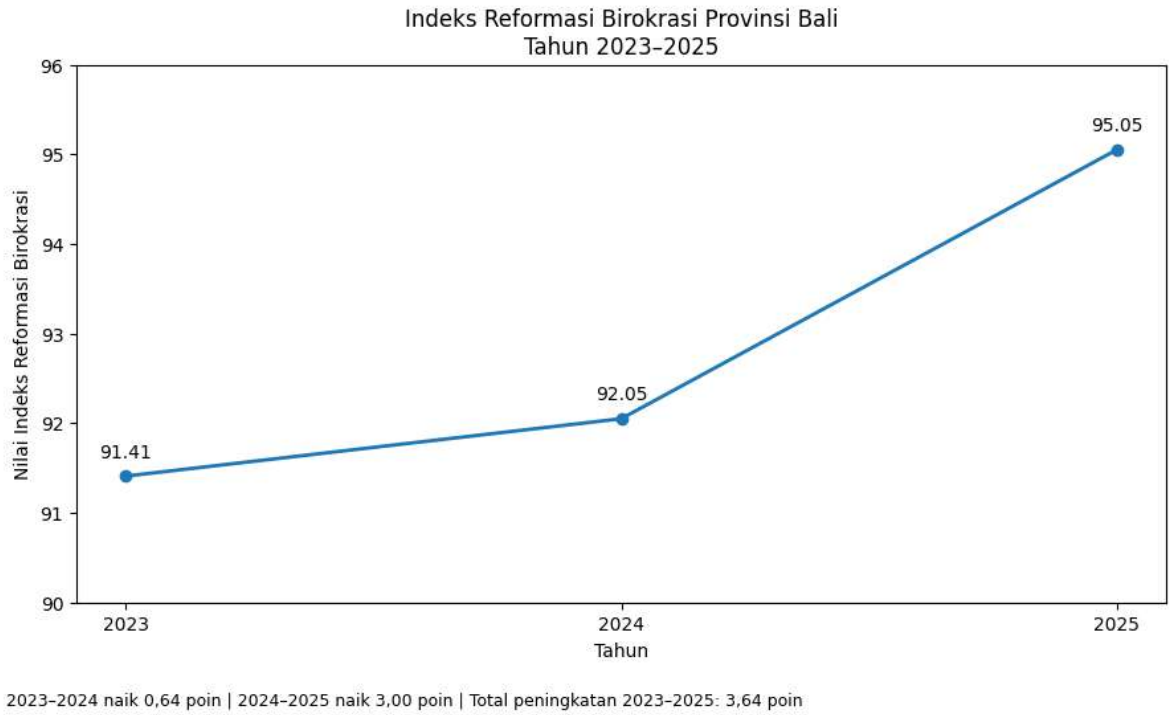

Gambar 6.2.
Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Bali Tahun 2023–2025

Sumber : Satu Data Indonesia Provinsi Bali

6.4. INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Tingkat kepatuhan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mencerminkan sejauh mana penyelenggara layanan memenuhi komponen standar pelayanan publik. Komponen tersebut meliputi pemenuhan hak-hak masyarakat dalam memperoleh layanan, seperti kejelasan persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, prosedur serta alur pelayanan yang jelas, ketersediaan sarana pengaduan, hingga kondisi pelayanan yang ramah dan nyaman. Indeks pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan koordinatif.

Berdasarkan data Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Bali tahun 2023–2025, kualitas penyelenggaraan pelayanan publik menunjukkan capaian yang secara umum berada pada predikat A. Pada tabel sumber, tahun 2023 dan 2024 tercantum dengan predikat “-A”, sedangkan pada tahun 2025 tercatat “A”. Dengan asumsi tanda hubung pada 2023–2024 merupakan bagian dari penulisan tabel, maka secara substantif capaian pelayanan publik Bali selama periode tersebut menunjukkan tingkat penilaian yang sangat baik.

Dari sisi nilai indeks, pada tahun 2024 Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Bali mencapai 96,94. Pada tahun 2025 nilainya menjadi 95,05, atau menurun sebesar 1,89 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, penurunan tersebut

belum mengubah predikat pelayanan publik pada tahun 2025 yang tetap berada pada kategori A.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Provinsi Bali telah berada pada tingkat kinerja yang tinggi. Predikat A mencerminkan kualitas pelayanan yang secara umum telah didukung oleh tata kelola pelayanan, standar pelayanan, kompetensi penyelenggara, ketersediaan sarana dan prasarana, pengelolaan pengaduan, serta upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Namun demikian, penurunan nilai indeks dari 96,94 pada 2024 menjadi 95,05 pada 2025 tetap perlu menjadi perhatian. Meskipun predikat tetap terjaga, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap aspek-aspek pelayanan yang mengalami penurunan, agar kualitas pelayanan publik tidak hanya dipertahankan tetapi dapat kembali ditingkatkan. Penguatan inovasi pelayanan, digitalisasi layanan, penyederhanaan proses, peningkatan respons terhadap pengaduan masyarakat, serta penguatan kepuasan pengguna layanan menjadi beberapa aspek yang relevan untuk terus diperhatikan.

6.5. INDEKS INOVASI DAERAH

Inovasi Daerah merupakan seluruh bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintahan. Pelaksanaan inovasi ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan serta pelibatan masyarakat, dan penguatan daya saing daerah.

Berdasarkan data Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Bali, kinerja inovasi daerah menunjukkan perkembangan yang positif. Nilai IID meningkat dari 69,92 pada tahun 2024 menjadi 77,04 pada tahun 2025. Dengan demikian, dalam satu tahun terjadi peningkatan sebesar 7,12 poin atau sekitar 10,18%.

Peningkatan tersebut menunjukkan adanya penguatan kapasitas Pemerintah Provinsi Bali dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi daerah. Secara umum, kenaikan IID dapat mencerminkan semakin baiknya upaya pemerintah daerah dalam mendorong pembaruan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta pengembangan berbagai inovasi yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2025 juga menunjukkan bahwa inovasi semakin menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini penting karena tantangan pembangunan yang semakin kompleks membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif, kolaboratif, berbasis teknologi, dan berorientasi pada hasil. Inovasi daerah tidak hanya perlu diarahkan pada penciptaan program atau layanan baru, tetapi juga pada perbaikan proses kerja, penyederhanaan pelayanan, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan efektivitas kebijakan.

6.6. INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan kepada seluruh pengguna, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Penerapan SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terpercaya. Tata kelola SPBE yang terpadu juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan keselarasan sistem pemerintahan secara nasional.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk melakukan transformasi birokrasi melalui penerapan e-government. SPBE memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Selain itu, SPBE mendorong peningkatan kolaborasi antar-instansi pemerintah, memperluas jangkauan pelayanan publik, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan seperti praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah memahami bahwa SPBE memiliki peran strategis dalam mendukung seluruh sektor pembangunan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat implementasi SPBE, termasuk penyusunan regulasi sektoral yang mewajibkan penyelenggaraan sistem informasi di berbagai instansi. Namun, pelaksanaannya masih berlangsung secara terpisah, bergantung pada kapasitas masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sehingga menghasilkan tingkat kemajuan SPBE yang berbeda-beda secara nasional.

Untuk mewujudkan integrasi, sinergi, dan kepastian hukum dalam penerapan SPBE, pemerintah menyusun Rencana Induk SPBE Nasional sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dokumen ini dirancang dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, serta inisiatif SPBE pada aspek tata kelola, layanan, teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya manusia.

Tabel 6.2
Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Provinsi Bali

Nama Instansi	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	Indeks	Predikat	Indeks	Predikat	Indeks	Predikat	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Bali	3,68	Sangat Baik	4,07	Sangat Baik	4,30	Memuaskan	4,65	Memuaskan

Sumber: Satu Data Indonesia Provinsi Bali; MenpanRB

Berdasarkan data Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Bali tahun 2022–2025, terlihat adanya peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Nilai Indeks SPBE meningkat dari 3,68 pada tahun 2022 menjadi 4,07 pada tahun 2023, kemudian meningkat menjadi 4,30 pada tahun 2024, dan mencapai 4,65 pada tahun 2025.

Pada tahun 2022 dan 2023, capaian SPBE Pemerintah Provinsi Bali berada pada predikat Sangat Baik, masing-masing dengan nilai 3,68 dan 4,07. Selanjutnya, pada tahun 2024 nilai indeks meningkat menjadi 4,30 dan predikatnya naik menjadi Memuaskan. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2025 ketika indeks mencapai 4,65, tetap dengan predikat Memuaskan.

Secara keseluruhan, selama periode 2022–2025 terjadi peningkatan sebesar 0,97 poin. Kenaikan terjadi sebesar 0,39 poin pada periode 2022–2023, 0,23 poin pada 2023–2024, dan 0,35 poin pada 2024–2025. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya penguatan yang berkelanjutan dalam penerapan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Peningkatan nilai SPBE mencerminkan semakin baiknya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, integrasi sistem, serta efektivitas proses administrasi pemerintahan. Perubahan predikat dari Sangat Baik menjadi Memuaskan sejak tahun 2024 juga menunjukkan bahwa kematangan penerapan SPBE di Provinsi Bali semakin meningkat.

Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah di Bali dalam mempercepat transformasi digital guna mendukung pelayanan publik yang semakin efisien, transparan, akuntabel, dan selaras dengan visi Indonesia Digital.

6.7. PELAYANAN TRANSPORTASI

6.7.1. Transportasi Darat

a. Jalan

Jalan merupakan infrastruktur dasar yang wajib tersedia untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Keberadaan jalan berfungsi sebagai jalur utama mobilitas orang dan barang, sehingga memungkinkan masyarakat mencapai tempat kerja, layanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Jalan juga menjadi penghubung antarkawasan, yang mencegah terjadinya isolasi wilayah dan mendorong pemerataan pembangunan.

Jaringan jalan memiliki nilai strategis yang sangat penting dalam sistem transportasi Provinsi Bali karena menjadi prasarana utama yang menghubungkan pusat-pusat permukiman, kawasan pariwisata, pusat perdagangan dan jasa, sentra produksi pertanian, pelabuhan, bandar udara, serta berbagai fasilitas pelayanan publik. Peran jaringan jalan menjadi semakin penting dalam kondisi mobilitas Bali saat ini yang masih sangat

bergantung pada transportasi privat atau kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum. Ketergantungan tersebut menyebabkan kinerja jaringan jalan tidak hanya menentukan tingkat konektivitas antarwilayah, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap waktu tempuh, biaya perjalanan, kelancaran distribusi barang, aksesibilitas kawasan pariwisata, dan tingkat kemacetan.

Dalam konteks tersebut, pembangunan transportasi Bali perlu memandang jaringan jalan tidak semata-mata dari sisi penambahan panjang atau kapasitas jalan, tetapi juga dari sisi kualitas pelayanan jaringan, keterhubungan antarruas, keselamatan, manajemen lalu lintas, serta integrasinya dengan transportasi publik. Pada kawasan dengan aktivitas tinggi, terutama kawasan perkotaan dan pusat pariwisata, peningkatan kapasitas jalan tanpa diikuti penguatan angkutan umum berpotensi mendorong pertumbuhan penggunaan kendaraan pribadi. Oleh karena itu, jaringan jalan perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem transportasi multimoda yang mendukung pergerakan masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data yang tersedia, panjang jaringan jalan di Provinsi Bali mencapai 8.706,78 km**.** Jaringan tersebut terdiri atas jalan negara sepanjang 589,64 km**,** jalan provinsi sepanjang 805,35 km**,** dan jalan kabupaten/kota sepanjang 7.311,79 km**.**

Tabel 6.3
Panjang Jalan (km) Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Provinsi Bali Keadaan Akhir Tahun 2025

Kabupaten/ Kota	Jalan Negara (km)	Jalan Provinsi (km)	Jalan Kabupaten/ Kota (km)	Jumlah (km)
Jembrana	58,41	29,37	1.003,74	1.091,52
Tabanan	62,78	170,48	872	1.105,25
Badung	73,54	63,64	809,59	946,78
Gianyar	79,71	88,85	560,95	729,51
Klungkung	24,25	12,69	464,96	501,9
Bangli	21,78	141,39	999	1.162,17
Karangasem	78,91	154,54	1.201,60	1.435,05
Buleleng	152,71	91,45	949,82	1.193,98
Denpasar	37,55	52,94	450,13	540,61
Provinsi Bali	**589,64**	**805,35**	**7.311,79**	**8.706,78**

Sumber: BPS Provinsi Bali tahun 2026

Dilihat berdasarkan status kewenangannya, jaringan jalan Bali sangat didominasi oleh jalan kabupaten/kota, yang mencapai sekitar 84,0% dari keseluruhan panjang jaringan jalan. Jalan provinsi memberikan kontribusi sekitar 9,3%, sedangkan jalan negara sekitar 6,8%. Struktur ini

menunjukkan bahwa konektivitas internal masyarakat, termasuk akses dari permukiman menuju pusat pelayanan, sentra ekonomi, dan jaringan jalan utama, sangat bergantung pada kualitas pengelolaan jalan kabupaten/kota.

Secara spasial, Kabupaten Karangasem memiliki jaringan jalan terpanjang, yaitu sekitar 1.435,05 km atau sekitar 16,5% dari keseluruhan jaringan jalan Bali. Posisi berikutnya adalah Kabupaten Buleleng sepanjang 1.193,98 km, Kabupaten Bangli 1.162,17 km, Kabupaten Tabanan 1.105,25 km, dan Kabupaten Jembrana 1.091,52 km. Kelima wilayah tersebut masing-masing memiliki jaringan jalan lebih dari 1.000 km.

Sementara itu, panjang jaringan jalan di Kabupaten Badung mencapai 946,78 km, Gianyar 729,51 km, Kota Denpasar 540,61 km, dan Klungkung 501,90 km. Klungkung tercatat memiliki total jaringan jalan paling pendek dalam data tersebut. Namun, perbedaan panjang jaringan jalan antarwilayah tidak dapat langsung digunakan untuk menilai tingkat pelayanan transportasi karena turut dipengaruhi oleh luas wilayah, pola permukiman, kondisi geografis, kepadatan penduduk, serta intensitas aktivitas ekonomi.

Untuk jalan negara, jaringan terpanjang terdapat di Kabupaten Buleleng yaitu 152,71 km, jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya posisi Buleleng dalam jaringan jalan nasional di Bali, terutama dalam mendukung konektivitas kawasan Bali bagian utara dengan wilayah lainnya. Sebaliknya, panjang jalan negara paling kecil terdapat di Bangli sebesar 21,78 km dan Klungkung sebesar 24,25 km.

Pada jalan provinsi, panjang terbesar terdapat di Kabupaten Tabanan sebesar 170,48 km, diikuti Karangasem 154,54 km dan Bangli 141,39 km. Sementara itu, jalan provinsi paling pendek terdapat di Klungkung, yakni hanya 12,69 km. Variasi tersebut menggambarkan perbedaan fungsi jaringan jalan provinsi dalam menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan jaringan jalan nasional maupun kabupaten/kota pada masing-masing wilayah.

Adapun jaringan jalan kabupaten/kota terpanjang terdapat di Karangasem sebesar 1.201,60 km, kemudian Jembrana 1.003,74 km, Bangli 999,00 km, dan Buleleng 949,82 km. Dominannya jalan kabupaten/kota mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas konektivitas di Bali sangat bergantung pada sinergi antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pemeliharaan serta peningkatan kualitas ruas jalan.

Dalam perspektif pembangunan, panjang jaringan jalan yang mencapai lebih dari 8,7 ribu km merupakan modal penting bagi konektivitas wilayah Bali. Namun, panjang jaringan belum otomatis mencerminkan tingkat pelayanan yang baik. Kondisi fisik jalan, kapasitas ruas, hambatan samping, titik kemacetan, keselamatan lalu lintas, kontinuitas jaringan, serta keterhubungannya dengan angkutan umum merupakan faktor yang sama

pentingnya. Hal ini khususnya relevan pada koridor-koridor dengan aktivitas perjalanan tinggi seperti Denpasar–Badung–Gianyar dan akses menuju kawasan pariwisata.

Dengan tingginya ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, kebijakan pembangunan jaringan jalan ke depan perlu dibarengi dengan penguatan transportasi publik, manajemen permintaan perjalanan, pengembangan simpul perpindahan moda, serta penyediaan fasilitas berjalan kaki dan bersepeda. Pendekatan tersebut penting agar peningkatan kualitas jaringan jalan tidak semata-mata meningkatkan kapasitas kendaraan, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas masyarakat secara lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

b. Angkutan Darat

Sebagai moda transportasi yang paling dekat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat, angkutan darat memegang peranan strategis dalam memperlancar pergerakan ekonomi, mempermudah akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta menjadi penghubung antara pusat-pusat pertumbuhan wilayah.

Tabel 6.4
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2022–2025

Wilayah	Akhir Tahun	Mobil Penumpang	Bus	Truk/ Mobil Barang	Sepeda Motor	Kendaraan Khusus	Jumlah
Provinsi Bali	2022	493.887	11.257	171.603	4.079.617	821	4.757.185
	2023	524.619	11.584	176.882	4.303.266	843	5.017.194
	2024	544.640	15.981	188.199	4.528.734	1.430	5.278.984
	2025	569.311	16.611	195.797	4.756.197		5.537.916

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2026

Berdasarkan data perkembangan kendaraan bermotor di Provinsi Bali tahun 2022–2025, jumlah kendaraan menunjukkan tren meningkat secara konsisten setiap tahun. Pada tahun 2022 jumlah kendaraan bermotor tercatat sebanyak 4.757.185 unit, kemudian meningkat menjadi 5.017.194 unit pada 2023, 5.278.984 unit pada 2024, dan mencapai 5.537.916 unit pada 2025.

Secara keseluruhan, selama periode 2022–2025 jumlah kendaraan bermotor bertambah sebanyak 780.731 unit atau meningkat sekitar 16,41%. Pertumbuhan tahunan tercatat sekitar 5,47% pada 2023, 5,22% pada 2024, dan 4,90% pada 2025. Meskipun laju pertumbuhannya sedikit melambat, penambahan kendaraan secara absolut tetap tinggi, yaitu sekitar 259–262 ribu unit per tahun.

Struktur kendaraan bermotor di Bali sangat didominasi oleh sepeda motor. Jumlah sepeda motor meningkat dari 4.079.617 unit pada 2022 menjadi 4.756.197 unit pada 2025, atau bertambah sekitar 676.580 unit dalam tiga tahun. Pada 2025, sepeda motor mencakup sekitar 85,88% dari seluruh kendaraan bermotor di Bali. Dominasi ini memperlihatkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan roda dua sebagai moda utama perjalanan sehari-hari.

Jumlah mobil penumpang juga terus meningkat, dari 493.887 unit pada 2022 menjadi 569.311 unit pada 2025. Dalam periode tersebut terjadi penambahan sebanyak 75.424 unit atau sekitar 15,27%. Pada 2025, mobil penumpang menyumbang sekitar 10,28% dari total kendaraan bermotor. Peningkatan ini turut memperkuat indikasi tingginya penggunaan kendaraan pribadi dalam sistem transportasi Bali.

Untuk truk atau mobil barang, jumlahnya meningkat dari 171.603 unit pada 2022 menjadi 195.797 unit pada 2025, atau bertambah sekitar 24.194 unit. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan kendaraan untuk mendukung distribusi barang, logistik, perdagangan, konstruksi, dan aktivitas ekonomi lainnya.

Jumlah bus relatif lebih kecil dibandingkan jenis kendaraan lainnya, namun pertumbuhannya cukup tinggi. Jumlah bus meningkat dari 11.257 unit pada 2022 menjadi 16.611 unit pada 2025, atau meningkat sekitar 47,56%. Meskipun demikian, proporsinya terhadap total kendaraan pada 2025 hanya sekitar 0,30%. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif kendaraan yang berpotensi digunakan sebagai angkutan penumpang bersama masih jauh lebih sedikit dibandingkan kendaraan pribadi.

Data kendaraan khusus tercatat sebanyak 821 unit pada 2022, meningkat menjadi 843 unit pada 2023 dan 1.430 unit pada 2024. Pada tabel tahun 2025, nilai kendaraan khusus tidak dicantumkan. Namun total kendaraan tahun 2025 sebesar 5.537.916 unit sama dengan penjumlahan mobil penumpang, bus, truk/mobil barang, dan sepeda motor yang tercantum pada tahun tersebut. Karena data kendaraan khusus 2025 tidak tersedia secara eksplisit, sebaiknya tidak ditafsirkan sebagai nol tanpa konfirmasi dari sumber data.

Perkembangan jumlah kendaraan tersebut memperlihatkan bahwa sistem mobilitas di Bali masih sangat bertumpu pada kendaraan bermotor pribadi, khususnya sepeda motor dan mobil penumpang. Kondisi ini berimplikasi terhadap peningkatan beban jaringan jalan, kebutuhan ruang parkir, konsumsi energi, emisi, serta potensi kemacetan terutama di kawasan perkotaan dan kawasan pariwisata dengan intensitas perjalanan tinggi.

Dalam konteks pembangunan transportasi, tren tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada

peningkatan kapasitas jalan, tetapi juga pada pengembangan transportasi publik yang andal, integrasi antarmoda, peningkatan layanan angkutan massal, serta pengelolaan permintaan perjalanan. Tanpa pergeseran menuju moda transportasi publik dan moda nonmotorized, pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi berpotensi semakin meningkatkan tekanan terhadap sistem transportasi Bali.

6.7.2. Transportasi Udara

Berdasarkan data perkembangan penerbangan di Provinsi Bali tahun 2023–2025, terlihat adanya pergeseran pola pergerakan penumpang, yaitu penurunan pada penumpang domestik yang terjadi bersamaan dengan peningkatan cukup kuat pada penumpang asing. Sementara itu, jumlah pergerakan pesawat relatif stabil.

Jumlah pesawat tiba menurun dari 73.545 penerbangan pada 2023 menjadi 71.081 penerbangan pada 2024 atau turun sekitar 3,35%, kemudian sedikit meningkat menjadi 71.661 penerbangan pada 2025 atau naik sekitar 0,82%. Pola serupa terjadi pada pesawat berangkat, dari 73.536 penerbangan pada 2023 menjadi 71.088 penerbangan pada 2024, lalu meningkat menjadi 71.651 penerbangan pada 2025. Secara keseluruhan, jumlah pergerakan pesawat pada 2025 masih sekitar 2,6% lebih rendah dibandingkan 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas penerbangan secara frekuensi cenderung stabil setelah mengalami penurunan pada 2024.

Berbeda dengan pergerakan pesawat, jumlah penumpang domestik menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten. Penumpang domestik yang tiba turun dari 5,33 juta orang pada 2023 menjadi 4,90 juta orang pada 2024 dan kembali menurun menjadi 4,45 juta orang pada 2025. Dalam periode 2023–2025 terjadi penurunan sekitar 16,59%. Penumpang domestik yang berangkat juga turun dari 5,05 juta orang menjadi 4,72 juta orang dan selanjutnya 4,31 juta orang, atau turun sekitar 14,64% dalam dua tahun. Penumpang domestik transit bahkan menurun hampir 29,74%, dari 263,76 ribu orang pada 2023 menjadi 185,31 ribu orang pada 2025.

Sebaliknya, penumpang asing menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Penumpang asing yang tiba meningkat dari 6,14 juta orang pada 2023 menjadi 6,98 juta orang pada 2024 dan mencapai 7,51 juta orang pada 2025. Dalam kurun 2023–2025, jumlah tersebut meningkat sekitar 22,39%. Penumpang asing yang berangkat juga meningkat dari 6,13 juta orang pada 2023 menjadi 7,04 juta orang pada 2024 dan 7,60 juta orang pada 2025, atau tumbuh sekitar 24,07% selama dua tahun.

Pertumbuhan penumpang asing pada 2025 masih berlanjut, meskipun dengan laju yang lebih moderat dibandingkan tahun sebelumnya. Penumpang asing tiba tumbuh sekitar 7,60% pada 2025, sedangkan penumpang asing berangkat meningkat sekitar 7,97%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas penerbangan

internasional semakin dominan dalam struktur pergerakan penumpang udara di Bali.

Penumpang asing transit juga meningkat sangat tajam dibandingkan 2023, dari hanya 12.029 orang menjadi sekitar 61.603 orang pada 2024 dan 60.420 orang pada 2025. Namun, pada 2025 jumlah transit asing sedikit turun sekitar 1,92% dibandingkan 2024. Meskipun jumlah absolutnya relatif kecil dibandingkan penumpang tiba dan berangkat, kenaikan dibandingkan 2023 menunjukkan adanya peningkatan fungsi Bali dalam jaringan penerbangan internasional.

Secara umum, data tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan penerbangan Bali tahun 2023–2025 semakin ditopang oleh pasar internasional, sementara pasar domestik mengalami kontraksi. Menariknya, peningkatan penumpang asing terjadi ketika jumlah penerbangan relatif tidak meningkat secara signifikan. Hal ini dapat mengindikasikan peningkatan keterisian penerbangan, penggunaan pesawat berkapasitas lebih besar, perubahan komposisi rute, atau meningkatnya porsi penerbangan internasional, meskipun penyebab pastinya tidak dapat ditentukan hanya dari data ini.

Tabel 6.5
Banyaknya Penerbangan dan Penumpang di Provinsi Bali Tahun 2023–2025

Indikator Penerbangan	Banyaknya Penerbangan dan Penumpang di Provinsi Bali		
	2023	2024	2025
Pesawat Tiba	73.545	71.081	71.661
Pesawat Berangkat	73.536	71.088	71.651
Penumpang Domestik Tiba	5.333.319	4.901.759	4.448.490
Penumpang Domestik Berangkat	5.053.688	4.719.044	4.314.074
Penumpang Domestik Transit	263.760	223.836	185.314
Penumpang Asing Tiba	6.138.907	6.982.674	7.513.282
Penumpang Asing Berangkat	6.128.531	7.041.983	7.603.581
Penumpang Asing Transit	12.029	61.603	60.420

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

6.7.3. Transportasi Laut

Aktivitas transportasi laut di Bali pada tahun 2025 didominasi oleh dua pelabuhan utama, yaitu Padangbai dan Gilimanuk, yang menjadi gerbang penting pergerakan penumpang dan barang antarwilayah. Total penumpang yang datang melalui pelabuhan laut mencapai 8.057.550 orang, sedangkan penumpang berangkat mencapai 8.926.540 orang.

Berdasarkan data jumlah penumpang pada pelabuhan laut di Provinsi Bali tahun 2023–2025, pergerakan penumpang menunjukkan dinamika yang cukup tinggi, terutama pada Pelabuhan Gilimanuk dan Padangbai. Secara keseluruhan, jumlah penumpang berangkat meningkat dari 7.243.234 orang pada 2023 menjadi 8.926.540 orang pada 2024, kemudian menurun menjadi 8.121.241

orang pada 2025. Sementara itu, jumlah penumpang tiba meningkat secara berturut-turut dari 7.370.437 orang pada 2023 menjadi 8.057.550 orang pada 2024 dan 8.215.330 orang pada 2025.

Pada sisi keberangkatan, terjadi peningkatan yang cukup besar pada 2024, yaitu sekitar 23,24% dibandingkan 2023. Namun pada 2025 jumlah penumpang berangkat turun sekitar 9,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan 2023, jumlah penumpang berangkat tahun 2025 masih lebih tinggi sekitar 12,12%. Pola ini menunjukkan adanya lonjakan mobilitas melalui pelabuhan pada 2024 yang kemudian mengalami normalisasi pada 2025.

Berbeda dengan keberangkatan, jumlah penumpang yang tiba menunjukkan tren yang lebih stabil dan terus meningkat. Pada 2024, jumlah penumpang tiba bertambah sekitar 9,32% dibandingkan 2023, dan pada 2025 kembali meningkat sekitar 1,96% dibandingkan 2024. Secara kumulatif, jumlah penumpang tiba tahun 2025 meningkat sekitar 11,46% dibandingkan 2023.

a. Pelabuhan Gilimanuk sebagai simpul utama

Pergerakan penumpang laut di Bali sangat didominasi oleh Pelabuhan Gilimanuk. Pada 2025, jumlah penumpang berangkat dari Gilimanuk mencapai 7.054.294 orang, atau sekitar 86,86% dari seluruh penumpang berangkat melalui pelabuhan yang tercatat. Sementara jumlah penumpang tiba mencapai 7.301.029 orang, atau sekitar 88,87% dari total penumpang tiba.

Jumlah penumpang berangkat melalui Gilimanuk meningkat dari 6,22 juta orang pada 2023 menjadi 7,74 juta orang pada 2024, sebelum turun menjadi 7,05 juta orang pada 2025. Sebaliknya, jumlah penumpang tiba terus meningkat dari 6,42 juta orang pada 2023 menjadi 7,01 juta orang pada 2024 dan 7,30 juta orang pada 2025. Perkembangan ini menegaskan peranan strategis Gilimanuk sebagai gerbang utama pergerakan penumpang darat-laut antara Bali dan Pulau Jawa.

b. Pergerakan di Pelabuhan Padangbai

Pelabuhan Padangbai menjadi simpul penumpang terbesar kedua. Jumlah penumpang berangkat meningkat dari 951.562 orang pada 2023 menjadi 1.182.059 orang pada 2024, kemudian turun menjadi 1.066.947 orang pada 2025. Dibandingkan 2023, jumlah keberangkatan pada 2025 masih lebih tinggi sekitar 12,13%.

Untuk penumpang tiba, jumlahnya meningkat dari 865.538 orang pada 2023 menjadi 1.048.078 orang pada 2024, tetapi turun menjadi 914.301 orang pada 2025. Dengan demikian, pergerakan melalui Padangbai pada 2025 menunjukkan sedikit pelemahan dibandingkan 2024, meskipun masih berada di atas kondisi tahun 2023 untuk beberapa indikator.

c. Benoa dan Celukan Bawang

Data untuk Pelabuhan Benoa dan Pelabuhan Celukan Bawang hanya tersedia pada tahun 2023. Benoa mencatat 47.563 penumpang berangkat dan 64.093 penumpang tiba, sedangkan Celukan Bawang mencatat 28.424 penumpang berangkat dan 21.999 penumpang tiba. Karena data tahun 2024 dan 2025 tidak tersedia pada tabel, perkembangan kedua pelabuhan tersebut tidak dapat dianalisis secara berkelanjutan.

Keterbatasan ini juga perlu diperhatikan saat membandingkan total antar tahun, karena total tahun 2023 mencakup Benoa dan Celukan Bawang, sedangkan total tahun 2024 dan 2025 hanya berasal dari pelabuhan yang memiliki data, terutama Gilimanuk dan Padangbai.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa mobilitas penumpang melalui pelabuhan laut di Bali masih sangat terkonsentrasi pada Gilimanuk, dengan Padangbai sebagai simpul penting berikutnya. Tingginya volume penumpang pada kedua pelabuhan menunjukkan pentingnya konektivitas laut dalam mendukung pergerakan masyarakat, pariwisata, dan aktivitas ekonomi antarpulau.

Tabel 6.6
Banyaknya Penumpang Tiba dan Berangkat Menurut Pelabuhan di Bali Tahun 2023–2025

Pelabuhan Laut	Jumlah Penumpang Berangkat pada Pelabuhan di Provinsi Bali (Orang)			Jumlah Penumpang Tiba di Pelabuhan di Provinsi Bali (Orang)		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Benoa	47.563	-	-	64.093	-	-
Padangbai	951.562	1.182.059	1.066.947	865.538	1.048.078	914.301
Celukan Bawang	28.424	-	-	21.999	-	-
Gilimanuk	6.215.685	7.744.481	7.054.294	6.418.807	7.009.472	7.301.029
Jumlah	7.243.234	8.926.540	8.121.241	7.370.437	8.057.550	8.215.330

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2026

6.8. PELAYANAN TELEKOMUNIKASI

Berdasarkan data telekomunikasi Provinsi Bali tahun 2025, kondisi infrastruktur dan pemanfaatan layanan komunikasi menunjukkan tingkat keterjangkauan yang sangat tinggi. Hampir seluruh desa/kelurahan telah memperoleh sinyal telepon seluler dan akses internet bergerak berkecepatan tinggi, meskipun keberadaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) belum terdapat secara langsung pada seluruh desa/kelurahan. Di sisi pemanfaatan, penggunaan telepon seluler oleh penduduk juga telah relatif luas, tetapi masih terdapat variasi antarwilayah dan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

a. Ketersediaan BTS dan sinyal telepon seluler

Berdasarkan Statistik Potensi Desa Provinsi Bali Tahun 2025, terdapat 718 desa/kelurahan yang tercakup dalam pendataan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 596 desa/kelurahan atau sekitar 83,0% telah memiliki BTS, sedangkan 122 desa/kelurahan atau sekitar 17,0% belum memiliki BTS di wilayahnya.

Ketersediaan BTS terbesar secara absolut terdapat di Kabupaten Buleleng sebanyak 116 desa/kelurahan, diikuti Tabanan sebanyak 103 desa/kelurahan, Karangasem 70 desa/kelurahan, Gianyar 68 desa/kelurahan, Badung 53 desa/kelurahan, Klungkung 51 desa/kelurahan, Bangli 48 desa/kelurahan, Jembrana 47 desa/kelurahan, dan Kota Denpasar 40 desa/kelurahan. Sementara itu, jumlah desa/kelurahan yang belum memiliki BTS paling banyak terdapat di Buleleng sebanyak 32 desa/kelurahan, Tabanan 30 desa/kelurahan, dan Bangli 26 desa/kelurahan.

Meskipun tidak semua desa/kelurahan mempunyai BTS sendiri, cakupan sinyal telepon seluler telah menjangkau seluruh desa/kelurahan. Dari 718 desa/kelurahan, sebanyak 345 desa/kelurahan memiliki sinyal sangat kuat, 371 desa/kelurahan memiliki sinyal kuat, dan hanya 2 desa/kelurahan yang memiliki sinyal lemah. Dengan demikian, sekitar 99,7% desa/kelurahan memiliki kekuatan sinyal kuat atau sangat kuat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan BTS secara administratif dalam suatu desa/kelurahan tidak secara langsung menentukan ada atau tidaknya layanan telekomunikasi. Desa/kelurahan yang tidak memiliki BTS sendiri masih dapat memperoleh cakupan sinyal dari BTS yang berada pada wilayah sekitarnya.

b. Cakupan jaringan internet seluler

Dari sisi jaringan internet seluler, kondisi Bali pada tahun 2025 tergolong sangat baik. Sebanyak 717 dari 718 desa/kelurahan, atau sekitar 99,86%, telah menerima sinyal internet kategori 5G/4G/LTE. Hanya 1 desa/kelurahan, yaitu di Kabupaten Bangli, yang tercatat masih menerima jaringan 3G/H/H+/EVDO.

Tidak terdapat desa/kelurahan yang tercatat hanya menerima jaringan 2,5G/E/GPRS maupun tidak memperoleh sinyal internet. Dengan demikian, secara spasial akses terhadap jaringan internet bergerak telah menjangkau hampir seluruh wilayah Bali.

Kabupaten Buleleng memiliki jumlah desa/kelurahan dengan penerimaan jaringan 5G/4G/LTE terbanyak, yaitu 148 desa/kelurahan, diikuti Tabanan 133, Karangasem 78, Bangli 73, Gianyar 70, Badung 62, Klungkung 59, Jembrana 51, dan Kota Denpasar 43 desa/kelurahan.

Namun, kategori data “5G/4G/LTE” merupakan kategori gabungan, sehingga data tersebut belum dapat digunakan untuk menentukan berapa desa/kelurahan yang secara khusus telah memiliki layanan 5G. Data tersebut terutama menunjukkan

bahwa hampir seluruh desa/kelurahan telah memperoleh jaringan internet seluler generasi tinggi, sekurang-kurangnya 4G/LTE.

c. Pemanfaatan telepon seluler oleh masyarakat

Tingginya ketersediaan jaringan telekomunikasi juga tercermin pada tingkat penggunaan telepon seluler. Pada tahun 2025, 85,96% penduduk Bali berumur 5 tahun ke atas menggunakan telepon seluler/HP untuk keperluan komunikasi dalam tiga bulan terakhir.

Penggunaan telepon seluler tertinggi terdapat di Kota Denpasar sebesar 95,59%, diikuti Kabupaten Badung sebesar 89,31%, Jembrana 85,56%, Buleleng 83,92%, Gianyar 82,19%, dan Tabanan 81,61%. Sementara itu, tingkat penggunaan relatif lebih rendah terdapat di Bangli sebesar 78,07%, Klungkung 77,21%, dan Karangasem sebesar 77,05%, yang merupakan capaian terendah di Bali.

Perbedaan antara Kota Denpasar sebesar 95,59% dan Kabupaten Karangasem sebesar 77,05% mencapai sekitar 18,54 poin persentase. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ketersediaan jaringan internet secara fisik sudah hampir merata, tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat masih berbeda antarwilayah.

d. Kesenjangan penggunaan menurut jenis kelamin

Data juga menunjukkan adanya kesenjangan penggunaan telepon seluler antara penduduk laki-laki dan perempuan. Secara provinsi, persentase penggunaan telepon seluler pada laki-laki mencapai 89,59%, sedangkan pada perempuan sebesar 82,00%, sehingga terdapat kesenjangan sekitar 7,59 poin persentase.

Kesenjangan terbesar terdapat di Kabupaten Klungkung, dengan penggunaan pada laki-laki sebesar 83,99% dan perempuan 70,63%, atau berbeda sekitar 13,36 poin persentase. Kesenjangan relatif besar juga terdapat di Tabanan sekitar 11,69 poin, Karangasem 10,98 poin, Bangli 10,86 poin, Gianyar 9,42 poin, dan Buleleng 8,74 poin.

Sebaliknya, kesenjangan terendah terdapat di Kota Denpasar, yaitu hanya sekitar 2,70 poin persentase, dengan penggunaan telepon seluler pada laki-laki 96,91% dan perempuan 94,21%. Badung juga menunjukkan kesenjangan yang relatif kecil sebesar sekitar 5,85 poin.

e. Gambaran umum kondisi telekomunikasi Bali

Secara keseluruhan, data tahun 2025 menunjukkan bahwa infrastruktur dan jangkauan telekomunikasi di Bali telah berada pada tingkat yang sangat baik. Hampir 100% desa/kelurahan telah memperoleh sinyal telepon seluler dan jaringan internet 4G/LTE atau lebih tinggi, sementara sekitar 83% desa/kelurahan telah memiliki BTS secara langsung.

Namun, tingginya cakupan infrastruktur belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan pemanfaatan. Tingkat penggunaan telepon seluler masih berkisar antara 77–96% antarwilayah dan masih terdapat kesenjangan penggunaan antara laki-laki dan

perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pembangunan telekomunikasi Bali ke depan mulai bergeser dari sekadar penyediaan cakupan jaringan menuju peningkatan kualitas konektivitas, keterjangkauan layanan, literasi digital, dan pemerataan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 6.7
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel untuk Keperluan Komunikasi dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Bali, 2025

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	**Laki-Laki** *Male*	**Perempuan** *Female*	**Laki-Laki+Perempuan** *Male+Female*
Jembrana	89,65	81,51	85,56
Tabanan	87,50	75,81	81,61
Badung	92,17	86,32	89,31
Gianyar	86,87	77,45	82,19
Klungkung	83,99	70,63	77,21
Bangli	83,45	72,59	78,07
Karangasem	82,54	71,56	77,05
Buleleng	88,32	79,58	83,92
Denpasar	96,91	94,21	95,59
BALI	**89,59**	**82,00**	**85,96**

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Tabel 6.8
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Base Transceiver Station (BTS), Sinyal Telepon Seluler, dan Sinyal Internet GSM atau CDMA Tahun 2025

Kabupaten/ Kota	**Desa Kelurahan dengan Penerimaan Sinyal Internet - 3G/H/H+/ EVDO**	**Desa Kelurahan dengan Penerimaan Sinyal Internet - 2,5G/E/ GPRS**	**Desa Kelurahan dengan Penerimaan Sinyal Internet - Tidak Ada**	**Desa Kelurahan dengan Penerimaan Sinyal Internet - 5G/4G/LTE**
Jembrana	–	–	–	51
Tabanan	–	–	–	133
Badung	–	–	–	62
Gianyar	–	–	–	70
Klungkung	–	–	–	59
Bangli	1	–	–	73
Karang Asem	–	–	–	78
Buleleng	–	–	–	148
Kota Denpasar	–	–	–	43
Bali	**1**	**–**	**–**	**717**

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2026

6.9. PELAYANAN AIR BERSIH

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2025, sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum di Provinsi Bali masih didominasi oleh air kemasan bermerek dan air isi ulang, dengan proporsi sebesar 53,72%. Sumber berikutnya adalah leding sebesar 18,16%, kemudian mata air terlindung dan air hujan sebesar 17,28%, sumur bor/pompa 6,03%, sumur terlindung 3,86%, mata air tak terlindung, air permukaan, dan sumber lainnya 0,80%, serta sumur tak terlindung 0,17%.

Secara spasial, pola penggunaan sumber air minum menunjukkan perbedaan yang cukup jelas antarwilayah. Kota Denpasar memiliki ketergantungan paling tinggi terhadap air kemasan bermerek dan air isi ulang, yaitu sebesar 95,10%. Pola yang sama juga terlihat kuat di Kabupaten Badung sebesar 77,69% dan Jembrana sebesar 52,12%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada kawasan perkotaan dan wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi, rumah tangga cenderung lebih banyak menggunakan air minum yang diperoleh melalui produk kemasan atau layanan isi ulang.

Di sisi lain, beberapa kabupaten menunjukkan penggunaan air leding yang relatif tinggi. Proporsi terbesar terdapat di Kabupaten Klungkung sebesar 44,47%, diikuti Bangli 41,14%, Karangasem 34,11%, Buleleng 29,29%, Gianyar 27,68%, dan Tabanan 26,70%. Sementara itu, penggunaan leding sangat rendah di Denpasar sebesar 1,48% dan Badung sebesar 2,63%, sejalan dengan dominannya penggunaan air kemasan dan air isi ulang di kedua wilayah tersebut.

Sumber mata air terlindung dan air hujan juga masih memiliki peranan penting, khususnya di wilayah yang karakteristik sumber daya airnya berbeda dengan kawasan perkotaan. Penggunaan tertinggi terdapat di Karangasem sebesar 40,00%, disusul Buleleng 37,76%, Tabanan 23,37%, Gianyar 20,81%, dan Bangli 19,66%. Pola ini menunjukkan bahwa sumber air alami masih menjadi sumber utama air minum bagi bagian rumah tangga di beberapa wilayah Bali.

Untuk kategori sumur bor/pompa, proporsi terbesar tercatat di Gianyar sebesar 13,38%, kemudian Bangli 10,47%, Jembrana 8,41%, Badung 8,36%, Buleleng 4,89%, Klungkung 4,19%, Tabanan 4,15%, Denpasar 3,14%, dan Karangasem 2,38%. Sementara penggunaan sumur terlindung relatif kecil pada tingkat provinsi, yaitu 3,86%, meskipun di Karangasem proporsinya mencapai 13,44%, tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Penggunaan sumber air yang relatif lebih rentan, seperti sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, air permukaan, dan sumber lainnya, tercatat sangat kecil pada tingkat provinsi. Sumur tak terlindung hanya sebesar 0,17%, sedangkan mata air tak terlindung, air permukaan, dan lainnya sebesar 0,80%. Dalam tabel sumber, beberapa kabupaten/kota ditandai dengan NA atau tanda “–”, sehingga nilainya tidak sebaiknya ditafsirkan sebagai nol tanpa penjelasan lebih lanjut dari sumber data.

Secara keseluruhan, kondisi tahun 2025 menunjukkan bahwa pola penyediaan air minum rumah tangga di Bali cukup beragam. Lebih dari separuh rumah tangga menggunakan air kemasan atau air isi ulang, sedangkan sebagian lainnya masih

mengandalkan jaringan leding, mata air, air hujan, dan sumber air tanah. Perbedaan antarwilayah memperlihatkan bahwa karakter perkotaan, kondisi geografis, ketersediaan jaringan perpipaan, dan keberadaan sumber air lokal sangat memengaruhi pilihan sumber air minum rumah tangga.

Tabel 6.9
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum di Provinsi Bali, Tahun 2025

Kabupaten/ Kota	Air Kemasan Bermerek, Air Isi Ulang	Leding	Sumur Bor/ Pompa	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung, Air Hujan	Mata Air Tak Terlindung, Air Permukaan, Lainnya	Jumlah
Jembrana	**52,12**	**15,56**	**8,41**	**7,15**	**1,26**	**12,86**	**2,64**	**100,00**
Tabanan	38,29	26,70	4,15	4,15	NA	23,37	3,07	100,00
Badung	77,69	2,63	8,36	2,96	–	8,36	–	100,00
Gianyar	33,06	27,68	13,38	4,11	–	20,81	0,96	100,00
Klungkung	31,78	44,47	4,19	4,61	–	14,62	NA	100,00
Bangli	27,58	41,14	10,47	NA	–	19,66	0,80	100,00
Karangasem	10,08	34,11	2,38	13,44	–	40,00	–	100,00
Buleleng	21,97	29,29	4,89	4,42	NA	37,76	1,28	100,00
Denpasar	95,10	1,48	3,14	NA	–	NA	–	100,00
BALI	**53,72**	**18,16**	**6,03**	**3,86**	**0,17**	**17,28**	**0,80**	**100,00**

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2026

6.10. TINGKAT PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang mampu menyerap dan memancarkan energi panas dalam spektrum inframerah sehingga meningkatkan efek rumah kaca di atmosfer. GRK terdiri dari berbagai senyawa, seperti karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dinitrogen oksida (N_2O), serta gas-gas berfluorinasi. Meskipun ragam komponennya banyak, emisi GRK umumnya dinyatakan dalam satuan setara CO_2 (CO_2e) karena CO_2 merupakan penyumbang terbesar dalam total emisi. Upaya penurunan emisi GRK dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung menekan jumlah emisi, sesuai dengan target pembangunan nasional maupun daerah. Berdasarkan data emisi GRK Provinsi Bali tahun 2019-2023, terlihat tren penurunan signifikan dari 17.958,72 Gg CO_2e pada 2019 menjadi 10.932,96 Gg CO_2e pada 2023.

Sektor energi masih menjadi kontributor terbesar dengan pola fluktuatif mengalami penurunan tajam pada 2020-2021 sebagai dampak pandemi COVID-19, lalu meningkat kembali pada 2022-2023 hingga melampaui level pra-pandemi. Perubahan paling positif terlihat pada sektor kehutanan, yang semula menghasilkan emisi sebesar 2.730,94 Gg CO_2e pada 2019, kemudian bertransformasi menjadi penyerap karbon sejak 2020 dengan peningkatan kapasitas penyerapan hingga mencapai -1.215,12 Gg CO_2e pada 2023. Sektor pertanian menunjukkan emisi relatif stabil di kisaran 1.600-1.770 Gg CO_2e, sedangkan sektor limbah mengalami penurunan tajam

dari 3.520,69 Gg CO_2e pada 2019 menjadi hanya 378,15 Gg CO_2e pada 2023. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan signifikan dalam pengelolaan limbah.

Provinsi Bali berhasil menurunkan total emisi GRK sebesar 39,1% dibandingkan baseline 2019. Penurunan ini terutama didorong oleh meningkatnya kemampuan sektor kehutanan dalam menyerap karbon serta perbaikan manajemen limbah di seluruh wilayah provinsi.

Tabel 6.10
Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Sumber Emisi GRK	Emisi Gas Rumah Kaca (Gg CO2e)				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Energi	7.586,31	6.911,40	8.205,87	10.169,94	12.239,68
IPPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pertanian	1.612,13	1.744,20	1.770,33	1.599,99	1.203,89
Kehutanan	-1.123,71	-1.156,42	-1.153,96	-1.215,12	-1.200,73
Limbah	3.849,91	4.140,84	3.852,40	378,15	355,95
Jumlah	**11.924,64**	**11.640,02**	**12.674,64**	**10.932,96**	**12.598,79**

Sumber: Sign Smart – KLHK

Data emisi GRK Provinsi Bali 2020-2024 dari Sign Smart KLHK menunjukkan dinamika signifikan dalam upaya mitigasi iklim. Total emisi sempat turun dari 11.924,64 Gg CO_2e (2020) menjadi 10.932,96 Gg CO_2e (2023), tetapi kembali melonjak menjadi 12.698,79 Gg CO_2e pada 2024, melampaui awal periode.

Secara sektoral, sektor energi menunjukkan peningkatan paling tajam, naik 61% dari 7.586,31 menjadi 12.239,68 Gg CO_2e, dipicu meningkatnya aktivitas ekonomi dan pariwisata pasca-pandemi. Sebaliknya, sektor limbah turun drastis 91%, menandakan perbaikan besar dalam pengelolaan limbah. Sektor pertanian dan kehutanan mengalami penurunan moderat masing-masing 26% dan 6%, sementara sektor IPPU tidak mencatat emisi selama periode ini.

Lonjakan emisi tahun 2024, yang hampir seluruhnya berasal dari sektor energi, menjadi peringatan penting bagi Bali untuk mempercepat transisi energi bersih dan efisiensi energi, terutama pada sektor pariwisata dan transportasi, agar tetap sejalan dengan target penurunan emisi nasional.

BAB 7

PROFIL DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025



BAB 7
DAYA SAING DAERAH

7.1. INDEKS DAYA SAING DAERAH

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menilai tingkat daya saing provinsi serta kabupaten/kota. Pengukuran ini bertujuan menghasilkan gambaran daya saing yang komprehensif sehingga mampu mencerminkan produktivitas suatu daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2025, Provinsi Bali mencatat skor IDSD sebesar 4,03, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 3,50. Dengan demikian, skor daya saing Bali berada 0,53 poin di atas rata-rata nasional, yang menunjukkan bahwa secara umum kapasitas daya saing daerah Bali berada pada posisi yang relatif kuat.

Jika dilihat menurut 12 pilar pembentuk IDSD, seluruh pilar Provinsi Bali memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa keunggulan daya saing Bali tidak hanya ditopang oleh satu atau dua aspek, tetapi relatif tersebar pada berbagai dimensi, mulai dari kelembagaan, infrastruktur, digitalisasi, kualitas sumber daya manusia, pasar, hingga inovasi.

Pilar dengan nilai tertinggi adalah Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebesar 4,90, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 3,68. Selisih sebesar 1,22 poin ini merupakan salah satu keunggulan paling menonjol Bali. Kondisi tersebut menunjukkan kuatnya dukungan pemanfaatan teknologi dan konektivitas digital dalam aktivitas pemerintahan, ekonomi, maupun masyarakat.

Pilar Institusi juga menunjukkan capaian tinggi, yaitu 4,73, dibandingkan rata-rata nasional 4,30. Capaian ini mengindikasikan bahwa kualitas kelembagaan dan tata kelola menjadi salah satu fondasi utama daya saing Bali. Selain itu, Ukuran Pasar memperoleh skor 4,40, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,38, menunjukkan bahwa Bali memiliki basis pasar yang relatif kuat.

Pada aspek ekonomi dan produktivitas, Stabilitas Ekonomi Makro memperoleh skor 4,16, lebih tinggi dari rata-rata nasional 4,02. Pasar Produk mencatat skor 3,30, dibandingkan rata-rata nasional 2,55, sedangkan Pasar Tenaga Kerja mencapai 3,92, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 2,96. Selisih pada pasar tenaga kerja mencapai 0,96 poin, menunjukkan bahwa aspek ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor daya saing yang cukup kuat di Bali.

Pada pilar Sistem Keuangan, Bali mencatat skor 3,62, lebih tinggi dibandingkan nasional 2,90. Sementara itu, Dinamika Bisnis mencapai 3,28, dibandingkan rata-rata nasional 2,79. Kedua capaian tersebut menunjukkan adanya dukungan ekosistem usaha dan akses sistem keuangan yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.

Dari sisi kualitas sumber daya manusia, pilar Kesehatan memperoleh skor 4,02, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional 3,79, sedangkan Keterampilan mencapai 4,05, dibandingkan nasional 3,67. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan dan keterampilan penduduk turut menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing daerah.

Pilar Kapabilitas Inovasi juga memperlihatkan capaian yang cukup tinggi, yaitu 4,25, atau lebih tinggi 0,71 poin dibandingkan rata-rata nasional sebesar 3,54. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas Bali dalam mengembangkan inovasi, adaptasi, dan pembaruan memiliki posisi yang relatif kuat sebagai salah satu penopang daya saing daerah.

Sementara itu, pilar Infrastruktur memperoleh skor 3,71, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 3,37. Meskipun unggul dibandingkan nasional, nilainya masih lebih rendah dibandingkan beberapa pilar Bali lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur tetap menjadi aspek yang perlu terus diperkuat agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, aktivitas pariwisata, dan peningkatan produktivitas.

Secara keseluruhan, struktur IDSD Bali tahun 2025 menunjukkan bahwa keunggulan utama daerah berada pada adopsi TIK, institusi, ukuran pasar, kapabilitas inovasi, stabilitas ekonomi makro, dan kualitas keterampilan. Pada saat yang sama, masih terdapat ruang penguatan terutama pada pilar dengan skor yang relatif lebih rendah seperti dinamika bisnis, pasar produk, sistem keuangan, dan infrastruktur, meskipun seluruhnya tetap berada di atas rata-rata nasional.

Gambar 7.1.
Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2025

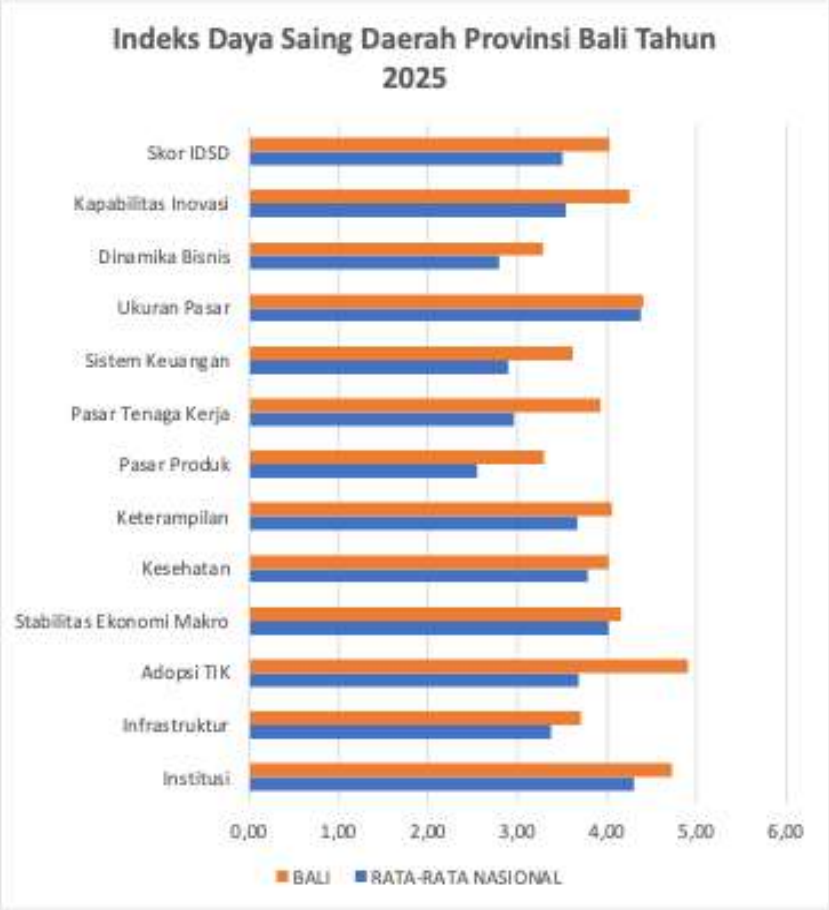

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Republik Indonesia, 2026

7.2. INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF

Menurut Bappenas, ekonomi inklusif merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan, dan mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ekonomi inklusif tidak hanya berfokus pada peningkatan angka pertumbuhan, tetapi juga pada bagaimana pertumbuhan tersebut dirasakan secara merata, terutama oleh kelompok miskin, rentan, dan wilayah yang tertinggal. Untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif, Bappenas mengarahkan berbagai program strategis salah satunya adalah akses terhadap pembiayaan (inklusi keuangan).

Kinerja inklusi keuangan di wilayah Bali & Nusa Tenggara, termasuk Provinsi Bali, menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah agen Layanan Keuangan Digital (LKD) mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi kepadatan per 100.000 penduduk dewasa maupun per 1.000 km², yang mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal dan digital. Total agen LKD juga terus bertambah dari sekitar 44.675 pada 2022

menjadi 48.301 pada 2025, menandakan ekspansi agresif jaringan layanan keuangan digital di kawasan ini.

Meskipun demikian, jumlah rekening uang elektronik yang terdaftar melalui agen LKD masih relatif rendah dan cenderung stagnan, menunjukkan bahwa penggunaan e-money oleh masyarakat Bali lebih banyak dilakukan melalui aplikasi digital langsung daripada melalui agen. Di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk dewasa ikut memperluas basis pengguna layanan keuangan, sementara akses terhadap rekening kredit dan pembiayaan mengalami tren kenaikan walaupun porsi kredit UMKM masih terbatas. Data ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan di Bali terus membaik, ditandai dengan akses yang semakin luas terhadap layanan digital, namun masih memerlukan penguatan pada pemanfaatan layanan keuangan yang lebih produktif, terutama bagi UMKM.

Tabel 7.1.
Indikator Keuangan Inklusif Provinsi Bali & Nusa Tenggara Tahun 2022-2025

Indikator	2022	2023	2024	2025
Agen LKD / 100k penduduk dewasa	435	440	425	453
Agen LKD / 1.000 km²	411	627	613	661
Jumlah Rekening Uang Elektronik Register pada Agen LKD per 1.000 Penduduk Dewasa	5	3	4	4
Total agen LKD	44.675	45.786	44.801	48.301
Jumlah Rekening Uang Elektronik Register pada Agen LKD	0.05	0.03	0.04	0.04
Penduduk Dewasa (juta)	10.28	10.41	10.53	10.66

Sumber: Statistik Sistem Keuangan Indonesia, 2025

7.3. INDEKS EKONOMI HIJAU

7.3.1. Perkembangan Umum

Indeks Ekonomi Hijau merupakan ukuran untuk menilai kemajuan pembangunan yang mengintegrasikan dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Melalui ketiga pilar tersebut, pembangunan daerah tidak hanya ditinjau dari peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga dari kualitas lingkungan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data tahun 2023–2024, Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Bali meningkat dari 57,37 pada tahun 2023 menjadi 60,50 pada tahun 2024, atau bertambah 3,13 poin. Perkembangan tersebut menunjukkan kemajuan pembangunan ekonomi hijau, meskipun capaian antarpilar masih belum

merata. Pilar lingkungan dan sosial mengalami peningkatan, sedangkan pilar ekonomi mengalami penurunan.

Perkembangan skor indeks masing-masing pilar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.2.
Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Bali

Indikator	2023	2024
Indeks Ekonomi Hijau	57,37	60,50

7.3.2. Perkembangan Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan menunjukkan peningkatan terbesar, dengan skor indeks naik dari 41,11 menjadi 48,02, atau bertambah 6,91 poin. Seluruh indikator lingkungan yang memiliki data pada kedua tahun menunjukkan perubahan sesuai arah yang diharapkan. Meskipun demikian, skor pilar lingkungan masih menjadi yang terendah dibandingkan dengan pilar ekonomi dan sosial.

Perbaikan paling menonjol terjadi pada indikator persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline. Nilainya meningkat dari 50,94 persen menjadi 74,10 persen, atau bertambah 23,16 poin persentase, dengan skor indeks meningkat dari 52,20 menjadi 76,10. Capaian ini menunjukkan peningkatan penurunan emisi terhadap baseline yang digunakan dalam penghitungan indikator. Namun, indikator tersebut perlu dibedakan dari perubahan emisi absolut tahunan karena menggunakan ukuran kumulatif terhadap baseline.

Kualitas udara juga memperlihatkan perbaikan. Konsentrasi nitrogen dioksida atau NO_2 menurun dari 9,77 µg/m³ menjadi 6,47 µg/m³, sehingga skor indeks meningkat dari 81,05 menjadi 89,89. Penurunan konsentrasi NO_2 menunjukkan perbaikan kualitas udara pada parameter yang diukur.

Pada kualitas air permukaan, nilai *Biochemical Oxygen Demand* atau BOD menurun dari 4,05 mg/l menjadi 4,01 mg/l. Perubahan tersebut meningkatkan skor indeks dari 48,75 menjadi 49,75. Walaupun bergerak ke arah positif, perbaikannya masih terbatas dan nilai BOD masih berada di atas target 2 mg/l yang digunakan dalam penghitungan indeks.

Persentase luas tutupan hutan terhadap luas daratan meningkat dari 16,92 persen menjadi 17,05 persen, dengan skor indeks naik dari 17,72 menjadi 17,86. Sementara itu, bauran energi baru terbarukan meningkat dari 2,45 persen menjadi 2,72 persen, dengan skor indeks naik dari 5,83 menjadi 6,48. Rendahnya skor kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa tutupan hutan dan pemanfaatan energi baru terbarukan masih memerlukan perhatian dalam penguatan pilar lingkungan.

Indikator lahan gambut terdegradasi tidak memiliki nilai dalam data yang disajikan. Oleh karena itu, perkembangannya belum dapat diuraikan, dan kekosongan data tersebut tidak dapat dimaknai sebagai nilai nol.

7.3.3. Perkembangan Pilar Ekonomi

Skor indeks pilar ekonomi menurun dari 69,71 pada tahun 2023 menjadi 67,64 pada tahun 2024, atau berkurang 2,07 poin. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa peningkatan pendapatan dan produktivitas pada beberapa sektor belum diikuti oleh perbaikan efisiensi energi secara konsisten.

Penurunan paling besar terjadi pada indikator intensitas energi final, yang meningkat dari 67,13 menjadi 77,52 BOE per miliar rupiah pada harga konstan 2010. Karena arah perbaikan indikator ini adalah menurun, peningkatan intensitas energi menyebabkan skor indeks turun dari 93,34 menjadi 76,59. Kondisi tersebut menunjukkan bertambahnya kebutuhan energi final untuk menghasilkan setiap satuan output ekonomi, sehingga efisiensi penggunaan energi menjadi salah satu aspek utama yang perlu diperkuat.

Sebaliknya, intensitas emisi menunjukkan perbaikan terbatas, dengan penurunan dari 1,58 menjadi 1,56 ton CO_2e per miliar rupiah pada harga konstan 2010. Skor indeksnya tetap 99,81 setelah pembulatan. Dengan demikian, perubahan intensitas emisi dan intensitas energi menunjukkan arah yang berbeda dan perlu dianalisis sebagai dua ukuran yang saling melengkapi.

Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB per kapita meningkat dari USD4.041,20 menjadi USD4.165,22, dengan skor indeks naik dari 61,75 menjadi 62,84. Produktivitas tenaga kerja sektor industri juga meningkat dari Rp27.265.642 menjadi Rp28.562.382 per orang pada harga konstan 2010, sehingga skor indeks naik dari 13,46 menjadi 15,48. Walaupun meningkat, produktivitas tenaga kerja sektor industri masih memiliki skor terendah dalam pilar ekonomi.

Pada sektor jasa, produktivitas tenaga kerja meningkat dari Rp63.065.049 menjadi Rp64.909.523 per orang pada harga konstan 2010, dengan skor indeks naik dari 49,88 menjadi 51,13. Perbaikan ini menunjukkan peningkatan output ekonomi per tenaga kerja pada sektor jasa.

Sementara itu, indikator produktivitas pertanian tetap memiliki skor indeks 100,00, meskipun nilai produktivitas komoditas yang tercatat mengalami penurunan. Produktivitas padi turun dari 6,21 menjadi 6,12 ton/ha/tahun, sedangkan produktivitas perikanan budi daya turun dari 49,90 menjadi 37,43 ton/ha/tahun. Skor indeks tetap maksimum karena nilai kedua indikator masih melampaui target yang digunakan dalam penghitungan. Oleh sebab itu, skor maksimum perlu dibaca bersama nilai aktual agar penurunan produktivitas

tetap menjadi perhatian. Produktivitas kelapa sawit tidak dapat dianalisis karena tidak tersedia nilainya dalam tabel.

7.3.4. Perkembangan Pilar Sosial

Pilar sosial memiliki skor indeks tertinggi, meningkat dari 79,54 menjadi 80,99, atau bertambah 1,45 poin. Perkembangan seluruh indikator sosial menunjukkan arah yang positif, mencakup pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan pengangguran.

Rata-rata lama sekolah meningkat dari 9,45 tahun menjadi 9,54 tahun, dengan skor indeks naik dari 74,50 menjadi 75,40. Peningkatan ini menunjukkan bertambahnya lama pendidikan formal yang ditempuh penduduk, meskipun masih berada di bawah target 12 tahun dalam penghitungan indeks.

Angka harapan hidup meningkat dari 72,98 tahun menjadi 73,29 tahun, sehingga skor indeks naik dari 71,92 menjadi 73,16. Perkembangan tersebut menunjukkan perbaikan pada dimensi kesehatan berdasarkan indikator yang digunakan dalam data Indeks Ekonomi Hijau.

Tingkat kemiskinan menurun dari 4,25 persen menjadi 3,80 persen, atau berkurang 0,45 poin persentase, dengan skor indeks meningkat dari 71,72 menjadi 75,41. Tingkat pengangguran juga turun dari 2,69 persen menjadi 1,79 persen, atau berkurang 0,90 poin persentase. Skor indeks pengangguran tetap 100,00 karena nilainya pada kedua tahun sudah lebih rendah daripada target 4 persen yang digunakan dalam penghitungan.

7.3.5. Implikasi bagi Pembangunan Daerah

Perkembangan Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Bali menunjukkan kemajuan dalam pengintegrasian kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat ke dalam pembangunan ekonomi. Namun, capaian tersebut masih menghadapi tantangan berupa rendahnya bauran energi baru terbarukan, terbatasnya peningkatan tutupan hutan, kualitas air permukaan yang belum mencapai target, serta meningkatnya intensitas energi final.

Arah pembangunan selanjutnya perlu menekankan peningkatan efisiensi energi, perluasan pemanfaatan energi baru terbarukan, perlindungan dan pemulihan tutupan hutan, serta pengendalian pencemaran air. Pada dimensi ekonomi, penguatan produktivitas tenaga kerja, terutama sektor industri, perlu disertai pemantauan produktivitas pertanian berdasarkan nilai aktual. Sementara itu, kemajuan pada pilar sosial perlu dilanjutkan melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan, penurunan kemiskinan, serta perluasan kesempatan kerja yang produktif. Keterpaduan upaya tersebut diperlukan untuk meningkatkan capaian ekonomi hijau secara lebih seimbang pada ketiga pilar pembangunan.

7.4. INDEKS KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan adalah kondisi ketika kebutuhan pangan terpenuhi mulai dari tingkat negara hingga individu. Hal ini tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau, serta selaras dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Dengan terpenuhinya aspek-aspek tersebut, masyarakat dapat hidup sehat, aktif, produktif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Bali tahun 2020–2025, kondisi ketahanan pangan menunjukkan dua pola yang cukup berbeda. Indeks secara umum mengalami perbaikan dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan yang cukup tajam sehingga nilai indeks berada di bawah capaian lima tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020, Indeks Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Bali tercatat sebesar 84,54. Nilai tersebut kemudian sedikit menurun menjadi 83,82 pada tahun 2021, atau berkurang sebesar 0,72 poin. Setelah itu, kondisi ketahanan pangan kembali menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2022, indeks meningkat menjadi 85,00, atau bertambah 1,18 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbaikan semakin kuat pada tahun 2023, ketika indeks meningkat menjadi 87,65. Kenaikan sebesar 2,65 poin dibandingkan tahun 2022 merupakan peningkatan tahunan terbesar selama periode 2020–2024. Kemudian berlanjut pada tahun 2024, mengalami penurunan sebesar 1,83 poin, sehingga indeks mencapai 85,82.

Secara kumulatif, antara tahun 2020 dan 2024 Indeks Ketahanan Pangan Daerah Bali meningkat sebesar 1,28 poin, dari 84,54 menjadi 85,82. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sebelum tahun 2025, kondisi ketahanan pangan Bali secara agregat mengalami penguatan yang relatif konsisten setelah penurunan kecil pada tahun 2021.

Perubahan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2025, ketika indeks turun menjadi 79,89. Dibandingkan tahun 2024, terjadi penurunan sebesar 5,93 poin atau sekitar 9,45%. Nilai tahun 2025 juga lebih rendah 4,65 poin dibandingkan capaian tahun 2020. Dengan demikian, penurunan tahun 2025 tidak hanya mengoreksi peningkatan yang terjadi pada tahun sebelumnya, tetapi membawa indeks ke posisi terendah dalam periode 2020–2025.

Tabel 7.3.
Indeks Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Bali tahun 2020–2025

Tahun	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Perubahan (poin)
2020	84,54	–
2021	83,82	-0,72
2022	85,00	+1,18
2023	87,65	+2,65
2024	85,82	-1,83
2025	79,89	-5,93

Sumber: RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dan Satu Data Indonesia Provinsi Bali

Penurunan pada tahun 2025 perlu menjadi perhatian dalam evaluasi pembangunan daerah. Namun, berdasarkan data indeks agregat saja, belum dapat ditentukan faktor spesifik yang menyebabkan penurunan tersebut. Untuk menjelaskan penyebabnya secara lebih tepat diperlukan penelaahan terhadap metodologi dan komponen pembentuk indeks pada tahun 2025, misalnya aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan atau akses pangan, pemanfaatan pangan, kondisi sosial ekonomi rumah tangga, maupun indikator lain yang digunakan dalam penghitungan indeks. Hal ini juga penting untuk memastikan apakah terdapat perubahan metodologi atau sumber data antara tahun 2024 dan 2025.

Dalam perspektif pembangunan, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan perlu dipandang sebagai sistem yang tidak hanya berkaitan dengan besarnya produksi pangan. Ketahanan pangan juga dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat memperoleh pangan yang cukup dan terjangkau, kelancaran distribusi, stabilitas harga, daya beli, kualitas konsumsi, serta ketahanan sistem pangan terhadap gangguan ekonomi, iklim, dan bencana. Oleh karena itu, penurunan indeks pada tahun 2025 dapat dijadikan sinyal untuk memperkuat identifikasi wilayah, kelompok masyarakat, serta komponen ketahanan pangan yang memerlukan intervensi lebih besar.

7.5. KETAHANAN DAN KONSUMSI ENERGI

Pemulihan konsumsi listrik di Provinsi Bali pascapandemi menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat dan perubahan struktur penggunaan energi. Setelah sempat menurun akibat pembatasan aktivitas, konsumsi listrik kembali meningkat seiring bangkitnya pariwisata dan percepatan digitalisasi.

kondisi ketahanan energi Provinsi Bali tahun 2025 dapat dilihat dari sisi cakupan pelanggan listrik, struktur pemanfaatan energi listrik, kapasitas daya terpasang, produksi listrik, serta distribusi konsumsi antarwilayah pelayanan. Data menunjukkan

bahwa sistem kelistrikan Bali telah melayani hampir 1,90 juta pelanggan, dengan produksi listrik sebesar 8,12 juta MWh dan listrik terjual sebesar 7,76 juta MWh. Namun, distribusi kapasitas dan pemanfaatannya masih sangat terkonsentrasi di wilayah Bali Selatan.

Jumlah pelanggan listrik di Provinsi Bali tahun 2025 mencapai 1.903.494 pelanggan. Sebagian besar merupakan pelanggan rumah tangga sebanyak 1.589.768 pelanggan, atau sekitar 83,52% dari seluruh pelanggan. Pelanggan bisnis berada pada urutan kedua sebanyak 245.175 pelanggan atau sekitar 12,88%, sedangkan pelanggan sosial sebanyak 48.345 pelanggan atau sekitar 2,54%. Selebihnya terdiri atas pelanggan publik, curah, industri, dan layanan khusus dengan proporsi relatif kecil.

Secara kewilayahan, jumlah pelanggan terbesar berada di Kota Denpasar sebanyak 447.155 pelanggan, disusul Kabupaten Badung sebanyak 378.774 pelanggan, Buleleng 243.642 pelanggan, Gianyar 215.110 pelanggan, dan Tabanan 178.095 pelanggan. Sementara jumlah pelanggan relatif paling sedikit terdapat di Kabupaten Klungkung sebanyak 77.006 pelanggan dan Bangli sebanyak 79.020 pelanggan. Tingginya jumlah pelanggan di Denpasar dan Badung mencerminkan besarnya konsentrasi penduduk, kegiatan perkotaan, perdagangan, jasa, dan aktivitas pariwisata di Bali Selatan.

Dari sisi kapasitas sistem, daya terpasang pada area pelayanan tegangan rendah di Bali mencapai 5.438 MW. Sebagian besar terkonsentrasi di Bali Selatan sebesar 3.670 MW atau sekitar 67,49%, sedangkan Bali Timur memiliki 1.136 MW atau 20,89%, dan Bali Utara 632 MW atau 11,62%. Struktur ini memperlihatkan kuatnya konsentrasi kapasitas kelistrikan pada kawasan selatan Bali.

Pola yang sama terlihat pada produksi listrik. Dari total 8.116.399 MWh listrik yang diproduksi, sebanyak 5.824.654 MWh atau sekitar 71,76% berasal dari area pelayanan Bali Selatan. Bali Timur menghasilkan 1.495.505 MWh atau sekitar 18,43%, sedangkan Bali Utara sebesar 796.240 MWh atau sekitar 9,81%. Dengan demikian, sistem kelistrikan Bali secara operasional sangat bertumpu pada wilayah Bali Selatan.

Listrik yang terjual selama tahun 2025 mencapai 7.758.002 MWh. Sekitar 71,96% penjualan listrik terjadi di Bali Selatan, kemudian 18,14% di Bali Timur dan 9,90% di Bali Utara. Hal ini menunjukkan bahwa pusat permintaan listrik terbesar juga berada di Bali Selatan, sejalan dengan konsentrasi penduduk, aktivitas ekonomi, fasilitas pariwisata, dan pusat pelayanan.

Jika dibandingkan antara produksi dan listrik terjual, terdapat selisih sekitar 358.397 MWh, atau sekitar 4,42% dari total produksi. Namun, selisih ini tidak dapat langsung disebut sebagai kehilangan energi atau losses hanya dari data tersebut, karena dapat mencakup pemakaian sendiri, kebutuhan sistem, pencatatan, maupun faktor teknis lainnya.

Dari sisi jenis pelanggan, struktur konsumsi listrik menunjukkan karakteristik yang menarik. Meskipun jumlah pelanggan rumah tangga mendominasi lebih dari 83% dari keseluruhan pelanggan, konsumsi listrik terbesar justru berasal dari sektor bisnis sebesar 3.603.543 MWh atau sekitar 46,45% dari total listrik terjual. Konsumsi rumah tangga sedikit lebih rendah, yaitu 3.436.530 MWh atau sekitar 44,30%.

Besarnya konsumsi sektor bisnis mencerminkan struktur ekonomi Bali yang sangat kuat pada kegiatan perdagangan, jasa, akomodasi, makanan dan minuman, serta aktivitas pariwisata. Sementara itu, sektor industri menggunakan sekitar 241.314 MWh atau 3,11%, pelanggan sosial 260.089 MWh atau 3,35%, pelanggan publik 158.217 MWh atau 2,04%, layanan khusus 57.401 MWh atau 0,74%, dan pelanggan curah 908 MWh.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan energi Bali tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga sangat berkaitan dengan keberlangsungan sektor jasa dan pariwisata. Gangguan pasokan listrik pada wilayah Bali Selatan berpotensi memberikan dampak ekonomi yang cukup besar karena wilayah ini menyerap hampir tiga perempat konsumsi listrik Bali.

Dari perspektif ketahanan energi, terdapat beberapa hal penting yang dapat dicermati. Pertama, besarnya jumlah pelanggan dan produksi listrik menunjukkan bahwa sistem kelistrikan Bali telah memiliki basis pelayanan yang luas. Kedua, terdapat konsentrasi kapasitas dan konsumsi yang sangat tinggi di Bali Selatan, sehingga aspek keandalan jaringan, redundansi pasokan, dan kemampuan sistem menghadapi gangguan menjadi sangat penting. Ketiga, dominasi konsumsi sektor bisnis menjadikan kesinambungan pasokan listrik sebagai salah satu faktor strategis dalam menjaga aktivitas ekonomi Bali.

Selain itu, data yang tersedia menggambarkan kondisi dari sisi ketersediaan dan penggunaan listrik, tetapi belum cukup untuk menilai ketahanan energi secara menyeluruh. Penilaian yang lebih lengkap perlu mencakup sumber energi primer, ketergantungan terhadap pasokan dari luar Bali, bauran energi terbarukan, cadangan daya, beban puncak, keandalan sistem, durasi gangguan, serta kemampuan sistem menghadapi bencana atau gangguan pasokan.

Tabel 7.4.

Jumlah Pelanggan Listrik Berdasarkan Jenis Pelanggan di Kota/Kabupaten Provinsi Bali Tahun 2025

Kabupaten/Kota *Regency/ Municipality*	Jenis Pelanggan / *Type of Customers*							
	Sosial *Social*	Rumah tangga *Household*	Bisnis *Bussines*	Industri *Industry*	Publik *Public*	Curah *Bulk*	Layanan Khusus *Special Services*	Jumlah *Total*
Jembrana	3 886	117 587	16 383	172	813	597	3	139 441
Tabanan	5 713	150 788	20 004	204	1 010	368	8	178 095
Badung	6 096	298 515	69 906	247	2 460	1 483	67	378 774
Gianyar	5 304	176 757	31 067	176	1 128	660	18	215 110
Klungkung	3 792	59 730	12 515	51	659	255	4	77 006
Bangli	3 691	59 364	15 183	85	636	57	4	79 020
Karangasem	6 950	125 356	11 285	122	1 434	100	4	145 251
Buleleng	7 752	222 135	11 728	194	1 337	491	5	243 642
Denpasar	5 161	379 536	57 104	354	2 052	2 891	57	447 155
Jumlah/*Total* :	**48 345**	**1 589 768**	**245 175**	**1 605**	**11 529**	**6 902**	**170**	**1 903 494**

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2026

Tabel 7.5.

Daya Terpasang, Produksi, dan Listrik Terjual Menurut Jenis Pelanggan dan Area Pelayanan di Provinsi Bali Tahun 2025

Uraian *Description*	Areal Pelayanan Tegangan Rendah / *Low Voltage Service A*			
	Bali Selatan *South Bali*	Bali Timur *East Bali*	Bali Utara *North Bali*	Jumlah *Total*
1. Daya Terpasang / *Installed Electricity Power (MW)*	**3 670**	**1 136**	**632**	**5 438**
2. Produksi Listrik / *Production of Electricity (MWh)*	**5 824 654**	**1 495 505**	**796 240**	**8 116 399**
3. Listrik Terjual Menurut Jenis Pelanggan *Electricity Sold by Type of Customers (MWh) :*	**5 582 837**	**1 407 299**	**767 866**	**7 758 002**
3.1. Sosial / *Social*	171 347	53 560	35 182	260 089
3.2. Rumahtangga / *Household*	2 366 027	654 129	416 374	3 436 530
3.3. Bisnis / *Bussines*	2 782 250	627 994	193 298	3 603 543
3.4. Industri / *Industries*	134 748	31 012	75 554	241 314
3.5. Publik / *Public*	84 316	35 631	38 270	158 217
3.6. Layanan Khusus / *Special Services*	43 271	4 945	9 185	57 401
3.7. Curah / *Bulk*	878	28	2	908

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2026

7.6. KONDISI KEPARIWISATAAN DAERAH

7.6.1. Kontribusi Sektor Pariwisata Pada Ekonomi Makro Bali

Berdasarkan perkembangan kontribusi Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Bali tahun 2020–2025, terlihat pola penurunan pada awal periode yang kemudian diikuti pemulihan dan penguatan secara konsisten hingga tahun 2025.

Pada tahun 2020, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Bali tercatat sebesar 18,33%. Pada tahun 2021, kontribusinya menurun menjadi 16,60%, atau berkurang sebesar 1,73 poin persentase. Penurunan ini mencerminkan melemahnya aktivitas pada sektor yang sangat terkait dengan pariwisata, akomodasi, restoran, dan jasa makan minum pada periode tersebut.

Memasuki tahun 2022, kontribusinya mulai meningkat menjadi 17,98%, atau naik sebesar 1,38 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Tren pemulihan berlanjut lebih kuat pada tahun 2023, ketika kontribusinya meningkat menjadi 19,93%. Kenaikan sebesar 1,95 poin persentase ini menunjukkan semakin kuatnya pemulihan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan penyediaan akomodasi dan makan minum.

Pada tahun 2024, kontribusi sektor ini kembali meningkat menjadi 21,42%, dan pada tahun 2025 mencapai 22,27%. Dengan demikian, tahun 2025 menjadi capaian tertinggi selama periode 2020–2025. Dibandingkan tahun 2024, kontribusi meningkat sebesar 0,85 poin persentase, sedangkan dibandingkan tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 3,94 poin persentase.

Secara keseluruhan, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu penopang utama struktur perekonomian Bali. Setelah mengalami tekanan pada tahun 2021, kontribusi sektor ini meningkat secara konsisten selama empat tahun berturut-turut hingga mencapai lebih dari seperlima total PDRB Bali pada tahun 2025.

Peningkatan kontribusi tersebut juga menggambarkan kembali menguatnya aktivitas yang berkaitan dengan sektor pariwisata, terutama hotel, restoran, jasa boga, dan berbagai usaha pendukung konsumsi wisatawan maupun masyarakat. Karena keterkaitannya yang kuat dengan pariwisata, perkembangan sektor ini memiliki efek luas terhadap perdagangan, transportasi, tenaga kerja, UMKM, dan berbagai aktivitas jasa lainnya.

Namun, besarnya kontribusi sektor ini juga menunjukkan bahwa struktur ekonomi Bali masih memiliki ketergantungan yang cukup kuat terhadap aktivitas pariwisata dan jasa terkait. Oleh karena itu, penguatan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum perlu tetap diimbangi dengan pengembangan

sektor-sektor ekonomi lainnya agar struktur ekonomi Bali menjadi lebih beragam dan lebih tangguh terhadap berbagai guncangan eksternal.

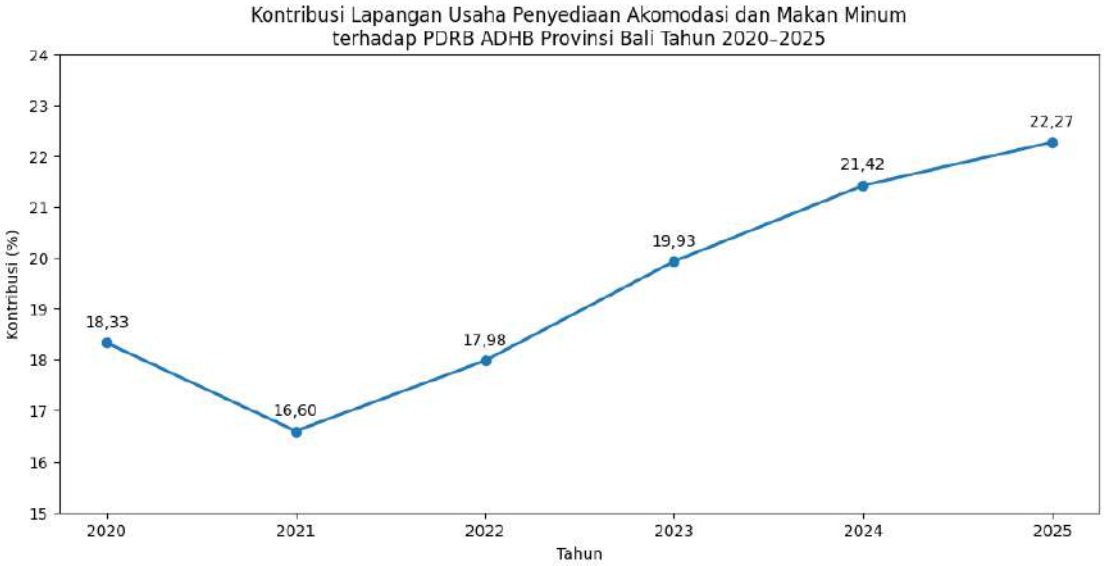

Gambar 7.2.
Grafik Perkembangan Kontribusi Sektor Pariwisata Berdasarkan Kontribusi Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB ADHB Provinsi Bali Tahun 2020–2025

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2026

7.6.2. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, perkembangan kunjungan wisatawan domestik ke Provinsi Bali selama periode 2021–2025 menunjukkan pemulihan yang sangat kuat pada 2022–2023, mencapai puncak total tahunan pada 2024, kemudian mengalami koreksi pada 2025. Meski menurun pada tahun terakhir, tingkat kunjungan 2025 masih jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi 2021 dan 2022.

Pada tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan domestik tercatat sebanyak 4.301.592 kunjungan. Jumlah tersebut kemudian melonjak menjadi 8.052.974 kunjungan pada 2022, atau meningkat sekitar 87,2%. Pertumbuhan masih berlanjut pada 2023 menjadi 9.877.911 kunjungan, naik sekitar 22,7% dibandingkan 2022. Pada 2024, kunjungan mencapai 10.120.786, yang merupakan capaian tertinggi selama periode 2021–2025, meskipun pertumbuhannya mulai melambat menjadi sekitar 2,5%.

Pada tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan domestik tercatat sebanyak 9.612.511 kunjungan, menurun sekitar 5,0% dibandingkan 2024. Walaupun mengalami koreksi, jumlah tersebut masih lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2021. Dengan demikian, penurunan pada 2025 lebih mencerminkan pelemahan

dari level kunjungan yang sudah relatif tinggi dibandingkan kembali ke kondisi awal periode.

Tabel 7.6.
Jumlah dan Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Domestik Ke Provinsi Bali Tahun 2021–2025

Tahun	Jumlah Kunjungan (Jiwa)	Pertumbuhan Tahunan (%)
2021	4.301.592	–
2022	8.052.974	87,20%
2023	9.877.911	22,70%
2024	10.120.786	2,50%
2025	9.612.511	-5,00%

Sumber : Olahan Data BPS Provinsi Bali Tahun 2026

Dari pola bulanan terlihat bahwa pergerakan wisatawan domestik di Bali cukup fluktuatif dan memperlihatkan adanya musiman kunjungan. Pada 2021, jumlah kunjungan terendah terjadi pada Juli sebanyak 166.718 kunjungan, sedangkan yang tertinggi terjadi pada Desember sebanyak 629.590 kunjungan. Pada 2022, jumlah terendah terdapat pada Februari sebesar 389.690 kunjungan, sedangkan tertinggi pada Mei sebanyak 960.692 kunjungan.

Pada tahun 2023, kunjungan relatif lebih stabil pada kisaran 600 ribu hingga 900 ribu kunjungan per bulan, sebelum meningkat sangat tinggi pada Desember menjadi 1.204.902 kunjungan. Angka ini merupakan jumlah kunjungan bulanan tertinggi sepanjang periode 2021–2025 dalam data yang tersedia.

Tahun 2024 menunjukkan pola yang berbeda. Puncak kunjungan terjadi pada April sebanyak 1.124.781 kunjungan, sedangkan jumlah terendah terjadi pada Maret sebesar 612.742 kunjungan. Setelah lonjakan April, jumlah kunjungan relatif stabil pada kisaran 700–900 ribu per bulan hingga akhir tahun.

Pada 2025, pola kunjungan juga menunjukkan puncak yang sangat tinggi pada April, yaitu 1.127.649 kunjungan. Angka tersebut sedikit lebih tinggi daripada April 2024. Januari juga mencatat jumlah yang cukup tinggi sebesar 902.688 kunjungan. Setelah April, jumlah kunjungan cenderung berfluktuasi dan menurun hingga Oktober yang mencapai 652.753 kunjungan, sebelum kembali meningkat pada November dan Desember. Jumlah terendah tahun 2025 terjadi pada Maret sebesar 633.380 kunjungan.

Tingginya kunjungan pada bulan-bulan tertentu menunjukkan adanya pola musiman yang cukup kuat. Lonjakan pada April, pertengahan tahun, maupun akhir tahun dapat berkaitan dengan periode libur panjang dan mobilitas wisata, meskipun penyebab spesifiknya perlu dikonfirmasi dengan kalender hari libur

dan data perjalanan pada masing-masing tahun. Pola tersebut penting bagi pengelolaan destinasi karena konsentrasi kunjungan dalam periode tertentu berimplikasi terhadap kebutuhan transportasi, akomodasi, pengelolaan kemacetan, kapasitas daya tarik wisata, serta pelayanan publik.

Perkembangan 2021–2025 secara keseluruhan juga menunjukkan bahwa pasar wisatawan domestik memiliki peranan penting dalam menopang aktivitas pariwisata Bali. Kenaikan yang sangat besar pada 2022 dan 2023 menunjukkan ekspansi kembali mobilitas wisata domestik, sedangkan capaian lebih dari 10 juta kunjungan pada 2024 menandai tingkat aktivitas yang sangat tinggi. Koreksi pada 2025 perlu dicermati, tetapi belum menunjukkan pelemahan struktural karena tingkat kunjungannya masih berada pada level tinggi.

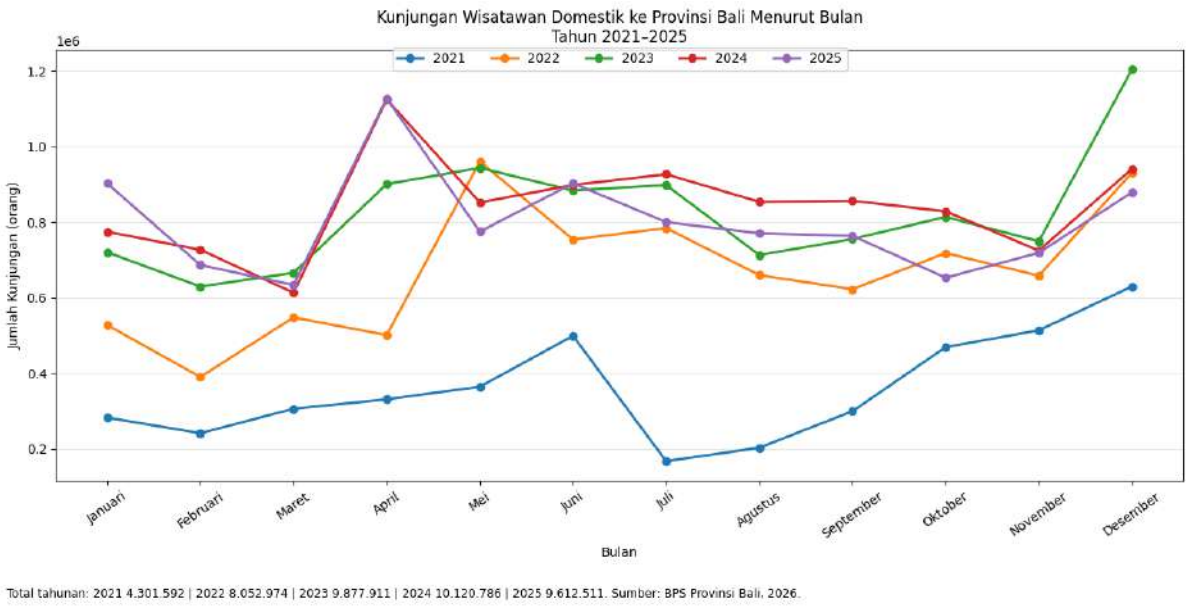

Gambar 7.3.
Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantara yang Mengunjungi Bali Berdasarkan Bulan Kunjungan Tahun 2020–2025

Sumber: Hasil Olah Data BPS Provinsi Bali, 2026

Tabel 7.7.
Banyaknya Wisatawan Domestik yang Datang ke Bali per Bulan, Tahun 2021–2025

Bulan	2021	2022	2023	2024	2025
Januari	282.248	527.447	720.164	774.529	902.688
Februari	240.608	389.690	629.282	726.744	686.283
Maret	305.579	547.726	665.751	612.742	633.380
April	330.593	500.740	900.880	1.124.781	1.127.649
Mei	363.959	960.692	943.713	852.253	774.930
Juni	498.852	753.907	883.793	898.335	902.879
Juli	166.718	784.205	898.260	926.975	800.121

Bulan	2021	2022	2023	2024	2025
Agustus	202.187	659.567	712.860	853.713	770.278
September	298.950	622.068	755.293	856.370	763.690
Oktober	468.826	718.066	813.745	828.647	652.753
November	513.482	657.949	749.268	724.560	718.679
Desember	629.590	930.917	1.204.902	941.137	879.181
Jumlah	**4.301.592**	**8.052.974**	**9.877.911**	**10.120.786**	**9.612.511**

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2026

Selain wisatawan nusantara, Wisatawan mancanegara juga memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan ekonomi daerah. Kehadiran mereka membawa pemasukan langsung melalui pengeluaran untuk hotel, makanan, transportasi, belanja, dan aktivitas wisata. Dampak ini meningkatkan perputaran uang di masyarakat dan membuka banyak peluang kerja, terutama pada sektor jasa seperti perhotelan, restoran, pemandu wisata, transportasi, hingga industri kreatif.

Berdasarkan data kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Bali selama periode 2021–2025, terlihat proses pemulihan yang sangat kuat setelah periode 2021, kemudian diikuti pertumbuhan yang semakin stabil hingga mencapai tingkat kunjungan tertinggi pada tahun 2025.

Pada tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara hanya tercatat 51 kunjungan. Angka yang sangat rendah ini menunjukkan kondisi yang belum normal. Memasuki 2022, jumlah kunjungan meningkat sangat tajam menjadi 2.155.747 kunjungan. Peningkatan tersebut menandai awal pemulihan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali.

Pemulihan berlanjut pada tahun 2023, ketika jumlah kunjungan mencapai 5.273.258, atau meningkat sekitar 144,61% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2024, jumlah kunjungan kembali meningkat menjadi 6.333.360, atau bertambah sekitar 20,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2025 dengan total 6.948.754 kunjungan, meningkat sekitar 9,72% dibandingkan 2024. Dengan demikian, tahun 2025 menjadi capaian tertinggi selama periode 2021–2025.

Tabel 7.8.
Jumlah dan Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Provinsi Bali
Tahun 2021–2025

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisman (Jiwa)	Pertumbuhan Tahunan
2021	51	–
2022	2.155.747	sangat tinggi*
2023	5.273.258	144,61%

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisman (Jiwa)	Pertumbuhan Tahunan
2024	6.333.360	20,10%
2025	**6.948.754**	**9,72%**

Sumber: Olahan Data BPS Provinsi Bali Tahun 2026

Jika dilihat dari pola bulanan, tahun 2022 memperlihatkan proses pemulihan yang berlangsung bertahap. Pada Januari hanya tercatat 3 kunjungan, kemudian meningkat menjadi 1.310 kunjungan pada Februari, 14.620 pada Maret, dan terus meningkat hingga mencapai 377.276 kunjungan pada Desember. Pola ini menunjukkan pemulihan mobilitas internasional yang semakin kuat sepanjang tahun.

Pada tahun 2023, pola kunjungan sudah jauh lebih stabil. Jumlah wisatawan berada pada kisaran sekitar 323 ribu hingga 541 ribu kunjungan per bulan. Kunjungan tertinggi terjadi pada Juli sebesar 541.353, sedangkan terendah terdapat pada Februari sebesar 323.510. Tingginya kunjungan pada Juli dan Agustus menunjukkan mulai terbentuk kembali pola musim puncak kunjungan wisatawan internasional.

Pada 2024, tingkat kunjungan meningkat hampir di seluruh bulan dibandingkan 2023. Puncak kunjungan terjadi pada Juli sebesar 625.665, disusul Agustus sebesar 616.641 dan September sebesar 593.909. Sementara jumlah terendah terjadi pada Januari sebesar 420.037. Pola tersebut menunjukkan konsentrasi kunjungan yang cukup kuat pada pertengahan tahun.

Pada 2025, jumlah wisatawan kembali meningkat dan mencapai tingkat bulanan tertinggi sepanjang periode pengamatan. Puncak kunjungan terjadi pada Juli sebesar 697.107, disusul Agustus sebesar 682.866 dan Juni sebesar 637.868. April dan Mei juga mencatat kunjungan yang tinggi, masing-masing 591.221 dan 602.213. Jumlah terendah pada 2025 terjadi pada Februari sebesar 450.697, namun angka tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan beberapa bulan pada tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, pola 2023–2025 menunjukkan bahwa musim kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali cenderung menguat pada pertengahan tahun, terutama Juni–September, kemudian mengalami penurunan pada akhir kuartal IV sebelum kembali meningkat pada Desember. Pola musiman ini penting dalam pengelolaan pariwisata karena berkaitan dengan kapasitas akomodasi, transportasi, kepadatan destinasi, kebutuhan pelayanan publik, dan manajemen lingkungan pada periode puncak.

Dari perspektif pembangunan ekonomi, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara memberikan dampak penting terhadap sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi, perdagangan, ekonomi kreatif, serta jasa lainnya. Pertumbuhan kunjungan dari 5,27 juta pada 2023 menjadi 6,95 juta

pada 2025, atau naik sekitar 31,77% dalam dua tahun, menunjukkan semakin kuatnya kembali permintaan pariwisata internasional terhadap Bali.

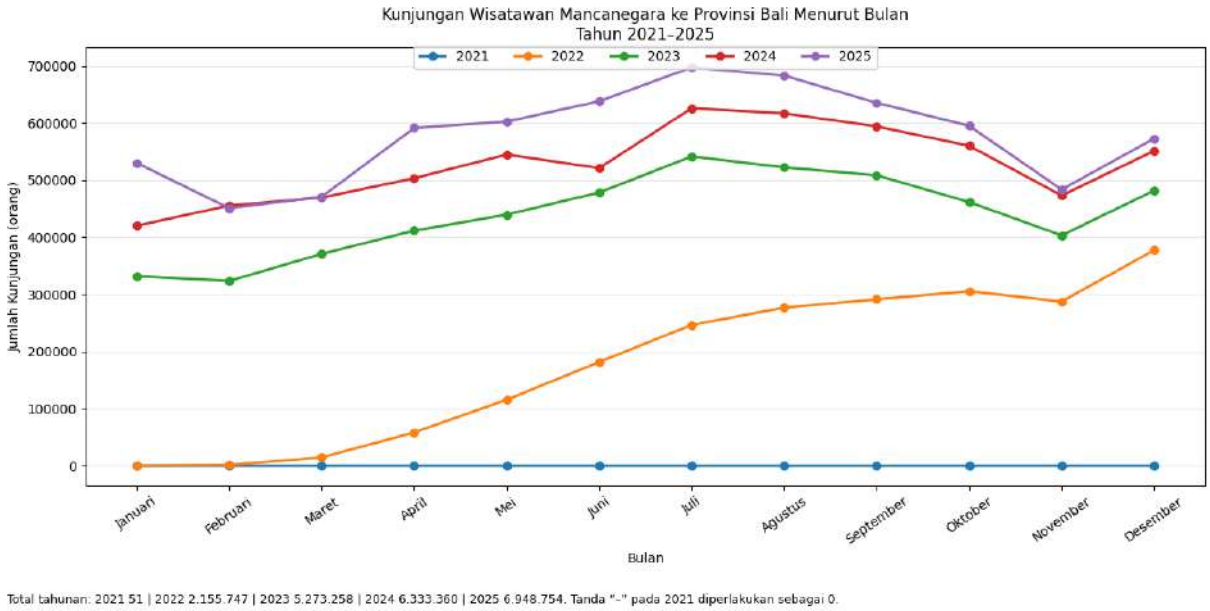

Gambar 7.4.
Grafik Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang Datang Ke Provinsi Bali Tahun 2021–2025

Sumber: Hasil Olah Data BPS Provinsi Bali, 2026

Tabel 7.9.
Banyaknya Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Provinsi Bali Berdasarkan Bulan Kunjungan Tahun 2021–2025

Bulan	2021	2022	2023	2024	2025
Januari	10	3	331.785	420.037	529.897
Februari	12	1.310	323.510	455.277	450.697
Maret	3	14.620	370.695	469.227	470.851
April	9	58.335	411.510	503.194	591.221
Mei	8	115.611	439.475	544.601	602.213
Juni	1	181.625	478.198	520.898	637.868
Juli	–	246.504	541.353	625.665	697.107
Agustus	–	276.659	522.141	616.641	682.866
September	–	291.162	508.350	593.909	635.149
Oktober	2	305.244	461.441	559.911	594.853
November	6	287.398	403.154	472.900	483.364
Desember	–	377.276	481.646	551.100	572.668
Jumlah	**51**	**2.155.747**	**5.273.258**	**6.333.360**	**6.948.754**

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2026

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Bali menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan yang sangat kuat selama periode 2021–2025. Setelah hanya tercatat 51 kunjungan pada tahun 2021, jumlah kunjungan meningkat menjadi 2,16 juta pada 2022, 5,27 juta pada 2023, 6,33 juta pada 2024, dan mencapai 6,95 juta kunjungan pada 2025. Pertumbuhan pada 2025 mencapai sekitar 9,72% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara bulanan, pola kunjungan menunjukkan konsentrasi pada pertengahan tahun, terutama periode Juni–September, dengan puncak kunjungan tahun 2025 terjadi pada Juli sebesar 697.107 kunjungan. Perkembangan ini menunjukkan semakin kuatnya pemulihan pasar wisatawan internasional dan menegaskan kembali peran strategis pariwisata mancanegara dalam perekonomian Bali.

7.6.3. Tingkat Penghunian Kamar

Tingkat hunian kamar adalah ukuran seberapa banyak kamar hotel/akomodasi yang terisi makin tinggi, makin baik kondisi pariwisata dan ekonomi pendukungnya.

Berdasarkan data Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang di Provinsi Bali tahun 2025, tingkat okupansi hotel menunjukkan pola yang cukup dinamis sepanjang tahun. Secara umum, TPK seluruh kelas hotel bintang mengalami penurunan pada awal tahun, mencapai titik terendah pada Maret, kemudian meningkat kuat hingga mencapai puncak pada Agustus, sebelum kembali melemah pada beberapa bulan terakhir tahun 2025.

Untuk seluruh kelas hotel bintang, TPK pada Januari tercatat sebesar 60,28%, kemudian menurun menjadi 51,62% pada Februari dan mencapai titik terendah sebesar 46,61% pada Maret. Setelah itu, tingkat hunian kembali meningkat menjadi 57,23% pada April, 58,10% pada Mei, dan 64,66% pada Juni. Tren positif berlanjut pada Juli sebesar 67,75% dan mencapai nilai tertinggi pada Agustus sebesar 69,54%.

Pada September, TPK seluruh kelas masih berada pada tingkat tinggi sebesar 68,17%, kemudian menurun menjadi 64,57% pada Oktober dan 57,97% pada November. Pada Desember, TPK kembali meningkat menjadi 60,88%. Pola tersebut menunjukkan adanya musiman yang cukup kuat, dengan okupansi hotel cenderung meningkat pada pertengahan tahun dan kembali menguat pada akhir tahun.

Apabila dihitung secara sederhana dari rata-rata bulanan, TPK seluruh kelas selama 2025 berada pada kisaran 60,62%. Angka ini merupakan rata-rata aritmetika dari data bulanan dan tidak selalu identik dengan angka TPK tahunan resmi apabila perhitungan resmi menggunakan pembobotan berdasarkan jumlah kamar tersedia pada masing-masing bulan.

a. Perkembangan Menurut Kelas Hotel

Hotel bintang 5 menunjukkan tingkat hunian yang relatif kuat terutama pada pertengahan hingga kuartal III. TPK tercatat sebesar 60,00% pada Januari, kemudian turun menjadi 48,59% pada Februari dan 46,71% pada Maret. Setelah itu, okupansi meningkat tajam menjadi 68,92% pada Juni, 71,01% pada Juli, dan mencapai 73,24% pada Agustus dan September, yang merupakan nilai tertinggi di antara seluruh kelas hotel dalam data tahun 2025. Secara sederhana, rata-rata bulanan hotel bintang 5 mencapai sekitar 62,60%, tertinggi dibandingkan kelas lainnya.

Hotel bintang 4 memiliki pola yang relatif serupa. TPK turun dari 60,39% pada Januari menjadi 46,97% pada Maret, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 68,09% pada Agustus. Setelah itu, TPK menurun hingga 57,22% pada Desember. Rata-rata bulanan sederhana hotel bintang 4 sekitar 59,47%.

Pada hotel bintang 3, TPK terendah tercatat pada Maret sebesar 44,10%, yang juga merupakan salah satu nilai terendah dari seluruh kelas hotel selama 2025. Setelah Maret, tingkat hunian meningkat hingga mencapai 65,73% pada Agustus, kemudian menurun menjadi 56,60% pada November sebelum kembali naik menjadi 60,97% pada Desember. Rata-rata bulanan sederhana kelas ini sekitar 58,67%.

Hotel bintang 2 menunjukkan fluktuasi yang relatif lebih moderat. TPK berkisar dari 48,69% pada Maret hingga 64,13% pada Juni dan Agustus. Pada Desember tingkat hunian masih cukup baik sebesar 61,99%. Rata-rata bulanan sederhananya berada pada kisaran 59,11%.

Sementara itu, hotel bintang 1 menunjukkan pola yang agak berbeda. Pada Januari TPK mencapai 67,22%, lebih tinggi dibandingkan kelas lainnya pada bulan tersebut. Setelah turun pada Februari dan Maret, TPK kembali meningkat dan mencapai 69,92% pada September. Namun, pada Desember turun cukup tajam menjadi 50,92%. Rata-rata bulanan sederhana kelas ini sekitar 61,63%.

b. Pola Musiman Okupansi Hotel

Data tahun 2025 memperlihatkan bahwa periode Juni–September menjadi fase dengan tingkat hunian paling tinggi. Pada periode tersebut, TPK seluruh kelas berada pada kisaran 64,66–69,54%. Sebaliknya, periode Februari–Maret menunjukkan tingkat hunian paling rendah, dengan Maret menjadi titik terendah hampir pada seluruh kelas hotel.

Pola ini sejalan dengan karakter sektor pariwisata Bali yang memiliki musim kunjungan tertentu. Tingginya okupansi pada pertengahan tahun berkaitan dengan tingginya aktivitas perjalanan wisata pada periode liburan dan musim kunjungan internasional, sedangkan penurunan pada awal tahun

menunjukkan fase permintaan yang lebih rendah. Namun, untuk menjelaskan penyebab secara pasti tetap diperlukan pembandingan dengan data kunjungan wisatawan, kalender libur, serta perkembangan event dan kegiatan pariwisata.

c. Implikasi bagi sektor pariwisata

Secara umum, TPK hotel bintang di Bali tahun 2025 menunjukkan bahwa permintaan terhadap akomodasi berada pada tingkat yang cukup kuat, terutama pada pertengahan tahun. Tingginya tingkat okupansi pada hotel bintang 5 menunjukkan kuatnya permintaan pada segmen akomodasi kelas atas, sementara hotel bintang 1–4 juga menunjukkan tingkat pemanfaatan yang relatif baik.

Namun, fluktuasi antarbulan menunjukkan bahwa industri perhotelan masih menghadapi tantangan dalam menjaga tingkat hunian secara lebih stabil sepanjang tahun. Penguatan event, wisata MICE, promosi pada low season, diversifikasi produk wisata, dan penyebaran kunjungan ke luar periode puncak dapat menjadi strategi penting untuk meningkatkan utilisasi hotel secara lebih merata.

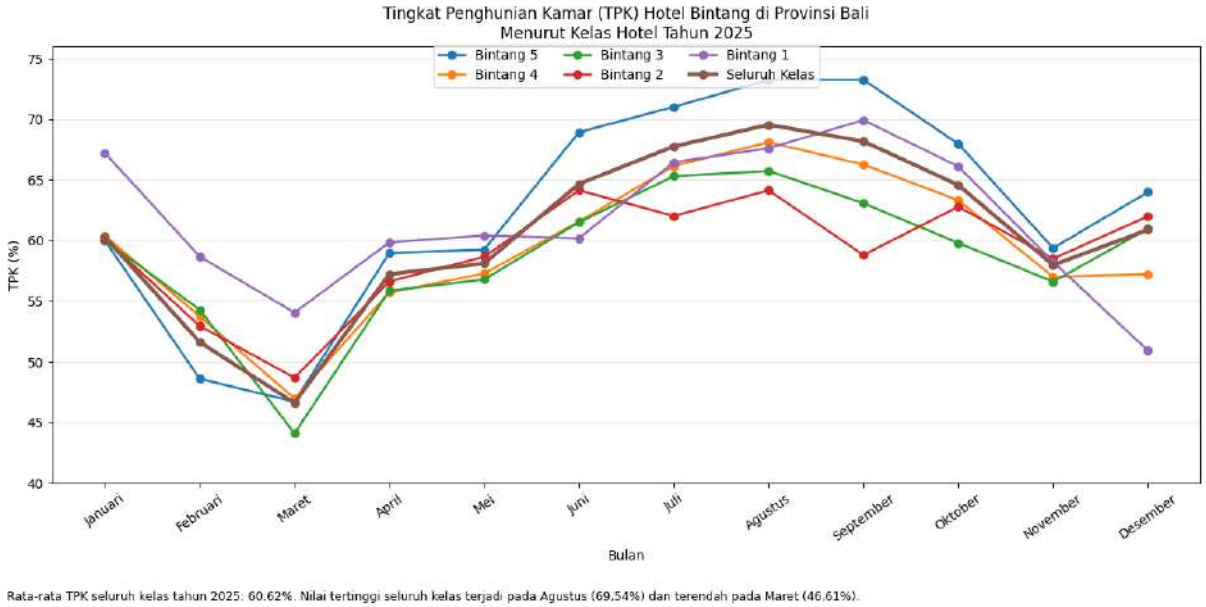

Gambar 7.5.
Grafik Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang di Provinsi Bali Berdasarkan Bulan Tahun 2025

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2026

Tabel 7.10.
Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang Menurut Bulan dan Kelas Hotel di Bali, 2025

Kelas Hotel Bintang	Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang Menurut Kelas di Provinsi Bali (Persen)											
	2025											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Bintang 5	60,00	48,59	46,71	58,97	59,24	68,92	71,01	73,24	73,24	67,97	59,37	63,98
Bintang 4	60,39	53,75	46,97	55,72	57,27	61,55	66,14	68,09	66,26	63,31	57	57,22
Bintang 3	60,00	54,29	44,10	55,86	56,78	61,50	65,30	65,73	63,07	59,79	56,60	60,97
Bintang 2	60,11	52,95	48,69	56,62	58,65	64,13	62,02	64,13	58,80	62,78	58,50	61,99
Bintang 1	67,22	58,67	54,05	59,84	60,41	60,18	66,45	67,60	69,92	66,10	58,24	50,92
Seluruh Kelas	**60,28**	**51,62**	**46,61**	**57,23**	**58,10**	**64,66**	**67,75**	**69,54**	**68,17**	**64,57**	**57,97**	**60,88**

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2026

Tingkat Penghunian Kamar hotel bintang di Provinsi Bali tahun 2025 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada pertengahan tahun. TPK seluruh kelas hotel tercatat sebesar 60,28% pada Januari, menurun hingga mencapai titik terendah sebesar 46,61% pada Maret, kemudian meningkat dan mencapai puncak sebesar 69,54% pada Agustus. Setelah itu, tingkat hunian menurun hingga 57,97% pada November sebelum kembali meningkat menjadi 60,88% pada Desember. Berdasarkan kelas hotel, tingkat hunian relatif tinggi terlihat pada hotel bintang 5, dengan puncak sebesar 73,24% pada Agustus dan September. Pola tersebut menunjukkan kuatnya faktor musiman dalam aktivitas perhotelan Bali, sehingga penguatan promosi dan diversifikasi kegiatan pariwisata di luar musim puncak menjadi penting untuk menjaga tingkat hunian yang lebih stabil sepanjang tahun.

7.6.4. Rata-rata Lama Menginap

a. Wisatawan Domestik

Berdasarkan data Rata-Rata Lama Menginap Tamu Domestik pada Hotel Bintang di Provinsi Bali tahun 2025, secara umum wisatawan domestik menginap sekitar 2–3 malam, dengan pola yang berbeda menurut kelas hotel dan bulan kunjungan. Untuk seluruh kelas hotel bintang, rata-rata sederhana bulanan selama 2025 berada pada kisaran 2,51 malam.

Pada tingkat seluruh kelas hotel, lama menginap tamu domestik pada Januari tercatat 2,52 malam, kemudian relatif stabil pada Februari sebesar 2,55 malam dan Maret 2,59 malam. Setelah itu terjadi penurunan pada April menjadi 2,43 malam dan mencapai titik terendah pada Mei sebesar 2,38 malam. Pada Juni dan Juli lama menginap kembali sedikit meningkat masing-masing menjadi 2,41 malam dan 2,42 malam.

Peningkatan yang lebih nyata terjadi pada Agustus, ketika rata-rata lama menginap seluruh kelas mencapai 2,66 malam, tertinggi sepanjang tahun 2025. Setelah itu, lama menginap berada pada 2,56 malam pada September, 2,48 malam pada Oktober, meningkat menjadi 2,61 malam pada November, kemudian kembali menjadi 2,48 malam pada Desember. Pola ini

menunjukkan bahwa lama tinggal wisatawan domestik cenderung relatif stabil, meskipun terdapat peningkatan pada beberapa periode tertentu.

Jika ditinjau menurut kelas hotel, hotel bintang 5 memiliki rata-rata lama menginap paling tinggi, dengan rata-rata sederhana sekitar 2,95 malam selama 2025. Lama menginap tertinggi terjadi pada Agustus sebesar 3,27 malam, disusul September sebesar 3,14 malam dan Mei sebesar 3,08 malam. Sementara itu, lama menginap terendah pada hotel bintang 5 terjadi pada Desember sebesar 2,62 malam. Pola ini menunjukkan bahwa tamu domestik pada hotel kelas atas cenderung memiliki durasi tinggal yang lebih panjang dibandingkan kelas hotel lainnya.

Pada hotel bintang 4, rata-rata lama menginap berada pada kisaran 2,53 malam. Lama menginap terendah tercatat pada Juni sebesar 2,27 malam, kemudian secara umum meningkat pada paruh kedua tahun hingga mencapai 2,76 malam pada Desember. Kondisi ini menunjukkan peningkatan durasi tinggal tamu domestik pada hotel bintang 4 menjelang akhir tahun.

Untuk hotel bintang 3, rata-rata lama menginap lebih rendah, yaitu sekitar 2,23 malam. Nilai tertinggi terjadi pada Januari sebesar 2,48 malam, sedangkan terendah pada Mei sebesar 2,02 malam. Sepanjang tahun, lama menginap pada kelas ini relatif stabil pada kisaran sekitar 2,1–2,4 malam.

Pada hotel bintang 2, rata-rata lama menginap sekitar 2,15 malam. Nilai tertinggi terjadi pada Maret sebesar 2,72 malam, sedangkan yang terendah terdapat pada September sebesar 1,97 malam. Hal ini menunjukkan bahwa tamu domestik pada hotel bintang 2 umumnya memiliki durasi menginap yang lebih pendek dibandingkan hotel bintang 4 dan 5.

Sementara itu, hotel bintang 1 menunjukkan fluktuasi yang cukup besar. Rata-rata sederhananya sekitar 2,43 malam, dengan lama menginap tertinggi pada Agustus sebesar 2,88 malam, diikuti Oktober sebesar 2,87 malam. Lama menginap terendah terjadi pada Juni sebesar 1,74 malam. Variasi ini menunjukkan pola kunjungan pada hotel bintang 1 relatif lebih tidak stabil dibandingkan beberapa kelas hotel lainnya.

Secara keseluruhan, data tahun 2025 menunjukkan adanya kecenderungan bahwa semakin tinggi kelas hotel, khususnya hotel bintang 5, semakin panjang rata-rata lama menginap tamu domestik. Hotel bintang 5 memiliki rata-rata sekitar 2,95 malam, lebih tinggi dibandingkan bintang 4 sebesar 2,53 malam, bintang 1 sebesar 2,43 malam, bintang 3 sebesar 2,23 malam, dan bintang 2 sebesar 2,15 malam. Namun, hubungan tersebut tidak sepenuhnya linier karena karakteristik perjalanan, tujuan kunjungan, harga, dan segmen wisatawan dapat berbeda pada setiap kelas hotel.

Dari perspektif pengembangan pariwisata, rata-rata lama menginap sekitar 2,5 malam menunjukkan masih adanya ruang untuk memperpanjang durasi tinggal wisatawan domestik di Bali. Upaya ini penting karena peningkatan

lama tinggal berpotensi memperbesar pengeluaran wisatawan pada akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, daya tarik wisata, ekonomi kreatif, serta berbagai layanan pendukung lainnya.

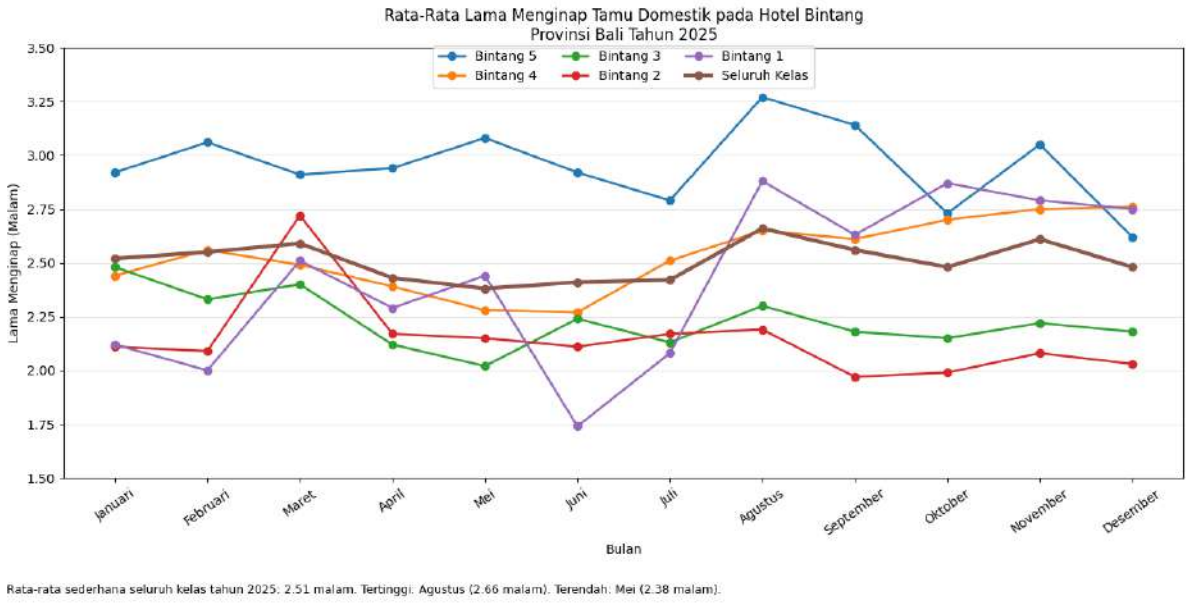

Gambar 7.6.
Grafik Rata-rata Lama Menginap Wisatawan Domestik di Hotel Berbintang Tahun 2025

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2026

Tabel 7.11.
Rata-rata Lama Menginap Tamu Domestik Pada Hotel Berbintang di Provinsi Tahun 2025

Kelas Hotel Bintang	Rata-Rata Lama Menginap Tamu Domestik pada Hotel Bintang Menurut Kelas dan Bulan di Provinsi Bali (Malam)											
	2025											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Bintang 5	2,92	3,06	2,91	2,94	3,08	2,92	2,79	3,27	3,14	2,73	3,05	2,62
Bintang 4	2,44	2,56	2,49	2,39	2,28	2,27	2,51	2,65	2,61	2,7	2,75	2,76
Bintang 3	2,48	2,33	2,4	2,12	2,02	2,24	2,13	2,3	2,18	2,15	2,22	2,18
Bintang 2	2,11	2,09	2,72	2,17	2,15	2,11	2,17	2,19	1,97	1,99	2,08	2,03
Bintang 1	2,12	2	2,51	2,29	2,44	1,74	2,08	2,88	2,63	2,87	2,79	2,75
Seluruh Kelas	2,52	2,55	2,59	2,43	2,38	2,41	2,42	2,66	2,56	2,48	2,61	2,48

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2026

Rata-rata lama menginap tamu domestik pada hotel bintang di Provinsi Bali tahun 2025 berada pada kisaran 2–3 malam. Untuk seluruh kelas hotel, rata-rata sederhana bulanan mencapai sekitar 2,51 malam, dengan lama menginap tertinggi terjadi pada Agustus sebesar 2,66 malam dan terendah pada Mei sebesar 2,38 malam. Berdasarkan kelas hotel, tamu domestik pada hotel bintang 5 memiliki durasi menginap paling panjang, dengan rata-rata sekitar 2,95 malam, sedangkan hotel bintang 2 memiliki rata-rata sekitar 2,15

malam. Kondisi ini menunjukkan bahwa durasi tinggal wisatawan domestik masih relatif singkat, sehingga pengembangan produk wisata, paket perjalanan, event, dan diversifikasi daya tarik perlu terus diperkuat untuk mendorong wisatawan tinggal lebih lama dan meningkatkan dampak ekonomi pariwisata di Bali.

b. Wisatawan Mancanegara

Berdasarkan data Rata-Rata Lama Menginap Tamu Mancanegara pada Hotel Bintang di Provinsi Bali Tahun 2025, durasi tinggal wisatawan asing secara umum berada di kisaran sekitar 3 malam. Untuk seluruh kelas hotel bintang, rata-rata sederhana bulanan selama tahun 2025 mencapai sekitar 3,00 malam.

Pada tingkat seluruh kelas hotel, rata-rata lama menginap tercatat sebesar 3,20 malam pada Januari, kemudian menurun menjadi 2,75 malam pada Februari, yang merupakan nilai terendah sepanjang tahun. Setelah itu, lama menginap meningkat menjadi 2,84 malam pada Maret dan 2,90 malam pada April, sebelum kembali turun menjadi 2,75 malam pada Mei. Memasuki paruh kedua tahun, durasi menginap cenderung meningkat, yaitu 2,85 malam pada Juni, 3,07 malam pada Juli, 3,03 malam pada Agustus, 3,10 malam pada September, 3,17 malam pada Oktober, 3,15 malam pada November, dan mencapai 3,21 malam pada Desember, tertinggi sepanjang tahun.

Dilihat menurut kelas hotel, pola lama menginap wisatawan mancanegara cukup bervariasi. Hotel bintang 1 justru mencatat durasi tinggal yang relatif panjang pada banyak bulan, terutama pada Januari–Juni dan Agustus–Oktober. Nilai tertinggi untuk kelas ini terjadi pada Maret sebesar 4,10 malam, disusul Februari 4,03 malam dan Januari 3,93 malam. Namun, terjadi penurunan cukup tajam pada Juli menjadi 2,67 malam.

Pada hotel bintang 2, rata-rata lama menginap juga relatif tinggi, terutama pada September sebesar 4,05 malam, yang menjadi salah satu capaian tertinggi antarsemua kelas. Nilai tinggi lainnya terjadi pada November sebesar 3,54 malam dan Oktober sebesar 3,49 malam. Sementara itu, nilai terendah terjadi pada Mei sebesar 2,77 malam.

Untuk hotel bintang 3, lama menginap relatif stabil pada kisaran sekitar 2,8–3,5 malam. Nilai tertinggi tercatat pada Januari sebesar 3,46 malam, sedangkan yang terendah pada April sebesar 2,84 malam. Hotel bintang 4 memiliki pola yang cukup stabil pula, meski terdapat lonjakan pada Juli menjadi 3,81 malam. Adapun hotel bintang 5 menunjukkan kecenderungan menguat menjelang akhir tahun, dari 2,53 malam pada Februari menjadi 3,53 malam pada Desember.

Secara umum, wisatawan mancanegara memiliki durasi menginap yang lebih panjang dibandingkan wisatawan domestik. Berdasarkan data sebelumnya, rata-rata sederhana seluruh kelas untuk wisatawan domestik sekitar 2,51

malam, sedangkan wisatawan mancanegara sekitar 3,00 malam. Artinya, tamu asing tinggal sekitar 0,49 malam lebih lama secara rata-rata. Perbedaan ini penting karena lama tinggal berpengaruh langsung terhadap besarnya pengeluaran wisatawan untuk akomodasi, makan minum, transportasi, rekreasi, ekonomi kreatif, serta jasa lainnya.

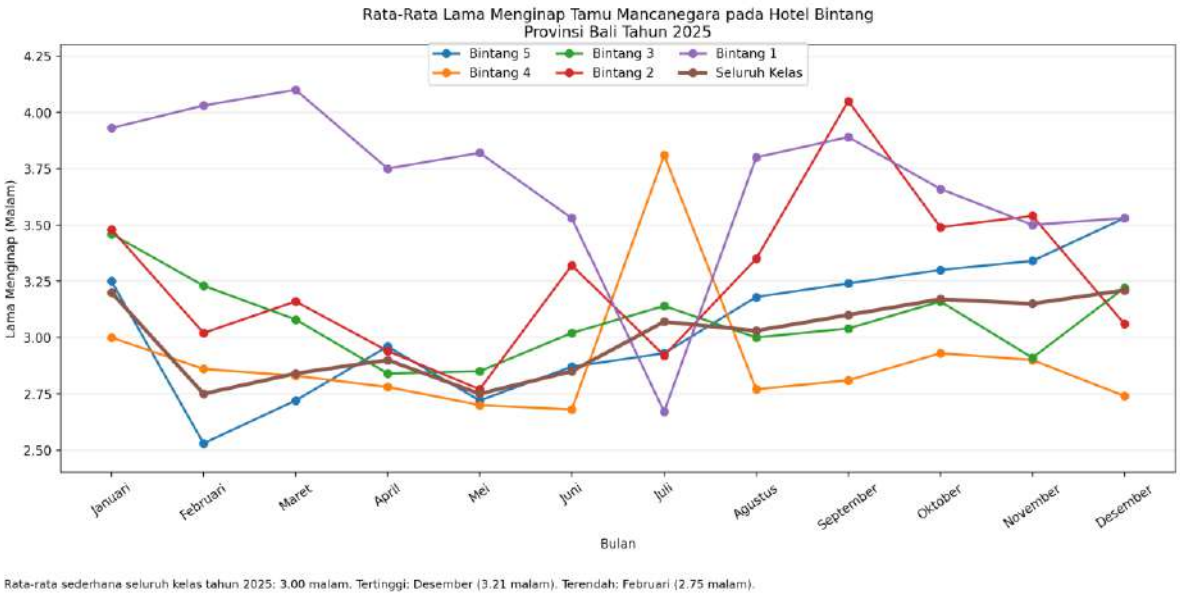

Gambar 7.7.
Grafik Rata-rata Lama Menginap Wisatawan Mancanegara di Hotel Berbintang Tahun 2025

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2026

Tabel 7.12.
Rata-rata Lama Menginap Tamu Mancanegara Pada Hotel Berbintang di Provinsi Tahun 2025

Kelas Hotel Bintang	Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing pada Hotel Bintang Menurut Kelas dan Bulan di Provinsi Bali (Malam)											
	2025											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Bintang 5	3,25	2,53	2,72	2,96	2,72	2,87	2,93	3,18	3,24	3,3	3,34	3,53
Bintang 4	3	2,86	2,83	2,78	2,7	2,68	3,81	2,77	2,81	2,93	2,9	2,74
Bintang 3	3,46	3,23	3,08	2,84	2,85	3,02	3,14	3	3,04	3,16	2,91	3,22
Bintang 2	3,48	3,02	3,16	2,94	2,77	3,32	2,92	3,35	4,05	3,49	3,54	3,06
Bintang 1	3,93	4,03	4,1	3,75	3,82	3,53	2,67	3,8	3,89	3,66	3,5	3,53
Seluruh Kelas	3,2	2,75	2,84	2,9	2,75	2,85	3,07	3,03	3,1	3,17	3,15	3,21

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2026

7.7. KONDISI KETENAGAKERJAAN

Kondisi ketenagakerjaan adalah gambaran menyeluruh mengenai keadaan angkatan kerja dalam suatu wilayah pada periode tertentu, yang mencakup jumlah penduduk yang bekerja, yang menganggur, tingkat partisipasi kerja, struktur lapangan pekerjaan, serta kualitas tenaga kerja.

7.7.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada November 2025, angkatan kerja di Bali tercatat sebanyak 2,71 juta orang, menurun 30,37 ribu orang dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 2,74 juta orang. Pada periode yang sama, TPAK mengalami penurunan 1,02 persen poin menjadi 76,29 persen dibandingkan Agustus 2025 yang tercatat sebesar 77,31 persen.

Kondisi pengangguran di Provinsi Bali dilihat dari data capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang dirilis oleh BPS Provinsi Bali. BPS Provinsi Bali merilis data Capaian Indikator TPT dan TPAK 2 kali dalam setahun, yaitu untuk periode Maret dan Periode Agustus. Dalam konteks evaluasi kinerja daerah dalam pengentasan kemiskinan periode Semester II menggunakan data capaian TPT dan TPAK pada bulan Agustus.

TPT dan TPAK Provinsi Bali selama 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang positif. TPT Provinsi Bali pada Tahun 2025 sebesar 1,49% dimana kondisi ini menurun dari Tahun 2024 dengan TPT sebesar 1,79%. Penurunan terus terjadi semenjak Tahun 2021 yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program-program penurunan pengangguran oleh Pemerintah Provinsi Bali. Pada sisi lainnya, TPAK Provinsi Bali mengalami peningkatan selama periode tahun 2021-2025. Pada Tahun 2025, TPAK Provinsi Bali tercatat sebesar 77,31% dimana meningkat dari Tahun 2024 yang tercatat sebesar 77,11%.

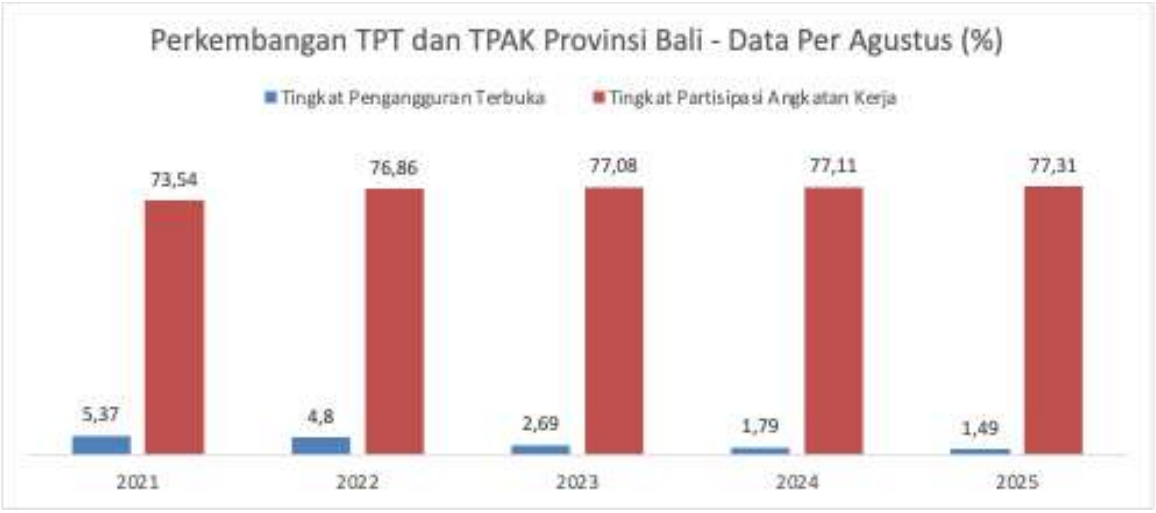

Gambar 7.8.
Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Bali Tahun 2021-2025 (%)
Sumber : Olahan Data BPS Provinsi Bali, Tahun 2025

Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPT laki-laki pada Agustus 2025 tercatat sebesar 1,51%, lebih tinggi disbanding TPT Perempuan yang sebesar 1,48%.

TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,23 persen poin, sedangkan TPT Perempuan mengalami peningkatan sebesar 0,09 persen poin dibandingkan dengan Februari 2025. Jika dibandingkan dengan Agustus 2024, baik TPT laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,43 persen poin dan 0,14 persen poin.

Tabel 7.13.
Karakteristik Pengangguran (%) di Provinsi Bali,
Agustus 2024-Agustus 2025

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2024 (persen)	Februari 2025 (persen)	Agustus 2025 (persen)	Perubahan Ags. 2024-Ags. 2025 (persen poin)	Perubahan Feb. 2025-Ags. 2025 (persen poin)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	**1,79**	**1,58**	**1,49**	**-0,30**	**-0,09**
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-laki	1,94	1,74	1,51	-0,43	-0,23
- Perempuan	1,62	1,39	1,48	-0,14	0,09

Sumber : BRS Provinsi Bali No. 67/11/51/Th. XIX, 5 November 2025, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Agustus 2025

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh Angkatan kerja, TPT Agustus 2025 tertinggi tercatat pada jenjang pendidikan Diploma I/II/III, yaitu sebesar 3,68%, dan TPT terendah pada jenjang pendidikan SMP ke bawah yang tercatat sebesar 0,75%. Pada periode Februari-Agustus 2025, TPT dari tamatan Diploma I/II/III, SMP ke bawah, dan SMA mengalami kenaikan sebesar 1,59 persen poin, 0,14 persen poin, dan 0,04 persen poin, sedangkan tingkat pendidikan Universitas dan SMK tercatat mengalami penurunan.

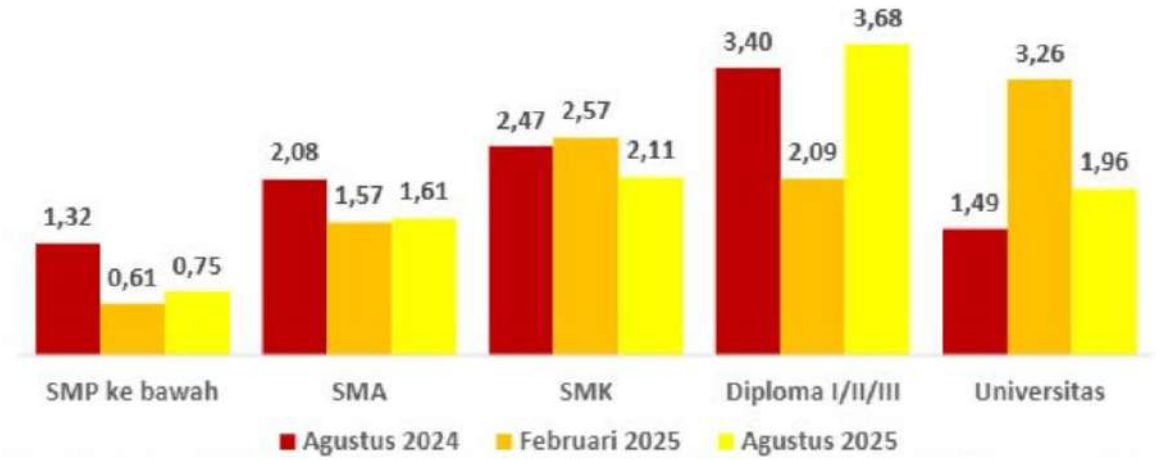

Gambar 7.9.
TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (%), Agustus 2024-Agustus 2025.

Sumber : BRS Provinsi Bali No. 67/11/51/Th. XIX, 5 November 2025, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Agustus 2025

7.7.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, yaitu penduduk berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja terbagi menjadi angkatan kerja yang mencakup pekerja dan pengangguran serta bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang tidak melakukan aktivitas ekonomi seperti pelajar, pengurus rumah tangga, atau kegiatan non-ekonomi lainnya.

Berdasarkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Bali tahun 2025, kondisi partisipasi penduduk usia kerja dalam pasar tenaga kerja tergolong tinggi. Pada tingkat provinsi, TPAK tercatat sebesar 77,40% pada Februari 2025 dan 77,31% pada Agustus 2025. Dengan demikian, terjadi penurunan yang sangat kecil sebesar 0,09 poin persentase, yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Bali relatif stabil sepanjang tahun 2025.

Perlu dicatat bahwa pengukuran TPAK pada tingkat kabupaten/kota hanya dilakukan pada bulan Agustus, sedangkan pada tingkat Provinsi Bali dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu Februari dan Agustus. Oleh karena itu, perbandingan antarwilayah menggunakan data Agustus agar berada pada periode pengukuran yang sama.

Pada Agustus 2025, TPAK tertinggi terdapat di Kabupaten Karangasem sebesar 84,69%, diikuti Kabupaten Bangli 81,73%, Kabupaten Buleleng 79,80%, Kabupaten Jembrana 78,69%, dan Kabupaten Klungkung 78,66%. Kelima wilayah tersebut memiliki TPAK lebih tinggi dibandingkan nilai Provinsi Bali sebesar 77,31%.

Sementara itu, Kabupaten Tabanan mencatat TPAK sebesar 76,88%, Gianyar 75,74%, Badung 74,61%, dan Kota Denpasar 70,98%. Kota Denpasar menjadi wilayah dengan TPAK terendah pada tahun 2025. Selisih antara wilayah dengan TPAK tertinggi dan terendah mencapai 13,71 poin persentase, yaitu antara Karangasem dan Denpasar.

Tingginya TPAK di Karangasem, Bangli, dan Buleleng menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja relatif besar. Sebaliknya, TPAK yang lebih rendah di Denpasar dan Badung tidak serta-merta menunjukkan kondisi ketenagakerjaan yang lebih buruk, karena tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti proporsi penduduk yang masih bersekolah, struktur umur, kegiatan domestik, pilihan untuk tidak masuk pasar kerja, serta karakteristik ekonomi wilayah.

Jika dikaitkan dengan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025, Provinsi Bali memiliki TPT sebesar 1,49%. Pada tingkat kabupaten/kota, TPT berada pada kisaran 0,73–1,80%. Kombinasi TPAK yang relatif tinggi dan TPT yang rendah menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang masuk dalam angkatan kerja pada umumnya terserap dalam kegiatan ekonomi. Namun,

kualitas pekerjaan, produktivitas, status pekerjaan formal atau informal, serta tingkat pendapatan tetap perlu diperhatikan agar tingginya partisipasi tenaga kerja juga diikuti oleh peningkatan kualitas kesejahteraan.

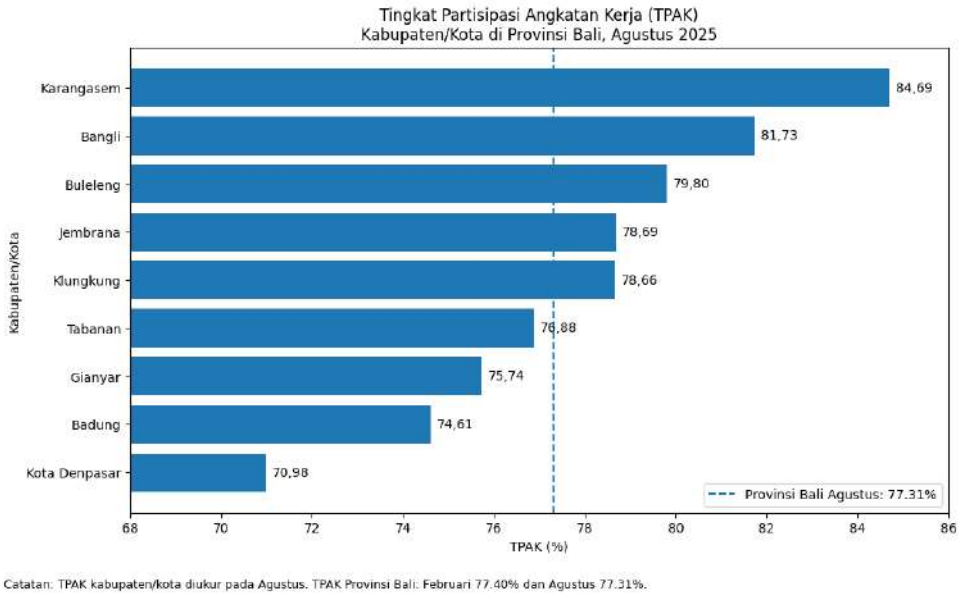

Gambar 7.10.
Grafik Perbandingan TPAK Kota/Kabupaten di Provini Bali Tahun 2025

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2026

7.8. PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI

Berdasarkan data pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Provinsi Bali tahun 2020–2025, terlihat bahwa kinerja sektor ini mengalami pemulihan setelah terkontraksi cukup dalam pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, industri pengolahan tumbuh negatif sebesar -6,41%. Kondisi kemudian membaik pada 2021 dengan pertumbuhan 0,07%, yang menunjukkan fase awal pemulihan.

Pemulihan menguat pada 2022, ketika pertumbuhan industri pengolahan mencapai 5,56%, menjadi pertumbuhan tertinggi sepanjang periode 2020–2025. Pada 2023, laju pertumbuhan melambat menjadi 2,24%, tetapi tetap berada pada zona positif. Selanjutnya, pada 2024 pertumbuhan kembali menguat menjadi 5,10%, sebelum melambat pada 2025 menjadi 3,94%.

Dengan demikian, setelah kontraksi pada 2020, lapangan usaha industri pengolahan mampu mempertahankan pertumbuhan positif selama lima tahun berturut-turut. Meskipun pertumbuhan 2025 lebih rendah dibandingkan 2024, capaian sebesar 3,94% tetap menunjukkan adanya ekspansi aktivitas industri pengolahan di Bali.

Jika dikaitkan dengan distribusi lapangan usaha industri pengolahan dalam PDRB ADHB Provinsi Bali, terlihat bahwa kontribusinya justru cenderung menurun. Pada

2021, industri pengolahan menyumbang 6,68% terhadap PDRB Bali, kemudian turun menjadi 6,58% pada 2022 dan 6,24% pada 2023. Pada 2024 kontribusinya sedikit meningkat menjadi 6,25%, tetapi kembali turun tipis menjadi 6,23% pada 2025.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan positif industri pengolahan belum secara otomatis meningkatkan pangsanya dalam struktur ekonomi Bali. Hal ini dapat terjadi apabila lapangan usaha lain tumbuh lebih cepat sehingga porsi relatif industri pengolahan terhadap total PDRB menjadi lebih kecil. Dalam konteks struktur ekonomi Bali, kondisi ini penting karena industri pengolahan dapat berperan dalam memperkuat diversifikasi ekonomi dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Selama periode 2021–2025, kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB ADHB turun sebesar 0,45 poin persentase, dari 6,68% menjadi 6,23%. Penurunan terbesar terjadi antara 2022 dan 2023, yaitu dari 6,58% menjadi 6,24%. Sejak 2023, kontribusinya relatif stabil pada kisaran 6,2%.

Kombinasi antara pertumbuhan sektor yang tetap positif dan kontribusi yang relatif stagnan menunjukkan bahwa industri pengolahan Bali masih memiliki ruang untuk diperkuat. Pengembangan ke depan dapat diarahkan pada peningkatan nilai tambah komoditas lokal, penguatan industri berbasis pertanian dan pangan, pengembangan industri kreatif, peningkatan produktivitas, teknologi pengolahan, serta keterkaitan yang lebih kuat antara industri dengan sektor pariwisata dan pasar ekspor.



Gambar 7.11.
Grafik Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan Provinsi Bali Tahun 2020–2025

Sumber: Hasil Olah Data BPS Provinsi Bali, 2026

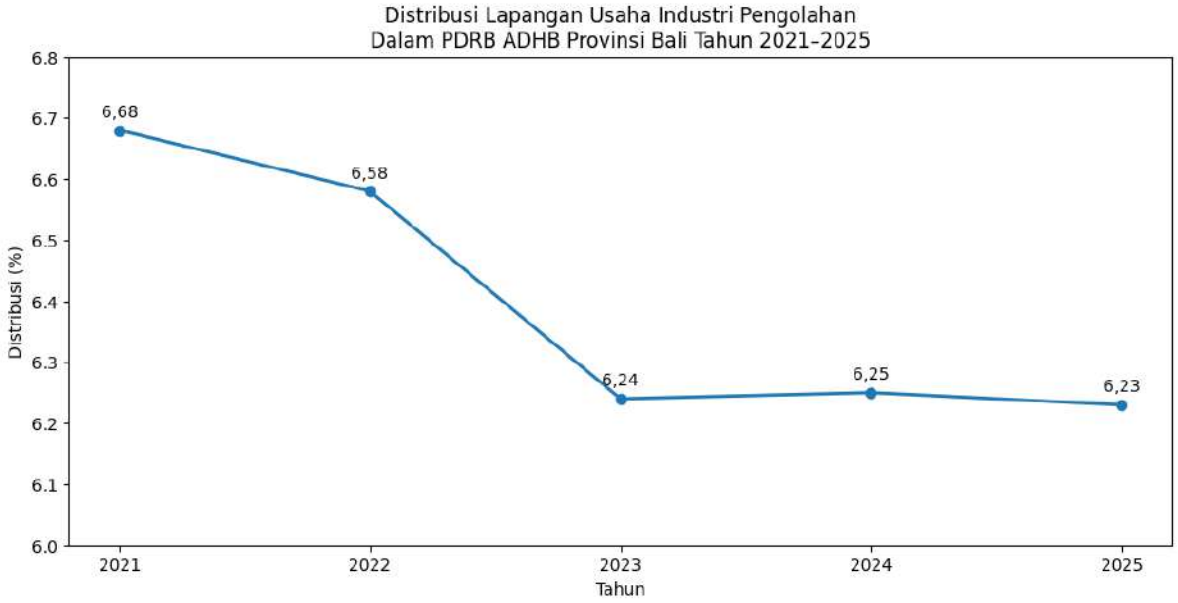

Gambar 7.12.
Grafik Perkembangan Distribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Provinsi Bali Tahun 2021–2025

Sumber: Hasil Olah Data BPS Provinsi Bali, 2026

7.9. POTENSI KOPERASI DAN UMKM

7.9.1. Koperasi

Berdasarkan data tahun 2025, koperasi di Provinsi Bali menunjukkan jumlah dan ragam usaha yang cukup besar, baik menurut wilayah, tingkat koperasi, bidang usaha, maupun jenis komoditas yang dijalankan. Secara keseluruhan terdapat 6.319 koperasi, terdiri atas 6.288 koperasi primer dan 31 koperasi sekunder. Dengan demikian, struktur koperasi Bali sangat didominasi oleh koperasi primer.

Secara kewilayahan, jumlah koperasi terbanyak terdapat di Kabupaten Gianyar sebanyak 1.362 koperasi, atau sekitar 21,55% dari total koperasi Bali. Posisi berikutnya adalah Kota Denpasar sebanyak 1.197 koperasi atau sekitar 18,94%, Tabanan 718 koperasi, Badung 681 koperasi, Buleleng 571 koperasi, Karangasem 438 koperasi, Jembrana 343 koperasi, Bangli 316 koperasi, dan Klungkung 218 koperasi. Selain itu terdapat 475 koperasi pada nivo provinsi, yaitu koperasi yang berada pada tingkat kewenangan provinsi.

Dominasi Gianyar dan Denpasar menunjukkan bahwa aktivitas perkoperasian cukup terkonsentrasi pada wilayah dengan basis kegiatan ekonomi, perdagangan, jasa, usaha masyarakat, serta aktivitas ekonomi lokal yang kuat. Sementara itu, jumlah koperasi yang relatif lebih sedikit di Klungkung dan Bangli tidak serta-merta menunjukkan peran koperasi yang lebih rendah, karena

besarnya jumlah koperasi perlu dibaca bersama dengan jumlah penduduk, keanggotaan, aset, volume usaha, dan status aktif koperasi.

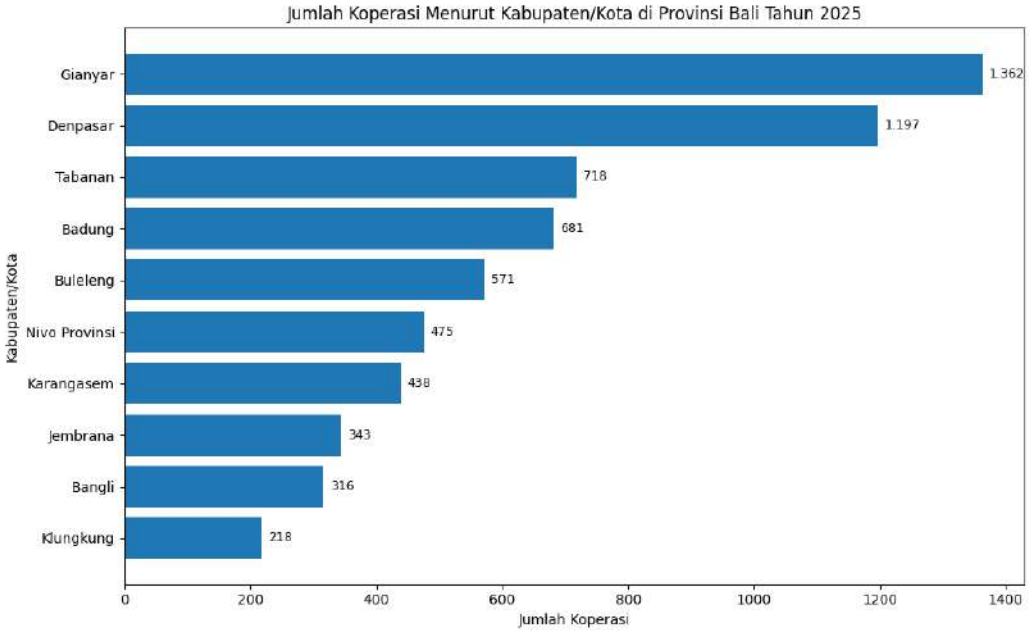

Gambar 7.13.
Grafik Jumlah Koperasi di Provinsi Bali Tahun 2025

Sumber: Hasil Olah Data BPS Provinsi Bali, 2026

a. Struktur koperasi menurut bidang usaha

Dilihat dari bidang usahanya, data tahun 2025 menunjukkan keragaman yang cukup besar. Tercatat 3.498 koperasi yang bergerak pada bidang pemasaran, 3.211 koperasi konsumen, 2.514 koperasi serba usaha, 1.689 koperasi simpan pinjam, dan 287 koperasi produksi.

Bidang pemasaran menjadi kelompok yang paling menonjol dalam data tersebut. Hal ini menunjukkan kuatnya peran koperasi sebagai wadah untuk membantu pemasaran produk dan memperluas akses pasar anggota. Peran ini penting terutama bagi usaha skala kecil dan ekonomi berbasis komunitas yang sering menghadapi keterbatasan dalam akses pasar secara individual.

Koperasi konsumen juga memiliki jumlah yang sangat besar, yang memperlihatkan kuatnya fungsi koperasi dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa anggota. Sementara itu, keberadaan koperasi serba usaha menunjukkan bahwa banyak koperasi menjalankan kegiatan yang relatif beragam, tidak terbatas pada satu fungsi ekonomi tertentu.

Koperasi simpan pinjam yang berjumlah 1.689 juga memiliki posisi penting dalam mendukung akses pembiayaan masyarakat dan anggota koperasi.

Keberadaannya menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi rumah tangga dan pelaku usaha skala kecil. Adapun koperasi produksi relatif lebih sedikit, yaitu 287 koperasi.

Perlu diperhatikan bahwa jumlah menurut bidang usaha tersebut tidak tepat dijumlahkan untuk memperoleh total koperasi, karena satu koperasi dapat memiliki lebih dari satu bidang usaha. Oleh sebab itu, data bidang usaha lebih tepat digunakan untuk menggambarkan cakupan aktivitas koperasi, bukan jumlah unit koperasi yang saling eksklusif.

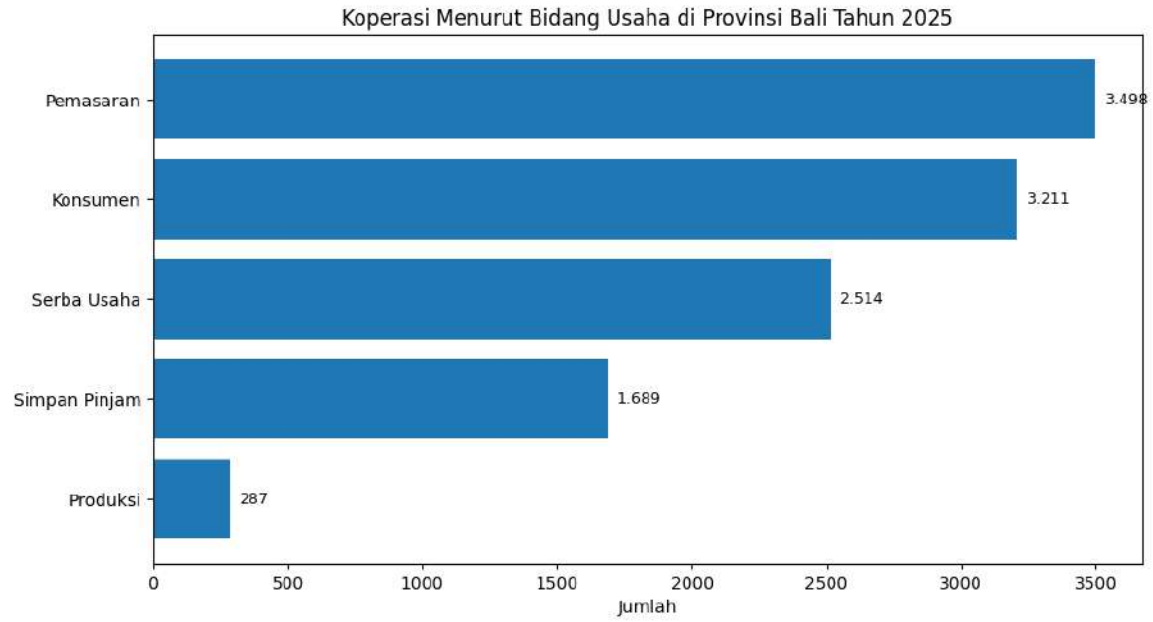

Gambar 7.14.
Grafik Jumlah Koperasi di Provinsi Bali Menurut Bidang Usaha Tahun 2025

Sumber: Hasil Olah Data BPS Provinsi Bali, 2026

b. Karakteristik bidang usaha menurut wilayah

Terdapat variasi yang cukup kuat antarwilayah. Kabupaten Gianyar sangat menonjol pada koperasi konsumen sebanyak 1.035 koperasi dan koperasi serba usaha sebanyak 831 koperasi. Kota Denpasar juga memiliki jumlah koperasi konsumen yang tinggi, yaitu 739 koperasi, disertai 350 koperasi simpan pinjam dan 377 koperasi serba usaha.

Kabupaten Badung memiliki 388 koperasi konsumen, 180 koperasi simpan pinjam, dan 328 koperasi serba usaha. Sementara Tabanan memiliki struktur yang relatif kuat pada koperasi konsumen sebanyak 275 koperasi, simpan pinjam 259 koperasi, dan serba usaha 238 koperasi.

Jembrana relatif menonjol pada koperasi produksi dibandingkan beberapa wilayah lainnya, yakni sebanyak 81 koperasi. Buleleng juga memiliki jumlah koperasi produksi cukup besar, yaitu 51 koperasi, disertai 304 koperasi serba usaha.

Struktur tersebut menunjukkan bahwa karakter koperasi di masing-masing wilayah tidak seragam dan berkaitan erat dengan karakteristik ekonomi lokal.

c. Koperasi menurut jenis komoditas

Dilihat berdasarkan jenis komoditas usaha, pada tahun 2025 tercatat 94 koperasi pertanian, 17 koperasi peternakan, 30 koperasi industri dan kerajinan, serta 281 koperasi jasa.

Koperasi jasa merupakan kelompok terbesar dalam klasifikasi komoditas tersebut. Jumlah yang cukup tinggi menunjukkan bahwa aktivitas koperasi di Bali tidak hanya bergerak pada sektor primer, tetapi juga semakin banyak berkembang pada sektor jasa.

Untuk koperasi pertanian, jumlah terbesar terdapat di Buleleng sebanyak 18 koperasi, diikuti Karangasem 17 koperasi dan Jembrana 16 koperasi. Pola ini sejalan dengan karakter wilayah yang memiliki basis kegiatan pertanian cukup kuat.

Koperasi peternakan jumlahnya relatif kecil, dengan Jembrana memiliki 4 koperasi, sementara Badung dan Buleleng masing-masing 3 koperasi. Pada bidang industri dan kerajinan, Gianyar menjadi wilayah paling menonjol dengan 12 koperasi, mencerminkan kuatnya basis ekonomi kerajinan dan industri kecil di wilayah tersebut.

Sementara itu, koperasi jasa paling banyak terdapat di Bangli sebanyak 87 koperasi, kemudian Buleleng 41 koperasi, Denpasar 33 koperasi, dan pada nivo provinsi sebanyak 55 koperasi jika koperasi primer dan sekunder digabungkan. Tingginya jumlah koperasi jasa menunjukkan semakin luasnya peran koperasi dalam aktivitas ekonomi non-produksi.

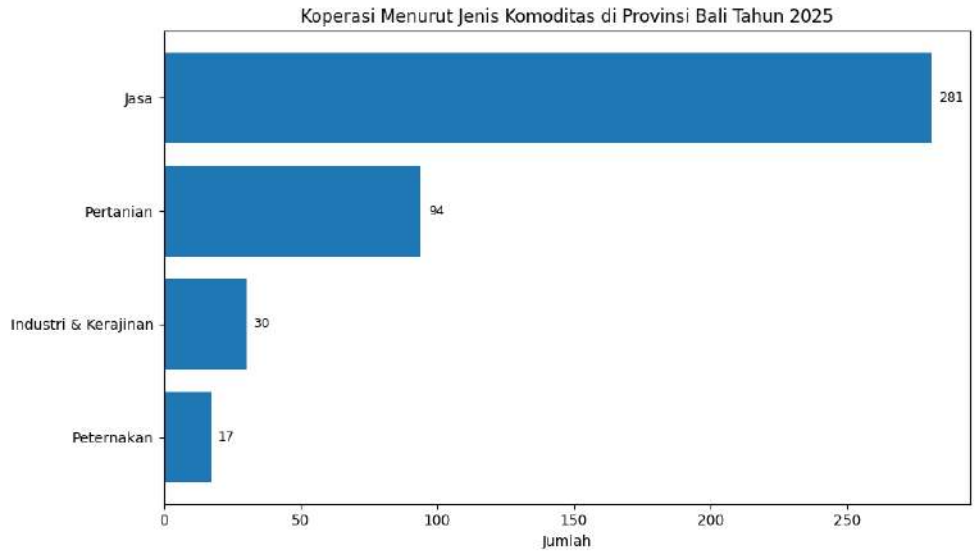

Gambar 7.15.
Grafik Jumlah Koperasi di Provinsi Bali Menurut Jenis Komoditas Tahun 2025

Sumber: Hasil Olah Data BPS Provinsi Bali, 2026

d. Perkembangan jumlah koperasi

Data perkembangan tahun 2021–2025 secara umum menunjukkan bahwa jumlah koperasi di Bali cenderung meningkat. Total koperasi tercatat 5.258 unit pada 2021, kemudian 5.394 unit pada 2022, dan 5.490 unit pada 2023. Pada tahun 2025 jumlahnya mencapai 6.319 koperasi.

Dengan membandingkan tahun 2021 dan 2025, terjadi penambahan 1.061 koperasi, atau sekitar 20,2% dalam empat tahun. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya ekspansi kelembagaan koperasi di Bali.

Namun, terdapat ketidakteraturan format pada data tahun 2024 yang Anda kirimkan, terutama pada pemisahan kolom koperasi primer, sekunder, dan total. Karena itu, angka tahun 2024 sebaiknya diverifikasi kembali sebelum digunakan untuk menghitung pertumbuhan tahunan 2023–2024 atau 2024–2025. Dari sumber yang diberikan, tren 2021, 2022, 2023, dan 2025 dapat dibaca dengan lebih jelas, sedangkan angka 2024 perlu dikonfirmasi.

Secara umum, peningkatan jumlah koperasi memperlihatkan bahwa kelembagaan ekonomi berbasis anggota masih memiliki peran penting dalam struktur ekonomi Bali. Namun, penguatan koperasi ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada pertambahan jumlah unit. Aspek yang lebih penting adalah keaktifan koperasi, jumlah anggota, kualitas tata kelola, aset, volume usaha, produktivitas, digitalisasi, kemampuan mengakses pasar, serta kontribusi terhadap pendapatan anggota.

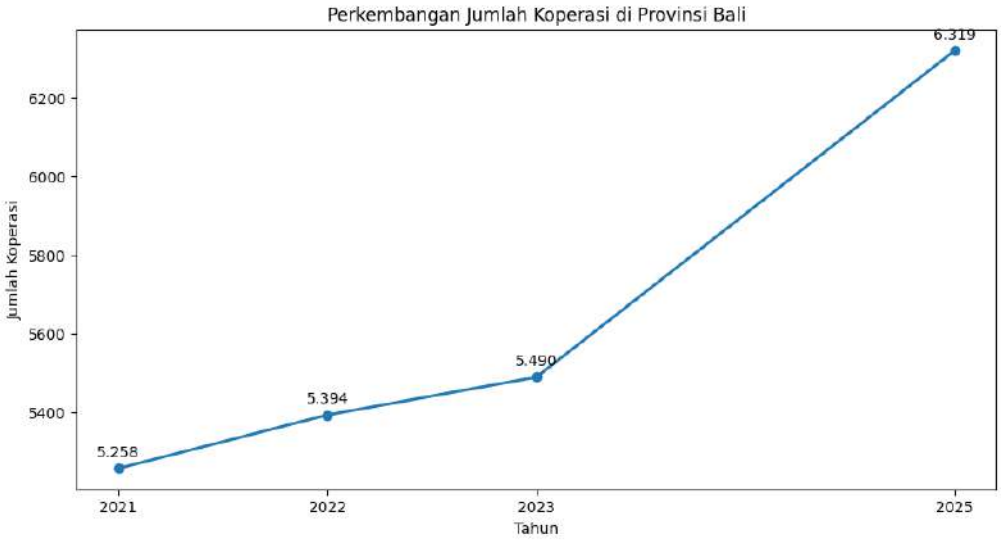

Gambar 7.16.
Grafik Perkembangan Jumlah Koperasi di Provinsi Bali Menurut Jenis Komoditas Tahun 2021–2025

Sumber: Hasil Olah Data BPS Provinsi Bali, 2026

7.9.2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Selain koperasi, Provinsi Bali juga memiliki sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berperan penting dalam perekonomian daerah. UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Keberadaan UMKM tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali, dengan dominasi pada sektor perdagangan, kuliner, kerajinan, fashion, pertanian modern, serta jasa pariwisata dan ekonomi kreatif.

Berdasarkan data keragaan UMKM Provinsi Bali tahun 2024–2025, jumlah UMKM di Bali menunjukkan peningkatan tipis. Pada tahun 2024 jumlah UMKM tercatat sebanyak 448.434 unit, kemudian meningkat menjadi 448.734 unit pada tahun 2025. Dengan demikian, terdapat penambahan sebanyak 300 unit usaha atau sekitar 0,07% dalam satu tahun.

Struktur UMKM di Bali sangat didominasi oleh usaha mikro. Pada tahun 2024 terdapat 447.494 usaha mikro, 756 usaha kecil, dan 184 usaha menengah. Pada tahun 2025, jumlah usaha mikro meningkat menjadi 447.794 unit, sedangkan usaha kecil tetap 756 unit dan usaha menengah tetap 184 unit. Dengan demikian, seluruh pertambahan UMKM sebanyak 300 unit pada tahun 2025 berasal dari kelompok usaha mikro.

Pada 2025, usaha mikro mencakup sekitar 99,79% dari seluruh UMKM di Bali. Sementara itu, usaha kecil hanya sekitar 0,17% dan usaha menengah sekitar 0,04%. Komposisi ini menunjukkan bahwa basis kewirausahaan Bali sangat kuat

pada skala mikro, namun sekaligus memperlihatkan bahwa proses naik kelas usaha dari mikro menjadi kecil dan menengah masih menjadi tantangan penting.

Dari sisi sektoral, UMKM paling banyak bergerak pada Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, dengan jumlah 173.546 unit pada 2025, meningkat dari 173.246 unit pada 2024. Sektor ini menyumbang sekitar 38,67% dari total UMKM Bali dan menjadi satu-satunya sektor pada tabel yang menunjukkan penambahan jumlah usaha antara 2024 dan 2025.

Sektor terbesar kedua adalah Industri Pengolahan dengan 111.261 unit, atau sekitar 24,79% dari total UMKM. Posisi berikutnya adalah Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebanyak 83.365 unit atau sekitar 18,58%, serta Aktivitas Jasa Lainnya sebanyak 45.277 unit atau sekitar 10,09%.

Dengan demikian, empat sektor terbesar tersebut secara bersama-sama mencakup lebih dari 92% total UMKM Bali. Struktur ini menunjukkan bahwa UMKM di Bali sangat terkonsentrasi pada kegiatan perdagangan, industri pengolahan, pariwisata dan kuliner, serta jasa.

Besarnya jumlah UMKM pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum memperlihatkan kuatnya keterkaitan UMKM Bali dengan sektor pariwisata. Sementara itu, tingginya jumlah UMKM industri pengolahan menunjukkan adanya basis usaha yang cukup besar dalam kegiatan produksi dan pengolahan, yang berpotensi dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Sektor lainnya memiliki jumlah yang relatif lebih kecil, antara lain pengangkutan dan pergudangan sebanyak 7.798 unit, aktivitas penyewaan dan jasa penunjang usaha 5.760 unit, konstruksi 4.788 unit, informasi dan komunikasi 3.168 unit, kesenian/hiburan/rekreasi 3.076 unit, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis 2.234 unit, kesehatan dan aktivitas sosial 2.232 unit, serta sektor-sektor lainnya dengan jumlah di bawah 2.000 unit.

Secara umum, perkembangan 2024–2025 menunjukkan bahwa jumlah UMKM Bali relatif stabil, dengan pertumbuhan hanya sekitar 0,07%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pengembangan UMKM ke depan tidak lagi hanya terletak pada pertambahan jumlah unit usaha, tetapi lebih pada peningkatan kualitas, produktivitas, kapasitas usaha, digitalisasi, akses pembiayaan, perluasan pasar, dan kemampuan usaha mikro untuk naik kelas.

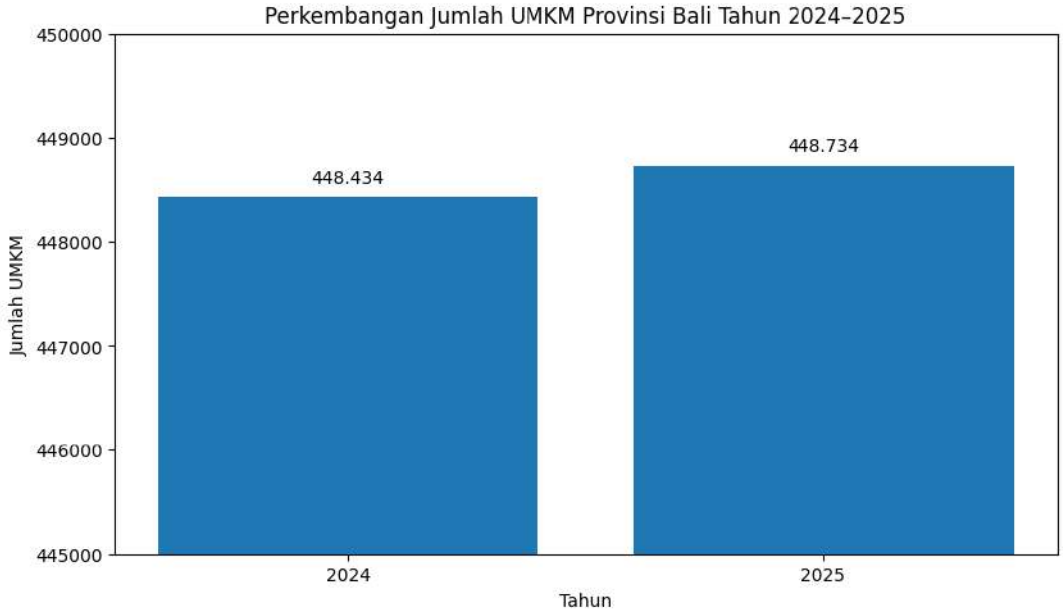

Jumlah UMKM bertambah 300 unit atau sekitar 0,07% pada 2025.

Gambar 7.17.
Perkembangan UMKM di Provinsi Bali Berdasarkan Tahun 2024–2025

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Tahun 2026

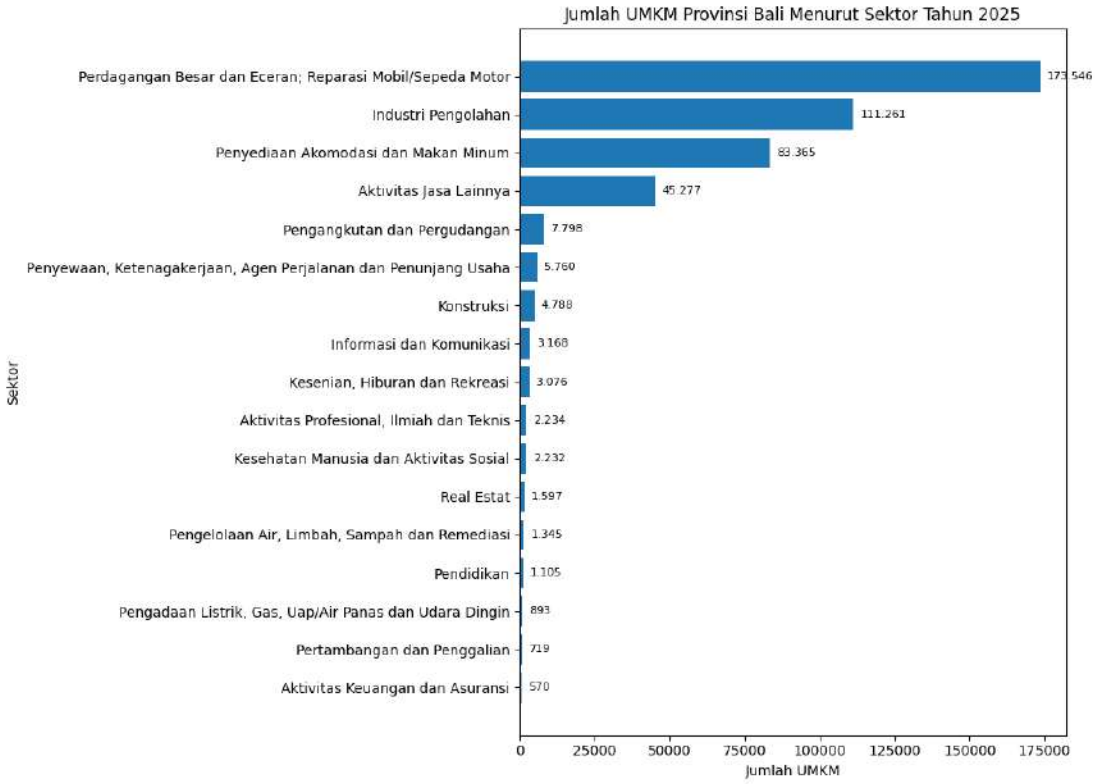

Gambar 7.18.
Jumlah UMKM di Provinsi Bali Berdasarkan Sektor Tahun 2025

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Tahun 2026

7.10. KEGIATAN EKSPOR BARANG

Berdasarkan data ekspor Provinsi Bali menurut kelompok komoditas utama periode 2021–2025, kinerja ekspor Bali menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Nilai ekspor sempat meningkat kuat pada 2022, melemah pada 2023, kembali menguat pada 2024, kemudian turun pada 2025. Di sisi lain, volume ekspor secara umum tetap lebih tinggi dibandingkan awal periode.

Pada tahun 2021, total volume ekspor Bali tercatat sekitar 65,72 juta kg dengan nilai US$508,36 juta. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang cukup kuat, dengan volume naik menjadi 70,98 juta kg atau tumbuh sekitar 8,01%, sedangkan nilai ekspor meningkat menjadi US$616,98 juta atau tumbuh sekitar 21,37%. Kenaikan nilai yang lebih cepat dibandingkan volume menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata ekspor per satuan berat pada tahun tersebut.

Pada 2023, volume ekspor kembali meningkat cukup tinggi menjadi 81,43 juta kg, atau naik sekitar 14,73% dibandingkan 2022. Namun demikian, nilai ekspor justru menurun menjadi US$580,89 juta atau turun sekitar 5,85%. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan volume belum diikuti peningkatan nilai yang sebanding, sehingga secara indikatif nilai ekspor rata-rata per kilogram mengalami penurunan.

Pada tahun 2024, volume ekspor menurun menjadi 77,20 juta kg atau sekitar 5,20%, tetapi nilai ekspor meningkat menjadi US$632,91 juta, atau tumbuh sekitar 8,96%. Tahun 2024 menjadi tahun dengan nilai ekspor tertinggi sepanjang periode 2021–2025.

Memasuki 2025, volume ekspor relatif stabil dan sedikit meningkat menjadi 77,75 juta kg, atau naik sekitar 0,71% dibandingkan 2024. Namun nilai ekspor turun menjadi US$565,49 juta, atau berkurang sekitar 10,65%. Dengan demikian, penurunan kinerja ekspor tahun 2025 terutama terlihat dari sisi nilai, sementara volume masih relatif bertahan.

Secara keseluruhan, dibandingkan 2021, volume ekspor Bali pada 2025 meningkat sekitar 18,31%, sedangkan nilai ekspor meningkat sekitar 11,24%. Ini menunjukkan bahwa dalam jangka menengah ekspor Bali tetap berkembang, meskipun pertumbuhan volume lebih cepat dibandingkan pertumbuhan nilainya.

a. Struktur komoditas ekspor Tahun 2025

Pada tahun 2025, ekspor Bali masih sangat ditopang oleh beberapa kelompok komoditas utama. Kelompok ikan, krustasea, dan moluska menjadi komoditas ekspor terbesar dengan nilai sekitar US$166,82 juta atau 29,50% dari total ekspor Bali. Kelompok ini juga memiliki volume sangat besar, yaitu sekitar 25,94 juta kg.

Komoditas terbesar kedua adalah logam mulia dan perhiasan/permata, dengan nilai ekspor sekitar US$61,81 juta atau 10,93% dari total ekspor. Meskipun

volumenya hanya sekitar 0,63 juta kg, nilai ekspornya sangat tinggi. Hal ini menunjukkan karakter komoditas bernilai tambah tinggi.

Pada posisi ketiga terdapat pakaian dan aksesorinya bukan rajutan dengan nilai sekitar US$52,59 juta atau 9,30%, kemudian kertas, karton, dan barang daripadanya sebesar US$45,84 juta atau 8,11%, serta perabotan, lampu, dan alat penerangan sekitar US$34,12 juta atau 6,03%.

Lima kelompok komoditas tersebut secara bersama-sama menyumbang sekitar 63,9% dari total nilai ekspor Bali tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekspor Bali masih cukup terkonsentrasi pada sejumlah komoditas utama.

Kelompok lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar antara lain kayu dan barang dari kayu sebesar 5,79%, pakaian rajutan 3,61%, barang anyaman 1,90%, buah-buahan 1,89%, serta barang dari batu, semen, asbes, atau mika sekitar 1,61%.

Menariknya, buah-buahan masuk dalam sepuluh besar komoditas ekspor tahun 2025 dengan nilai sekitar US$10,68 juta dan volume sekitar 3,01 juta kg. Hal ini menunjukkan potensi komoditas pertanian dan hortikultura Bali untuk semakin dikembangkan sebagai bagian dari diversifikasi ekspor.

b. Perubahan struktur komoditas

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat perubahan posisi beberapa komoditas. Pada 2024, komoditas terbesar setelah produk perikanan adalah pakaian bukan rajutan dan logam mulia/perhiasan. Pada 2025, posisi logam mulia dan perhiasan/permata naik menjadi peringkat kedua, sedangkan pakaian bukan rajutan bergeser menjadi peringkat ketiga.

Nilai ekspor ikan, krustasea, dan moluska pada 2025 sedikit menurun dari sekitar US$168,39 juta pada 2024 menjadi US$166,82 juta, tetapi pangsanya justru meningkat dari 26,61% menjadi 29,50% karena total nilai ekspor Bali secara keseluruhan menurun lebih besar.

Sementara itu, nilai ekspor logam mulia dan perhiasan/permata turun dari sekitar US$79,87 juta pada 2024 menjadi US$61,81 juta pada 2025, dan pakaian bukan rajutan turun lebih tajam dari US$85,66 juta menjadi US$52,59 juta. Penurunan kedua kelompok tersebut menjadi salah satu faktor yang turut menjelaskan pelemahan nilai ekspor total Bali pada 2025.

Sebaliknya, kelompok kertas dan karton meningkat cukup kuat, dari sekitar US$33,31 juta pada 2024 menjadi US$45,84 juta pada 2025. Perubahan ini memperlihatkan bahwa struktur ekspor Bali tidak statis dan terdapat pergeseran kontribusi antar komoditas dari tahun ke tahun.

c. Gambaran umum

Secara umum, ekspor Bali menunjukkan struktur yang khas, yaitu kombinasi antara komoditas berbasis perikanan, kerajinan, tekstil, furnitur, kayu, perhiasan, serta produk-produk bernilai tambah tinggi. Struktur ini memperlihatkan keterkaitan ekspor Bali dengan basis ekonomi lokal, ekonomi kreatif, industri pengolahan, dan sumber daya kelautan.

Namun, tingginya konsentrasi pada beberapa kelompok komoditas juga menunjukkan pentingnya diversifikasi pasar dan produk ekspor. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap komoditas tertentu dapat meningkatkan kerentanan terhadap perubahan harga internasional, permintaan global, biaya logistik, maupun perubahan kebijakan perdagangan.

BAB 8

PROFIL DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025



BAB 8
PENUTUP

Profil Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi, potensi, capaian, serta tantangan pembangunan daerah yang ditinjau dari aspek kewilayahan, kependudukan, sumber daya, perekonomian, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, hingga daya saing daerah. Keseluruhan informasi yang disajikan pada Bab I sampai dengan Bab VII menunjukkan bahwa Bali memiliki modal pembangunan yang kuat, baik dari sisi sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, kelembagaan, infrastruktur, aktivitas ekonomi, maupun kapasitas inovasi. Namun demikian, profil pembangunan juga memperlihatkan masih adanya sejumlah kesenjangan antarwilayah, tekanan terhadap daya dukung sumber daya, ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu, serta kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan manfaat pembangunan.

8.1. RINGKASAN KONDISI PEMBANGUNAN PROVINSI BALI TAHUN 2025

Bab I – Kondisi Geografis menggambarkan karakter dasar wilayah Bali sebagai provinsi kepulauan yang berada di antara Pulau Jawa dan Lombok, dengan luas wilayah sekitar 5.636,66 km² dan terdiri atas delapan kabupaten serta satu kota. Karakter topografi, geologi, iklim, sumber daya air, pesisir, serta bentuk lahan yang beragam membentuk potensi sekaligus keterbatasan ruang pembangunan. Sebagian besar wilayah Bali berupa pegunungan dan perbukitan, sementara kegiatan penduduk dan ekonomi banyak terkonsentrasi di dataran serta wilayah selatan. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan ruang, daya dukung lingkungan, konservasi kawasan lindung, ketersediaan air, dan mitigasi bencana menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan Bali.

Bab II – Kondisi Demografi Penduduk menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Bali dihuni sekitar **4,46 juta jiwa**, dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar **0,69% per tahun**. Persebarannya belum merata dan cenderung terkonsentrasi pada wilayah perkotaan serta pusat pertumbuhan ekonomi. Buleleng memiliki jumlah penduduk terbesar, sedangkan kepadatan tertinggi terdapat di Kota Denpasar yang mencapai 6.066 jiwa/km², jauh di atas rata-rata Bali sebesar 799 jiwa/km². Konsentrasi penduduk di Denpasar, Badung, Gianyar, dan kawasan metropolitan Sarbagita menimbulkan konsekuensi terhadap kebutuhan perumahan, infrastruktur, pelayanan dasar, lapangan kerja, transportasi, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Di sisi

lain, wilayah dengan kepadatan lebih rendah tetap membutuhkan peningkatan aksesibilitas dan penguatan pusat pertumbuhan agar pembangunan lebih merata.

Bab III – Potensi Sumber Daya menunjukkan besarnya kekayaan sumber daya alam Bali sekaligus pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan. Pada sektor kehutanan, luas kawasan hutan dan konservasi perairan mencapai **132.171,47 hektare**, dengan sekitar 73,15% berupa hutan lindung dan hampir 20% kawasan konservasi, sehingga fungsi ekologis, tata air, perlindungan keanekaragaman hayati, dan jasa lingkungan menjadi sangat menonjol. Pada sektor pertanian, produksi padi, hortikultura, biofarmaka, dan perkebunan memperlihatkan dinamika yang berbeda antar komoditas. Produksi padi cenderung menurun setelah mencapai puncak pada 2022, sementara hortikultura menunjukkan pergeseran struktur produksi dengan semakin dominannya beberapa komoditas seperti bawang merah dan cabai rawit.

Potensi peternakan juga cukup besar, terutama daging babi dan sapi, sedangkan wilayah pesisir memiliki kawasan konservasi perairan, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun yang penting bagi fungsi ekologis, ketahanan pangan, pariwisata, serta ekonomi masyarakat pesisir. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya Bali ke depan perlu menyeimbangkan aspek produksi, nilai tambah ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan antargenerasi.

Bab IV – Ekonomi dan Keuangan Daerah memperlihatkan bahwa perekonomian Bali tahun 2025 tetap berada pada jalur ekspansi dengan pertumbuhan sebesar **5,82%**. Struktur ekonomi masih didominasi oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum dengan kontribusi **22,27%** terhadap PDRB ADHB, diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 13,12%, transportasi dan pergudangan 10,20%, konstruksi 9,02%, serta perdagangan 8,78%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pariwisata dan berbagai sektor turunannya masih menjadi penggerak utama perekonomian, sementara pertanian tetap memiliki posisi strategis sebagai fondasi ekonomi perdesaan dan ketahanan pangan. Pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum yang tinggi juga menegaskan kuatnya pemulihan aktivitas pariwisata.

Di sisi lain, pertumbuhan beberapa sektor produksi seperti pertanian dan industri pengolahan lebih rendah, sehingga diversifikasi ekonomi dan penguatan nilai tambah lokal tetap menjadi kebutuhan. Stabilitas harga relatif terjaga dengan inflasi akhir tahun 2025 sebesar 2,91%, meskipun masih terdapat variasi tekanan harga antarwilayah dan periode.

Perkembangan investasi, ekspor, serta kapasitas fiskal daerah menjadi faktor penting untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan dan memperluas basis ekonomi Bali.

Bab V – Kesejahteraan Masyarakat menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi Bali telah diikuti oleh peningkatan kualitas pembangunan manusia, namun belum sepenuhnya menghilangkan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat. PDRB per kapita Bali tahun 2025 mencapai sekitar **Rp72,66 juta**, sedangkan pengeluaran per kapita disesuaikan sebesar **Rp15,383 juta per orang**

per tahun. Terdapat kesenjangan cukup besar antara wilayah dengan aktivitas ekonomi sangat tinggi seperti Badung dan Denpasar dengan kabupaten lainnya.

Indeks Pembangunan Manusia Bali mencapai **79,37**, dengan capaian tertinggi di Denpasar sebesar 85,63 dan terendah di Karangasem sebesar 71,89. Gini Rasio Bali sebesar **0,353** menunjukkan bahwa pemerataan manfaat pembangunan tetap memerlukan perhatian. Kondisi pendidikan dan kesehatan secara umum telah menunjukkan capaian yang baik, tetapi masih terdapat kesenjangan partisipasi pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, variasi capaian kesehatan antarwilayah, serta tantangan kualitas dan pemerataan layanan. Demikian pula pada aspek ketenagakerjaan, tingginya partisipasi angkatan kerja dan rendahnya tingkat pengangguran perlu terus diikuti peningkatan produktivitas, kualitas pekerjaan, keterampilan, dan perlindungan pekerja. Dengan demikian, pembangunan kesejahteraan perlu semakin diarahkan pada pemerataan kesempatan, penguatan perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Bab VI – Pelayanan Umum Daerah memperlihatkan perkembangan positif pada perlindungan sosial, tata kelola pemerintahan, infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional telah mencapai **99,5% atau 4,38 juta peserta aktif**, menunjukkan tingkat perlindungan pembiayaan kesehatan yang sangat luas. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga telah menjangkau lebih dari 1,52 juta pekerja, meskipun perluasan perlindungan bagi pekerja informal masih perlu diperkuat. Dari aspek tata kelola, reformasi birokrasi, inovasi daerah, pelayanan publik, dan digitalisasi pemerintahan menunjukkan kecenderungan positif. Indeks Inovasi Daerah meningkat dari 69,92 menjadi 77,04, sedangkan Indeks SPBE mencapai **4,65 dengan predikat Memuaskan** pada 2025.

Pada sisi infrastruktur, Bali memiliki jaringan jalan sekitar **8.706,78 km**. Transportasi udara dan laut tetap memegang peranan vital dalam konektivitas daerah, baik untuk mobilitas penduduk, distribusi barang, maupun aktivitas pariwisata. Pada bidang telekomunikasi, hampir seluruh desa/kelurahan telah memperoleh sinyal internet sekurang-kurangnya 4G/LTE dan 85,96% penduduk berumur lima tahun ke atas menggunakan telepon seluler untuk komunikasi. Namun demikian, masih terdapat perbedaan pemanfaatan digital antarwilayah dan antara laki-laki dengan perempuan. Oleh karena itu, kualitas pelayanan umum ke depan perlu lebih ditekankan pada pemerataan, integrasi, keandalan, kemudahan akses, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Bab VII – Daya Saing Daerah menunjukkan bahwa Bali memiliki posisi daya saing yang relatif kuat. Nilai **Indeks Daya Saing Daerah sebesar 4,03** berada di atas rata-rata nasional 3,50, dan seluruh 12 pilar pembentuknya juga berada di atas rata-rata nasional. Keunggulan terutama terdapat pada adopsi TIK, kualitas institusi, ukuran pasar, kapabilitas inovasi, keterampilan, dan stabilitas ekonomi makro.

Namun, aspek infrastruktur, dinamika bisnis, pasar produk, dan sistem keuangan masih memiliki ruang penguatan. Pembangunan ekonomi inklusif semakin ditopang

oleh perluasan layanan keuangan digital, sementara pengembangan ekonomi hijau diarahkan pada penurunan emisi, peningkatan energi terbarukan, transportasi bersih, dan penerapan prinsip keberlanjutan pada pertanian, industri, serta pariwisata.

Pada aspek ketahanan, **Indeks Ketahanan Pangan** yang sebelumnya meningkat hingga tahun 2024 mengalami penurunan cukup nyata pada 2025, sehingga memerlukan perhatian terhadap ketersediaan, akses, distribusi, keterjangkauan, dan kualitas konsumsi pangan. Sistem kelistrikan Bali telah melayani sekitar 1,90 juta pelanggan, namun kapasitas dan konsumsi energi masih terkonsentrasi di Bali Selatan sehingga peningkatan keandalan, diversifikasi sumber energi, dan pengembangan energi terbarukan menjadi penting. Daya saing ekonomi juga diperkuat oleh pariwisata, industri pengolahan, koperasi, UMKM, serta ekspor. UMKM Bali mencapai **448.734 unit pada 2025** dan hampir seluruhnya merupakan usaha mikro, sehingga agenda utama ke depan bukan semata menambah jumlah usaha tetapi meningkatkan produktivitas, digitalisasi, akses pembiayaan, pemasaran, dan kemampuan UMKM untuk naik kelas.

8.2. KESIMPULAN DAN ARAH PENGUATAN PEMBANGUNAN

Secara keseluruhan, Profil Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 menunjukkan bahwa pembangunan Bali telah menghasilkan sejumlah capaian positif. Pertumbuhan ekonomi tetap kuat, kualitas pembangunan manusia berada pada tingkat yang relatif tinggi, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan semakin baik, cakupan perlindungan sosial semakin luas, konektivitas digital hampir menjangkau seluruh wilayah, serta daya saing daerah berada di atas rata-rata nasional. Bali juga memiliki modal sumber daya alam, budaya, pertanian, kelautan, pariwisata, ekonomi kreatif, serta kapasitas inovasi yang sangat besar untuk mendukung pembangunan jangka panjang.

Di sisi lain, profil pembangunan memperlihatkan beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian. Aktivitas ekonomi dan penduduk masih terkonsentrasi pada kawasan Bali Selatan; struktur ekonomi masih memiliki ketergantungan kuat terhadap pariwisata; disparitas PDRB per kapita, kualitas sumber daya manusia, dan akses terhadap kesempatan ekonomi antarwilayah masih terlihat; jaringan transportasi menghadapi tekanan akibat dominasi kendaraan pribadi; sektor pertanian dan ketahanan pangan menghadapi dinamika produksi dan tekanan terhadap lahan; ketahanan energi memerlukan diversifikasi sumber pasokan; serta struktur UMKM yang hampir seluruhnya berskala mikro menunjukkan pentingnya peningkatan produktivitas dan kapasitas usaha.

Berdasarkan keseluruhan kondisi tersebut, arah pembangunan Bali ke depan perlu semakin menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, pelestarian lingkungan, dan penguatan daya saing. Pengembangan ekonomi perlu diperluas melalui diversifikasi sektor, peningkatan nilai tambah pertanian dan sumber daya lokal, industri pengolahan, ekonomi kreatif, koperasi dan

UMKM, serta penguatan keterhubungan antara sektor pariwisata dengan perekonomian lokal. Pada saat yang sama, pengelolaan ruang, sumber daya air, kawasan hutan, pesisir, energi, pangan, dan lingkungan harus dilakukan berdasarkan prinsip daya dukung dan keberlanjutan.

Penguatan pembangunan manusia perlu diarahkan pada pemerataan akses pendidikan dan kesehatan berkualitas, peningkatan kompetensi tenaga kerja, perlindungan sosial yang inklusif, pengurangan ketimpangan, pemberdayaan perempuan, serta perluasan kesempatan ekonomi bagi seluruh kelompok masyarakat. Peningkatan kualitas infrastruktur perlu dipadukan dengan pengembangan transportasi publik, konektivitas antarmoda, pemerataan layanan digital, serta penyediaan pelayanan dasar yang adaptif terhadap dinamika penduduk dan karakteristik wilayah.

Dari sisi tata kelola, capaian reformasi birokrasi, pelayanan publik, inovasi daerah, dan SPBE menjadi modal penting untuk mewujudkan pemerintahan yang semakin efektif, transparan, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil. Penguatan pengambilan keputusan berbasis data juga perlu terus dilakukan agar kebijakan pembangunan mampu merespons secara lebih tepat perubahan sosial, ekonomi, lingkungan, dan kewilayahan.

Pada akhirnya, Profil Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 diharapkan tidak hanya menjadi gambaran statistik kondisi daerah, tetapi menjadi basis informasi untuk perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan perumusan kebijakan pembangunan selanjutnya. Integrasi antara kekuatan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, kelestarian alam dan budaya, pemerataan wilayah, ketahanan daerah, serta tata kelola yang baik menjadi kunci agar pembangunan Bali dapat berlangsung secara berkelanjutan, berdaya saing, tangguh terhadap berbagai perubahan, dan memberikan manfaat yang semakin merata bagi seluruh masyarakat Bali.